



PEMERINTAH DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

KOTA KOTAMOBAGU



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU 2018-2023

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	10
1.4. Maksud dan Tujuan	22
1.5. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	25
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	26
2.1.1. Kondisi Geografis.....	26
2.1.2. Kondisi Topografi	28
2.1.3. Kondisi Geologi	28
2.1.4. Kondisi Hidrologi	32
2.1.5. Kondisi Klimatologi.....	34
2.1.6. Penggunaan Lahan.....	35
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah.....	38
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana.....	39
2.1.9. Kondisi Demografi.....	41
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	43
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	43
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	47
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	51

2.3. Aspek Pelayanan Umum	52
2.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib	
Pelayanan Dasar	52
2.3.1.1. Pendidikan	52
2.3.1.2. Kesehatan.....	54
2.3.1.3. Pekerjaan Umum.....	55
2.3.1.4. Penataan Ruang	59
2.3.1.5. Perumahan Rakyat.....	60
2.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib	
Non pelayanan Dasar	64
2.3.2.1. Ketenaga Kerjaan	64
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan	
dan perlindungan Anak	68
2.3.2.3. Ketahanan Pangan	70
2.3.2.4. Lingkungan Hidup.....	71
2.3.2.5. Administrasi Kependudukan dan	
Pencatatan Sipil	80
2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	81
2.3.2.7. Keluarga Berencana dan	
Keluarga Sejahtera.....	83
2.3.2.8. Perhubungan.....	83
2.3.2.9. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	85
2.3.2.10. Penanaman Modal	93
2.3.2.11. Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
Persandian	94
2.3.2.12. Perpustakaan	96
2.3.2.13. Kearsipan	97
2.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan	98
2.3.3.1. Pertanian dan Perikanan.....	98
2.3.3.2. Pariwisata	99
2.3.3.3. Perdagangan.....	107

2.3.4.	Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan.....	109
2.3.4.1.	Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan	109
2.3.4.2.	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	109
2.3.4.2.1.	Tata Kelola Pemerintahan.....	109
2.3.4.2.2.	Pengawasan	110
2.3.4.2.3.	Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan	110
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	112
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	112
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	114
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	117
2.4.3.1.	Angka Kriminalisasi	117
2.4.3.2.	Kemudahan Perijinan.....	119
2.4.3.3.	Pengenaan Pajak Daerah.....	122
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	123
2.4.4.1.	Kualitas Tenaga Kerja	124

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 143

3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	145
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	145
3.1.2.	Neraca daerah	150
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	156
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	156
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	158
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	162
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	162
3.3.1.1.	Proyeksi Pendapatan.....	162
3.3.1.2.	Proyeksi Belanja Daerah.....	166
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	169

BAB IV	PERMASALAHAN DAN	
	ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	176
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	177
4.1.1.	Permasalahan terkait program pembangunan daerah	177
4.1.2.	Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	192
4.2.	Isu Strategis.....	204
4.2.1.	Isu Strategis Nasional dan Internasional.....	204
4.2.2.	Isu Strategis Kota Kotamobagu	222
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	237
5.1.	Visi	240
5.2.	Misi	241
5.3.	Tujuan Dan Sasaran.....	245
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
	DAERAH	254
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	
	DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	291
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAHAN DAERAH	375
BAB IX	PENUTUP	396

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Telaahan pola ruang	14
Tabel 2.1	Jumlah murid, guru, rasio-murid PAUD.....	53
Tabel 2.2	Jumlah sekolah murid, guru, rasio murid-guru SD/SDLB	53
Tabel 2.3	Jumlah sekolah, murid, guru, rasio murid-guru MI.....	53
Tabel 2.4	Jumlah sekolah, murid, guru, rasio murid-guru SMP.....	54
Tabel 2.5	Jumlah sekolah, murid, guru, rasio murid-guru MTs	54
Tabel 2.6	Panjang jalan menurut kondisi jalan (KM).....	57
Tabel 2.7	Panjang jalan menurut jenis permukaan (KM)	57
Tabel 2.8	Panjang jalan menurut Pemerintahan yang berwenang mengelolanya (KM).....	57
Tabel 2.9	Jumlah pelanggan dan air yang disalurkan	57
Tabel 2.10	Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan.....	58
Tabel 2.11	Data BSPS Kota Kotamobagu.....	61
Tabel 2.12	Backlog kepemilikan rumah	61
Tabel 2.13	Kawasan permukiman kumuh.....	62
Tabel 2.14	Kondisi Tenaga Kerja.....	64
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun yang bekerja.....	68
Tabel 2.16	Data Rincian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak.....	68
Tabel 2.17	Pangan Harapan (PPh)	70
Tabel 2.18	Indek Kualitas Udara	75
Tabel 2.19	Nama Sungai yang melintas di kota kotamobagu.....	77
Tabel 2.20	Indeks Kualitas Air	79
Tabel 2.21	Klasifikasi Desa.....	83

Tabel 2.22	Data Jalan	85
Tabel 2.23	Jumlah kendaraan bermotor.....	86
Tabel 2.24	Jumlah Koperasi.....	86
Tabel 2.25	Jumlah UKM Non BPR/LKM.....	88
Tabel 2.26	Jumlah BPR/LKM.....	89
Tabel 2.27	Rasio Luas Wilayah Industri.....	94
Tabel 2.28	Jumlah Investor.....	94
Tabel 2.29	Jumlah Investasi.....	95
Tabel 2.30	Persentase cakupan Layanan Informasi	96
Tabel 2.31	Ketersediaan Dokumen data dan Informasi	97
Tabel 2.32	Jumlah Perpustakaan	98
Tabel 2.33	Cakupan Kelestarian Arsip.....	98
Tabel 2.34	Produksi Komoditi.....	99
Tabel 2.35	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	101
Tabel 2.36	Kawasan Strategis Pariwisata Kotamobagu.....	102
Tabel 2.37	Objek dan daya Tarik Wisata	104
Tabel 2.38	Jumlah Restoran	107
Tabel 2.39	Jumlah Penginapan	108
Tabel 2.40	Informasi Pasar	108
Tabel 2.41	Penjabaran Program	110
Tabel 2.42	Penilaian SAKIP.....	111
Tabel 2.43	Jumlah tindak lanjut temuan	111
Tabel 2.44	Data Kapasitas dan Kompetensi Aparatur.....	112
Tabel 2.45	Rasio ketaatan RTRW.....	115
Tabel 2.46	Rasio Luas Wilayah.....	116
Tabel 2.47	Rasio Luas Industri	117
Tabel 2.48	Rasio Luas Wilayah Perkotaan.....	118
Tabel 2.49	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	118
Tabel 2.50	Jumlah demonstrasi	119
Tabel 2.51	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan	119
Tabel 2.52	Jenis ijin, waktu pengurusan, jumlah persyaratan Dan biaya	120

Tabel 2.53	Jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi.....	124
Tabel 2.54	Jumlah kelompok umur menurut jenis kelamin.....	125
Tabel 2.55	Penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja.....	126
Tabel 2.56	Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan.....	126
Tabel 2.57	Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	127
Tabel 3.1	Rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah	147
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan neraca	151
Tabel 3.3	Analisis rasio keuangan	154
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi belanja.....	156
Tabel 3.5	Analisis proporsi belanja pemenuhan aparatur.....	157
Tabel 3.6	Defisit rill anggaran	158
Tabel 3.7	Komposisi penutup defisit rill anggaran	159
Tabel 3.8	Realisasi sisa lebih perhitungan	160
Tabel 3.9	Sisa lebih (rill) pembiayaan anggaran tahun berkenaan.....	161
Tabel 3.10	Proyeksi sisa lebih (rill) pembiayaan anggaran tahun berkenaan	162
Tabel 3.11.	Proyeksi anggaran pendapatan.....	164
Table 3.12	Proyeksi anggaran belanja	167
Tabel 3.13	Kapasitas rill kemampuan keuangan daerah	169
Tabel 3.14	Rencana Penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah kota kotamobagu.....	171
Tabel 3.15	kerangka pendanaan alokasi kapasitas keuangan.....	173
Tabel 5.1.	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Kotamobagu.....	248
Tabel 6.1.	Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Kota Kotamobagu.....	256
Tabel 6.2.	Program Pembangunan Kota Kotamobagu	267
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kota Kotamobagu.....	317

Tabel 7.2	Indikasi program pembangunan prioritas	319
Tabel 8.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.....	377
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu.....	383

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya	22
Gambar 2.1	Peta administrasi pemerintah daerah	28
Gambar 2.2	Peta satuan litotektonik Sulawesi	30
Gambar 2.3	Peta Sembilan sungai	33
Gambar 2.4	Peta penggunaan lahan	35
Gambar 2.5	Peta patahan	40
Gambar 2.6	Peta rawan longsor	40
Gambar 2.7	Peta lereng gunung.....	41
Gambar 2.8	Peta piramida penduduk	41
Gambar 2.9	Jumlah kelahiran dan kematian	42
Gambar 2.10	Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu Berdasarkan Kecamatan Periode 2015-2017.....	42
Gambar 2.11	Laju pertumbuhan ekonomi	43
Gambar 2.12	Pertumbuhan PDRB.....	44
Gambar 2.13	Grafik laju inflasi.....	45
Gambar 2.14	PDRB Per Kapita	46
Gambar 2.15	Gambaran kemiskinan	47
Gambar 2.16	Perkembangan IPM	47
Gambar 2.17	Perekembangan AHH.....	48
Gambar 2.18	Perekembangan AMH dan rata-rata lama sekolah	48
Gambar 2.19	Perkembangan APK.....	49
Gambar 2.20	Perkembangan APM	49
Gambar 2.21	Perkembangan APS.....	50
Gambar 2.22	Perkembangan Angka kematian bayi	50
Gambar 2.23	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	51

Gambar 2.24	Jumah angka kelulusan	52
Gambar 2.25	Persentase Kondisi jalan	56
Gambar 2.26	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.....	69
Gambar 2.27	Persentase Jumlah IKM dan UKM	90
Gambar 2.28	Jumlah IKM	91
Gambar 2.29	Jumlah UKM jasa penjualan.....	91
Gambar 2.30	Jumlah UKM jasa penyewaan	92
Gambar 2.31	Jumlah UKM jasa lainnya.....	93
Gambar 2.32	NTP.....	113
Gambar 2.33	Persentase pengeluaran perkapita per bulan menurut kelompok makanan	114
Gambar 2.34	Persentase rata-rata pengeluaran perkapita per bulan menurut kelompok non makanan	114



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2010 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8);
 32. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);
 33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamboagu Tahun 2005-2023.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018-2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Kotamobagu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Kotamobagu yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
27. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2018-2023

Pasal 2

- (1) RPJMD menggambarkan:
 - a. visi dan misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2018-2023

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2018-2023

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan

nasional.; dan/atau

- d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Walikota tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pada saat RPJMD 2023-2027 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 Maret 2019


WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 25 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH



A D N A N
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730223 199302 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERDA KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA (3/2019)

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada Tahun 2018, Kota Kotamobagu melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023. Berdasarkan hasil Pilkada, pasangan

Ir. Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan, SH ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2018-2023, dan dilantik pada 25 September 2018. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk PERDA paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Di dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2018-2023 harus memperhatikan dan bersinergi dengan dokumen RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Kotamobagu, penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 harus berpedoman pada RPJPD Kota Kotamobagu tahun 2005-2025, khususnya pada tahap pembangunan lima tahunan ketiga dan tahap pembangunan lima tahunan keempat.

Dalam RPJPD Kota Kotamobagu, arah kebijakan pembangunan tahap ketiga diarahkan pada:

1. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan;
2. Memantapkan layanan kesehatan;
3. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi;
4. Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa;
5. Memantapkan karakter dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, melalui muatan lokal dimasukkan ke semua jenjang pendidikan;
6. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan pada tahap keempat diarahkan pada:

1. Memantapkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa yang aman dan asri;
2. Memantapkan Kota Kotamobagu yang eksis dalam aktivitas pelayanan perdagangan dan jasa regional dan nasional serta transformasi dari pola pengembangan perdagangan berbasis keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif;
3. Memantapkan Kota Kotamobagu sebagai kota pendidikan berkualitas yang didukung masyarakat berwawasan pendidikan.
4. Memantapkan Kota Kotamobagu sebagai pusat layanan kesehatan;
5. Memantapkan penerapan good governance;
6. Memantapkan penyelenggaraan pelayanan prima pemerintah dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, informasi dan e-Government;
7. Memantapkan nilai-nilai sosio-religius dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, demokratis dan berkelanjutan;
8. Memantapkan karakter dan budaya local sebagai identitas Kota Kotamobagu yang beriman dan berakhlak mulia, berbudi luhur, toleransi tinggi, bergotong royong yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme;
9. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota Kotamobagu.

Selain itu, dalam menyusun RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, dilakukan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan para pakar dan tenaga

- ahli yang sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini;
 3. Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh walikota terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama dengan DPRD;
 4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan oleh daerah dan program prioritas walikota dan wakil walikota serta inventarisasi masukan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) yang harus diakomodir dalam RPJMD.

Dengan dilakukannya 5 (lima) pendekatan tersebut, maka secara substansi RPJMD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang posisi Kota Kotamobagu lima tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat hidup Sehat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
 32. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2007 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2010 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota kotamobagu Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. RPJMN

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah dengan arah, kebijakan, umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kota Kotamobagu.

2. RPJMD Provinsi

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah dengan arah, kebijakan, umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kota Kotamobagu wajib dilakukan penyelarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

3. RPJPD

RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2005–2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan jangka panjang **“MEWUJUDKAN KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA YANG AMAN, ASRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Penyusunan RPJMD selain memuat visi misi dan program walikota dan wakil walikota Kota Kotamobagu periode 2018–2023, juga berpedoman pada visi dan misi Kota Kotamobagu beserta arah pembangunannya.

Pada tahap ketiga RPJMD Kota Kotamobagu fokus pembangunan masing-masing misi ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Kotamobagu disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian terutama di sektor jasa.

Kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia antara lain meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas perekonomian. Kondisi ini didukung pula oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

4. RTRW Tahun 2014-2034

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Kotamobagu

Tabel 1.1
Hasil Telaahan Pola Ruang Kota Kotamobagu

No	Usulan program	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Pelaksana kegiatan	Periode							Ket
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 -	2025 -	
I. PERWUJUDAN POLA RUANG													
A. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung													
A.1 Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung:													
1.	Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air.	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Kotamobagu Barat di Kelurahan Mongkonai Barat; - Kecamatan Kotamobagu Timur, tersebar di Kelurahan Motoboi Besar, Kelurahan Kobo Besar dan Desa Moyag; - Kecamatan Kotamobagu Utara: tersebar di Desa Sia, Desa Pontodon dan Desa Upai; dan - Kecamatan Kotamobagu Selatan: tersebar di Desa Kobo Kecil, Desa Poyowa Besar II, Desa Bungko dan Desa Poyowa Kecil. 		APBD Kota	KLH, Dinas Pertanian.								
2.	Pemantapan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - sempadan sungai besar, yang meliputi Sungai Moayat dan Sungai Ongkag, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan yang berada di luar wilayah permukiman, sebesar 100 meter dari tepi sungai; - Dalam kawasan permukiman 		APBD Kota	KLH dan Dinas PU.								

No	Usulan program	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Pelaksana kegiatan	Periode							Ket	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 – 2024	2025 – 2029		2030 – 2034
	– sempadan sungai kecil, yang meliputi Sungai Poyowa, Sungai Katulidan, Sungai Dayanan, Sungai Kotobangon, Sungai Bonodon, Sungai Yuyak, Sungai Kope dan Sungai Tambayo	sebesar 5 meter dan 50 meter di luar kawasan permukiman, dari tepi sungai.												
3.	Pemantapan kawasan sekitar mata air	Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara	0,05 hektar	APBD Kota	KLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan.									
4.	Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya	Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara		APBD Kota	KLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan.									
5.	Pemantapan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas: – RTH Publik (20% dari luas wilayah kota) – RTH Privat (10% dari luas wilayah kota)	Wilayah Kota Kotamobagu		APBD Kota	Bappeda, KLH dan Dinas PU.									
6.	Pengembangan RTH Publik, meliputi: – RTH Taman Lingkungan/RT/RW; – RTH Taman Kota; – RTH Hutan Kota; – RTH Kebun Raya Kota; – RTH Taman Kecamatan; – RTH Taman Resting Area; – RTH Kawasan Agrowisata;	– Tersebar disetiap lingkungan RT/RW dengan luas ± 35,40 ha. – Kelurahan Kotabangon, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Biga, Kelurahan motoboi Kecil dan Desa Moyag dengan luas ± 20 ha. – Kelurahan Mongkonai, Kelurahan Mongkonai Barat, Molinow, Moyag, Moyag Todulan, Pontodon, Sia, Kobo Besar,		APBD Kota	Bappeda, KLH dan Dinas PU.									

No	Usulan program	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Pelaksana kegiatan	Periode							Ket	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 – 2024	2025 – 2029		2030 – 2034
–	RTH Median Jalan;	Poyowa Kecil, Motoboi Besar dengan luas ± 677ha.												
–	RTH Jalur Hijau;	– Desa Bungko, Sia dan Moyag dengan luas ± 300 ha												
–	RTH Jalur Hijau Jalan Pejalan Kaki;	– Disetiap Kecamatan dengan luas ± 11,1 ha												
–	RTH Sempadan Sungai;	– Kelurahan Mongkonai, Moyag Todulan dan Bilalang II dengan luas ± 10,1ha.												
–	RTH Sempadan Mata Air;	– Desa Poyowa Besar I, Poyowa Besar II, Pontodon, Sia, dan Moyag dengan luas ± 555 ha.												
–	RTH Kawasan Resapan Air;	– Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan dan Kotamobagu Timur dengan luas ± 6,6 ha.												
–	RTH Pemakaman Umum; dan	– Menyebar di seluruh wilayah kota dengan luas ± 288,4 ha.												
–	RTH Lapangan Olah Raga/ Lapangan Terbuka.	– Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, Desa Poyowa Besar I, Desa Poyowa Besar II, Kelurahan Biga, Desa Moyag Todulan												

No	Usulan program	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Pelaksana kegiatan	Periode							Ket	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 – 2024	2025 – 2029		2030 – 2034
		dengan luas ±13,5 ha. – Tersebar di sekitar sungai dengan luas ± 107,2 ha. – Tersebar di sekitar mata air dengan luas ± 100,6 ha. – Desa Sia, Desa Pontodon, Desa Moyag, Kelurahan Moyag Todulan, Desa Bilalang I, Bilalang II, Kelurahan Molinow dengan luas ± 514 ha – Menyebar di seluruh kecamatan dengan luas ± 9 ha; dan – Tersebar di semua Kecamatan dengan luas ± 49,89 ha.												
7.	Pemantapan RTH Privat: – RTH pekarangan rumah seluas ± 1.113 ha; – RTH kawasan peruntukan Perdagangan dan Jasa seluas ± 31 ha; – RTH kawasan Efektif Pariwisata seluas ± 344,3 ha; – RTH kawasan peruntukan Industri dan Pergudangan seluas ± 406,2 ha; – RTH kawasan peruntukan Pertahanan dan Keamanan seluas ± 18,1 ha; – RTH kawasan peruntukan Pendidikan seluas ± 41 ha; – RTH kawasan peruntukan Perkantoran seluas ± 16,2 ha;	Wilayah Kota Kotamobagu		APBD Kota	Bappeda, KLH, Dinas PU dan Dinas Tata Kota.									

No	Usulan program	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Pelaksana kegiatan	Periode							Ket	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 – 2024	2025 – 2029		2030 – 2034
	<ul style="list-style-type: none"> – RTH kawasan peruntukan Kesehatan seluas ± 9,3 ha; – RTH kawasan peruntukan Peribadatan seluas ± 19,6 ha; – RTH kawasan peruntukan Terminal seluas ± 13 ha; dan – RTH kawasan peruntukan TPA seluas ± 10 ha. 													
8.	<p>Rencana pengelolaan pada kawasan rawan gempa bumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perencanaan pembangunan gedung yang efektif untuk mengurangi resiko gempa bumi – Memasyarakatkan perencanaan bangunan hunian dengan konstruksi tahan gempa – Pengorganisasian dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya mengacu pada fungsi ruang yang fleksibel – Mempelajari perilaku bangunan dalam menerima beban gempa – Meningkatkan pemahaman masyarakat lewat penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa 	Wilayah Kota Kotamobagu		APBD Kota	Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota.									
9.	<p>Rencana pengelolaan pada kawasan rawan gerakan tanah dan patahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perencanaan pembangunan gedung yang efektif untuk mengurangi resiko gerakan tanah dan patahan – Memasyarakatkan perencanaan bangunan hunian dengan konstruksi tahan gerakan tanah – Menghindari pembangunan pada jalur patahan/sesar – Pengorganisasian dan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya mengacu pada fungsi ruang yang fleksibel – Meningkatkan pemahaman masyarakat lewat penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa 	Wilayah Kota Kotamobagu		APBD Kota	Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota.									
10.	<p>Rencana pengelolaan pada kawasan rawan longsor:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Peruntukan ruang sebagai kawasan lindung (tidak layak untuk pembangunan fisik) – Pengaturan pada lokasi tertentu beberapa kegiatan terutama non fisik masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan khusus dan/atau persyaratan yang pada dasarnya 	Wilayah Kota Kotamobagu		APBD Kota	Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota.									

No	Usulan program	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Pelaksana kegiatan	Periode							Ket	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 – 2024	2025 – 2029		2030 – 2034
	<p>diarahkan dengan pendekatan konsep penyesuaian lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pelarangan terhadap pembangunan rumah di daerah yang berpotensi terhadap rawan longsor – Pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan rawan longsor – Pembuatan tanggul penahan tanah (talud) pada daerah - daerah berlereng – Pelarangan terhadap kegiatan budidaya yang berdampak tinggi pada fungsi lindung serta kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan – Mempertahankan tutupan vegetasi yang tinggi dari perkebunan kelapa, cengkih dan jenis-jenis bambu serta tanaman keras lainnya yang ada di kawasan ini untuk melindungi tanah terhadap erosi dan longsor – Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa. – Menyusun Peraturan Walikota tentang ketentuan khusus pengelolaan kawasan rawan longsor. 													
11.	<p>Rencana pengelolaan pada kawasan rawan bencana gunung berapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan memperkuat kapasitas sistem pemantauan serta peringatan dini bahaya letusan gunung berapi - Mengurangi dampak bahaya erupsi vulkanis pada bidang-bidang rendah (lembah, badan sungai dan sejenisnya) dengan normalisasi serta dan memperkuat struktur dinding badan-badan sungai - Penatagunaan lahan dengan intensitas pemanfaatan lahan, jumlah bangunan dan penggunaannya dan fungsi ruang terbuka pada daerah potensi ancaman material vulkanis - Mengarahkan pengembangan permukiman kearah wilayah-wilayah aman dari jangkauan letusan dan dampak letusan gunung berapi - Menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana, dan membangun fasilitas evakuasi bencana 	Wilayah Kota Kotamobagu		APBD Kota	Bappeda, KLH, BPBD, Dinas PU dan Dinas Tata Kota.									

No	Usulan program	Lokasi	Volume	Sumber Dana	Pelaksana kegiatan	Periode							Ket	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 – 2024	2025 – 2029		2030 – 2034
	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan lokasi evakuasi bencana (pada lokasi dengan jarak tertentu) - Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui simulasi, latihan peran serta penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa. 													

5. RKPD

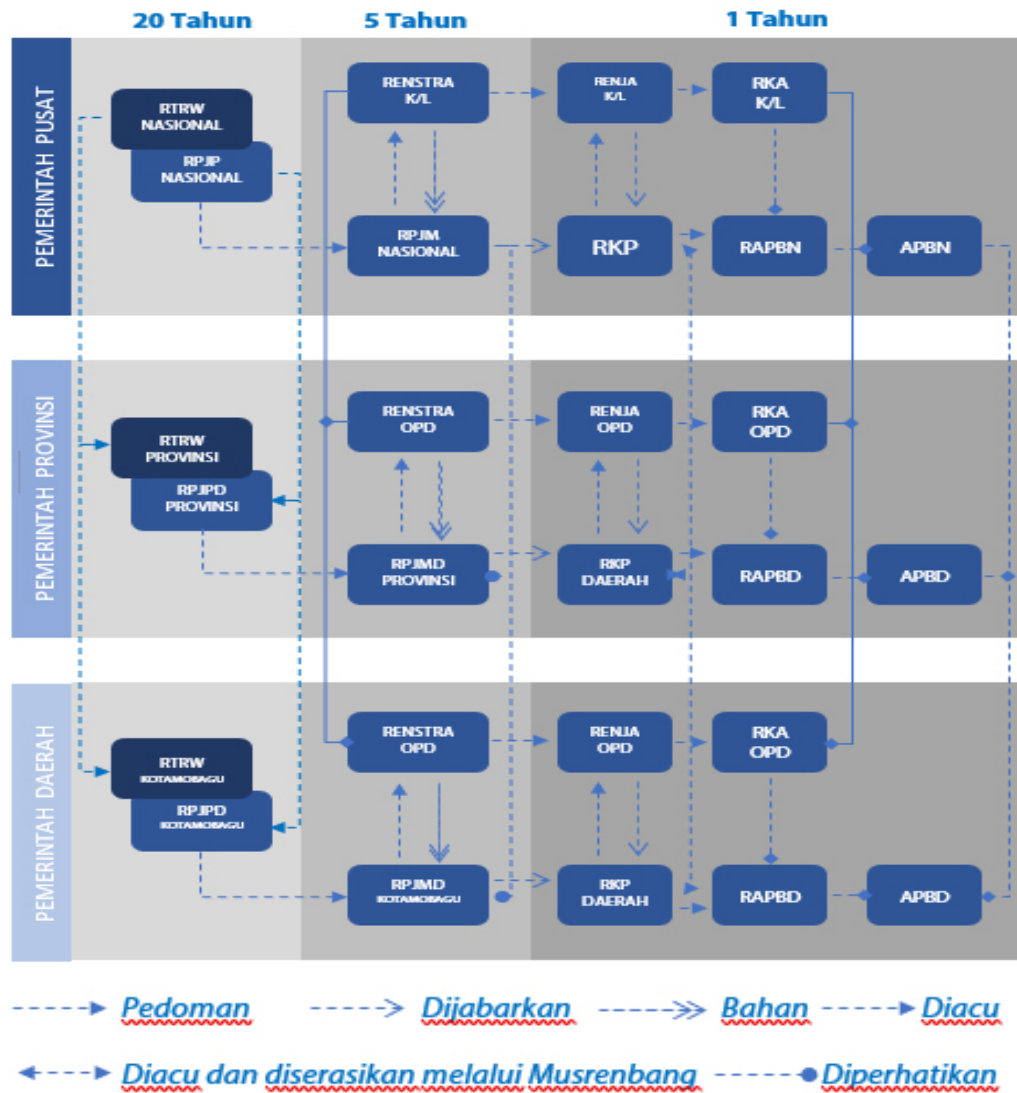
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

6. RENSTRA OPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA OPD RENSTRA merupakan RENJA 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, serta RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW Daerah Sekitar.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antara
Dokumen RPJMD
dengan Dokumen
Perencanaan lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023.

2. Menelaah kinerja keuangan tahun sebelumnya dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan Kota Kotamobagu beberapa tahun terakhir.
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kota Kotamobagu.
5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu 5 (lima) tahun kedepan.
6. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rancangan program perangkat daerah.
7. Menetapkan IKU dan IKK serta target untuk Tahun 2018-2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023 pada intinya adalah skema penjabaran visi misi Walikota terpilih yang dijabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan yang merupakan goals dari visi misi tersebut yang selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran pembangunan beserta target-target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas dan indikator outcome dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun format penulisan penjabaran visi misi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kodisi Daerah
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB IX	Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Pembangunan di Kotamobagu selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disampaikan gambaran umum sebagai berikut:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis

Kota Kotamobagu terletak pada jarak \pm 180 km di selatan ibu kota Provinsi (kota Manado) berada pada posisi geografis antara $0^{\circ} 41' 16,29''$ dan $0^{\circ} 46' 14,88''$ Lintang Utara, serta antara $124^{\circ} 15' 9,56''$ dan $124^{\circ} 21' 1,93''$ Bujur Timur dengan keseluruhan luas wilayah 68,06 km².

Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu secara Administrasi terbagi kedalam 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kecamatan Kotamobagu Selatan memiliki luas 25,38 km²; Kecamatan Kotamobagu Timur dengan luas 22,94 km²; Kecamatan Kotamobagu Barat dengan luas 10,61 km²; Kecamatan Kotamobagu Utara dengan luas 9,13 km².

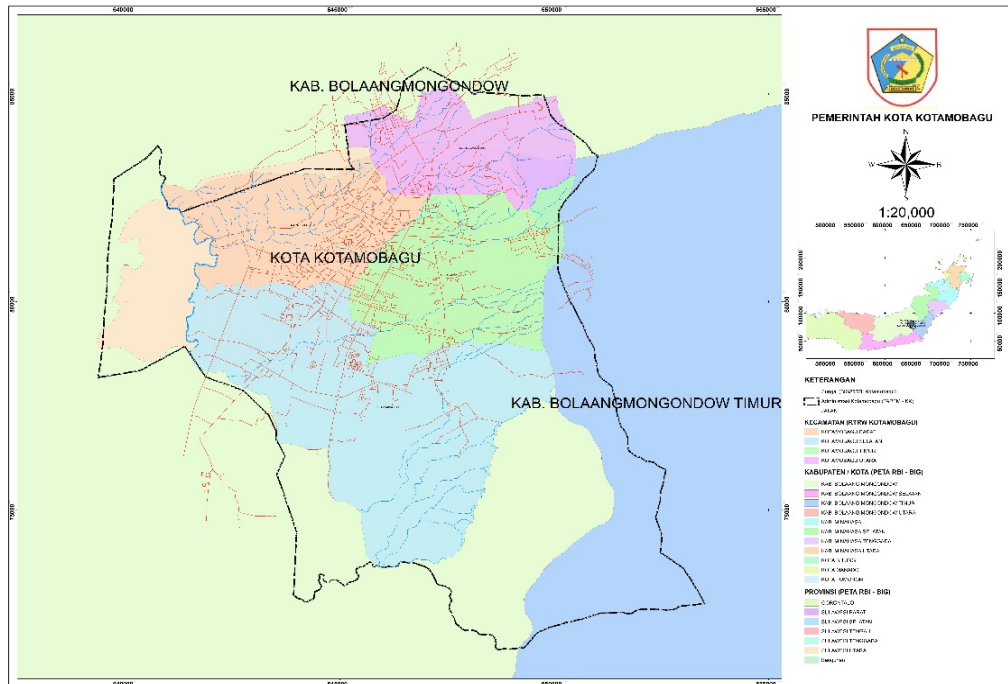
Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Awalnya Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian Kota Kotamobagu harus menyiapkan dirinya menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa. Implikasi dari semua ini adalah meningkatnya kebutuhan pengadaan sarana transportasi masyarakat Kota, timbulnya kemacetan, meningkatnya jumlah pedagang kaki lima, rusaknya tata kota, semakin menurunnya kualitas kebersihan kota sebagai akibat dari kelebihan penduduk dan segala aktivitasnya yang melebihi daya dukung lingkungan.

Kota Kotamobagu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui Inobonto) dan 207,26 Km (melalui Modinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara.

Gambar 2.1

Peta Administrasi
Pemerintah Daerah
Kota Kotamobagu

Sumber : RTRW Provinsi
SULUT



2.1.2. Kondisi Topografi

Topografi bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in bakid yang terletak di desa pontodon serta bukit disekitar Gogagoman yang menjadi lokasi kuburan bogani, merupakan dua bukit yang sangat di kenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kultur Bolaang Mongondow.

Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi, Kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan ketinggian ± 952 m DPL, dan yang terendah adalah Kecamatan Kotamobagu Barat dengan ketinggian 180 M DPL.

2.1.3. Kondisi Geologi

Secara geologi regional daerah kajian merupakan bagian dari kawasan Indonesia Timur, yang secara geologi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan rumit bila dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat. Kondisi Ini dikarenakan kawasan timur Indonesia merupakan tempat pertemuan dari lempeng-lempeng litosfera.

Sulawesi terletak pada pertemuan Lempeng besar Eurasia, Lempeng Pasifik, serta sejumlah lempeng lebih kecil (Lempeng Filipina) yang menyebabkan kondisi tektoniknya sangat kompleks. Kumpulan batuan dari busur kepulauan, batuan bancuh, ofiolit, dan bongkah dari mikrokontinen terbawa bersama proses penunjaman, tubrukan, serta proses tektonik lainnya (Van Leeuwen, 1994). Berdasarkan keadaan litotektonik, Sulawesi dibagi tiga mandala, yaitu: Mandala barat sebagai jalur magmatik yang merupakan bagian ujung timur Paparan Sunda; Mandala tengah berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia; dan Mandala timur berupa ofiolit yang merupakan segmen dari kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen.

Van Leeuwen (1994) menyebutkan bahwa mandala barat sebagai busur magmatik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian utara dan barat. Bagian utara memanjang dari Buol sampai sekitar Manado, dan bagian barat dari Buol sampai sekitar Makassar. Batuan bagian utara bersifat riodasitik sampai andesitik, terbentuk pada Miosen-Resen dengan batuan dasar basaltik yang terbentuk pada Eosen-Oligosen. Busur magmatik bagian barat mempunyai batuan penyusun lebih bersifat kontinen yang terdiri atas batuan gunung api hingga sedimen berumur Mesozoikum-Kuarter dan batuan malihan berumur Kapur. Batuan tersebut diterobos granitoid bersusunan terutama granodioritik sampai granitik yang berupa batolit, stok, dan retas.

Dilihat dari kondisi geologisnya maka formasi batuan yang terdapat di Kota Kotamobagu dan sekitarnya terdiri atas batuan vulkanik dengan komposisi terdiri dari breksi, tuff dan lava bersusunan andesit, dasit dan rhyolit. Tuff umumnya bersifat dasitan, agak kompak dan berlapis buruk pada beberapa tempat. Tebal satuan formasi ini diperkirakan lebih dari 1.000 m sedangkan umurnya berdasarkan kandungan fosil dalam sisipan batu gamping adalah Miosen bawah-Miosen akhir. Di bagian atas dari batuan vulkanik Bilungala terdapat Batuan Vulkanik Pinogu (TQpv) yang lebih muda umurnya, yang terdiri dari tuff, tuff lapili, breksi dan lava. Satuan ini umumnya termampatkan

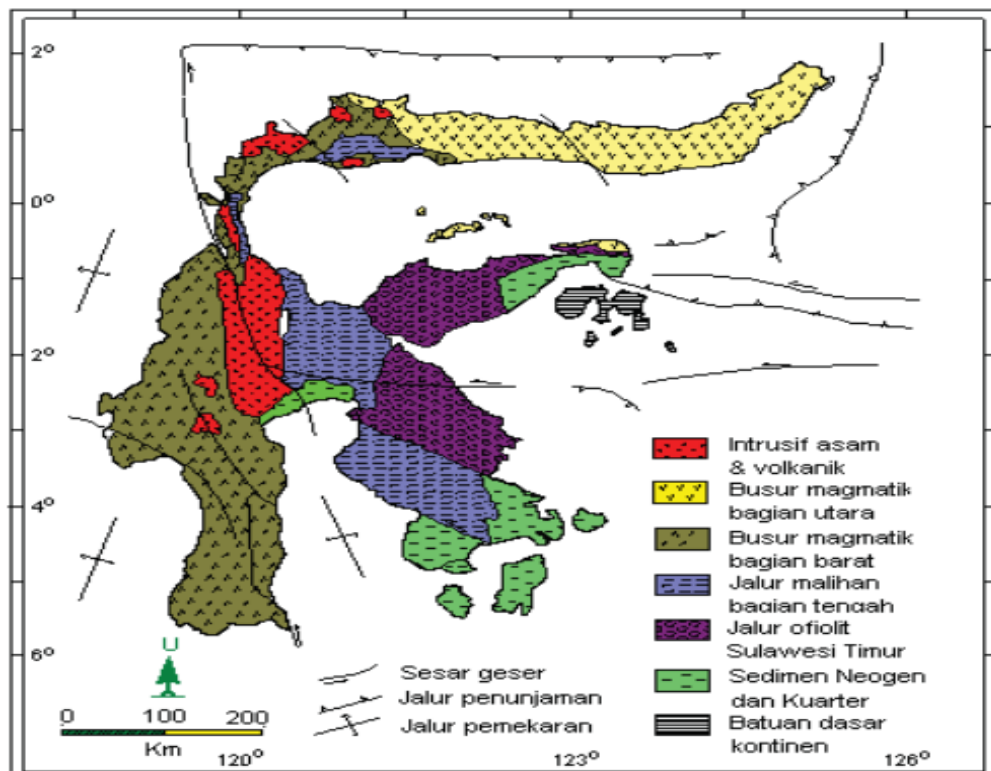
lemah sampai sedang. Umur formasi batuan ini diperkirakan Pliosen-Plistosen (John dan Bird, 1973).

Secara geologis pula, di Kota Kotamobagu terdapat tiga (3) busur utama yang telah dapat dipetakan, yaitu sebagai berikut: i) Early Eocene–MiddleEocene; dikarakteristikan oleh lapisan tebal yang didominasi oleh vulkanik basalt dengan komposisi tholeiitic dan berasosiasi dengan sedimen laut dalam (Trail et al.,1972; van Leeuwen and Muharjo, 2005); ii) Miocene; diwakili oleh calk alkaline vulkanic yang diterobos oleh batuan intrusi comagmaticgranitoid. Batuan intrusive tersebut menjeri dengan batuan sedimen laut dangkal. iii) Pliocene – recent, terdiri dari sub aerial vulkanik dengan komposisi andesit dan dasit and high level intrusive (Carlile at al.,1996; Kavalieris et al., 1992; Person and Cairn, 1999). Peristiwa geologi yang terjadi meliputi dua (2) peristiwa magmatic: i) miocene dikarakteristikan dengan intrusive diorite di dalam lava andesit dan batuan sedimen ii) Plio Pleistocene volcanic yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dasitik piroklastik dan berasosiasi dengan alterasi asam sulfat.

Gambar 2.2

Peta Satuan
Litotektonik Sulawesi

Sumber: (Van Leeuwen,
1994).



Berdasarkan formasinya, maka wilayah pusat Kota Kotamobagu sebagian besar merupakan formasi Qpl atau dikenal sebagai formasi Endapan Danau yang memiliki ciri: tersusun atas batulempung, batupasir dan kerikil. Endapan ini pada umumnya didominasi oleh batulempung yang berwarna abu-abu kecoklatan; setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Di beberapa tempat terdapat batupasir berbutir halus hingga kasar, serta kerikil. Pada batupasirnya setempat terdapat struktur silang siur berskala kecil. Umumnya satuan ini masih belum padu. Umurnya diperkirakan plistosen sampai holosen. Sebaran batuan ini terutama menempati daerah lembah Paguyaman dan di sekitar danau Limboto. Ketebalannya mencapai 94 m, dialasi oleh batuan diorit (Trail, 1974).

Berdasarkan kondisi geologi-nya, daerah pengamatan dipisahkan menjadi 3 (tiga) sistem akuifer, yaitu sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui ruang antar butir, sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan dan ruang antar butir, serta sistem akuifer bercelah atau sarang. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, potensi air tanah di Cekungan Kotamobagu dibagi menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, yang terdiri dari pasir, lumpur, dan kerikil. Kedudukan muka air tanah dangkal berkisar antara 0,20 - 1,30 m bmt setempat;
2. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, celahan, rekahan, dan saluran yang terdapat pada lapisan pasir, lumpur, kerikil, batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan batu gamping;
3. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan, rekahan, dan ruang antar butir yang terdapat pada batuan hasil gunungapi berupa batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan breksi. Terdapat pula pada batu pasir, greuwake, serpih, dan rijang. Banyak dijumpai pula mata air dengan

debit 0,1-4 l/dtk, kedudukan muka air tanah dangkal lebih dari 5 m bmt setempat;

4. Wilayah Potensi Air Tanah Langka atau Tidak Berarti, menempati daerah punggung dan puncak bukit/gunung. Setempat-setempat dijumpai mata air dengan debit kecil, kurang dari 1 l/dtk dan rembesan-rembesan. Kedudukan muka air tanahnya bervariasi dengan kedalaman 9 m bmt setempat.

Berdasarkan kenampakan geologi, sistem akuifer, kuantitas, dan kualitas air tanahnya serta kemudahan dalam cara pengambilan air tanah, di Cekungan Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona prospek pengembangan air tanah, yaitu: Zona pengembangan air tanah yang diprioritaskan dari sumur gali, mata air yang berdebit besar, dan sumur bor.

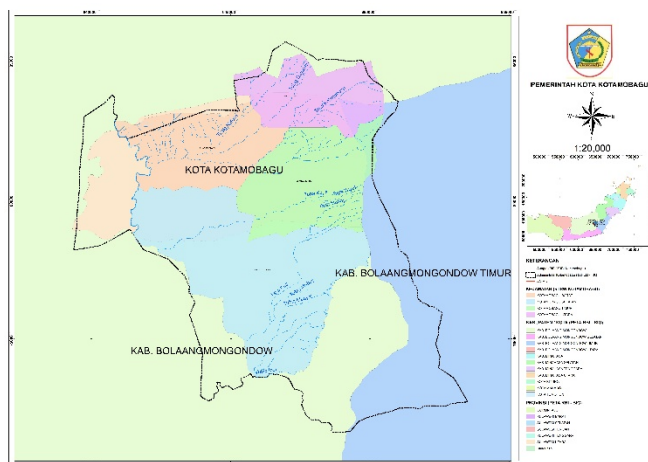
2.1.4. Kondisi Hidrologi

Terdapat sejumlah aliran sungai yang melintasi Kota Kotamobagu diantaranya yang terbesar adalah Ongkag Mongondow yang bermuara di Inobonto yang bergabung dengan Ongkag Dumoga. Sungai-sungai lain adalah Sungai Kotobangon, sungai Gogagoman, sungai Moayat (Irigasi Moayat di Desa Poyowa Besar) dan beberapa sungai kecil lainnya. Oleh karena itu memiliki sumber daya air yang melimpah, untuk kebutuhan air baku, kolam dan berbagai usaha lainnya. Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Kotamobagu sebagai sarana dan usaha perikanan serta sumber air baku bagi PDAM. Keberadaan air tanah di Kota Kotamobagu kualitasnya terbilang cukup baik. Namun demikian tingkat pelapukan batuan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu terjadi cukup tinggi yang diikuti dengan laju perubahan penutupan lahan oleh pembangunan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan menjadi sangat rendah yang berakibat pada tingginya run off, hal ini merupakan salah satu penyebab menurunnya muka air tanah di musim kemarau. Berikut daftar nama sungai dirinci menurut kecamatan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu.

Iklm di Kota Kotamobagu memilik curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei, dan terendah pada bulan Februari. Suhu udara berada di kisaran 18° C – 28°C. Sebagian besar wilayah digunakan untuk kegiatan pertanian, diikuti pemukiman, perkantoran, dan perdagangan. Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Gambar 2.3
Peta Sembilan Sungai
di Kota Kotamobagu

Sumber: Kota
Kotamobagu Dalam
Angka 2018



Kecamatan	Nama Sungai
Kotamobagu Utara	Bilalang Toko/Dayanan Kotabangon
Kotamobagu Selatan	Yantaton Kopek
Kotamobagu Timur	Bonodon Yoyak Motoboi Besar
Kotamobagu Barat	Mongkonai

Iklm merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen. Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November samapai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara

yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei (369 mm³) dan terendah jatuh pada bulan Februari. Jumlah hari hujan 10 - 224 hari.

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Iklm merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen.

Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 - 120 hari. Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Sebagai wilayah hasil pemekaran baru, Kota Kotamobagu belum memiliki catatan curah hujan pada setiap wilayah kecamatannya. Dalam buku Kota Kotamobagu dalam angka, data curah hujan tidak tercantum dan belum

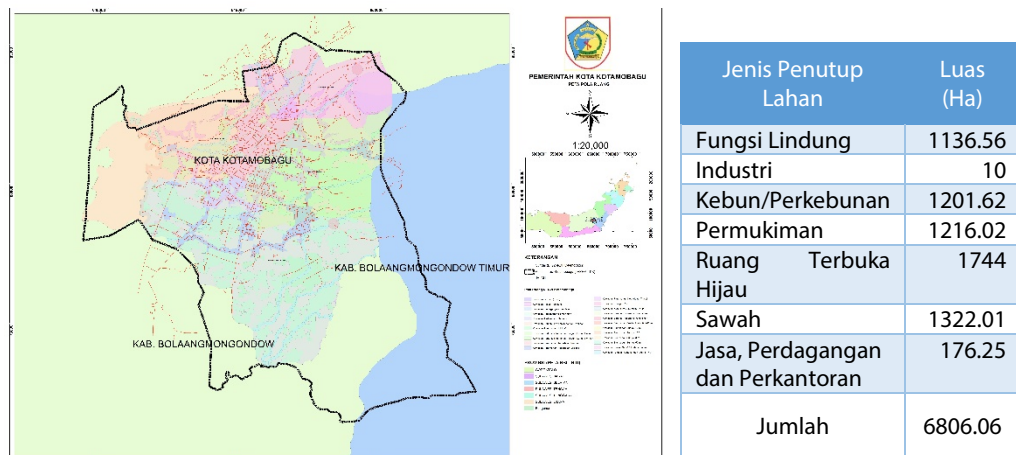
tersajikan karena ketidakadaan data akibat tidak adanya stasiun pencatat hujan. Kondisi ini perlu diperbaiki dengan membangun stasiun pencatat hujan di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu. Mengingat pentingnya data curah hujan dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan maka disarankan untuk dapat segera merealisasikan pembangunan stasiun pencatat hujan tersebut.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan saat ini (present landuse) merupakan cerminan tingkat penggunaan lahan dan penerapan teknologi masyarakat setempat saat ini. Berdasarkan analisis citra World view komposit warna sesungguhnya liputan bulan Oktober 2010, daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) satuan tutupan lahan, yaitu: sawah (sw), tegalan (tg), ruang terbuka hijau (rth), permukiman (pm), hutan (ht), badan air (ba), dan kebun/perkebunan (kb)

Gambar 2.4
Peta Penggunaan Lahan di Kota Kotamobagu

Sumber: Perda RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034



2.1.6.1. Sawah (sw)

Satuan tutupan lahan ini meliputi sawah irigasi. Persawahan di daerah kajian berada pada dataran aluvial, pada musim kemarau lahan sawah di wilayah ini masih dapat ditanami padi sawah karena masih mendapat pasokan air yang memadai. Sawah irigasi ini, dapat ditanam padi dua kali setahun dan bahkan

dapat tiga kali setahun. Total Luas lahan area persawahan sampai dengan tahun 2018 adalah $\pm 1.691,55$ Ha. Melihat perkembangan Kota Kotamobagu, perlu dipikirkan upaya untuk mempertahankan areal persawahan di wilayah ini untuk tetap menjaga kemampuannya berswasembada pangan. Jika melihat laju pertumbuhan permukiman bukan tidak mungkin akan terjadi konversi lahan yang cukup besar dari pemanfaatan lahan sebagai sawah menjadi lahan terbangun.

2.1.6.2. Tegalan (tg)

Satuan tutupan lahan ini termasuk di dalamnya ladang yang terdapat pada lereng-lereng perbukitan dan daerah dataran. Di beberapa tempat, penduduk membuka perladangan pada lereng-lereng bukit tanpa usaha konservasi, sehingga mempercepat kerusakan lahan. Secara umum tutupan lahan berupa tegalan merupakan pemanfaatan lahan peralihan yang digunakan untuk pertanian lahan kering dengan komoditas pertanian berupa tanaman semusim. Berdasarkan citra satelit, sebagian satuan tutupan lahan berupa tegalan merupakan areal semak atau lahan yang belum dimanfaatkan atau merupakan lahan yang telah selesai dimanfaatkan/panen.

2.1.6.3. Ruang Terbuka Hijau (rth)

Ruang terbuka hijau merupakan satuan tutupan lahan yang pemanfaatannya diarahkan untuk keseimbangan ekosistem kota, umumnya bentuk dari pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu adalah berupa lapangan olah raga, median jalan, pemakaman umum, sempadan sungai, sempadan mata air, kawasan resapan air, jalur hijau dan taman kota. Pemanfaatan ruang lainnya yang dapat digolongkan sebagai ruang terbuka hijau adalah hutan kota yang saat ini luasnya $\pm 4,3$ Ha

2.1.6.4. Permukiman (pm)

Satuan tutupan lahan permukiman merupakan wilayah terbangun yang ada di Kota Kotamobagu. Satuan tutupan lahan ini umumnya mengikuti pola

jalan yang ada di Kota Kotamobagu. Pola pemanfaatan ruang permukiman umumnya berselang seling atau bercampur dengan areal pertanian yang ada. Kepadatan areal permukiman umumnya bervariasi dengan tingkat kepadatan sedang hingga jarang. Kepadatan permukiman paling tinggi berada pada jalur-jalur jalan utama. Pesatnya perkembangan permukiman di Kota Kotamobagu selanjutnya harus direncanakan lebih rinci untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan daya dukung lingkungan setempat.

2.1.6.5. Badan Air (ba)

Tutupan lahan berupa badan air umumnya merupakan areal rendah yang terisi oleh air dan bersifat permanen sepanjang waktu. Sebagai contoh bentuk-bentuk tutupan lahan berupa badan air adalah; sungai, embung, situ, danau, rawa, kolam dan tambak yang keberadaan dan suplai airnya relatif selalu tetap.

2.1.6.6. Kebun/Perkebunan (kb)

Keberadaan kebun ataupun perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu dipahami karena kota ini memiliki potensi di sektor pertanian. Keberadaan kebun campuran maupun perkebunan yang membudidayakan satu atau lebih jenis tanaman produktif sangat banyak terdapat disini. Jenis tanaman yang umumnya dapat dijumpai di wilayah Kota Kotamobagu diantaranya adalah: tanaman kopi, kelapa, kakao dan tanaman buah seperti rambutan, nanas dan komoditas tanaman tahunan lainnya.

Kebun atau perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu diusahakan secara perorangan dan tradisional. Laju pertumbuhan perkebunan nampaknya cukup pesat jika melihat masih luasnya dan banyaknya areal kebun atau perkebunan yaitu 2.462,2 Ha yang dapat diamati pada citra satelit yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perlu perencanaan yang matang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan pada waktu mendatang.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (hinterland), melalui pembudayaan sektor atau subsektor basis sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Tujuan utama dari kawasan andalan adalah mempercepat pembangunan.

Kota Kotamobagu yang berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang strategis. Kota Kotamobagu terletak pada simpul jalur perdagangan, jasa dan transportasi regional Bolaang Mongondow Raya, dimana daerah Kawasan Bolaang Mongondow Raya tersebut sedang berkembang, terutama Kota Kotamobagu yang menjadi kawasan andalan bagi daerah sekitarnya.

Kota Kotamobagu akan berperan sebagai kota transit bagi para pelaku perjalanan antara Kotabunan, Molibagu, Lolak dan Boroko. Dengan demikian akan mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa terutama dalam distribusi produk dan potensi lokal.

Kota Kotamobagu berperan sebagai terminal (pusat) perdagangan hasil pertanian bagi daerah sekitarnya, penyedia alat-alat dan input bagi kegiatan pertanian, serta sebagai pusat industri pengolahan pertanian. Peran ini didukung oleh keberadaan wilayah sekitar yang sangat potensial bagi pengembangan pertanian, baik tanaman pangan, buah, sayuran, dan hasil kebun lainnya. Keberhasilan peran ini akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Kota Kotamobagu dan Kabupaten di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

Kota Kotamobagu telah ditetapkan sebagai calon ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya dengan melalui analisa dan kajian indikator penilaian calon ibukota suatu Provinsi dan sesuai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktifitas ekonomi, maka Kota Kotamobagu dinilai memenuhi persyaratan sebagai calon ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Selain itu pula dari sisi kajian administrasi, Kota Kotamobagu sebagai calon ibukota

Provinsi Bolaang Mongondow Raya, telah mendapat Surat Keputusan dari Bupati dan DPRD se Bolaang Mongondow Raya tentang persetujuan penetapan Kota Kotamobagu sebagai Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

Sebagai calon Ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya maka di pandang perlu adanya pengembangan wilayah Kota Kotamobagu, meliputi PASSI dan LOLAYAN, merupakan wilayah yang ideal sebagai calon Ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya, guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta memperkuat basis ekonomi rakyat. Secara historis, kultur dan budaya, Kerajaan Bolaang Mongondow mempunyai 4 (empat) wilayah adat masing-masing: Passi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang.

Passi dan Lolayan merupakan satu wilayah mongondow, yang disatukan dengan bahasa mongondow, serta secara historis, kultur dan budaya menyatu dengan masyarakat Kota Kotamobagu.

Salah satu tujuan pemekaran wilayah yaitu pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Passi dan Lolayan, ditinjau dari geoposisi strategis menyatu dengan wilayah Kota Kotamobagu.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

1. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu
2. Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melintasi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas + 628 ha
3. Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas ± 273 Ha
4. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di wilayah Kota Kotamobagu meliputi kawasan di Kelurahan Moyag dan

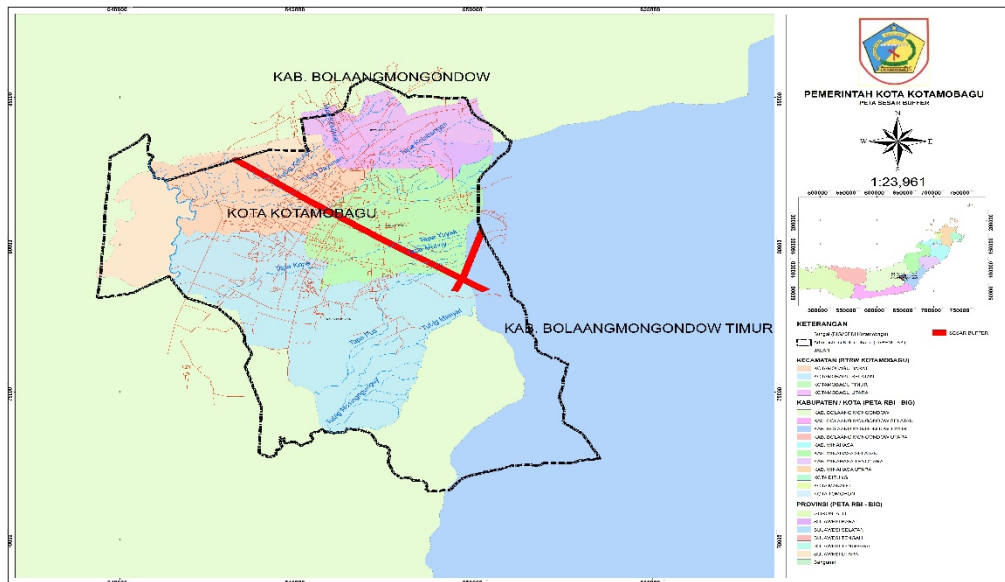
Kelurahan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas ± 322 Hektar.

5. Kawasan rawan bencana banjir wilayah Kota Kotamobagu meliputi Kelurahan Molinow, Mogolaing, Kotamobagu, Kotobangon, Matali, Kopandakan, Motoboi Kecil, Biga.

Gambar 2.5

Peta Patahan di Kota Kotamobagu

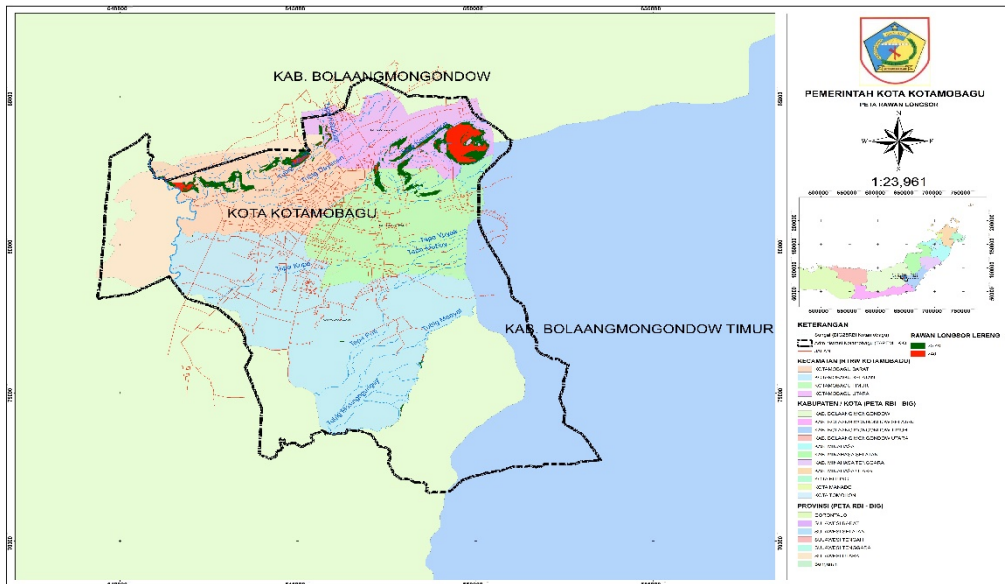
Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034



Gambar 2.6

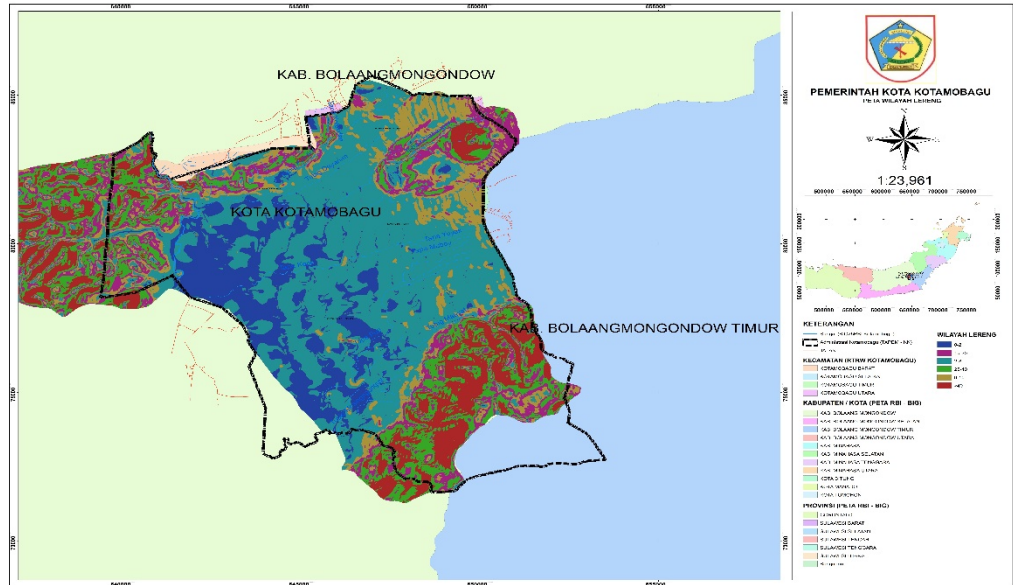
Peta Rawan Longsor di Kota Kotamobagu

Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034



Gambar 2.7
Peta Lereng Gunung
di Kota Kotamobagu

Sumber: Perda RTRW
Kota Kotamobagu
Tahun 2014-2034



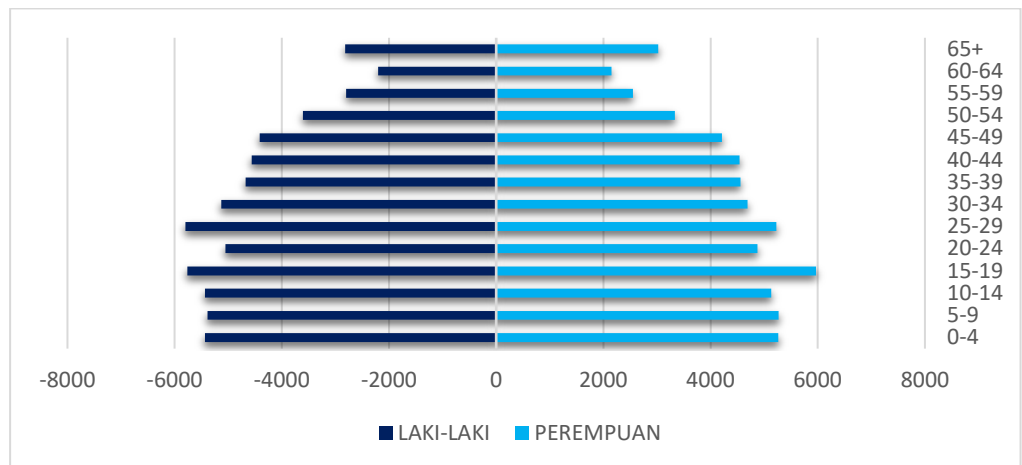
2.1.9. Kondisi Demografi

Pada tahun 2010, penduduk Kota Kotamobagu berjumlah 107.459 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk bertambah menjadi 123.872 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, penduduk laki-laki adalah sebanyak 63.075 jiwa dan perempuan sebanyak 60.797 jiwa, dengan seks rasio 103.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kotamobagu pada periode 2010 - 2017 sebesar 4.85 persen per tahun. Struktur penduduk di Kotamobagu dapat dilihat pada gambar piramida penduduk berikut.

Gambar 2.8
Piramida Penduduk
Kota Kotamobagu
2017

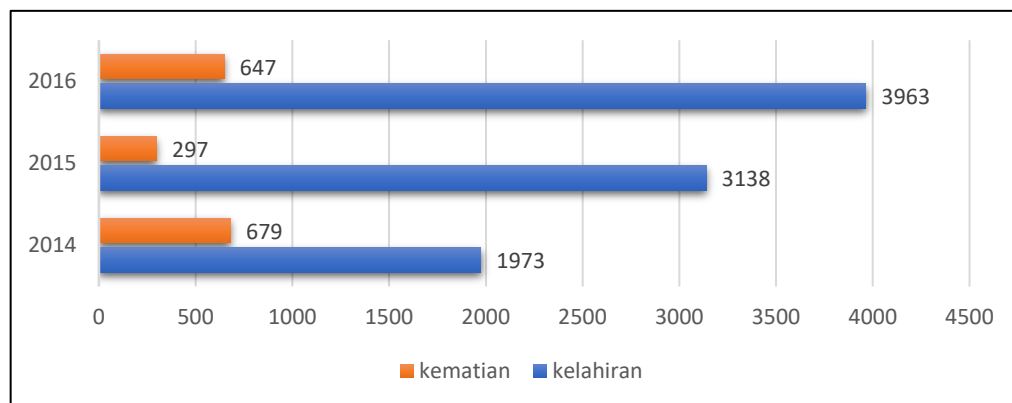
Sumber: Proyeksi
Penduduk Indonesia
2010-2035 (BPS)



Jumlah penduduk Kotamobagu dipengaruhi oleh angka kelahiran yang lebih besar daripada jumlah kematian. Angka kelahiran dan kematian yang teregistrasi ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 2.9
Jumlah Kelahiran dan Kematian Kota kotamobagu

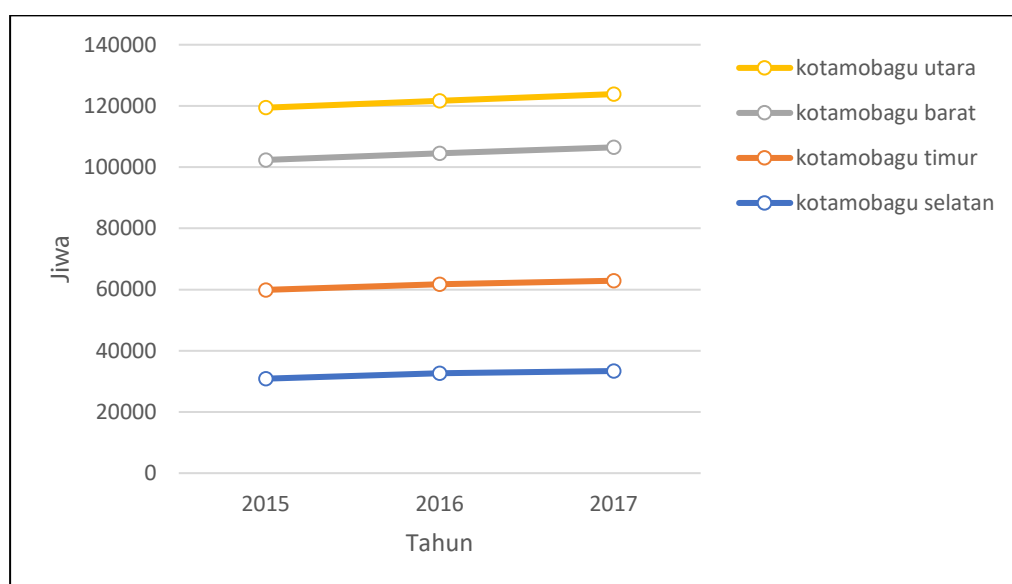
Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018



Penduduk di Kotamobagu tersebar di empat wilayah Kecamatan Administrasi. Perkembangan jumlah penduduk di 4 (empat) wilayah Kecamatan Administrasi Gambar 2.11. Distribusi penduduk menurut Kecamatan bervariasi dari terendah sebesar 14.05 persen di Kecamatan Administrasi Kotamobagu Utara hingga yang tertinggi sebesar 35.19 persen di Kecamatan Administrasi Kotamobagu Barat. Sementara menurut strukturnya, penduduk Kota Kotamobagu untuk tahun 2017 adalah masuk dalam kategori struktur penduduk produktif sebanyak 123.872 jiwa penduduk berusia antara 15-64 tahun.

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Kota kotamobagu Berdasarkan Kecamatan Periode 2015-2017

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018



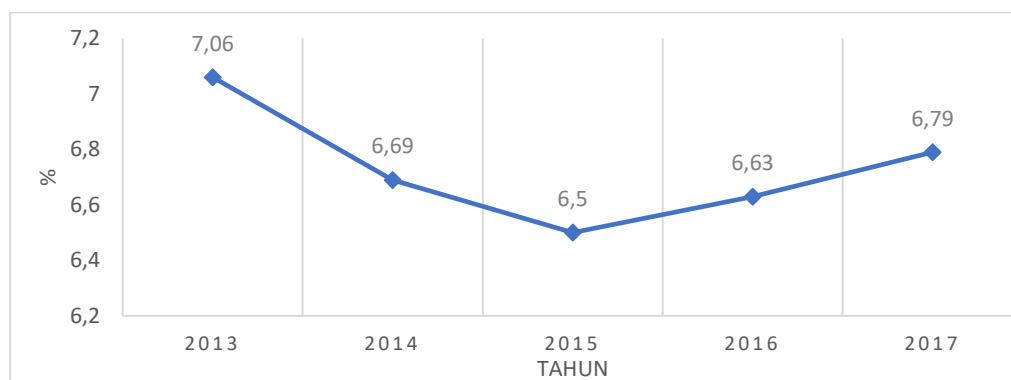
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Kotamobagu beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Meskipun Perekonomian Kotamobagu sebesar 7,06 persen pada tahun 2013, kemudian turun sebesar 6,69 persen pada tahun 2014, lalu turun lagi pada tahun 2015 sebesar 6,5 persen, namun pertumbuhan Ekonomi Kotamobagu menunjukkan tren positif sehingga pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 6,63 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi kotamobagu tahun 2017 meningkat menjadi 6,79 persen,

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kota
Kotamobagu

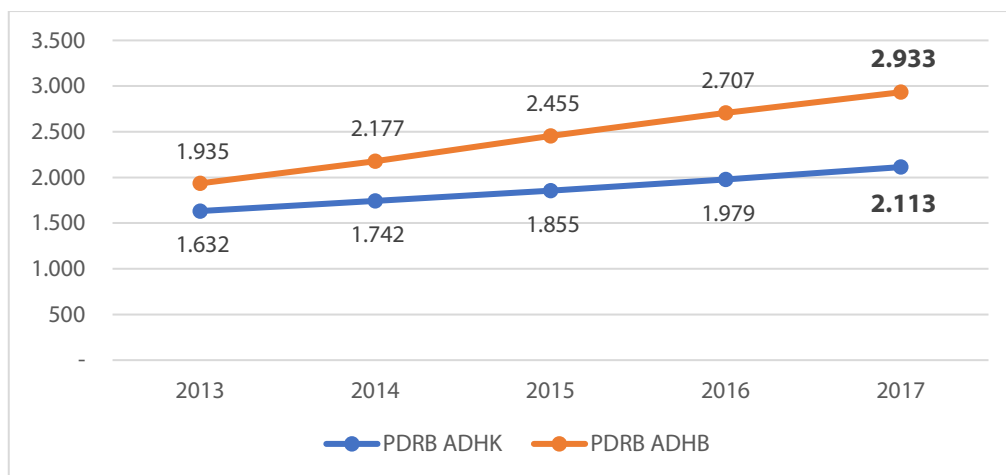
Sumber: Buku PDRB
Menurut Lapangan
Usaha Kota
Kotamobagu Tahun
2013-2017



Perkembangan ekonomi Kotamobagu pada tahun 2017 relatif lebih baik dari tahun 2016, meskipun masih terbuka adanya resiko krisis keuangan di beberapa negara di Eropa. Meningkatnya perkembangan ekonomi ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2017 sebesar 2113,46 miliar, sementara nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 2933,22 miliar rupiah.

Gambar 2.12
 Pertumbuhan PDRB
 Harga Konstan dan
 Harga Berlaku (milyar
 rupiah) Kota
 Kotamobagu Tahun
 2013-2017

Sumber: Buku Statistik
 Daerah Kota
 Kotamobagu 2018

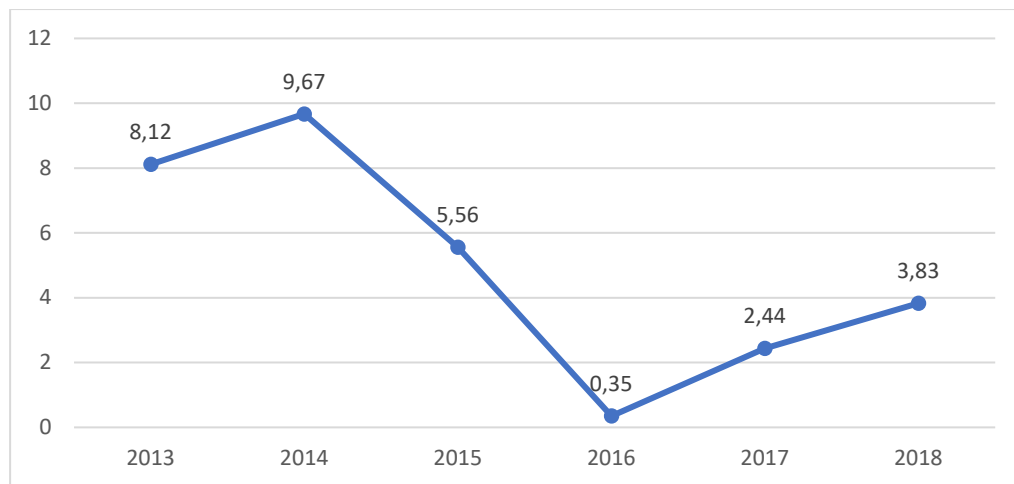


Laju inflasi Kotamobagu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2013 inflasi sebesar 8.12 persen, sementara tahun 2014 laju inflasi meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 9.67 persen. Inflasi tahun 2014 merupakan inflasi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2015 inflasi kembali menurun dan hanya 5.56 persen, tahun 2016 inflasi menurun menjadi 0.35 persen, pada tahun 2017 naik menjadi 2,44 persen dan pada tahun 2018 menjadi 3,83 persen.

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri.

Gambar 2.13
Grafik Laju Inflasi Kota
Kotamobagu

Sumber: BPS SULUT



Struktur perekonomian dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor yang didasarkan pada nilai nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kota Kotamobagu. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

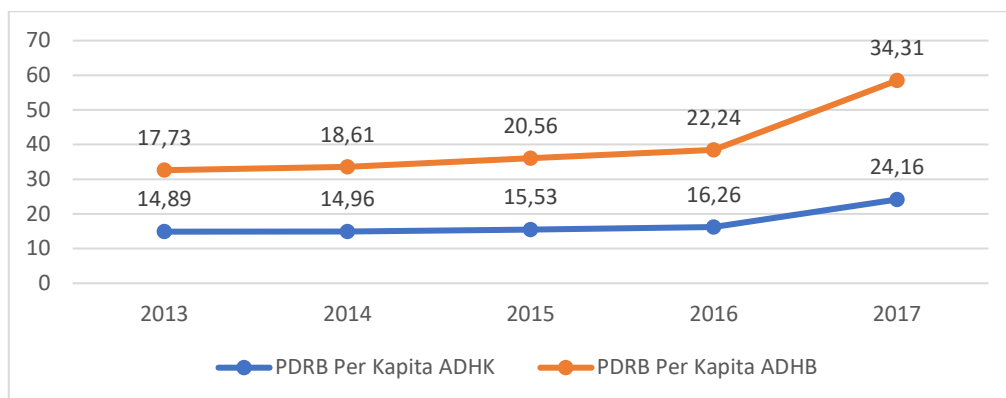
Pertumbuhan ekonomi Kotamobagu pada tahun 2017 tumbuh positif didorong oleh seluruh lapangan usaha. Beberapa Lapangan Usaha yang mencetak pertumbuhan tertinggi diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, dan Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,40 persen; 8.96 persen; dan 8.72 persen;

Pertumbuhan yang cukup pesat ini didorong oleh beberapa faktor seperti meningkatnya aktivitas jasa kesehatan di Kotamobagu sejak mulai beroperasinya gedung baru pada RSUD Pobundayan dan RSUD Swasta lainnya serta bertambahnya beberapa praktek spesialis, sehingga pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Kotamobagu meningkat. Hal ini membuat masyarakat sudah tidak pergi jauh ke Manado untuk mendapatkan jasa kesehatan. Sementara itu, tingginya aktivitas konstruksi di Kotamobagu juga mendorong aktivitas pertambangan dan penggalan sebagai pemasok bahan baku konstruksi.

PDRB per kapita Kota Kotamobagu atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai Rp. 34.31 juta atau meningkat 1.54 persen dibanding tahun 2016 (Rp. 22.24 juta).

Gambar 2.14
PDRB Per Kapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Sumber : Buku Statistik Daerah Kota kotamobagu 2018



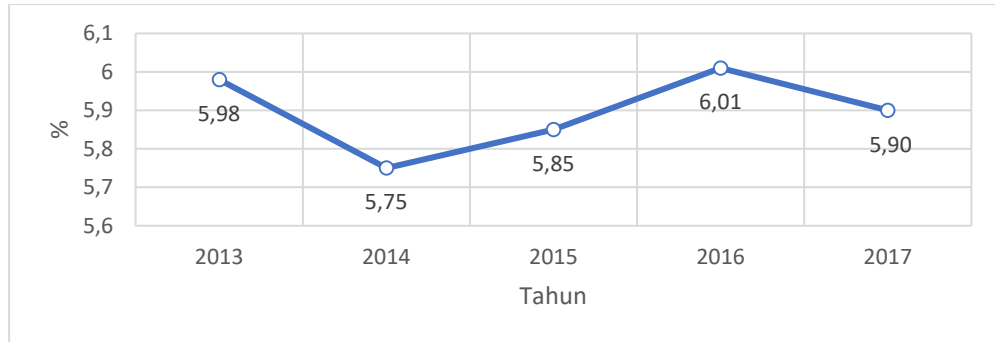
Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*). Gini ratio Kota Kotamobagu pada periode 2013-2017 yang relatif tetap, mengindikasikan/menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan sedang, yaitu antara 0,36 sampai dengan 0,49. Ketimpangan yang sedang ini ditunjukkan bahwa pendapatan penduduk Kota Kotamobagu relatif merata ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kota Kotamobagu juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Dilihat dari indikator kemiskinan, angka kemiskinan Kotamobagu pada posisi bulan Maret 2013 tercatat 6,863.78 jiwa (5.98 persen), bulan Maret tahun 2014 hanya tercatat 6,728.59 jiwa (5.75 persen), bulan Maret tahun 2015 mencapai 6,986.48 jiwa (5.85 persen), bulan Maret tahun 2016 mencapai 7,314.11 jiwa (6.01 persen). Lalu tercatat bahwa sampai dengan bulan Maret 2017, secara makro penduduk miskin Kota Kotamobagu menjadi 7,308.45 jiwa atau sebesar 5.90 persen dari total penduduk Kota Kotamobagu. Namun, Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu terlihat pada grafik berikut.

Gambar 2.15

Gambaran Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Sulawesi Utara



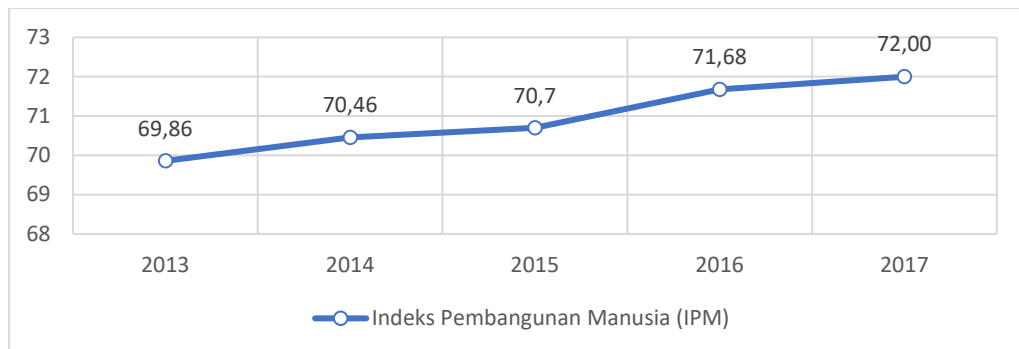
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, IPM Kota Kotamobagu menunjukkan peningkatan, yakni dari 69.86 pada tahun 2013 meningkat menjadi 70.46 pada tahun 2014, 70.7 pada 2015, dan 71.68 pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 IPM Kota Kotamobagu mencapai 72.00 (Gambar 2.17). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

Gambar 2.16

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017

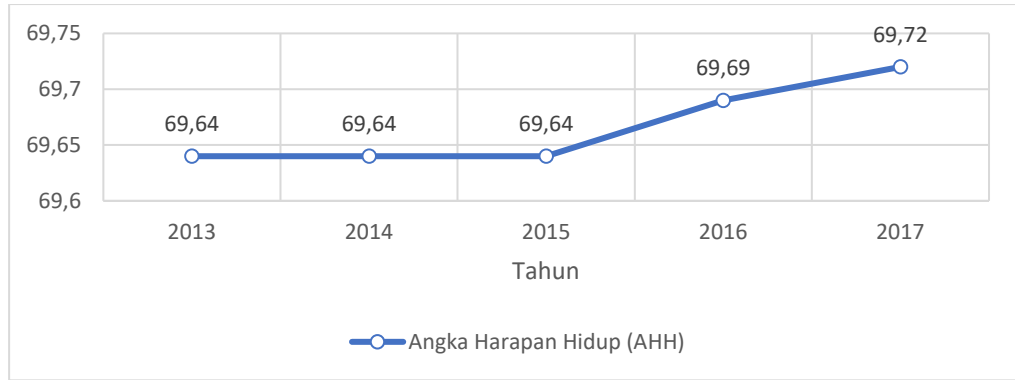
Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018



Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Kotamobagu yang merupakan salah satu komponen IPM juga menunjukkan angka yang cukup baik dan meningkat dari tahun ke tahun. AHH, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tercatat 69.64 tahun, tahun 2016 mencapai 69.69 tahun, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 69.72 tahun (Gambar 2.18).

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017

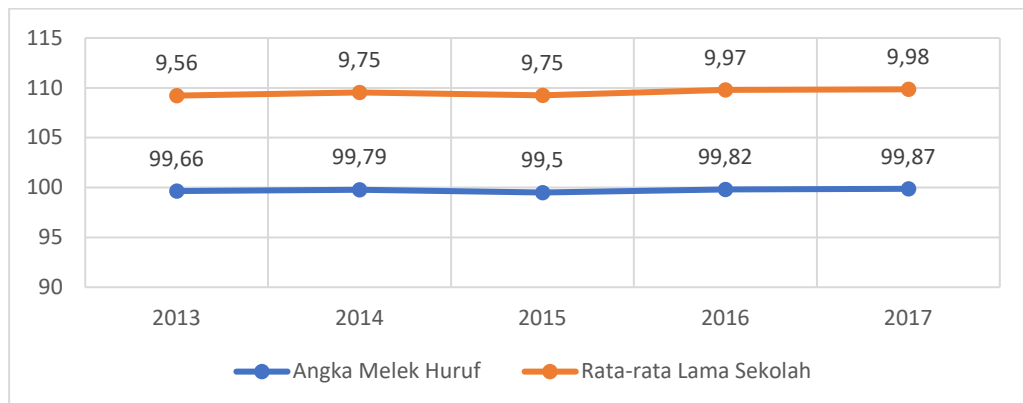
Sumber: BPS Sulawesi Utara



Sementara ini, Angka Melek Huruf juga mengalami Peningkatan. Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf tercatat sebesar 99.66 persen, pada tahun 2014 meningkat menjadi 99.79 dan tahun 2015 menurun menjadi 99.5 persen, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 99.92 persen, dan pada tahun 2017 turun mencapai mencapai 99.87 persen. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan, pada tahun 2013 adalah 9.56 tahun. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 9.75 tahun dan pada tahun 2016 menjadi 9.97 tahun. Pada tahun 2017 Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 9.98 tahun. (Gambar 2.19.)

Gambar 2.18
Perkembangan AMH dan Rata-rata lama Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017

Sumber: Kompilasi dari Data Dinas Pendidikan dan BPS Sulawesi Utara

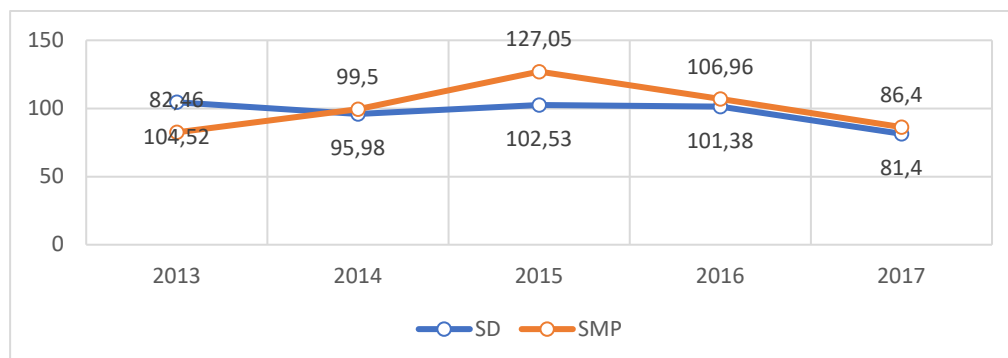


Untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar, SD berada diatas 100 persen sedangkan tahun 2014 menurun 95.98 persen, kemudian pada tahun 2017 menurun lagi di angka 81.4 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dari 82.46 persen pada tahun 2013 menjadi 99.5 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 dan tahun 2016 berada diatas 100 persen dan pada tahun 2017 turun menjadi

86.4 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dari 93,37 persen pada tahun 2013 menjadi 81.4 persen pada tahun 2017, APM SMP/MTs/Paket B meningkat dari 59.7 persen pada 2013 menjadi 94.9 persen pada tahun 2017. (Gambar 2.20.)

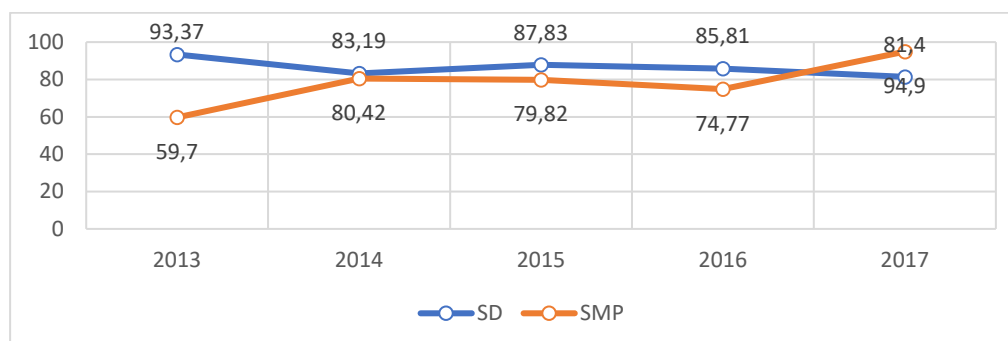
Gambar 2.19
Perkembangan APK
Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2017

Sumber: Kompilasi dari
Data Dinas Pendidikan
dan BPS Sulawesi
Utara



Gambar 2.20
Perkembangan APM
Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2017

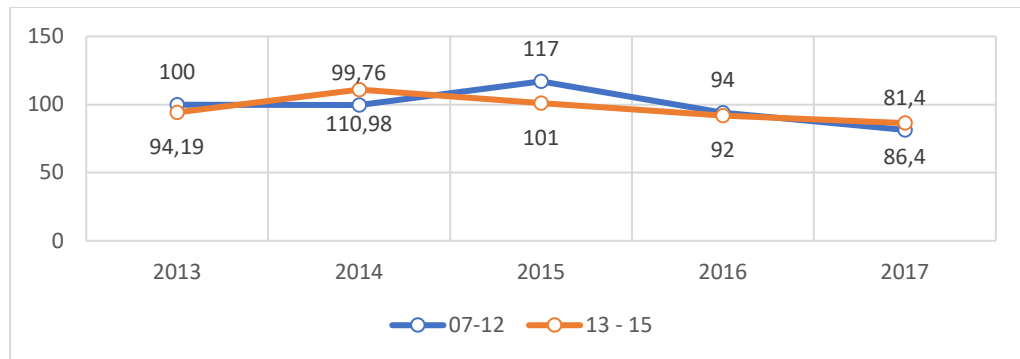
Sumber : Kompilasi
dari Data Dinas
Pendidikan dan BPS
Sulawesi Utara



Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur juga menunjukkan peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2013 sebesar 100 persen, menurun menjadi 99.76 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 kembali naik sebesar 117 persen dan kemudian menurun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 masing menjadi 94 persen dan 81.4 persen. APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2013 sebesar 94.19 persen, menurun menjadi 86.4 persen pada tahun 2017. (Gambar 2.22.)

Gambar 2.21
Perkembangan APS
Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2017

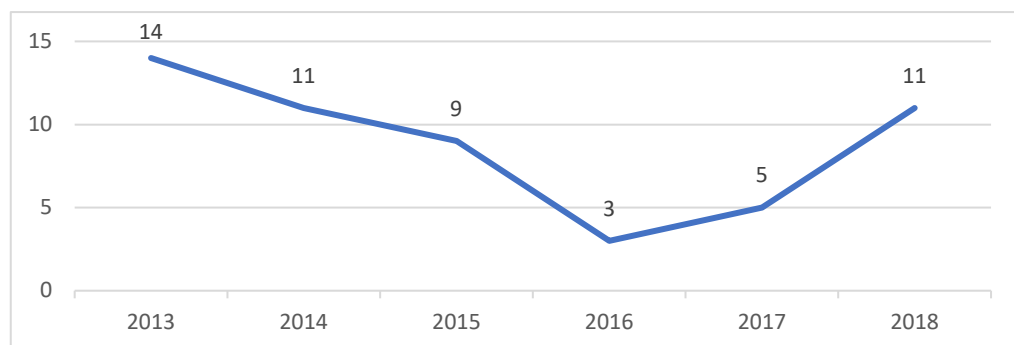
Sumber: Kompilasi dari
Data Dinas Pendidikan
dan BPS Sulawesi
Utara



Sedangkan peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Ratio (IMR) dari 14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi 11 (sebelas) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 (Gambar 2.23). Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami hal yang sama, yaitu cenderung menurun. Jika pada tahun 2013 AKI mencapai 5 kasus sementara pada tahun 2018 AKI tersebut hanya 3 kasus. Selain itu, Angka Kesakitan (Incident Rate) DBD juga mengalami penurunan dari 155 kasus pada tahun 2013 menjadi 120 kasus pada tahun 2018. Di sisi lain, Case Detection Rate TB juga mengalami penurunan dari 360 kasus pada tahun 2013 menjadi 332 kasus pada tahun 2018.

Gambar 2.22
Perkembangan Angka
Kematian Bayi Kota
Kotamobagu Tahun
2013-2018

Sumber: Dinas
Kesehatan
Kotamobagu



Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan penduduk, dihadapkan pada beberapa hambatan namun masih dapat dikendalikan, diantaranya adalah wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang pada tahun 2013 terjadi 155 kasus dan berkurang menjadi 120 kasus pada tahun 2018. Selain DBD, terdapat penyakit HIV/AIDS yang pada tahun 2018 terjadi 1/9 kasus dengan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta

penemuan penderita Tuberculosis (TBC) yang pada tahun 2018 terdapat 332 penderita.

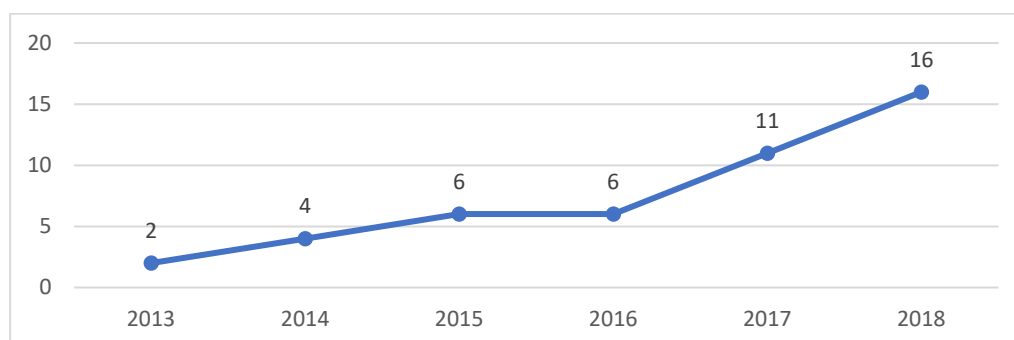
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Kotamobagu mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah dilestarikan di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun meningkat menjadi 10 jenis pada tahun 2018 dan tata nilai budaya lokal hasil inovasi dari masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun menjadi 6 jenis pada tahun 2018.

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kota kotamobagu telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, prestasi yang dicapai dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, tercatat kota Kotamobagu telah mendapat prestasi dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan tingkat nasional 2 cabang olahraga pada tahun 2013 meningkat menjadi 16 cabang pada tahun 2018 antara lain Cabang olahraga catur, karate, taekwondo, silat, selam, bilyard, tinju, basket, bulutangkis, bolakaki, tenis meja, renang, futsal, atletik, tenis lapangan dan tenis meja (Gambar 2.24)

Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kota Kotamobagu sampai tahun 2018 adalah sebanyak 24 organisasi.

Gambar 2.23
Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu



2.3. Aspek Pelayanan Umum

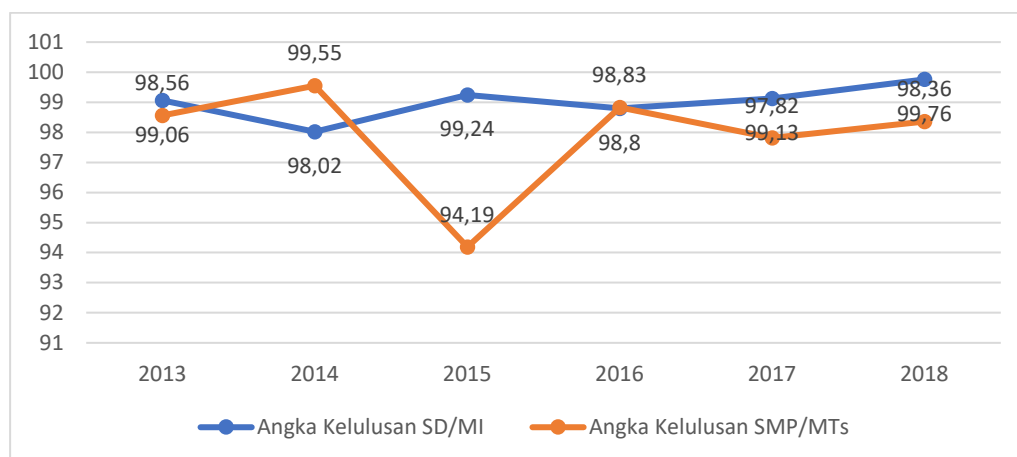
2.3.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Kota Kotamobagu salah satunya ditunjukkan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Angka kelulusan siswa tingkat SD/MI di Kota Kotamobagu meningkat dari 99.6 persen pada tahun 2013 menjadi 99.13 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 angka kelulusan SD/MI meningkat menjadi 99.76 persen. Persentase kelulusan siswa tingkat SMP/MTs meningkat dari 98.56 persen pada tahun 2013, menjadi 98.83 persen pada tahun 2016 dan menurun menjadi 97.82 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 98.36 (Gambar 2.25).

Gambar 2.24
Jumlah Angka Kelulusan (AL) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu



Sampai tahun 2018, Pemerintah Kota Kotamobagu terdapat 3 (tiga) bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain Taman Kanak-kanak (TK) dengan jumlah murid 1.851 murid, Kelompok Bermain (KB) 451 murid dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) 479 murid. Adapun jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 61 unit dan Sekolah Dasar Swasta (SDS) sebanyak 8 unit, Sekolah Dasar

Luar Biasa (SDLB) 1 unit, Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebanyak 5 unit, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebanyak 9 unit, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) 6 unit, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebanyak 2 unit, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) 2 unit, Sekolah Menengah Atas negeri (SMAN) 4 unit, Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) 3 unit, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 unit, Madrasah Alyah Swasta (MAS) 1 unit, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 unit, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 7 unit.

Tabel 2.1
Jumlah Murid, Guru,
Rasio Murid-Guru
PAUD Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Pendidikan Kota
Kotamobagu

BENTUK PENDIDIKAN PAUD	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
Taman Kanak- kanak (TK)	1.851	210	8.81
Kelompok Bermain (KB)	451	100	4.51
Satuan PAUD sejenis (SPS)	479	100	4.79

Tabel 2.2
Jumlah Sekolah,
Murid, Guru, Rasio
Murid-Guru SD/SDLB
Kota Kotamobagu
Tahun 2018

Sumber : Dinas
Pendidikan Kota
Kotamobagu

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
Kotamobagu Barat	19	4,527	241	17.66
Kotamobagu selatan	21	3,141	183	17.16
Kotamobagu timur	20	2,536	168	15.01
Kotamobagu Utara	10	1,182	83	14.02
Jumlah	70	11,386	675	15,96

Tabel 2.3
Jumlah Sekolah,
Murid, Guru, Rasio
Murid-Guru MI Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Pendidikan Kota
Kotamobagu

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
Kotamobagu Selatan	-	-	-	-
Kotamobagu timur	1	61	12	5.08
Kotamobagu barat	4	978	70	13.97
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	5	1039	82	19.05

Tabel 2.4
Jumlah Sekolah,
Murid, Guru, Rasio
Murid-Guru SMP Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Pendidikan Kota
Kotamobagu

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	7	2,978	213	13.25
Kotamobagu selatan	2	884	52	32.00
Kotamobagu timur	4	2,033	92	11.98
Kotamobagu Utara	2	687	52	12.69
Jumlah	15	6,597	415	17,58

Tabel 2.5
Jumlah Sekolah,
Murid, Guru, Rasio
Murid-Guru MTs Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Pendidikan Kota
Kotamobagu

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	1	554	31	18
Kotamobagu selatan	2	975	51	19
Kotamobagu timur	1	74	12	6
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	4	1,603	94	43

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kotamobagu telah menunjukkan pencapaian yang positif.

Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama Rumah Sakit, puskesmas, posyandu, dan polindes. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah Rumah Sakit Umum Daerah di Kotamobagu sebanyak 6 (enam) unit, Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit dengan kapasitas 258 tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Swasta berjumlah 5 unit. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai tahun 2018 mencapai 5 unit. Terdiri dari 3 unit Puskesmas telah dilengkapi dengan Fasilitas Rawat Inap 2 unit, rawat bersalin (RB) 1 unit dan 2 unit Puskesmas Rawat Jalan. Dalam pencegahan gizi buruk juga telah disediakan fasilitas pelayanan pemulihan untuk balita penderita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding Center* (TFC) di 4 (empat) Puskesmas Kecamatan.

Terkait dengan penanggulangan penyakit menular, cakupan layanan pasien HIV/AIDS telah ditingkatkan dimana penemuan kasus HIV (kumulatif) sebanyak 1 Orang dan kasus AIDS (kumulatif) sebanyak 9 pasien orang. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA dan DBD menurun dari tahun ketahun yaitu TB BTA sebanyak 360 kasus (2013), 126 kasus (2014), 106 kasus (2015), 10 kasus (2016), 50 kasus (2017) dan 332 kasus (2018) serta kasus DBD sebanyak 155 kasus (2013), 68 kasus (2014), 224 kasus (2015), 91 kasus (2016), 45 kasus (2017) dan 120 kasus (2018). Dalam rangka meningkatkan cakupan deteksi penyakit TB BTA dan DBD ini, Pemerintah Kota Kotamobagu telah meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi penyakit ini sehingga kasus TB BTA dan DBD usia lebih dari 5 (lima) tahun yang ditemukan tidak banyak yang berlanjut.

Sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada tahun 2018 jumlah Dokter di Kota Kotamobagu sebanyak 110 orang yang terdiri dari dokter umum 74 orang, dokter spesialis 30 orang dan dokter gigi 6 orang.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Kotamobagu. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem tata air, jaringan jalan serta penyediaan air bersih.

Pengembangan sistem tata air terbagi menjadi sistem drainase dan pengendali banjir yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan pengendalian banjir. Untuk sistem drainase antara lain dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sungai dan saluran. Untuk pengendali banjir dilakukan dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana Drainase

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kotamobagu telah melakukan normalisasi kali/sungai di Katulidan, sungai Agoan, sungai Bonodon, sungai

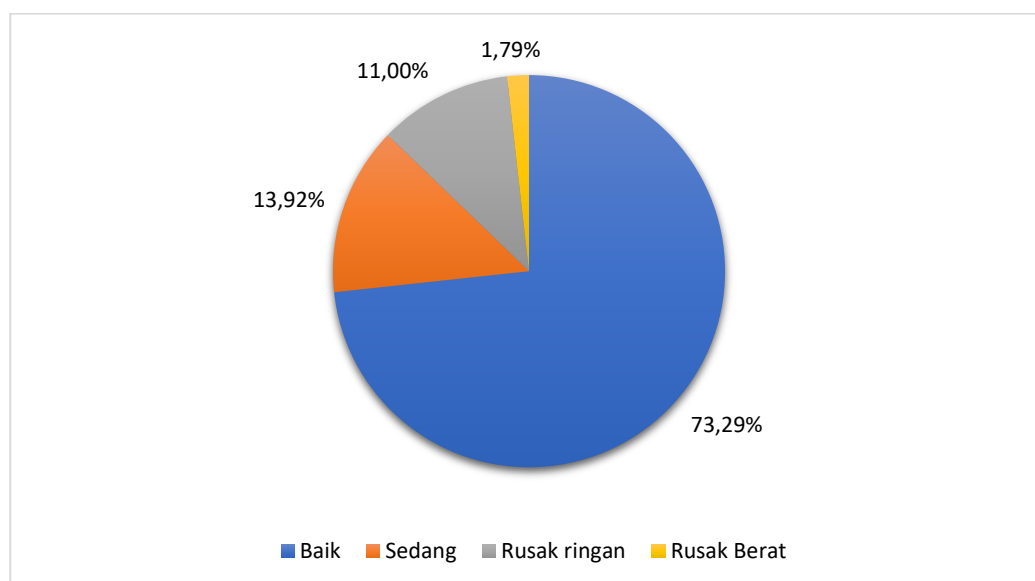
Yantaton 1, sungai Yantaton 2, sungai Dayanan, sungai Mogolaing, sungai Motoboi, dan sungai Kope serta pengerukan drainase kota.

Dalam peningkatan jaringan jalan Pemerintah Kota Kotamobagu membangun infrastruktur dasar dalam hal ini jalan di Kota Kotamobagu sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun belum tersedia secara optimal.

Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada Gambar 2.26 Pada tahun 2018 persentase panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 73 % atau 196.402 km, kondisi sedang 13 % atau 37.306 km, kondisi rusak 11 % atau 29.480 km dan kondisi rusak berat 1.79 % atau 4.806 km. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Kotamobagu yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Gambar 2.25
Persentase Kondisi
Jalan di Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota
Kotamobagu



Tabel 2.6
Panjang Jalan
Menurut Kondisi Jalan
(Km) di Kota
Kotamobagu Tahun
2013-2018

Sumber: Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota
Kotamobagu

Tahun	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2018	196.402	37.306	29.480	4.806	267.99
2017	186.34	35.78	39.90	5.97	267.99
2016	102.24	87.38	58.04	18.18	265.84
2015	212.99	40.76	13.59	16.85	287.18
2014	144.53	44.71	63.83	11.75	264.82
2013	152.23	65.77	53.91	12.27	284.18

Tabel 2.7
Panjang Jalan
Menurut Jenis
Permukaan (Km) di
Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2018

Sumber: Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota
Kotamobagu

Tahun	Diaspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
2018	176.050	47.6651	43.828	0.3956	267.99
2017	174.39	43.88	48.43	1.29	267.99
2016	189.62	43.53	32.7	-	265.85
2015	212.99	40.76	30.4	-	284.15
2014	195.2	44.75	1.75	23.2	264.9
2013	242.04	40.13	2.01	-	284.18

Tabel 2.8
Panjang Jalan
Menurut
Pemerintahan yang
Berwenang
Mengelolanya (Km) di
Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2018

Sumber: Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota
Kotamobagu

Tahun	Pemerintahan Yang Berwenang Mengelola				Jumlah Total
	Negara	Provinsi	Kota	Non Status	
2018	19.812	1.734	267.99	18.93	308.47
2017	19.812	20.6689	267.99	-	308.47
2016	19.812	20.6689	265.85	-	306.33
2015	19.812	15.85	284.18	-	319.84
2014	6.361	15.85	264.86	0.18	306.57
2013	6.35	15.85	284.18	0.18	306.57

Tabel 2.9
Jumlah Pelanggan
dan Air yang
disalurkan di Kota
Kotamobagu Tahun
2017

Sumber: Kota
Kotamobagu Dalam
Angka 2018

Pelanggan	Pelanggan	Air Disalurkan (m3)	Nilai
Sosial	686	133,754	415,703,300
Rumah Tangga	16,916	2,028,466	7,909,177,950
Instansi Pemerintah	354	121,802	431,526,000
Niaga	994	191,656	799,257,000
Industri	35	27,314	103,837,300
Khusus	80	10,166	166,870,500
Jumlah Total	19,065	2,513,158	9,826,372,050

Suplai air bersih yang dilakukan oleh PDAM Bolaang Mongondow terhadap kebutuhan warga Kota Kotamobagu berada pada angka 2.513.158 m³ dengan total jumlah pelanggan 19.065. Angka ini semakin berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan total yang disalurkan 2.821.108 m³ dengan total jumlah pelanggan 18.343. Cakupan pelayanan Instalasi Air Bersih khusus PDAM di Kota Kotamobagu baru melayani sebagian besar kawasan pusat kota dan sekitarnya, belum mencakup ke wilayah-wilayah pedesaan di pinggiran Kota Kotamobagu. Suply air dari PDAM ke masyarakat seharusnya lebih ditingkatkan, mengingat sumber air baku yang ada tidak sulit dengan keberadaan 9 buah sungai yang mengalir melewati kota dan rata-rata masih memenuhi persyaratan sebagai sumber air baku. Untuk sambungan rumah pelayanan air minum, pemerintah kotamobagu telah menyediakan total 4996 SR sampai dengan tahun 2018 dengan rincian: Tahun 2014 disediakan 3510 SR, Tahun 2015 disediakan 476 SR, Tahun 2016 disediakan 160 SR, Tahun 2017 disediakan 197 SR. Untuk suplay air minum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yang dikelola oleh UPTD Air bersih sampai dengan tahun 2018 adalah 5.107 sambungan rumah (SR) lebih lengkapnya seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan di Kota Kotamobagu Tahun 2018

Sumber: UPTD Air Minum Kota Kotamobagu

NO.	LOKASI SPAM	TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS L/DET	JUMLAH TOTAL SR TAHUN 2018
1	Broncap Mobalang (Lokasi Desa Poyowa Besar)	2010	10	732
2	Broncap Sia (Lokasi Desa Sia)	2010	5	110
3	IPA Kobo Kecil	2011	20	1394
4	IPA Pontodon	2013	20	414
5	IPA Bilalang I	2012	20	1332
6	IPA Kotamobagu Selatan (Lokasi Desa Poyowa Besar I)	2015	20	845
7	Reservoar (Lokasi Desa Pontodon Timur)	2016	5	160
8	Reservoar (Lokasi Desa Upai, Sumber dari IPA Pontodon)	2016	5	31
9	Broncap Bilalang II	2018	10	89
	Total			5107

2.3.1.4 Penataan Ruang

Pola ruang dan struktur ruang Kota Kotamobagu memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), belum terealisasi.

Dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi, namun masih ada tahapan yang belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Prioritas pemanfaatan ruang dikembangkan berdasarkan pertimbangan upaya untuk mengantisipasi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan kawasan strategis kota maka prioritas pemanfaatan ruang di Kota Kotamobagu secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang atas dinamika pengembangan wilayah bagi secara internal maupun secara regional yang menuntut Kota Kotamobagu menyediakan lahan untuk kebutuhan tersebut.
- b. Upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan perkotaan

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan-jasa.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif serta Arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang
- c. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- d. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

2.3.1.5 Perumahan Rakyat

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Kotamobagu secara optimal. Khusus untuk Kota Kotamobagu sampai dengan saat ini mengalami kesulitan dalam persoalan data perumahan rakyat, sehingga sulit untuk melihat perkembangan perumahan rakyat di Kota Kotamobagu. Untuk itu diperlukan solusi penanganan dari pemerintah Kota Kotamobagu yang akan menjadi stimulan untuk MBR. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Kota Kotamobagu kemudian bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan

disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Berikut adalah data BPS Kota Kotamobagu:

Tabel 2.11
Data BPS Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman

KEGIATAN	2016	2017	2018
	capaian	capaian	capaian
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA	295	228	225

Sampai saat ini Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki rumah yang tidak layak huni sebanyak 1.561 unit rumah. Kota Kotamobagu juga memiliki Rumah Susun Sederhana yang tercatat sebanyak 2 Unit masing-masing di kelurahan Gogagoman dengan 68 Kamar dan di kelurahan Pobundayan dengan 90 Kamar. Rumah susun sewa di Kotamobagu, diadakan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Adapun jumlah data kepemilikan rumah pada tahun 2017 sebanyak 89,47% atau 22.982 rumah tangga memiliki rumah, dan 5,66% atau 1.413 rumah tangga non miliki rumah (backlog kepemilikan rumah). Sampai saat ini data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kotamobagu terkait backlog kepemilikan rumah adalah tahun 2017 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Backlog Kepemilikan
Rumah

Sumber: Pemutakhiran
Baseline Data KOTAKU,
2017.

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Rumah Tangga (ruta)	Peresentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah Rumah Tangga Milik (ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik/Backlog Kepemilikan Rumah (ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik/Backlog Kepemilikan Rumah (%)
2017	123.872	24.982	89,47	22.352	1.413	5,66

Permukiman kumuh di kota kotamobagu pada tahun 2014 teridentifikasi terdapat 8 lokasi dengan luas 36,07 Ha, pada tahun 2016 teridentifikasi melalui penyusunan RP2KP seluas 282,315 Ha, dimutakhirkan pada baseline KOTAKU pada tahun 2017 seluas 56,29 Ha dan tertangani seluas 40,61 Ha, dan

pada tahun 2018 permukiman kumuh di kota kotamobagu seluas 15,68 Ha. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Kawasan Permukiman
Kumuh di Kota
Kotamobagu

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
36,07 Ha	36,07 Ha	282,315 Ha	56,29 Ha	15,68 Ha

Sumber: SK Walikota
Tentang Penetapan
Kawasan Permukiman
Kumuh Kotamobagu
dan Berita Acara Hasil
Penanganan
Permukiman Kumuh,
2018.

Sarana perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga, pe-samaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan rumahnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.

Kawasan kumuh serta rasio bangunan ber IMB yang belum maksimal menjadi persoalan permukiman dimana kaum miskin menanggung konsekwensi terbesar dari kerusakan lingkungan dengan berbagai alasan seperti:

- a. Mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam seperti air, lahan, hutan dll.
- b. Keluarga miskin terkadang memiliki tingkat akses terendah ke jasa dan manfaat sumber daya yang ada seperti air minum, masalah sanitasi yang sehat, dan sumber energy lainnya.
- c. Terkadang pula bahwa rumah tangga yang berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap bencana alam karena mereka tinggal pada wilayah yang beresiko tinggi.
- d. Kaum miskin pada umumnya memiliki mata pencaharian yang erat kaitannya dengan keberadaan lahan, hutan, dan lain-lain. Kehilangan

hutan atau kerusakan lingkungan akan memperlemah kaum miskin dalam hal mata pencaharian terutama bagi kaum petani.

- e. Selanjutnya terkait dengan rumah tangga miskin umumnya menjadi isu lingkungan terkait dengan adanya pemukiman kumuh di perkotaan dengan sistem sanitasi yang tidak layak.

Kondisi yang terjadi di Kota Kotamobagu tidak seperti apa yang dialami di Kota-Kota kecil lainnya. Masyarakat Kotamobagu yang hidup dari hasil pertanian, dimana pola hidupnya justru lebih terjamin. Persediaan lahan pertanian masih cukup dengan tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, belum ternodai dengan berbagai macam penyemprotan pestisida maupun sistem pemupukan, karena rata-rata jenis tanahnya mengandung unsure hara yang tinggi. Dari aspek permukiman rata-rata tidak ada masalah, persiapan lahan bahkan ruang terbuka hijau di masing-masing halaman bangunan rumahnya menjadi salah satu budaya masyarakat dari pendahulunya atau sudah menjadi tradisi turun temurun untuk menjaga kondisi lahan yang ada.

2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Struktur tenaga kerja yang ada di Kota Kotamobagu untuk Tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja 15 – 19 tahun yang paling besar. Dan jumlah pekerja informal lebih besar dari pekerja formal.

Tabel 2.14
Kondisi Tenaga Kerja
Kota kotamobagu
Tahun 2018

*Sumber : Dinas
Perindustrian dan
Ketenagakerjaan
Kotamobagu*

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
I.1	PENDUDUK dan TENAGA KERJA				
	a. Penduduk Usia Kerja 15 keatas	11,248	11,431	11,501	11,735
	b. Penduduk yang bekerja Usia 15 keatas	1.550	777	789	1,899
	c. Tingkat Penganggur terbuka (%)	9.02	9.02	8.4	6.1
	d. Tingkat setengah Penganggur	11.53	11.53	6.9	12.73
	e. Angkatan Kerja usia 15-59 Tahun	51.181	52.031	52,031	49,263
	f. Pengangguran terbuka	4.614	5.632	5,632	3,052
	g. Penduduk yang Bekerja < 35 Jam/Minggu (Setengah Penganggur)	6,004	11.706	11,867	7,145
	h. Jumlah Tenaga Kerja BUMN dan BUMD	-	712	734	4,175
	i. Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di Lembaga Pemerintah (PNSD)	2.787	2.835	2,436	2,550
I.2	KESEMPATAN KERJA				
	a. Penduduk yang Bekerja	46.567	49.748	49,767	50,435
	b. Penduduk yang Bekerja Formal	-	26.210	26,456	28,606

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	c. Penduduk yang bekerja Informal	-	20.707	21,809	20,192
	d. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Laki – Laki dan Perempuan)	-	173	173	100
	e. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (Laki – Laki dan Perempuan)	256	720	317	458
I.3	PELATIHAN dan KOMPETENSI KERJA				
	a. Penganggur terbuka dengan pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	4,614	5,632	5,632	3,052
	b. Jumlah lulusan Pelatihan	60	109	95	25
I.4	HUBUNGAN INDUSTRIAL				
	a. Jumlah Perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 50 Orang	10	12	14	-
	b. Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan yang disahkan	2	2	4	-
	c. Jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama yang sudah di daftarkan	-	1	2	-
	d. Jumlah perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama (LKS) Bipartit	-	2	3	-
	e. Jumlah Sarikat Pekerja / Sarikat Buruh	-	2	3	-

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	f. Jumlah perselisihan hubungan industrial	-	25	28	-
	g. Jumlah perselisihan HI yang masuk ke pengadilan HI		5	9	-
I.5	KONDISI LINGKUNGAN KERJA				
	a. Jumlah Perusahaan Kecil, menengah dan besar (sensus ekonomi 2006)				
	• Kecil	-	262	283	283
	• Menengah	-	28	28	28
	• Besar	-	4	4	4
	b. Jumlah perusahaan yang melapor sesuai UU No 7 tahun 1981	16	38	38	-
	c. Jumlah Buruh/karyawan perusahaan yang dilaporkan sesuai UU No. 7 Tahun 1981	3,627	3,795	4,175	-
	d. Jumlah Buruh / karyawan yang perusahaanya	3,627	3,795	4,175	-
	e. Jumlah perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja		3	4	-
	f. Jumlah buruh/karyawan yang mengalami kecelakaan kerja		3	3	-
	g. Jumlah buruh/pekerja (anak) dibawah umur	-	-	-	-
I.6	PENGUPAHAN dan KESEJAHTERAAN PEKERJA				

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	a. Besarnya Upah minimum Provinsi (UMP)	Rp. 2.150.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.598.000	Rp. 2.824.286
	b. Jumlah buruh / karyawan yang terdaftar menjadi anggota jamsostek aktif	1,208	1,521	1,589	-
	c. Jumlah perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek	53	118	124	-

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin Tahun 2017 Kota kotamobagu

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	1,544	355	1,899
20-24	3,180	2,023	5,203
25-29	3,306	1,983	5,289
30-34	4,283	2,820	7,103
35-39	5,235	1,195	6,430
40-44	4,245	1,077	5,322
45-49	4,029	1,734	5,763
50-54	3,378	2,039	5,417
55-59	2,624	1,161	3,785
60+	3,048	1,176	4,224
Jumlah	34,872	15,563	50,435

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu adalah sebesar 100%, tercapai sesuai target baik di tahun 2017 maupun 2018. Artinya semua pengaduan yang diterima oleh P2TP2A telah mendapatkan layanan baik sosial, kesehatan, hukum dan psikologi.

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kotamobagu dalam 2 tahun terakhir tercatat 39 kasus di Tahun 2017 dan menurun menjadi 28 kasus di Tahun 2018. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Data Rincian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017 – 2018

Sumber: SIMFONI PPA Tahun 2018

Tahun	Kasus Kekerasan terhadap		Jumlah
	Perempuan	Anak	
2017	9	30	39
2018	9	19	28

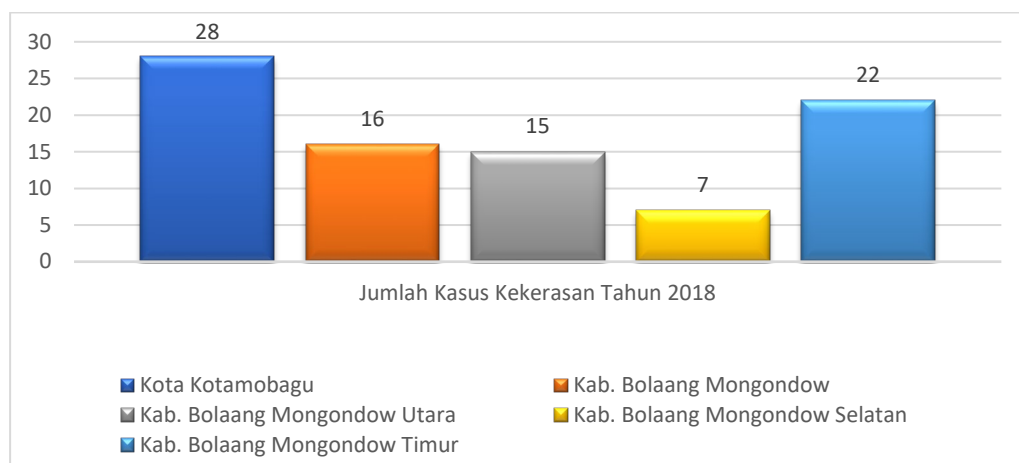
Yang menjadi catatan penting kami dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak adalah bahwa KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terkait relasi suami istri. Sehingga ruang lingkup penyelesaianpun dibatasi dalam lingkungan keluarga saja. Bahkan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa KDRT

tidak perlu dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan kasus KDRT.

Berikut dalam Gambar 2.27 Data Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Data SIMFONI PPA (Sistem Informasi *On-Line* Perlindungan Perempuan dan Anak) tahun 2018 antara Kota Kotamobagu dengan beberapa Kabupaten lainnya di Bolaang Mongondow Raya.

Gambar 2.26
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018

Sumber: SIMFONI PPA Tahun 2018



Gambar 2.27 menunjukkan Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Kotamobagu Tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan 4 Kabupaten lainnya di Bolaang Mongondow Raya. Ini menjadi perhatian penuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu untuk terus mengupayakan sosialisasi dan pematapan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kotamobagu melalui P2TP2A. Namun yang menjadi permasalahannya adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM terlatih untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.3.2.3 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah Kota Kotamobagu. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya local secara optimal dilakukan dengan penganeekaragaman Pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri . Perwujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kota kotamobagu diarahkan pada tersediaanya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui penganeekaragaan bahan pangan, peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan dimasyarakat.

Tabel 2.17
Pangan Harapan (PPH)
Tingkat ketersediaan
Berdasarkan Neraca
bahan Makanan
Nasional Tahun 2018

Sumber: Dokumen NBN
dan PPH Dinas
Ketahanan pangan Kota
Kotamobagu

No	Kelompok bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Rill	Skor PPh	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	1,259	52.9	0.5	26.5	25	25	-
2	Umbi-umbian	119	4.9	0.5	2.5	2.5	2.5	-
3	Pangan Hewani	220	9.2	2.0	18.3	18.3	24	-
4	Minyak dan Lemak	257	10.7	0.5	5.3	5	5	-
5	Buah/Biji berminyak	78	3.2	0.5	1.6	1	1	-
6	Kacang-kacangan	96	4	2	8	8	10	-
7	Gula	107	4.5	0.5	2.2	2.2	2.5	-
8	Sayuran dan Buah	160	6.6	5	33.2	30	30	-
Jumlah		2.295	95.6	-	97.5	92.05	100	-

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu barometer tingkat kebersihan kota serta keterkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah bagaimana penanganan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Sistem penanganan dan pengurangan sampah yang secara teknis dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan di suatu daerah telah mendapat pengakuan dan penghargaan lingkungan hidup antara lain penghargaan daerah/kota bersih (**ADIPURA**).

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penduduk Kota Kotamobagu sudah meninggalkan cara-cara konvensional, yaitu dengan cara membuat lubang tempat sampah yang kemudian dilakukan pembakaran atau penimbunan. Hal ini merupakan komitmen antara masyarakat dan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih baik dalam mewujudkan Kota Kotamobagu yang Bersih dan Nyaman dan berwawasan lingkungan hidup.

Pengelolaan persampahan di Kota Kotamobagu saat ini masih menjadi masalah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga produksi sampah ikut meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perencanaan dengan meningkatkan sistem Penanganan dan Pengurangan sampah dari sumbernya dengan kebijakan-kebijakan antara lain membangun dan mengadakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang layak, seperti Model Container, bak sampah dan atau tempat penampungan sampah sementara yang mudah dinaikkan ke mobil pengangkut sampah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah) dengan cara antara lain pengurangan penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari, pemilahan sampah organik dan an-organik, mengolah sampah organik dengan pengomposan dan meningkatkan jumlah Bank Sampah ditengah-tengah masyarakat sehinggah Sampah bukan lagi menjadi masalah akan tetapi akan menjadi manfaat bagi masyarakat dengan bernilai ekonomis.

Perhitungan produksi sampah di suatu daerah ditentukan berdasarkan SNI. Sesuai SNI 3242:2008 yang merupakan revisi atas SNI 03-3242-1994 tentang 'Pengelolaan sampah di permukiman', bahwa bila pengamatan/kajian lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran produksi sampah, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

- a. Satuan timbulan sampah kota besar = 2– 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari.
- b. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4 kg/orang/hari.

Dengan menggunakan rumusan SNI diatas, hasil perhitungan Produksi sampah Kota Kotamobagu sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 189,57 M3/Hari (62.566,50 Kg/Hari) atau 68.243,45 M3/Tahun (22.520.340 Kg/Tahun).

Dari jumlah produksi sampah tersebut yang tertangani/ masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 137,07 M3/Hari (45.233,53 Kg/Hari) atau 49.345,67 M3/Tahun (16.284.070 Kg/Tahun) M dengan Perentase Penanganan Sampah / yang masuk di TPA dibandingkan dengan Produksi Sampah adalah sebesar 72,31% dan dengan Persentase Pengurangan Sampah sebesar +/- 27,69% yang dikelola secara 3R antara lain melalui Pengomposan dan Bank Sampah.

Sistem pengumpulan, penyimpanan dan penampungan sampah yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah ditempatkan pada pewardahan (bak sampah) yang terbuat dari papan/kayu, sebagian ditempatkan pada viber plastic yang disiapkan oleh pemda, sebagian juga yang langsung ditempatkan di plastic dan karung. Namun beberapa komponen masyarakat yang tanpa menyadari langsung membuang sampahnya ke sungai sehingga hal ini sangat berbahaya. Namun dari hasil pengamatan dan survey lokasi bahwa sebenarnya pihak Pemda sudah menyiapkan beberapa pewardahan sampah terutama di pusat-pusat kota, pasar dan lain-lain, namun hal ini masih sangat kurang dimana penyediaan pewardahan / penyimpanan sementara yang terbuat dari plastik baru mencapai sekitar 30 %, sehingga hal ini dianggap masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi masalah adalah

faktor partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat, adanya tangan-tangan jahil sampai mencuri tempat-tempat pewadahan yang melalui pengadaan seperti Viber plastik termasuk standnya sebagai tempat penyanggah yang terbuat dari besi yang juga ikut dicuri.

Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan bidang persampahan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir adalah sangat tergantung ketersediaan sarana dan prasarana termasuk personil yang tersedia dalam melakukan penanganan dan pengurangan sampah tersebut. Personil petugas kebersihan sampai dengan akhir Tahun 2018 yang tercatat adalah sebagai berikut : Pengawas Lapangan Wilayah Kebersihan 3 Orang, Operator Alat Berat 3 Orang, Tenaga Pengecek / Penghitung Volume Sampah di TPA 2 Orang, Petugas Pengelola Kompos 2 Orang, Sopir Mobil Dump Truck Sampah 16 Orang, Sopir Mobil Pick Up Sampah 4 Orang, Knek Mobil Dump Truck Sampah 48 Orang, Knek Mobil Pick Up Sampah 7 Orang, Sopir Motor Sampah 5 Orang, Knek Motor Sampah 5 Orang, Tukang Sapu 110 Orang, Petugas Penjaga TPST 1 Orang, Petugas Pengelola Kebersihan Lapangan Kota 2 Orang dan Penjaga TPA 1 Orang. Peralatan yang ada untuk mendukung pengelolaan persampahan di Kota Kotamobagu yang tercatat sampai dengan Akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut : Alat Berat (Excavator, Dozer dan Loader) 5 Unit, Dump Truck Sampah 17 Unit, Mobil Pick Up Sampah 4 Unit, Motor Sampah 12 Unit, Rumah Kompos 1 Unit dan Bank Sampah Induk 1 Unit.

Sesuai amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa singkatan TPA yang dulunya disebut "**Tempat Pembuangan Akhir**" maka saat ini diganti menjadi "**Tempat Pemrosesan Akhir**" dimana titik beratnya adalah sudah tidak dibenarkan lagi yang namanya metode **Open Dumping**, akan tetapi sudah harus ada proses pengolahan di lokasi TPA minimal metode "**Sanitary Landfill**", dan harus ada kebijakan pengurangan sampah pada sumbernya dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Selanjutnya dari hasil peninjauan lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah Kota Kotamobagu akan menjadi masalah mengingat kondisi TPA yang ada dapat dianggap tidak memenuhi syarat lagi mengingat daya tampung TPA sudah tidak memadai lagi dan dikarenakan Lokasinya berada di pinggir sungai besar sehingga hal ini sangat riskan terhadap pencemaran air sungai akibat adanya rembesan lindi/leachet dari Timbunan sampah ini. Perencanaan kedepan dibutuhkan perluasan atau penyiapan lokasi baru TPA.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan faktor pendukung sistem ini adalah:

1. Memiliki lahan TPA yang layak teknis, ekonomis dan layak lingkungan;
2. Setiap bangunan rumah tangga disediakan pewadahan/bak sampah/tempat penampungan sementara (TPS) yang layak dan memadai;
3. Pelayanan disediakan pewadahan/bak sampah/tempat penampungan sementara (TPS) yang disesuaikan dengan volume sampah.
4. Penyediaan gerobak pengangkut sampah guna mengangkut sampah ke TPS yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Penyediaan Alat Angkut Sampah yang sesuai dengan kondisi lapangan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA yang dikelola oleh Pemerintah.
6. Upaya pengurangan sampah pada sumbernya melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Di Kota Kotamobagu saat ini telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem Sanitary Landfill, luas lahan yang dimiliki $\pm 2,8$ Ha berlokasi dekat sekali dengan sungai. Untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terlalu besar maka perlu perluasan dan/atau relokasi lahan TPA yang layak atau sesuai kriteria lahan TPA (Standar SNI).

Udara memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dunia ini sehingga kualitasnya harus dijaga. Sebagaimana tersirat dalam peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2009 tentang pengendalian pencemaran udara, maupun yang ada pada Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Di Kota Kotamobagu yang hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 33 Kelurahan dan desa secara fisik wilayah relatif masih dalam kondisi normal, keberadaan industry-industri yang menghasilkan sumber sumber gas pencemar belum ada, terkecuali adalah beberapa jenis kendaraan roda 4 dan roda 2, akan tetapi belum padat dan daya dukung lingkungan kotanya masih sehat. Kondisi Kota Kotamobagu juga diuntungkan dengan sistem vegetasi kota atau ruang terbuka hijau yang masih sangat menguntungkan.

Tabel 2.18
Perhitungan Indeks
Kualitas Udara Tahun
2018

Sumber: Dinas
Lingkungan Hidup

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2018							
A. Transportasi (Lokasi Bundaran Paris)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	6,3	7,4	6,85	40	0,17	
2	SO2	5,63	6,74	6,19	20	0,31	
Indeks Udara (leu)						0,24	0,14
IKU						92,21	Unggul
B. Industri (Lokasi PLTD Kotamobagu / PLN)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	0,9	1	0,95	40	0,02	
2	SO2	11,5	13,36	12,43	20	0,62	
Indeks Udara (leu)						0,32	0,22
IKU						87,63	Sangat Baik

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2018										
C. Pemukiman (Lokasi Perum Griya Pobundayan)										
Parameter		Tahap I		Tahap II		Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1	
1	NO2	2		2,6		2,3	40	0,06		
2	SO2	8,3		10,43		9,37	20	0,47		
Indeks Udara (leu)								0,26	0,16	
IKU								90,95	Unggul	
D. Perkantoran (Lokasi DLH Kotamobagu)										
Parameter		Tahap I		Tahap II		Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1	
1	NO2	0,41		4,1		2,26	40	0,06		
2	SO2	6,27		2,57		4,42	20	0,22		
Indeks Udara (leu)								0,14	0,04	
IKU								97,85	Unggul	
Rata Rata IKU										
Parameter		A	B	C	D	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1	
1	NO2	6,85	0,95	2,30	2,26	1,84	40	0,05		
2	SO2	6,19	12,43	9,37	4,42	8,74	20	0,44		
Indeks Udara (leu)								0,24	0,14	
RATA RATA TOTAL IKU								92,14	Unggul	

Diwilayah Kota Kotamobagu telah mengalir beberapa Sungai kecil yang bersumber dari pegunungan/perbukitan bagian Timur dan Selatan yang selanjutnya bermuara ke sungai besar yaitu Sungai Ongkag Mongondow. Sungai ini semuanya melintasi dalam kawasan Kota Kotamobagu, tidak pernah mengalami kekeringan dan pada saat musim hujan juga tidak pernah menimbulkan bencana banjir besar. Pada saat musim kemarau rata-rata

relatif jernih, pada bagian hulu atas gunung dapat dialirkan secara grafitasi. Klasifikasi atau kategori / status dari masing-masing sungai ini adalah termasuk Kelas II (Kelas B) yaitu dapat dijadikan sebagai sumber air baku.

Sungai merupakan salah satu sumber air baku di Kota Kotamobagu, terdapat beberapa sungai yang melintas di daerah ini seperti yang tampak pada tabel berikut ini. Tampak bahwa Sungai Mongkonai merupakan sungai terpanjang, terlebar dan terdalam yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Barat. Sebaliknya sungai yang terpendek adalah Sungai Dayanan yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Utara.

Sungai yang Melintas dan Pegunungan yang Ada Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2018

Tabel 2.19
Nama Sungai yang melintas di Kota kotamobagu

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Kecamatan	Nama Sungai
Kotamobagu Timur	Bonodon
	Yoyak
	Motoboi Besar
	Tangaton
	Molunow
	Pangi
	Agoan
Kotamobagu Selatan	Yantaton 1
	Kope
	Yantaton 2
	Lantaan
	Koli
Kotamobagu Barat	Panang
	Dayanan
	Katulidan
	Mogolaing (Ampera)
Kotamobagu Utara	Agoan
	Bilalang
	Dayanan
	Kotobangon

Dari hasil pengamatan lapangan bahwa disaat musim kemarau secara fisik ke 20 sungai ini rata-rata masih sesuai dengan baku mutu air. Hal ini terlihat pada

hulu sungai tersebut rata-rata belum tercemar dengan air limbah rumah tangga kecuali setelah melewati Kotamobagu. Kualitas dari masing-masing air sungai tersebut diketahui setelah melakukan uji Laboratorium dari masing-masing sampel pada sungai tersebut.

Tabel 2.20
PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR SUNGAI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisa Sungai (C1)			Rata Rata (C1)	Baku Mutu (L1)	IP (C1 / L1)	Ket	No	Parameter	Satuan	Hasil Analisa Sungai (C1)			Rata Rata (C1)	Baku Mutu (L1)	IP (C1 / L1)	Ket
			Kobo B.	Sinindian	AKD								Upa i	Osion	Mongkonai				
A. Fisika										A. Fisika									
1	Temperatur	°C	27	27	27	27	28	0,96428 5714	Baik	1	Temperatur	°C	26	28	28	27,333 3333	28	0,97619 0476	Baik
2	Total Dissolved Solids	mg/L	131	143	206	160	1000	0,16	Baik	2	Total Dissolved Solids	mg/L	117	135	140	130,66 6667	1000	0,13066 6667	Baik
3	Total Suspended Solids	mg/L	3	2	1	2	50	0,04	Baik	3	Total Suspended Solids	mg/L	1	1	2	1,3333 3333	50	0,02666 6667	Baik
B. Kimia										B. Kimia									
4	pH	n/a	7,74	7,69	7,83	7,753 3333	9	0,86148 1481	Baik	4	pH	n/a	7,87	7,69	7,77	7,7766 6667	9	0,86407 4074	Baik
5	Ammonia (N-NH3)	mg/L	0,02	0,05	0,03	0,033 3333	1	0,03333 3333	Baik	5	Ammonia (N-NH3)	mg/L	0,02	0,06	0,08	0,0533 3333	1	0,05333 3333	Baik
6	Nitrate (N-NO3)	mg/L	0,39 1	0,4	0,44 8	0,413	10	0,0413	Baik	6	Nitrate (N-NO3)	mg/L	0,99	0,51 6	0,553	0,6863 3333	10	0,06863 3333	Baik
7	Total-Phosphate (P-PO4)	mg/L	0,00 5	0,211	0,14 7	0,121	0,2	0,605	Baik	7	Total-Phosphate (P-PO4)	mg/L	0,03 2	0,15 2	0,21	0,1313 3333	0,2	0,65666 6667	Baik
8	Cyanide (total)	mg/L	0,00 5	0,005	0,00 5	0,005	0,02	0,25	Baik	8	Cyanide (total)	mg/L	0,00 5	0,00 5	0,005	0,005	0,02	0,25	Baik
9	E.coli	MPN/100mL	1990 0	24200	240 00	22700	5000	4,54	Cemar Ringan	9	E.coli	MPN/100mL	548 0	242 00	15500	15060	5000	3,012	Cemar Ringan
10	Total coliform	MPN/100mL	2420 0	24200	242 00	24200	5000	4,84	Cemar Ringan	10	Total coliform	MPN/100mL	242 00	242 00	24200	24200	5000	4,84	Cemar Ringan
11	Iron-Dissolved (Fe)	mg/L	0,06	0,04	0,02	0,04	1	0,04	Baik	11	Iron-Dissolved (Fe)	mg/L	0,02	0,02	0,03	0,0233 3333	1	0,02333 3333	Baik
12	Lead-Dissolved (Pb)	mg/L	0,00 2	0,001	0,00 2	0,001 6667	0,03	0,05555 5556	Baik	12	Lead-Dissolved (Pb)	mg/L	0,00 1	0,00 3	0,002	0,002	0,03	0,06666 6667	Baik
13	Zinc-Dissolved (Zn)	mg/L	0,00 5	0,005	0,00 5	0,005	0,05	0,1	Baik	13	Zinc-Dissolved (Zn)	mg/L	0,00 5	0,00 5	0,005	0,005	0,05	0,1	Baik

No	Parameter	Satuan	Hasil Analisa Sungai (C1)			Rata Rata (C1)	Baku Mutu (L1)	IP (C1 / L1)	Ket	No	Parameter	Satuan	Hasil Analisa Sungai (C1)			Rata Rata (C1)	Baku Mutu (L1)	IP (C1 / L1)	Ket
			Kobo B.	Sinindian	AKD								Upa i	Osion	Mongkonai				
14	Mercury-Dissolved (Hg)	mg/L	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,002	0,025	Baik	14	Mercury-Dissolved (Hg)	mg/L	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,002	0,025	Baik
15	Biological Oxygen Demand	mg/L	2	2	2	2	3	0,666666667	Baik	15	Biological Oxygen Demand	mg/L	2	2	2	2	3	0,666666667	Baik
16	Chemical Oxygen Demand	mg/L	10	10	10	10	25	0,4	Baik	16	Chemical Oxygen Demand	mg/L	10	10	10	10	25	0,4	Baik
Indeks Kualitas Air								0,8514	Baik	Indeks Kualitas Air								0,7599	Baik
								13922										93618	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu

Diwilayah Kota Kotamobagu telah mengalir beberapa Sungai kecil yang bersumber dari pegunungan/perbukitan bagian Timur dan Selatan yang selanjutnya bermuara ke sungai besar yaitu Sungai Ongkag Mongondow. Sungai ini semuanya melintasi dalam kawasan Kota Kotamobagu, tidak pernah mengalami kekeringan dan pada saat musim hujan juga tidak pernah menimbulkan bencana banjir besar. Pada saat musim kemarau rata-rata relatif jernih, pada bagian hulu atas gunung dapat dialirkan secara grafitasi. Klasifikasi atau kategori / status dari masing-masing sungai ini adalah termasuk Kelas II (Kelas B) yaitu dapat dijadikan sebagai sumber air baku.

Sungai merupakan salah satu sumber air baku di Kota Kotamobagu, terdapat beberapa sungai yang melintas di daerah ini seperti yang tampak pada tabel berikut ini. Tampak bahwa Sungai Mongkonai merupakan sungai terpanjang, terlebar dan terdalam yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Barat. Sebaliknya sungai yang terpendek adalah Sungai Dayanan yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Utara.

Sungai yang Melintas dan Pegunungan yang Ada Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2018

2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk sebanyak 123.872 jiwa, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Jumlah penerbitan KTP Kota Kotamobagu pada tahun 2018 sebanyak 96.124 KTP, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 84.227 KTP. Ketersediaan database kependudukan skala Kota Kotamobagu tahun 2008 masih mencapai 75%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 95% di tahun 2009. Kota Kotamobagu saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*.

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak

memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan

status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

Tabel 2.21

Klasifikasi desa di Kota kotamobagu Tahun 2018

Sumber : Dinas PMD Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	Desa	Status
1	Kotamobagu Utara	Desa Sia	Berkembang/Swakarsa
		Desa Bilalang I	Berkembang/Swakarsa
		Desa Bilalang II	Berkembang/Swakarsa
		Desa Ponyodon Timur	Berkembang/Swakarsa
		Desa Ponyodon	Berkembang/Swakarsa
2	Kotamobagu Selatan	Desa Pyowa Besar I	Berkembang/Swakarsa
		Desa Pyowa Besar II	Maju/Swasembada
		Desa Pyowa Kecil	Maju/Swasembada

No	Kecamatan	Desa	Status
		Desa Bungko	Berkembang/Swakarsa
		Desa Kopandakan I	Berkembang/Swakarsa
		Desa Tabang	Berkembang/Swakarsa
3	Kotamobagu Timur	Desa Moyag	Berkembang/Swakarsa
		Desa Moyag Todulan	Berkembang/Swakarsa
		Desa Moyag Tampoan	Berkembang/Swakarsa
		Desa Kobo kecil	Berkembang/Swakarsa

2.3.2.7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemerintah Kota Kotamobagu menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kotamobagu secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hasil dari kebijakan tersebut masih tinggi dan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti tingginya Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2.38, pemakaian obat dan alat kontrasepsi pasangan usia subur meningkat dari 79,7 persen pada tahun 2016 menjadi 80.8 persen pada tahun 2017. Namun berdasarkan SUPAS tahun 2015, angka TFR Kota Kotamobagu sama yaitu sebesar 2.38 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional sebesar 2.30, sehingga perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan program KB.

2.3.2.8 Perhubungan

Jaringan jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai prasarana transportasi, yang tidak hanya digunakan sebagai jalur aliran barang dan penumpang tetapi juga berperan sebagai

pembuka keterhubungan antar kawasan terutama pada kawasan yang terbelakang. Kota kotamobagu sebagai kota jasa memiliki jaringan jalan dalam lingkup lokal atau lingkungan dapat berfungsi dalam menata atau mengatur pola permukiman. Rasio panjang jalan yang belum bisa diketahui masih menjadi tugas pemerintah kota kotamobagu namun berdasarkan klasifikasinya Jalan menurut pemerintahan yang berwenang, Kota Kotamobagu pada tahun 2018 dilalui oleh Jalan Negara sepanjang 19.8 km, Jalan Provinsi sepanjang 1.73 km, dan Jalan Kota sepanjang 267.99 km.

Tabel 2.22
*Data Jalan Diaspal,
Kerikil, Tanah di Kota
Kotamobagu*

*Sumber: Dinas
Pekerjaan Umum
2018..*

Tahun	Diaspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
2018	176.050	47.6651	43.828	0.3956	267.99
2017	174.39	43.88	48.43	1.29	267.99
2016	189.62	43.53	32.7	-	265.85
2015	212.99	40.76	30.4	-	284.15
2014	195.2	44.75	1.75	23.2	264.9
2013	242.04	40.13	2.01	-	284.18

Jaringan jalan di Kota Kotamobagu berdasarkan jenis permukaannya dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu jenis permukaan jalan berupa aspal, kerikil, tanah dan lainnya. Panjang jalan di Kota Kotamobagu tahun 2018 tercatat sekitar 267.99 Km dengan kondisi mulai baik, sedang, rusak hingga rusak berat. Jenis permukaan berupa aspal merupakan jenis permukaan jalan terbesar di Kota Kotamobagu, yaitu mencapai 176.050 Km.

Kota Kotamobagu sendiri belum memiliki angkutan kota yang resmi, oleh karenanya pemerintah Kota Kotamobagu belum mengeluarkan izin trayek angkutan sehingga angkutan yang tersedia saat ini adalah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang kewenangannya berada pada Dinas Perhubungan Provinsi. Pengguna jalan terdiri atas kendaraan beroda 2 (dua) sebanyak 31.179 unit, roda 3 (tiga) sebanyak 21 unit dan Kendaraan Roda 4

(empat) sebanyak 7.739 unit dengan jumlah dengan jumlah terminal sebanyak 1 buah.

Tabel 2.23

Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota kotamobagu 2018

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

Kabupaten / kota	Jenis Kendaraan			
	Roda Empat	Roda Dua	Roda Tiga	Jumlah
Kotamobagu	7.739	31.179	21	38.939

2.3.2.9 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan data 2018, jumlah koperasi 102 unit, Koperasi yang aktif sebanyak 82 unit, berarti ada 20 unit Koperasi yang tidak aktif. Kondisi semacam ini harus segera diatasi secara serius. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menjadi bumerang dan berdampak buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Kota Kotamobagu. Oleh sebab itu perlu melakukan penguatan kelembagaan koperasi aktif, dan membina serta menertibkan 20 unit koperasi yang tidak aktif.

Tabel 2.24

Jumlah Koperasi Menurut Jenis koperasi Tahun 2018 Kota kotamobagu

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

KOPERASI	Kecamatan							
	Kotamobagu Barat		Kotamobagu Timur		Kotamobagu Utara		Kotamobagu Selatan	
	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
KUD	2	-	3	1	-	1	2	-
KOPERASI PERTANIAN	-	2	-	-	-	-	1	-
KOPINKRA	-	-	-	-	-	-	1	-
KOPKAR	2	1	2	-	1	-	-	-
KSU	15	4	11	3	4	3	9	-
KSP	3	-	4	-	2	-	2	-
KOPWAN	-	-	-	-	-	-	-	1

KOPERASI	Kecamatan							
	Kotamobagu Barat		Kotamobagu Timur		Kotamobagu Utara		Kotamobagu Selatan	
	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
KOPERASI MAHASISWA	1	-	-	-	-	-	-	-
KOPERASI LAINNYA	4	3	1	-	4	-	1	-
KPN	3	1	1	-	-	-	-	-
KOPERASI ANGKUTAN DARAT	2	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah	32	11	22	4	11	4	17	1

Ini merupakan program prioritas. Tidak lagi kepada jumlah kelembagaannya yang banyak, tapi bagaimana agar kelembagaan koperasi yang ada harus bisa memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.

Undang-Undang Koperasi yang baru Nomor 17 tahun 2012, fungsi dan tugas koperasi hampir sama seperti unit usaha swasta yang ada saat ini. Hanya saja, apabila unit usaha swasta dimiliki satu atau dua orang, koperasi justru dimiliki banyak orang. Koperasi diwajibkan membuat perencanaan usaha dan target usaha yang akan dicapai. Karena itu, orang yang duduk menjadi pengurus koperasi kedepan tak cukup dengan jujur dan demokratis, tapi juga harus orang yang memiliki *interpreneur* tinggi dalam bidang bisnis dan jasa usaha.

Usulan pembentukan sebuah kelembagaan koperasi ke depan tidak lagi semata atas dasar untuk menerima bantuan kredit atau peralatan dari pemerintah, tetapi harus atas dasar keinginan yang kuat dari sekelompok masyarakat untuk membangun sebuah kelembagaan usaha bersama yang kuat yang bisa menopang hidup orang banyak.

2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sebanyak 87 persen dari sekitar 40 juta atau sekitar 34,8 juta pengusaha mandiri yang bergelut di usaha mikro dan kecil di tanah air hingga kini belum tersentuh akses layanan perbankan. Akibatnya, para pengusaha baru ini kesulitan mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut pula yang menjadi permasalahan di Kota Kotamobagu, dimana akses layanan perbankan, untuk usaha mikro dan kecil belum tersentuh.

Tabel 2.25
Jumlah UKM Non
BPR/LKM Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber : Dinas
Perdagangan Koperasi
dan UKM

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah seluruh UKM	476	1500	2750	3500
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	-	-

Hal tersebut kontradiktif dengan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, atau pertumbuhan yang menjangkau kelompok berpendapatan rendah. Kebutuhan adanya sektor keuangan mikro yang kuat serta mampu memberikan akses perbankan kepada pengusaha mikro dan kecil saat ini sangat mendesak dijalankan.

3. Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*paymentservice*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Tabel 2.26
Jumlah BPR/LKM Kota kotamobagu

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah BPR	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah LKM	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah BPR dan LKM	4	4	4	4	4	4

Dengan adanya BPR dan LKM, hal ini berdampak positif bagi perekonomian di Kota Kotamobagu. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan sektor UMKM di Kota Kotamobagu perlu terus di tingkatkan dan menjadi perhatian karena terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: **pertama**, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, **kedua**, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta **ketiga**, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

4. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Kotamobagu

Pemerintah daerah Kota Kotamobagu memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan IKM dan UKM. Menurut Dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 17 tahun 2013, pasal 2 menyatakan: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM), (2) Pemberdayaan

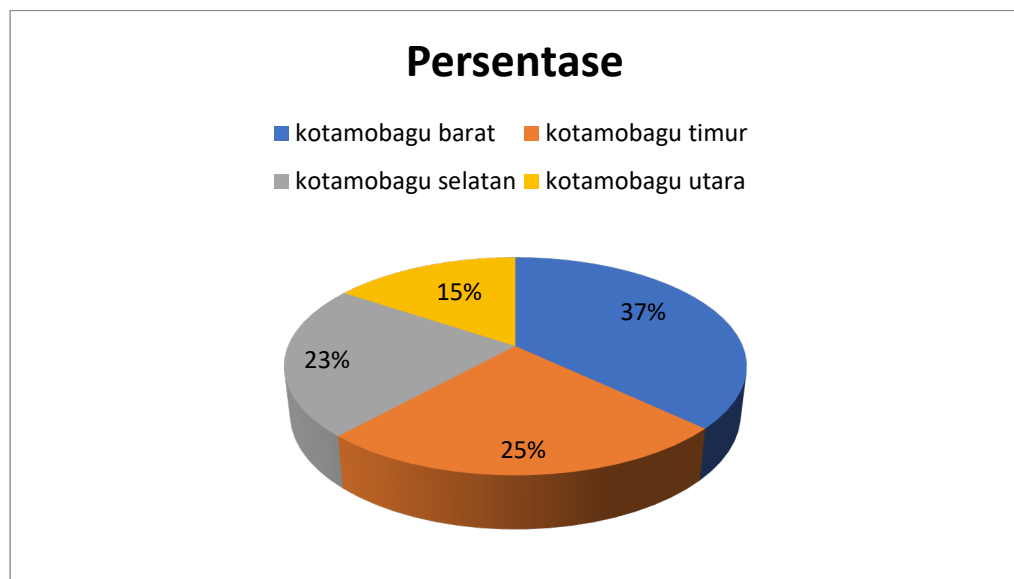
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pengembangan usaha; b. kemitraan; c. perizinan; dan d. koordinasi dan pengendalian.

Jumlah IKM dan UKM di Kota Kotamobagu yang terdaftar pada Tahun 2016 menunjukkan bahwa 49% UKM dan IKM terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur, 30% di Kecamatan Kotamobagu Barat, 12% di Kecamatan Kotamobagu Utara dan 9 % terdapat di Kecamatan Kotamobagu Selatan. Sebaliknya jumlah UKM dan IKM yang paling sedikit sebesar 9% terdapat di Kecamatan Kotamobagu Selatan dimana 36% terdapat di Kelurahan Motoboi Kecil. Untuk Kecamatan Kotamobagu Timur 71% terletak di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Utara paling banyak terdapat di Kelurahan Genggulang sebesar 31% dan Kecamatan Kotamobagu Barat paling banyak di Kelurahan Molinow.

Gambar 2.27

Persentase Jumlah IKM dan UKM Kota kotamobagu Tahun 2016

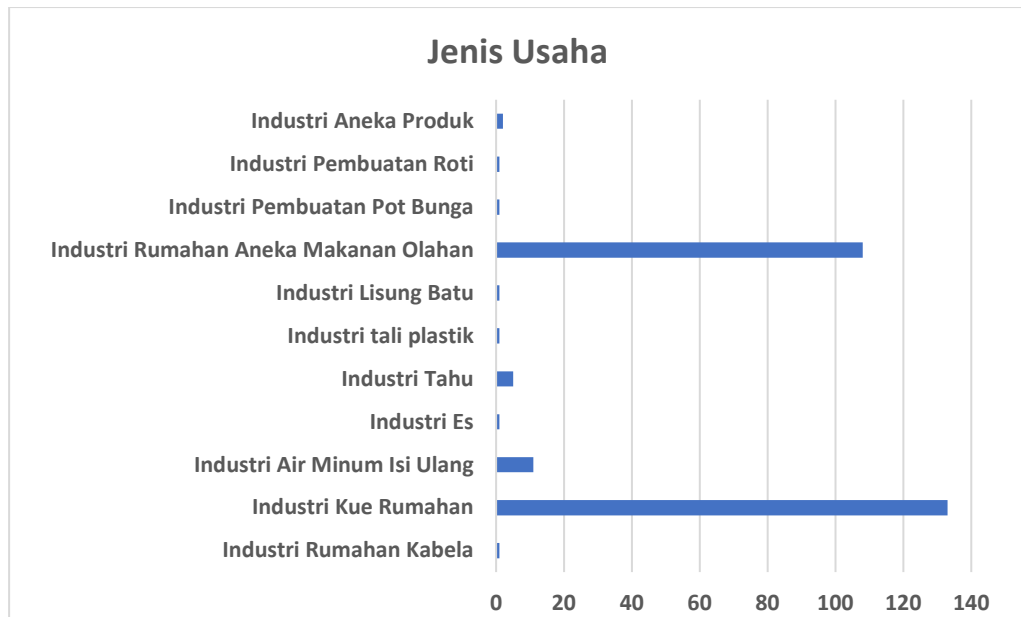
Sumber : Dokumen Pengkajian Pengelompokan dan Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Usaha IKM dan UKM



Berdasarkan jenis usaha, tampak bahwa untuk IKM paling dominan adalah industri kue rumahan diikuti oleh industri rumahan aneka makanan olahan.

Gambar 2.28
 Jumlah IKM di Kota kotamobagu Menurut Jenis Usaha Tahun 2016

Sumber :Dokumen Pengkajian Pengelompokkan dan Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Usaha IKM dan UKM

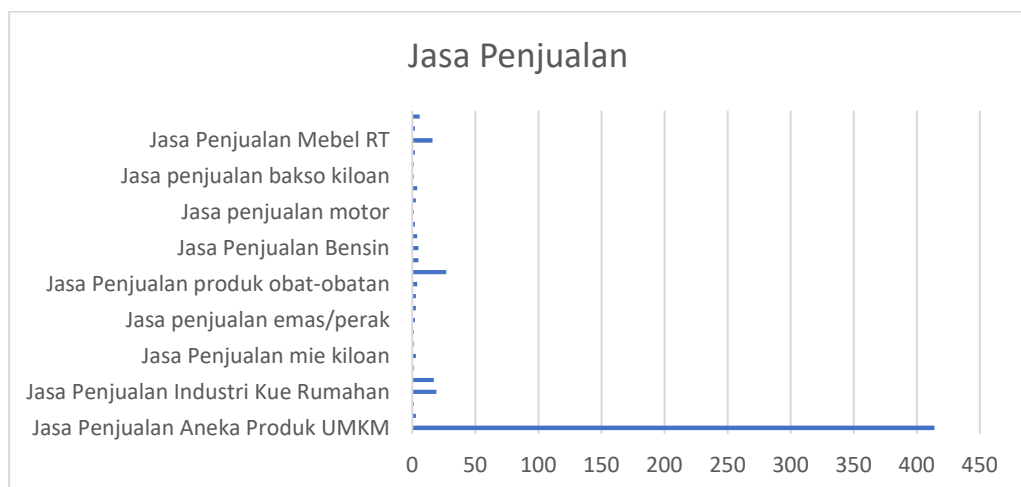


54% IKM yang beroperasi di Kota Kotamobagu terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur, hanya 9 % berada di Kecamatan Kotamobagu Selatan. Terdapat 11 (sebelas) jenis industri yang ada di Kota Kotamobagu yaitu industri aneka produk, industri pembuatan roti, industri pembuatan pot bunga, industri rumahan aneka makanan olahan, industri lisung batu, industri tali plastik, industri tahu, industri es, industri air minum isi ulang, industri kue rumahan dan industri rumahan kabel.

Untuk UKM dengan jasa penjualan terbanyak di Kecamatan Kotamobagu Timur mencapai 47 % dan hanya sebesar 7 % yang terdapat di Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Gambar 2.29
 Jumlah UKM Jasa Penjualan di Kota kotamobagu Tahun 2016

Sumber :Dokumen Pengkajian Pengelompokkan dan Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Usaha IKM dan UKM



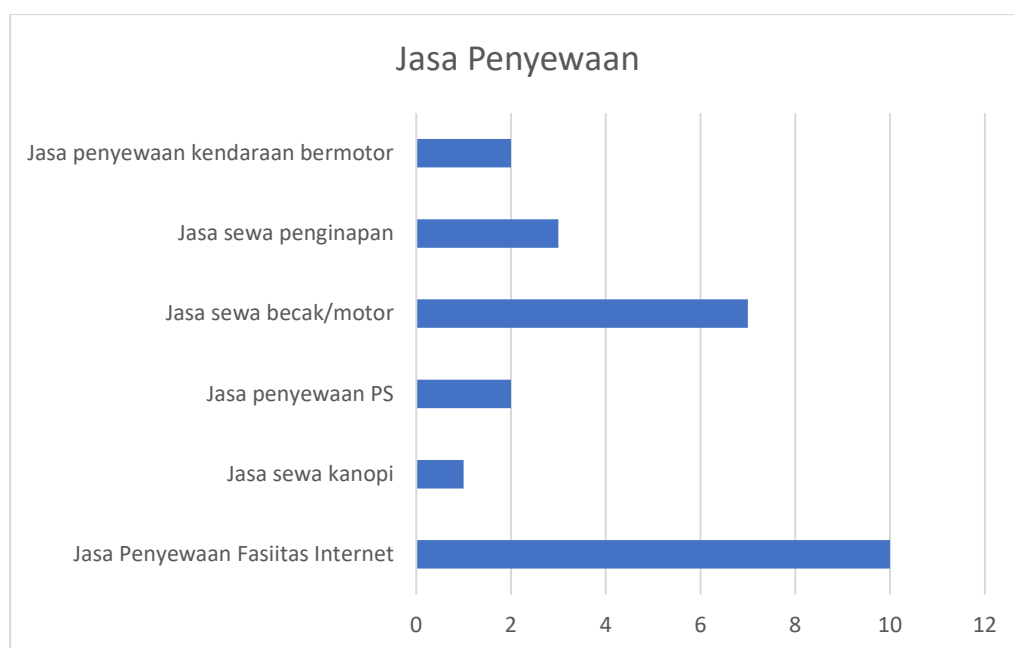
Data tahun 2016 menunjukkan untuk jasa penjualan di dominasi oleh jasa penjualan aneka produk UMKM, diikuti oleh jasa penjualan industri kue rumahan dan makanan olahan.

Selanjutnya untuk UKM jasa penyewaan lebih beragam, 6 (enam) jenis jasa penyewaan yang menonjol di Kota Kotamobagu berdasarkan jumlahnya terdiri atas jasa penyewaan fasilitas internet yang paling banyak. Diikuti oleh jasa sewa becak/motor dan paling sedikit adalah jasa penyewaan kanopi.

Gambar 2.30

Jumlah UKM Jasa Penyewaan di Kota kotamobagu Tahun 2016

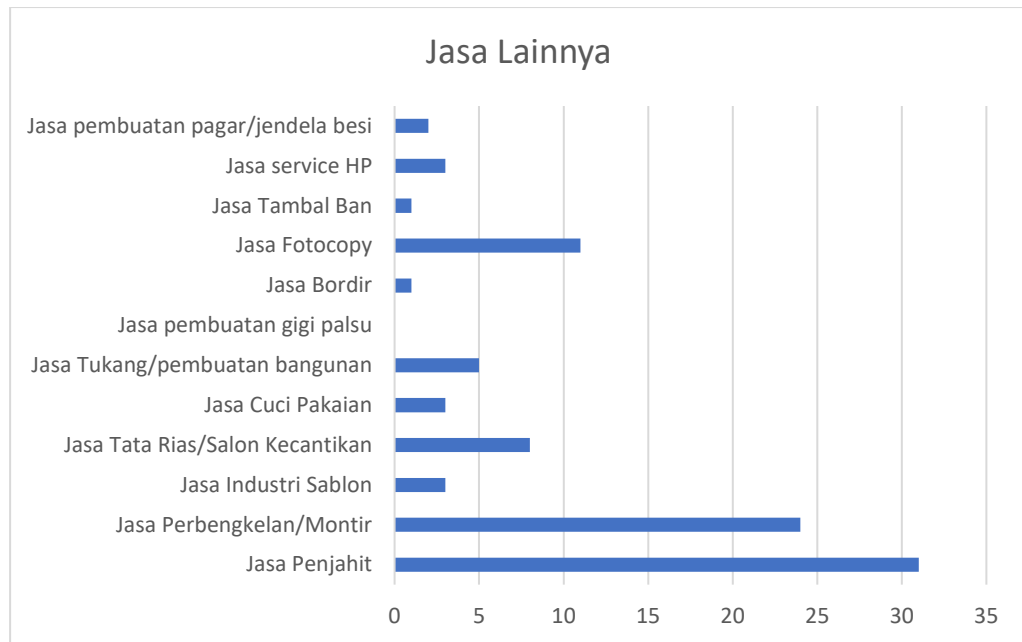
Sumber : Dokumen Pengkajian Pengelompokkan dan Pengembangan Ekonomi Berdasarkan Usaha IKM dan UKM



Selanjutnya terdapat UKM dengan usaha jasa lainnya, yang terdiri atas jasa pembuatan pagar/jendela besi, jasa service hp, jasa tambal ban, jasa fotocopy, jasa border, jasa pembuatan gigi palsu, jasa tukang bangunan, jasa cuci pakaian, jasa tata rias atau salon kecantikan, dan jasa industry sablon. Ternyata yang paling banyak adalah Jasa penjahit dan jasa perbengkelan/montir.

Gambar 2.31
 Jumlah UKM Jasa
 Lainnya di Kota
 kotamobagu Tahun
 2016

*Sumber: Dokumen
 Pengkajian
 Pengelompokan dan
 Pengembangan
 Ekonomi Berdasarkan
 Usaha IKM dan UKM*



Kebutuhan dalam pengembangan kawasan industri Pemerintah Kota Kotamobagu perlu untuk dilakukan oleh karena dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Strategi untuk mencapai tujuan menjadi wilayah produktif adalah membangun prasarana, mempromosikan kerja sama dan meningkatkan partisipasi publik. Prasarana wilayah, yang terdiri dari jalan, listrik, adalah satu paket kebutuhan yang mutlak untuk membangun wilayah produktif. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam hal ini transportasi, energi, komunikasi dan informasi. ini adalah untuk memudahkan kerja sama dan pertukaran barang dan jasa antar wilayah, dan untuk memberikan akses yang merata terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah. Untuk menjadikan kota kotamobagu menjadi wilayah yang produktif. Berikut ini adalah rasio luas wilayah industry di Kota Kotamobagu dan luas seluruh wilayah budidaya.

Tabel 2.27
Rasio Luas Wilayah Industri

Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034

No	Uraian	Luas
1	Luas Wilayah Industri	10
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.898
3	Rasio (1./2.)	0,002

2.3.2.10 Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.28
Jumlah Investor Kota Kotamobagu Tahun 2018

Sumber: Dinas Penanaman Modan dan PTSP

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2018	Jumlah Investor	439	-	439
2017	Jumlah Investor	495	-	495
2016	Jumlah Investor	621	-	621
2015	Jumlah Investor	507	-	507
2014	Jumlah Investor	353	-	353
TOTAL				2.425

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.29
Jumlah Investasi Kota
kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Penanaman Modan
dan PTSP

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2018	439 Paket	703.533.796.097	439 Paket	703.533.796.097
2017	495 Paket	343.824.903.652	495 Paket	343.824.903.652
2016	621 Paket	607.855.720.216	621 Paket	607.855.720.216
2015	102 Paket	219.822.789.542	507 Paket	2.178.955.985.023
2014	353 Paket	94.417.859.786	353 Paket	94.417.859.786
Total Nilai Investasi				3.928.588.264.774

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

2.3.2.11 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang lebih baik, perlu ditekankan akan pentingnya peran

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu dalam pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK harus dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah khususnya perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan memenuhi tuntutan dalam rangka memberikan pelayanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Khususnya untuk Kota Kotamobagu saat ini menghadapi tantangan, diantaranya adalah (a) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan data statistik sektoral dan persandian. (b) Masih rendahnya SDM dibidang teknologi informasi dalam mendukung program *smart city* statistik dan persandian. (c) Belum optimalnya infrastruktur, pemanfaatan dan sistem jaringan informasi yang terintegrasi. (d) Masih minimnya tingkat keamanan informasi dan pemanfaatan peralatan sandi. (e) Belum adanya standarisasi peralatan TIK.

Pada tabel dibawah ini menggambarkan cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik di Kota Kotamobagu selang tahun 2013 hingga tahun 2018.

Tabel 2.30
Persentase Cakupan
Layanan Informasi
Kota kotamobagu

Sumber: Dinas
Kominfo Kota
Kotamobagu, 2018.

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (%)	2.94	2.94	14.7	14.7	9.30	13.95

Untuk urusan Statistik Pemerintah Kota Kota kotamobagu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kotamobagu untuk menyusun buku PDRB Kota

Kotamobagu dan Informasi Data Pokok Kotamobagu sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Kotamobagu Dalam Angka.

Tabel 2.31
Ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Kotamobagu

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

No	Dokumen	2016	2017	2018
1	PDRB Kota Kotamobagu	Ada	Ada	Ada
2	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada
3	Kota Kotamobagu Dalam Angka	Ada	Ada	ada

2.3.2.12 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang bakuguna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarkan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Pemerintah Kota Kotamobagu sampai saat ini tahun 2018 memiliki 33 unit perpustakaan yang tersebar diseluruh kecamatan yakni kecamatan kotamobagu utara, kotamobagu timur, kotamobagu selatan dan kotamobagu barat. Selain itu minat baca masyarakat di Kota Kotamobagu tergolong rendah dilihat dari data pertahun yang dihimpun, dimana pada tahun 2013 jumlah kunjungan mencapai 416 orang dan terus meningkat dari tahun ketahun hingga tahun 2018 mencapai 1.500 orang yang berkunjung keperpustakaan.

Tabel 2.32
Jumlah Perpustakaan
dan Jumlah
Kunjungan ke
Perpustakaan di Kota
kotamobagu

Sumber : Kearsipan
dan Perpustakaan,
2018.

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perpustakaan (Unit)	33	33	33	33	33	33
Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan daerah (Orang)	416	434	737	1130	1679	1500

2.3.2.13 Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik.

Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif yang sangat berguna dimasa yang akan datang. Untuk pemerintah kota kotamobagu sampai dengan tahun 2018 cakupan untuk kelestarian arsip daerah sudah mencapai 85%. Berikut uraian data dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 2.33
Cakupan Kelestarian
Arsip Daerah di Kota
Kotamobagu

Sumber: Kearsipan dan
Perpustakaan, 2018.

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan kelestarian arsip daerah (%)	10	20	50	80	85

2.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan

2.3.3.1 Pertanian dan Perikanan

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pertanian, peternakan dan perikanan perlu membangun keselarasan antar sektor. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlindungan dan pemberdayaan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemantapan ketahanan pangan maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Tentunya sumber daya manusia dan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan dalam pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tabel dibawah ini digambarkan produksi komoditi pertanian dan perikanan di Kota Kotamobagu selang tahun 2013 sampai 2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	58,5	40	67,39	75,6	11,82	2,1
cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	1.7	1.9	2.12	2.34	2.5	3,015
cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	3.838	4.095	4.753	5.907	10.374	19.134
cakupan jumlah	550	580	605	700	725	761

Tabel 2.34
Produksi Komoditi
Pertanian dan
Perikanan di Kota
kotamobagu Tahun
2018

Sumber : Dinas
Pertanian dan Perikanan
Kota Kotamobagu

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
produksi kakao (Ton)						
cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	10.8	15.4	19.7	24.5	29.8	76,6
cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	60	61.5	63	64.5	66	111,6
cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	825	825	825	825	900	937
cakupan jumlah produksi kemiri (Ton)	6	6	7	8	9	10,25
cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	64	70	90	100	120	215
cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	2.8	3.2	3.5	3.9	4.8	39,4
cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	21.502	39.572	27.486	24.523	30.821	24.475
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	463,7	496	526,4	677	733,8	754

2.3.3.2 Pariwisata

Destinasi pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan kepariwisataan. Destinasi pariwisata terbentuk dari konstruksi ruang, sosial, budaya, lingkungan, dan sumber daya pariwisata yang saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka menciptakan pengalaman pariwisata. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih

wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dalam analisis kepariwisataan Kota Kotamobagu dapat dipilah mana yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) di Kotamobagu, Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu (KSPK) serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK).

1. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi di Kota Kotamobagu

Berdasarkan analisis kebijakan pariwisata provinsi yang tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara memuat kebijakan yaitu: (a). meningkatkan perlengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata; (b) Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata; (c) Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataan; dan (d) Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Inti dari kebijakan pariwisata provinsi Sulawesi Utara antara lain: Perlengkapan sarana prasana pariwisata, Pembentukan koridor pariwisata dan Pemasaran pariwisata. Berikut ini daftar nama tempat wisata Provinsi yang ada di Kota Kotamobagu

Tabel 2.35
Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi
Sulawesi Utara

Sumber: Dokumen
Rencana Induk
Pariwisata Provinsi
Tahun 2017

No	KETERANGAN	LOKASI	JLN ART ERI	JLN KOL EKT	JLN LOK AL	AIR BER SIH	PA RK IR	TO ILE T	JAR TEL P	LIS TRI K	SEL LUL ER	AKO M REST O
1	Air Terjun Molipungan	Kota Kotamobagu	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
2	Hutan Kota Bonawang	Kota Kotamobagu	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

No	KETERANGAN	LOKASI	JLN ARTERI	JLN KOLEKT	JLN LOKAL	AIR BERSIH	PARKIR	TOL	JAR TELP	LIS TRIK	SELULER	AKOM RESTO
3	Air Terjun Boliagonan	Kota Kotamobagu	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-

2. Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu

Obyek wisata yang ada di Kota Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi. Obyek pariwisata tersebut selain dikunjungi oleh wisatawan domestik juga dikunjungi oleh wisatawan asing. Selanjutnya kawasan pengembangan masing-masing jenis wisata yang ada di Kota Kotamobagu antara lain:

Tabel 2.36
Kawasan Strategis
Pariwisata Kota
Kotamobagu

Sumber: Dinas
Kebudayaan dan
pariwisata

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Air Terjun Molipungan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Kobo Kecil	Alam
2	Air Terjun Mongkonai	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Alam
3	Air Terjun Boliangonan	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
4	Air Terjun Mobuya	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
5	Air Panas Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
6	Air Batu Putih	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
7	Kawasan Batu Putih Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
8	Gunung Sia	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Sia	Alam

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
9	Hutan Kota Bonawang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Buatan
10	Taman Kota	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
11	Kolam Renang Artabanyu	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kobo Besar	Buatan
12	Kolam Renang Tirta Kencana	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Buatan
13	Kawasan Gelora Ambang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
14	Perkebunan Sibatuon Mobalang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Buatan
15	Rumah Adat Bobakidan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
16	Patung Bogani	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
17	Makam Raja Datu Cornelis Manoppo	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Matali	Budaya
18	Makam Raja Datu Binangkang	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Poyowa Besar I	Budaya
19	Makam Raja Abo' Tadohe'	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Upai	Budaya
20	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Molinow	Budaya
21	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Kopandakan I	Budaya
22	Masjid Tertua "Al-Huda"	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Kopandakan I	Budaya dan Religi

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
23	Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM)	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Budaya dan Religi
24	Klenteng Tian Shan Sheng Mu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Budaya dan Religi
25	Pura Jagatnata Kotamobagu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Budaya dan Religi

Dalam upaya meningkatkan pariwisata Kota Kotamobagu maka aktivitas diarahkan pada pengembangan pemasaran, penataan wilayah, jalan dan jembatan, serta kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian upaya yang dilakukan dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemasaran untuk wisatawan domestik maupun wisatawan asing masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan sarana prasarana, fasilitas penunjang lainnya serta peningkatan pemasaran, baik dalam pasar domestik maupun pasar luar negeri. Sektor kepariwisataan perlu dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Obyek-obyek wisata yang sudah ada dipertahankan dan dikelola sebaik-baiknya, serta perlu adanya perluasan untuk kawasan wisata alam. Sementara itu, untuk kawasan wisata budaya/sejarah agar tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Kota Kotamobagu.

Daya tarik lain yang terdapat di Kota Kotamobagu adalah berupa kesenian daerah Bolaang Mongondow dan penetapan desa wisata yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kota Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Tari Kabela	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
2	Tari Tuitan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian

Sumber: Dokumen RIPPDA Kota Kotamobagu

Tabel 2.37
Obyek dan Daya Tarik
Wisata di Kota
Kotamobagu

Sumber: Dokumen
RIPPDA Kota
Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
3	Tari Motobatu Molintak Kon Totabuan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
4	Tari Mogama	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
5	Tari Rambabo	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
6	Tari Ronggo	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
7	Tari Joke	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
8	Tari Kalibombang	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
9	Tari Mocosambe	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
10	Tari Monugal	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
11	Odenon	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
12	Pinsikan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisioanl
13	Langkadan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisioanl
14	Mokalar	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisioanl
15	Salamat	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
16	Bintang Vokalia/lagu Adat	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
17	Tari Mokoyut	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Inovasi Kesenian
18	Karnaval Budaya Tionghoa	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
19	Kerajinan Kabela	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian/Ce ndera Mata
20	Kerajinan Rotan, Ijuk, Bambu, Semen	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Biga	Keterampilan
21	Festival 'Binarundak'	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Motoboi Besar	Kuliner
22	Produksi Kue Kolombeng Selai	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Poyowa Besar	Kudapan Khas

Tabel 2.37
Obyek dan Daya Tarik
Wisata di Kota
Kotamobagu

Sumber: Dokumen
RIPPDA Kota
Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
23	Produksi Kacang Goyang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Motobo Kecil	Kudapan Khas
24	Produksi Gula Aren	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Moyag	Kudapan Khas
25	Produksi Kopi Lokal "Dinodok"	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Minuman Khas

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota

Tujuan adanya pembangunan pariwisata di Kota Kotamobagu adalah untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu dengan adanya potensi daya tarik objek wisata yang dimiliki, maka pemerintah Kota Kotamobagu harus memiliki strategi dalam pengembangan produk wisatanya. Program pengembangan produk pariwisata Kota Kotamobagu terutama dalam hal pengembangan Destinasi Wisata baru, Sarana prasarana objek wisata pembentukan pasar wisata serta adanya proses penciptaan kerajinan/souvenir khas Kota Kotamobagu.

Berikut ini adalah beberapa konsep pengembangan produk wisata di wilayah perencanaan secara keseluruhan: (a) Pengembangan wisata alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (b) Pembentukan pasar wisata/kerajinan/oleh-oleh khas Kota Kotamobagu; (c) Pelestarian adat/budaya wilayah perencanaan dari generasi ke generasi yang merupakan daya tarik wisatawan.

Selain itu diperlukan lagi pengembangan Fasilitas dan utilitas penunjang pariwisata, pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata, konsep pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan pengembangan kepariwisataan berdasarkan kemitraan.

4. Fasilitas Pendukung Pariwisata Ketersediaan Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.38
Jumlah Restoran dan
Rumah Makan di Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
Kotamobagu

Tahun	Restoran	Rumah Makan
2014	3	12
2015	3	12
2016	5	15
2017	5	15
2018	7	22

5. Fasilitas Pendukung Pariwisata Ketersediaan Penginapan

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas

lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.39
Jumlah Penginapan di
Kota kotamobagu
Tahun 2018

Sumber: Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

Jenis Hotel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bintang 5	-	-	-	-	-	-
Bintang 4	-	-	-	1	1	1
Bintang 3	-	-	-	-	-	-
Bintang 2	-	-	-	-	-	-
Bintang 1	2	2	2	1	1	1
Melati	16	16	16	20	19	19
Jumlah	18	18	18	22	21	21

2.3.3.3 Perdagangan

Sektor perdagangan memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor seperti pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Berikut data infrastruktur pasar kota kotamobagu:

Tabel 2.40
Informasi Pasar

Sumber: Perdagangan
Koperasi dan UKM
Kota kotamobagu

No.	LOKASI PASAR	POTENSI	TOTAL	KETERANGAN
1	Pasar 23 maret	ruko	60	
		kios	84	
		lapak	101	
		pedagang kaki lima	96	
		kios semi permanen	10	
2	Pasar Poyowa	kios	170	
		lapak	50	

No.	LOKASI PASAR	POTENSI	TOTAL	KETERANGAN
3	Pasar Serasi	kios	20	
		kios semi permanen	235	
		lapak kayu	183	
		pedagang kaki lima	157	
4	Pasar Genggulang	Kios	105	
5	Pasar Ikan	Kios	33	
		Lapak	52	
6	Pasar Jajan	Pedagang kaki lima	45	
7	Pasar buah	Pedagang buah	8	

2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja Perangkat Daerah, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Tabel 2.41
Penjabaran Program
RPJMD kedalam RKPD

Sumber:
Bappelitbangda
Kotamobagu

Tahun	2016	2017	2018
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	87,85	80,85	61,82

2.3.4.2 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.3.4.2.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota

Kotamobagu telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.42
Penilaian Evaluasi SAKIP

Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kotamobagu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	B	ON PROGRES
2	Nilai Evaluasi SAKIP	33	56.30	63.40	65.10	ON PROGRES

2.3.4.2.2 Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mengurangi jumlah tindak lanjut temuan. Tabel 2.36 menunjukkan jumlah tindak lanjut temuan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal telah sesuai ketentuan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.43
Jumlah Tindak Lanjut Temuan

Sumber : Inspektorat Kotamobagu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase tindak lanjut temuan	56,13	86,37	88,35	90,06	89,60
2	Jumlah temuan BPK	24	24	18	6	ON PROGRES

2.3.4.2.3 Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel 2.37 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel 2.44
Data Kapasitas Dan
Kompetensi Aparatur

Sumber : BKPP
Kotamobagu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	-
2	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,35	1,88	1,64	1,80	2,62
3	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	32	35	36	33	33
4	jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	29	29	29	35	35
5	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.104	1.121	1.101	1.109	1.006
6	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.698	1.688	1.626	1.184	1.209

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

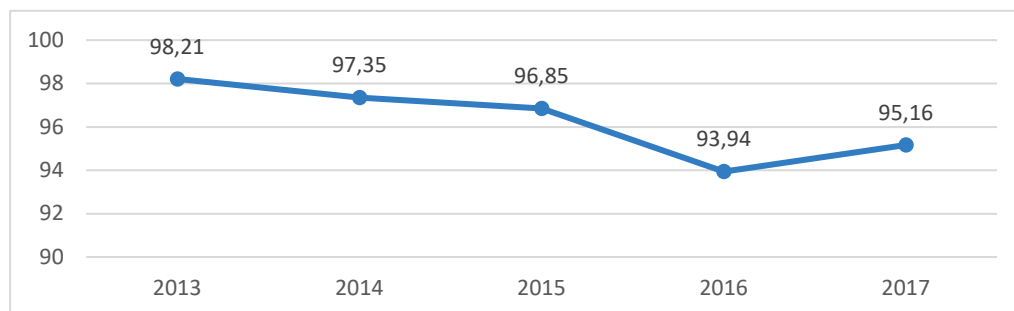
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Nilai Tukar Petani

Dapat diikuti bahwa nilai tukar petani berada pada posisi masih dibawah 100 terlihat bahwa pada tahun 2016 mengalami penurunan berada pada posisi 93,94 naik menjadi 95,16 pada tahun 2017 dan tampaknya fluktuasinya sangat kecil. Indikator nilai tukar petani menjadi penting mengingat penduduk Kota Kotamobagu masih memiliki petani yang cukup besar. Lahan pertanian mereka tidak terbatas di wilayah Kota Kotamobagu, tetapi juga di daerah sekitar.

Gambar 2.32
Nilai Tukar Petani
Provinsi Sulawesi
Utara

Sumber: Kota
Kotamobagu Dalam
Angka 2018



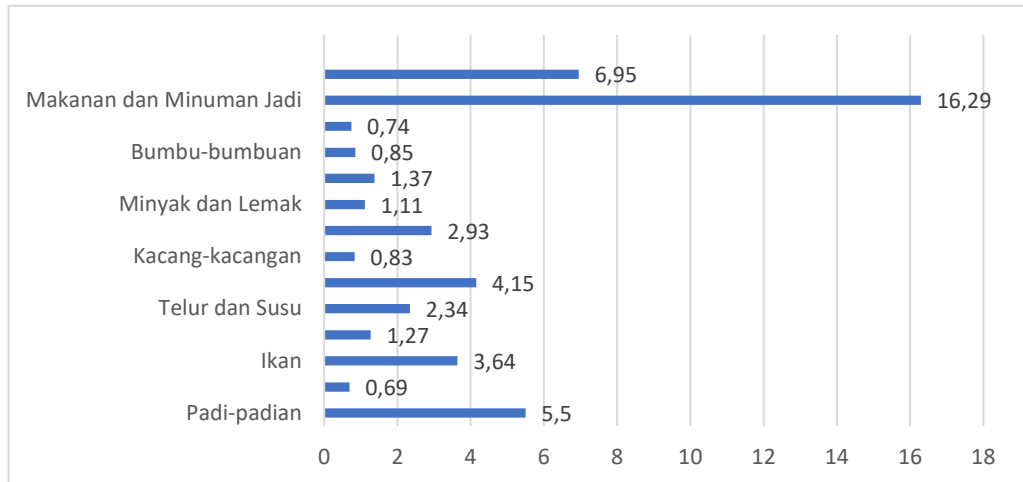
2. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran koansumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Gambar 2.33

Persentase
Pengeluaran
Perkapita Per Bulan
Menurut Kelompok
Makanan di Kota
Kotamobagu

Sumber : Kota
Kotamobagu Dalam
Angka 2018



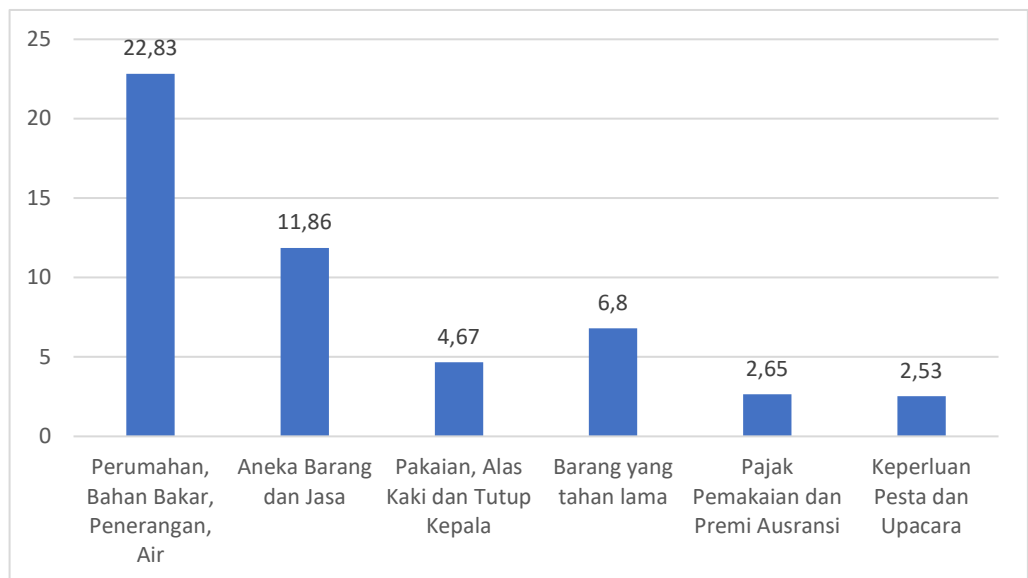
Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga melalui data pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Gambar 2.34

Persentase Rata-rata
Pengeluaran
Perkapita Per Bulan
Menurut Kelompok
Non Makanan di Kota
Kotamobagu

Sumber : Kota
Kotamobagu Dalam
Angka 2018



2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1. Ketaatan terhadap RTRW

Tabel 2.45
Rasio Ketaatan RTRW
di Kota Kotamobagu

Sumber: Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi RTRW	95	95	95	95	95
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1./2.)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

2. Luas Wilayah Produktif

Strategi untuk mencapai tujuan menjadi wilayah produktif adalah membangun prasarana, mempromosikan kerja sama dan meningkatkan partisipasi publik. Prasarana wilayah, yang terdiri dari jalan, listrik, adalah satu paket kebutuhan yang mutlak untuk membangun wilayah produktif. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam hal ini transportasi, energi, komunikasi dan informasi. ini adalah untuk memudahkan kerja sama dan pertukaran barang dan jasa antar wilayah, dan untuk memberikan akses yang merata terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah. Untuk menjadikan kota kotamobagu menjadi wilayah yang produktif. sehingga pemerintah kota kotamobagu perlu melakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, atau perikanan darat berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM yang ada di Kota Kotamobagu, sehingga membentuk klaster industri berbasis sumber daya alam lokal.
- b. Mendorong tumbuhnya industri baru yang tidak bergantung pada lokasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam lingkungan yang alami dan nyaman.

- c. Mengelola lingkungan alami di perkotaan, yang dapat berupa hutan kota, serta menyediakan fasilitas yang menarik untuk sarana rekreasi bagi penghuni kota yang produktif serta wisatawan lokal.
- d. Menghubungkan kawasan wisata dengan jaringan pariwisata provinsi dan nasional, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kotamobagu.
- e. Meningkatkan fasilitas untuk riset, pengembangan teknologi, peningkatan keterampilan dan perilaku pekerja, dan mendorong kerjasama yang erat antar industri, pemerintah dan lembaga pendidikan.

Kawasan budidaya meliputi kawasan permukiman, perdagangan, sawah, kebun, resapan air, dan kawasan untuk prasarana dan sarana wilayah. Daya tampung atau ketersediaan ruang pada dasarnya diukur berdasarkan kemampuan penyediaan ruang untuk kegiatan budidaya. Ruang kegiatan budidaya adalah ruang yang disediakan bukan untuk kawasan lindung. Namun demikian didalam ruang budidaya terdapat ruang-ruang hijau seperti RTH. Ruang fungsi lindung di Kota Kotamobagu adalah seluas 912 Ha, Atau sebesar 13.38 % terhadap keseluruhan luas wilayah kota. Sehingga daya tampung global untuk fungsi budidaya adalah 5.898 Ha atau 86.62 % dari total luas kota.

Tabel 2.45
Rasio Luas Wilayah Produktif/Non Produktif di Kota Kotamobagu

Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034

Kawasan	Luas (Ha)	(%)
Budidaya	5.898	86.62
Non Budidaya (Kawasan Lindung)	912	13.38
Total	6.809	100 %

Salah satu pendekatan dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan mengembangkan industri. Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom yang mengusung kota jasa, perlu untuk melihat prospek pengembangan Industri, guna untuk menjadikan Kota Kotamobagu yang

lebih berdaya saing, adapun kondisi existing luas wilayah industri kota kotamobagu terhadap luas wilayah budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.40

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa memang pengembangan industri masih harus lebih dikembangkan, hal ini dapat dilihat bahwa luas wilayah pengembangan industri di kota Kotamobagu masih tergolong sangat kurang hanya sebesar 0,002 dari total luas wilayah budidaya.

Tabel 2.47
Rasio Luas industry
dan wilayah budidaya
di Kota Kotamobagu

Sumber: Perda RTRW
Kota Kotamobagu
Tahun 2014-2034

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Industri	10
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.898
3.	Rasio (1./2.)	0,002

3. Luas Wilayah Perkotaan

Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat terus berkembang dengan semakin kompleksnya kegiatan-kegiatan dalam kota, kota tidak lagi mempunyai fungsi tunggal (*single use*-pemenuhan kebutuhan masyarakat kota) namun memiliki kecenderungan multi fungsi (*mixed use*) dengan fungsi kegiatan yang berorientasi pada kepentingan pasar (wilayah) dan kepentingan publik. Sehingga kota dapat diartikan sebagai suatu lokasi dengan konsentrasi penduduk/permukiman, kegiatan sosial ekonomi yang heterogen dan intensif (bukan ekstraktif atau pertanian), pemusatan, koleksi dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan sosial ekonomi yang ditetapkan secara administratif. Jika kota adalah suatu wilayah yang ditetapkan secara administratif, perkotaan tidak terbatas pada penetapan administratif, namun berdasarkan ciri-ciri perkotaan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Kawasan perkotaan menurut undang-undang penataan ruang adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kota Kotamobagu dikategorikan sebagai kota kecil yang merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah perkotaan yakni sebesar 1.206 Hektar dan luas wilayah budidaya sebesar 5.898 Hektar atau dengan perbandingan rasio yakni 0.20. Berikut ini menunjukkan bahwa luas wilayah perkotaan lebih kecil dari luas wilayah budidaya.

Tabel 2.48

Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kota Kotamobagu

Sumber: Perda RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Perkotaan	1.206
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.898
3.	Rasio (1./2.)	0,20

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.49

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kota Kotamobagu

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	2015		2016		2017	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Kotamobagu Selatan	172	149	207	152	232	168
2	Kotamobagu Timur	223	167	253	171	287	177
3	Kotamobagu Barat	251	171	286	183	301	189
4	Kotamobagu Utara	163	114	188	109	109	124
	Kota Kotamobagu	809	601	934	615	929	658

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan

protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Tabel 2.50
Jumlah Demonstrasi
Kota Kotamobagu

Sumber:
BANKESBANGPOL Kota
Kotamobagu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	8	3	2	4	2
2	Ekonomi	5	3	1	-	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	13	6	3	4	6

Dilihat dari jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Kotamobagu yang harus menjadi perhatian selain jumlah keluarga miskin adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 241 orang.

Tabel 2.51
Jumlah penyandang
masalah social Kota
Kotamobagu

Sumber: DINAS SOSIAL
Kota Kotamobagu

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	38 Orang
2	Anak Terlantar	38 Orang
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	8 Orang
4	Anank Jalanan	3 Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	80 Orang
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	6 Orang
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	241 Orang
8	Korban Tindak Kekerasan	7 Orang
9	Lanjut Usia Terlantar	276 Orang
10	Penyandang Disabilitas	345 Orang
11	Tuna Susila	4 Orang
12	Pengemis	-
13	Gelandangan	-
14	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasarakatan	95 Orang
15	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	8 Orang
16	Keluarga Fakir Miskin	3040 Jiwa
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
18	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
19	Komonitas Adat Terpencil	-

No	Jenis PMKS	Jumlah
20	Korban Bencana Alam	50 Orang
21	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi	15 Orang
22	Pekerja Migran Terlantar	-
23	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	174 Orang
24	Keluarga Rentan	146 Orang / KK
25	Kelompok Minoritas	40 Jiwa
26	Korban Traficking	-

2.4.3.2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain seperti pada tabel 2.45

Tabel 2.52
Jenis izin, waktu
pengurusan, jumlah
persyaratan dan biaya
Kota Kotamobagu
Tahun 2018

Sumber : Dinas PM dan
PTSP Kota
Kotamobagu

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
2.	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
3.	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
4.	IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
5.	IZIN LOKASI (ILOK)	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
6.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
7.	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
8.	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
9.	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya
10.	IZIN RUMAH MAKAN (IRM)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
11.	SURAT IZIN REKLAME (SIR)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
12.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	35 Menit	16	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
13.	IZIN TRAYEK	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
14.	IZIN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
15.	IZIN USAHA PERIKANAN	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
16.	SURAT IZIN REKLAME KENDARAAN (SIRK)	35 Menit	3	Tidak Ada Biaya
17.	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGARAKAN OLEH MASYARAKAT (ISPNF)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
18.	TANDA DAFTAR USAHA PARAWISATA (TDUP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
19.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
20.	SURAT RESI GUDANG (SRG)	35 Menit	13	Tidak Ada Biaya
21.	IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
22.	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN SWASTA/LEMBAGA PELATIHAN KERJA (ILPK)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
23.	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
24.	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
25.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU SUMBER AIR (MEDIA LINGKUNGAN) (IPAL)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
26.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK (IPALD)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
27.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLAAN KEDELAI (IPALUK)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
28.	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
29.	IZIN LINGKUNGAN UKL/UPL (ILH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
30.	IZIN LINGKUNGAN AMDAL (AMD LH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
31.	IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI (SIP)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
32.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA APOTEKER (SIPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
33.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA BIDAN (SIPB)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
34.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP/SIKP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
35.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA PERAWAT GIGI (SIPPG/SIKPG)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
36.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENANGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
37.	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
38.	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
39.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA FISIOTERAPIS (SIPF/SIKF)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
40.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA OKUPASI TERAPIS (SIPTW/SIKOT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
41.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TERAPIS WICARA (SIPTW/SIKTW)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
42.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA RADIOGRAFER (SIKR)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
43.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA ORTOSIS PROSTESIS (SIPOP/SIKOP)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
44.	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
45.	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
46.	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
47.	SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIPPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
48.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENAGA GIZI (SIPTGz/SIKTGz)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
49.	SERTIFIKAT/REKOMENDASI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
50.	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAHSAKIT (IORS)	35 Menit	15	Tidak Ada Biaya
51.	SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK (SIOK)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
52.	SURAT IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
53.	SURAT IZIN OPERASIONAL APOTEK (SIA)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
54.	SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK (SIO)	35 Menit	12	Tidak Ada Biaya
55.	SURAT IZIN OPERASIONAL TOKO OBAT (SITO)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya

2.4.3.3. Pengeanaan Pajak Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Tabel 2.53

Jumlah dan macam Insentif pajak dan Retribusi Daerah (milyar rupiah) Kota Kotamobagu

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kota Kotamobagu
*unaudited

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Pajak yang dimasukkan	2.112	2.929	4.804	15.809	21.800	13.600
2.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	2.125	1.927	4.047	6.030	27.380	41.779

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), dan Jumlah umur yang produktif Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.54
Jumlah Keompok Umur Menurut jenis kelamin Kota Kotamobagu

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	5,432	5,261	10,693
5-9	5,388	5,269	10,657
10-14	5,435	5,133	10,568
15-19	5,765	5,970	11,735
20-24	5,050	4,875	9,925
25-29	5,800	5,228	11,028
30-34	5,131	4,689	9,820
35-39	4,674	4,558	9,232
40-44	4,563	4,540	9,103
45-49	4,413	4,211	8,624
50-54	3,605	3,335	6,940
55-59	2,800	2,553	5,353
60-64	2,201	2,152	4,353
65+	2,818	3,023	5,841
Jumlah	63,075	60,797	123,872

Berdasarkan kelompok umur ternyata penduduk yang berusia 15-19 Tahun mendominasi diikuti yang berusia 25-29 Tahun dan 0-4 Tahun. Namun

Penduduk yang berusia 60-64 Tahun memiliki jumlah terendah dari komposisi penduduk yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.55

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTP Ke Bawah	20.843	5.728	26.571
SMTA	11.589	5.922	17.511
Diploma/Akademi/Universitas	4.222	5.183	9.405
Jumlah	36.654	16.833	53.487

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Tabel 2.56

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTP Ke Bawah	19.989	5.477	25.466
SMTA	10.611	5.057	15.718
Diploma/Akademi/Universitas	4.222	5.029	9.251
Jumlah	34.872	15.563	50.435

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Tabel. 2.57
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
Pertumbuhan Ekonomi	7,06	6,7	6,52	6,63	6,79	-	melampaui
Laju inflasi	8,12	9,67	5,56	0,36	2,44	3,83	melampaui
PDRB per kapita	16.860.770	18.602.160	20.557.460	22.240.000	34.310.000	-	melampaui
Indeks Pembangunan Manusia	69,86	70,46	70,7	71,68	72	-	melampaui
Angka Penduduk Miskin (%)	5,98	5,75	5,85	6,01	5,9	-	melampaui
Kesejahteraan Sosial							
Pendidikan							
Angka melek huruf	99,66	99,79	99,5	99,67	99,61	99,87	melampaui
Angka rata-rata lama sekolah	9,53	9,59	9,75	9,75	9,97	9,98	melampaui
Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah							
SD/MI	92,37	92,53	93,04	95,62	108	105,4	melampaui
SMP/MTS	72,51	72,57	74,87	81	83	80,07	melampaui
Angka partisipasi murni							
SD/MI	93,37	83,19	87,83	85,81	74,69	75,33	belum tercapai
SMP/MTS	59,70	80,42	79,82	74,77	81,97	71,77	melampaui
Angka partisipasi Kasar							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
SD/MI	104,52	95,98	102,53	101,38	87,87	88,04	belum tercapai
SMP/MTS	82,46	99,5	127,05	106,96	103,3	96,09	melampaui
PELAYANAN UMUM							
Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib							
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
Pendidikan							
Pendidikan dasar							
Angka partisipasi sekolah SD	100,00	98,27	117	94	83,87	86,42	melampaui
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	53,22	55,2	54,51	100	56,04	57,04	melampaui
Rasio terhadap murid	47,61	44,8	64,15	61,62	57	57,78	melampaui
Pendidikan menengah							
Angka partisipasi sekolah SMP	92,7	94,2	98,8	105,73	131,4	133,54	melampaui
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 526 (19,02)	1 : 492 (20,29)	26,34	18,94	21,33	1 : 415 (24.1)	melampaui
Kesehatan							
Rasio posyandu per satuan balita	2,57	5,11	4,33	14,11	3,93	5,48	melampaui
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	3,86	11,2	10,08	10,06	2,42	10,04	melampaui
Jumlah Dokter	23	24	14	26	43	110	melampaui
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	89,3	77	156	147	60,6	98	melampaui
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85	86	89	74	47	70	belum tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Cakupan Kelurahan UCI	81,82	67	42	66,67	55	60,6	belum tercapai
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	sesuai
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA	360	126	106	10	50	332	belum tercapai
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	155	68	224	91	45	120	melampaui
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien mayarakat miskin	65	39	82,5	85,68	40,9	73,3	belum tercapai
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5	5	5	5	12,7	5	belum tercapai
Cakupan kunjungan bayi	82	101	85	81,27	76	111	belum tercapai
Cakupan Puskesmas	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	5 PKM	sesuai
Cakupan Puskesmas Pembantu	7	7	7	7	7	7	sesuai
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)							
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	78,8	98	75	72	59,1	70,2	belum tercapai
Cakupan pelayanan nifas	86,8	91	83	80	58,5	74	belum tercapai
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	76	86	156	147	126	75,9	melampaui
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	12	100	75	95	100	100	melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	91,2	95	96	99	100	100	melampaui
Cakupan peserta KB aktif	58,1	86	45	75	39,6	23,8	belum tercapai
Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100	100	100	-	100	100	belum tercapai
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa siaga aktif	30	30	33	60	30	60	belum tercapai
INDIKATOR TAMBAHAN							
Cakupan jumlah kematian bayi	14	11	9	3	5	11	belum tercapai
Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	5	4	4	3	3	3	melampaui
Cakupan aplikasi sikda antara dinas , puskesmas dan IFK serta kementerian	0	0	4	4	5	1	belum tercapai
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP setingkat	100	100	100	100	100	100	melampaui
Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMA dan setingkat	100	100	100	100	100	100	melampaui
Cakupan pelaksanaan rakerkes	1	1	1	1	0	1	belum tercapai
Cakupan ketersediaan SOP dinas , PKM, dan IFK	20	20	20	20	20	20	sesuai
Cakupan jumlah peserta Jamkesda	2800	17836	0	4000	4000	4000	belum tercapai
Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	42,8	39	41	86	45,11	60,46	melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Cakupan pelayanan ASKES sosial (PNS)		51,28	69,78	71,7	75,3%	78,68	melampaui
Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)		27	62	68	15	1	belum tercapai
Jumlah penemuan kasus AIDS(kumulatif)		-	-	-	57	9	melampaui
Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular	100	100	100	100	100	100	sesuai
Pembangunan Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	sesuai
Jml Kematian bayi < 1 thn		11	9	3	13	12	belum tercapai
Jml Kelahiran Hidup bayi	99,23	99,45	99,55	99,84	1503	1796	melampaui
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	992,3	970	976	484	484	993	melampaui
Balita Gizi Buruk	5	0	4	3	4	3	melampaui
Pekerjaan Umum							
Cakupan persentase panjang jalan dalam kondisi baik	53,54	55	75	35	69,53	71,75	belum tercapai
Rasio Jumlah Jembatan yang direncanakan	0,07	0,064	0,051	0,13	0,17	1,02	sesuai
Rasio total panjang jalan dapat dilalui roda 4/luas wilayah	2,13	2,43	2,49	2,20	3,92	2,39	melampaui
Rasio Jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan	5,11	0,064	0,051	0,013	0,026	0,013	belum tercapai
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)							
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	50	70	80	87	100	100	melampaui
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat	41,80	0,2	5,54	1,77	85,00	192.286	melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (KM).							
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (Meter)	284,34	1350	900	590	267.994 km	192.286	melampaui
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (Meter)	284,33	1350	920	590	262000	192.286	melampaui
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (Meter)	223	33890	15480	22300	262000	192.286	melampaui
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	223	33890	15480	22300	262000	192.286	melampaui
PENATAAN RUANG							
Terciptanya Review RTRW	0	0	0	0	0	0	belum tercapai
Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1	1	tercapai
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)							
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	1	1	1	1	1	sesuai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	0	50	100	100	100	100	sesuai
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	0	0	0	1460	1467 izin	1918 izin	melampaui
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	580	750	367	484	714	193	belum tercapai
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.(%)	22,96	23,36	23,77	26,28 *	27,17	28,49	belum tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	6 Ha	4.48 Ha	5 Ha	2 Ha	2.58Ha	2,58 Ha	sesuai
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	5,39	3,75	3,60	3,92	2.34 Ha	0,29	belum tercapai
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	1	1	1	1	1	1	melampaui
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	0	1	1	1	1	1	melampaui
Terdatanya fasos fasum perumahan luas area yang diupdate datanya per luas seluruh fasos fasum	0	1	1	1	1	1	belum tercapai
cakupan luas kawasan ruang terbuka hijau	10	40	30	30	30	30	melampaui
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Cakupan Jumlah Gangguan Kanrantibmas yang Berhasil Ditangani (%)	60	85	90	90	85	80	belum tercapai
Cakupan Jumlah Potensi Konflik SARA	4	1	1	0	1	1	belum tercapai
Cakupan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam agenda	82	53	83	80	0	78,19	Belum tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
politik/pilkada/pileg/pilpres(%)							
SOSIAL							
Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4	3	2	3	2	2	belum tercapai
PMKS yang memperoleh bantuan sosial		443	550	388	477	90	belum tercapai
Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	99%	22%	27%	28	477	3	melampaui
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)							
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	1,6%	330	431	260	30	69	belum tercapai
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60	98	72	70	0	0	melampaui
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
TENAGA KERJA							
Cakupan tenaga kerja yang siap pakai (Orang)	71	145	55	109	95	25	belum tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Persentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk (%)	35	35%	35,3	35,3	40,4	42,2	melampaui
Tingkat Pengangguran (%)	9,02	10	9,02	9,02	8,4	6,1	melampaui
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Cakupan angka kekerasan terhadap anak (kasus)	0	0	100	100	100	100	sesuai
Persentase angka kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	0	0	100	100	100	100	sesuai
Cakupan Jumlah Kasus Travicking	0	0	0	0	100	100	sesuai
KETAHANAN PANGAN							
Regulasi Ketahan Pangan	0	0	2	1	3	3	melampaui
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)		130,896	158,871	211,323	211,323	237.121	belum tercapai
Ketersediaan pangan Energi (Kkal/kap/tahun)	2.227	2,245	2164	2,286	2,286	2.295	melampaui
Ketersediaan Pangan Protein (gram/kap/tahun)	57,27	55,77	65,56	67,04	67,04	69,03	melampaui
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	-	-	-	12	15	15	sesuai
Pemantauan Harga Pangan (Minggu)		52	52	52	52	52	sesuai
Rumah Pangan Lestari (Kelompok)		6	10	12	30	10	melampaui
PPH (Skor)		85,00	85,00	85,00	91,4	92,05	melampaui
PERTANAHAN							
Jumlah Pengembangan	0	0	1	1	0	0	belum tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Sistem Informasi Pertanahan							
Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0	0	85	85/Kec	0	0	melampaui
LINGKUNGAN HIDUP							
Persentase pengangkutan timbunan sampah	79,3 %	70,29%	74,05%	77,81%	67%	72,31%	belum tercapai
Persentase Penataan dan perawatan taman kota dan taman bermain	-	34,66%	37,16%	39,66%	48	35	melampaui
Persentase pengangkutan sampah rumah tangga	20%	43%	45,50%	48%	51%	53,00%	melampaui
Persentase Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	75%	86,38%	88,57%	93,93%	99,85%	98,10%	belum tercapai
Persentase Konservasi sumber daya alam	50%	99,86%	87,63%	96,01%	100%	100%	belum tercapai
Persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	22,2	0	96,31	98,91	0	100,00	belum tercapai
Persentase peningkatan capaian pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup	75	87,07	87,86	85,33	98,55	98	belum tercapai
KEPENDUDUKAN							
Cakupan angka laju pertumbuhan penduduk (%)	2,14	1,76	2,39	0,46	4,20	0,2	melampaui
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)							
Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	60	87	91	96	95	90	melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
dan Pencatatan Sipil							
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DAN DESA							
Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan (Rp)	1.650.000.000	2.125.763.000	5.741.710.400	4.587.000.000	3.704.823.500	4.252.600.000	melampaui
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA							
Persentase Keluarga Berencana	80	82,21	81,64	95	80	80	melampaui
Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	81	85	89	90	92	95	
Persentase pelayanan kontrasepsi	50	60	70	90	75	80	melampaui
Jumlah pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang terdiri 100 Kelompok	50	50	60	65	70	80	melampaui
Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	30	60		19	20	10	belum tercapai
Persentase promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	50	100	100	100	100	100	melampaui
Persentase pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	60	65	67	63,64	75	75	melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)							
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	50	82	85	85	82	100	melampaui
PERHUBUNGAN							
Rasio kenaikan pendapatan berbanding target PAD	1.088.485.000	988.881.000	1.423.472.371	1.159.838.200	915.703.400	1.706.861.000	belum tercapai
Rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan	745	1162	1322	1477	1746	1731	melampaui
Rasio jumlah kendaraan penumpang umum yg masuk terminal berbanding jumlah kendaraan penumpang	340	320	388	255	255	255	belum tercapai
Rasio jalan yang dikelola parkirnya berbanding jalan berpotensi parkir		7	7	7	6	6	belum tercapai
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (%)	60	80	80	90	80	90	belum tercapai
Cakupan jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informasi (Unit)	0	0	2	0	4	4	belum tercapai
KOPERASI dan UKM							
Jumlah koperasi yang aktif dan sehat	59	64	70	73	80	82	melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Jumlah Koperasi	207	204	206	278	195	102	melampaui
Jumlah usaha kecil dan menengah	300	400	476	1500	2750	3500	melampaui
PENANAMAN MODAL							
Cakupan nilai investasi (Rp,dalam Milyar)	60	94	2178	607	343	703	melampaui
KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA							
Cakupan jumlah organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam pemerintahan di kota kotamobagu (Organisasi)	11	15	15	15	17	24	melampaui
Cakupan jumlah prestasi cabang olah raga sampai tingkat nasional (cabang)	2	4	6	6	11	16	melampaui
KEBUDAYAAN							
Cakupan tata nilai budaya local hasil inovasi masyarakat (Jenis)	1	2	4	5	6	6	melampaui
Cakupan nilai budaya yang dilestarikan (jenis)	5	2	3	8	7	10	belum tercapai
PERPUSTAKAAN							
Jumlah Perpustakaan (Unit)	33	33	33	33	33	33	sesuai
Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan daerah (Orang)	416	434	737	1130	1679	1500	melampaui
KEARSIPAN							
Cakupan kelestarian arsip daerah (%)	0	0	0	80	80	85	belum tercapai
PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
KELAUTAN DAN PERIKANAN							

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	463,7	496	526,4	677	733,8	754	belum tercapai
PARIWISATA							
Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	31164	39090	39360	50057	50158	54158	melampaui
PERTANIAN							sesuai
cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	58,5	40	67,39	75,6	11,82	2,1	belum tercapai
cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	1,7	2,5	2,226	2,345	2,56	3,015	melampaui
cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	3.838	4.095	4.753	5.907	10.374	19.134,78	melampaui
cakupan jumlah produksi kakao (Ton)	550	65,25	635,25	763	756	761	belum tercapai
cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	10,8	16,35	20,69	70	42,99	766	melampaui
cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	60	402	66,15	13,41	21,75	111,6	melampaui
cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	825	845	866,25	730	927	937,00	melampaui
cakupan jumlah produksi kemiri (Ton)	6	6,5	7,35	8,1	10,21	10,25	melampaui
cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	64	70,15	94,5	101	123	215	melampaui
cakupan jumlah produksi nilam (Ton)	0	875,5	945	760	0	0	belum tercapai
cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	2,8	103,96	3,68	6,6	25,99	39,4	melampaui
cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	21.502,80	39.572,00	27.486,00	24.523,35	30.821,2	24.475,5	melampaui
PERDAGANGAN							
Kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan	8.39	9,21	14,62	14,34	14,42	0	melampaui

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
ekonomi kota kotamobagu (%)							
PENUNJANG URUSAN							
PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	0	0	0	ON PROGRES	ON PROGRES	belum tercapai
Tersediannya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	0	1	0	1	1	1	sesuai
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	2	2	2	2	2	melampaui
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	70	80	90	90	90	90	belum tercapai
KEUANGAN							
Cakupan kualitas opini pengelolaan keuangan daerah	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	ON PROGRES	melampaui
Cakupan peningkatan pendapatan asli daerah (Rp)	11.238.227.576	24.664.876.568	31.288.987.422	39.056.170.573	58.842.774.254	64.179.355.939.163	melampaui
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Cakupan tingkat profesionalisme aparatur pemerintah daerah berdasarkan jabatan (%)	60	80	80	85	97	94	melampaui
PENGAWASAN							
Cakupan presentase tindak lanjut LHP (%)	68	75	86,37	88,38	86,18	89,6	belum tercapai

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 . Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Kotamobagu terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah masa lalu merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan daerah di masa depan. Keuangan daerah ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam waktu lima tahun terakhir. Dari informasi tersebut bisa didapatkan trend pertumbuhan dan perkembangan untuk masing-masing item keuangan daerah, sehingga membantu untuk membuat prediksi selama periode lima tahun RPJMD 2018-2023.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah pertahun sebesar 10,61%. Realisasi PAD pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan perubahan pengelompokan jenis Pendapatan Asli Daerah. Jenis pajak daerah yang dipindahkan adalah objek pajak rokok yang beralih pada kelompok lain-lain pendapatan daerah

yang sah yang merupakan objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Demikian pula objek Hibah Dana Bos yang semula tertata pada jenis Lain-lain PAD yang Sah beralih pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan objek Hibah Dana Bos sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku. secara rinci seperti terlihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2014 s/d Tahun 2018
Kota Kotamobagu

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
PENDAPATAN	479.525.120.830	564.484.184.252	627.615.362.668	701.749.680.963	717.769.054.968	10,61%
Pendapatan Asli Daerah	24.664.876.568	31.288.987.422	39.195.723.854	71.085.357.271	64.286.313.930	27,06%
Pajak daerah	9.048.900.330	13.484.210.746	15.809.318.150	21.800.643.988	13.600.916.377	10,72%
Retribusi daerah	3.669.284.428	4.047.015.351	6.075.891.158	27.380.668.495	41.779.518.883	83,69%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	315.094.958	871.254.776	1.361.363.265	107,86%
Lain-lain PAD yang sah	11.946.691.810	13.757.761.325	16.995.419.588	21.032.790.012	7.544.515.405	-10,86%
Dana Perimbangan	389.050.811.658	459.062.123.883	548.235.378.984	524.297.199.831	563.699.285.751	9,71%
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	18.622.320.508	13.461.636.883	16.340.748.409	15.445.021.658	16.261.701.610	-3,33%
Dana alokasi umum	333.000.351.150	354.997.037.000	382.638.269.000	375.916.545.000	376.388.719.000	3,11%
Dana alokasi khusus	37.428.140.000	90.603.450.000	149.256.361.575	132.935.633.173	171.048.865.141	46,21%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	65.809.432.604	74.133.072.947	40.184.259.830	106.367.123.861	89.783.455.287	8,08%
Hibah	-	-	-	-	12.534.400.000	0,00%
Dana darurat	-	-	-	-	-	0,00%

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	15.802.071.497	14.325.029.468	15.060.266.379	15.469.165.861	24.723.104.112	11,84%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	48.134.414.000	59.806.587.000	15.123.993.451	65.897.958.000	36.180.851.000	-6,89%
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.796.000.000	-	10.000.000.000	25.000.000.000	16.345.100.175	73,69%
Pendapatan Lainnya	76.947.107	1.456.479	-	-	-	-100,00%
						0,00%
Belanja	479.669.347.318	527.750.242.996	697.175.959.362	701.625.724.898	717.057.879.189	10,57%
Belanja Tidak Langsung	228.489.292.661	248.888.517.561	280.209.243.898	314.273.415.015	311.319.806.270	8,04%
Belanja Pegawai	223.142.920.968	235.708.550.361	258.060.269.873	226.903.159.673	225.072.086.135	0,22%
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
Belanja Subsidi	102.000.000	-	-	-	-	-100,00%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	24.344.473.034	27.579.316.729	40.860.899.881	44.995.572.242	41.551.767.294	14,30%
Belanja Hibah	2.600.000.000	2.553.646.250	2.461.350.000	24.002.978.950	15.874.750.540	57,19%
Belanja Bantuan Sosial	511.250.000	680.000.000	1.137.500.000	5.481.950.000	10.543.600.000	113,10%
Belanja Bagi Hasil	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000	1.528.548.750	8,43%

Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
Belanja Bantuan Keuangan	2.133.121.693	9.910.873.950	17.022.611.600	55.944.846.100	56.825.893.050	127,19%
Belanja Tidak Terduga	-	35.447.000	227.512.425	640.480.292	1.474.927.795	246,52%
Belanja Langsung	251.180.054.657	278.861.725.435	416.966.715.464	387.352.309.883	405.738.072.919	12,74%
Belanja Pegawai	24.202.961.488	6.697.405.956	20.397.210.178	34.914.146.241	23.855.121.230	-0,36%
Belanja Barang dan Jasa	91.461.840.811	131.381.652.400	166.983.467.268	154.657.103.676	207.416.431.023	22,72%
Belanja Modal	135.515.252.358	140.782.667.079	229.586.038.018	197.781.059.966	174.466.520.666	6,52%
Pembiayaan	67.068.061.244	53.690.763.543	90.424.704.799	20.864.108.105	20.983.738.158	-25,21%
Penerimaan Pembiayaan	69.568.061.244	66.249.821.169	90.424.704.799	20.864.108.105	20.983.738.158	-25,89%
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	12.559.057.626	-	-	-	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota kotamobagu Tahun 2018

*) unaudited

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui perkembangan keuangan pemerintah daerah melalui analisis likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Kotamobagu

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR	76.576.590.811,00	104.645.532.957,00	48.889.733.138,74	38.232.589.084,28	36.918.611.739,18	-16,67%
Kas	66.362.724.336,00	90.381.924.680,00	21.195.783.966,00	21.007.353.454,15	24.221.938.325,98	-22,27%
Piutang	5.956.885.001,00	10.344.596.182,00	18.029.345.531,00	7.946.285.656,41	1.560.222.984,06	-28,46%
Persediaan	4.256.981.474,00	3.919.012.095,00	9.664.603.641,74	9.278.949.973,72	11.136.450.429,14	27,18%
ASET TETAP	1.104.040.146.676,00	991.697.973.609,00	1.163.887.762.178,62	1.012.419.978.915,93	1.128.924.660.166,44	0,56%
Tanah	209.034.211.679,00	209.906.977.678,00	212.029.926.966,52	61.212.441.523,52	60.643.916.152,52	-26,61%
Peralatan dan mesin	150.388.810.749,00	177.523.636.122,00	240.692.236.962,00	248.893.660.111,22	340.356.921.245,43	22,65%
Gedung dan bangunan	310.905.934.881,00	355.676.563.483,00	358.039.278.969,95	344.286.941.373,68	412.619.391.855,13	7,33%
Jalan, irigasi, dan jaringan	382.995.996.680,00	443.514.824.819,00	535.426.269.926,00	617.811.493.158,73	680.668.059.933,33	15,46%
Aset tetap lainnya	23.268.270.706,00	25.990.481.455,00	27.873.236.299,00	29.497.124.580,95	29.759.716.908,95	6,34%
Konstruksi dalam pengerjaan	27.446.921.981,00	31.562.963.981,00	101.927.646.728,70	158.356.033.987,15	92.390.469.634,50	35,45%
Akumulasi Penyusutan	-	(252.477.473.929,00)	(312.100.833.673,55)	(447.637.715.819,32)	(487.513.815.563,42)	24,52%

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan (%)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
ASET LAINNYA	6.751.400.491,00	9.409.939.638,00	20.683.846.588,79	148.610.824.175,61	121.574.935.706,61	106,00%
Tagihan penjualan angsuran						
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	3.794.896.773,00	-	-	-		
Tagihan Jangka Panjang	-	680.026.649,00	521.835.567,00	2.944.160.746,31	2.944.160.746,31	62,98%
Kemitraan dengan pihak Ketiga						
Aset tak berwujud	373.697.000,00	516.135.667,00	756.382.000,00	1.086.335.525,00	1.121.139.525,00	31,61%
Aset Lain-lain	2.582.806.718,00	8.213.777.322,00	25.621.245.595,98	148.768.771.654,84	124.337.095.736,51	163,41%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			(5.923.411.007,86)	(3.745.218.990,12)	(6.255.989.235,79)	2,77%
Amortisasi Aset Tidak Berwujud			(292.205.566,33)	(443.224.760,42)	(571.471.065,42)	39,85%
JUMLAH ASET DAERAH	1.187.368.137.978,00	1.115.753.446.204,00	1.243.461.341.906,15	1.209.263.392.175,82	1.297.418.207.612,23	2,24%
KEWAJIBAN	-	2.328.573.403,00	20.790.485.625,70	7.617.835.458,00	25.610.021.558,00	

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan (%)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	2.328.573.403,00	20.790.485.625,70	7.617.835.458,00	25.610.021.558,00	122,39%
Utang perhitungan pihak ketiga	-	(67.023.397,00)	12.017.017,00	19.289.284,00	19.644.876,00	-166,43%
Uang muka dari kas daerah					-	
Pendapatan diterima dimuka					-	
Utang Beban	-	-	1.935.666.164,00	6.620.176.488,00	18.871.903.335,00	212,24%
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	2.395.596.800,00	18.842.802.444,70	978.369.686,00	6.718.473.347,00	41,02%
EKUITAS DANA	-	1.113.424.874.901,00	122.670.856.280,79	1.201.645.556.717,82	1.265.118.186.054,23	4,35%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-	1.115.753.448.304,00	143.461.341.906,49	1.209.263.392.175,82	1.290.728.207.612,23	4,98%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota kotamobagu Tahun 2018

*) unaudited

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, berikut dijabarkan beberapa rasio keuangan tahun selama 2014 hingga 2018.

Tabel 3.3.
Analisis Rasio
Keuangan Kota
Kotamobagu Tahun
2018

Sumber: Badan
Keuangan Daerah
Kota kotamobagu,
diolah
*unaudited

RASIO	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
RASIO LIKUIDITAS					
RASIO LANCAR	0,00	44,94	2,35	4,99	1,44
RASIO QUICK (quick ratio)	0,00	43,26	1,89	3,78	1,01
RASIO TOTAL HUTANG TERHADAP TOTAL ASET	0,00000	0,00209	0,01672	0,00630	0,01974
RASIO HUTANG TERHADAP MODAL	0,00000	0,00209	0,16948	0,00634	0,02024
RATA-RATA UMUR PIUTANG	1	2	3	5	1

Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*Leverage*), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio*, yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai *Current Ratio* artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sebesar 1,44.
2. *Quick Ratio*, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel diatas, tahun 2018 sebesar 1,01.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam emenuhi kewajibankewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi

oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2018 sebesar 0,001974.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2018 sebesar 0,02024

Rasio Aktivitas digunakan untuk mengetahui aktivitas aktiva pada kegiatan tertentu. Rasio Aktivitas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. Rata-rata umur piutang berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Angka rata-rata umur piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat;
2. Rata-rata umur persediaan menandakan berapa lama waktu perputaran persediaan. Semakin besar rata-rata umur persediaan menandakan efektifitas manajemen persediaan. Sebaliknya, rata-rata umur persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mis-manajemen seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran, diolah 2018 *) unaudited

No	Uraian	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018*) (%)	Proporsi Rata-Rata
A	Belanja Tidak Langsung	47,63%	37,88%	40,19%	44,79%	43,42%	42,78 %
1	Belanja Pegawai	46,52%	36,02%	37,02%	32,34%	31,39%	36,66 %
2	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Subsidi	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Belanja Hibah	0,36%	0,36%	0,34%	3,35%	2,21%	1,33%
5	Belanja Bantuan Sosial	0,11%	0,10%	0,16%	0,78%	1,47%	0,52%
6	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,21%	0,12%
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,44%	1,37%	2,44%	7,97%	7,92%	4,03%
8	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,03%	0,03%	0,09%	0,21%	0,07%
B	Belanja Langsung	52,37%	62,12%	59,81%	55,21%	56,58%	57,22 %
1	Belanja Pegawai	5,05%	1,28%	2,93%	4,98%	3,33%	3,51%
2	Belanja Barang dan Jasa	19,07%	25,57%	23,95%	22,04%	28,93%	23,91 %
3	Belanja Modal	28,25%	35,26%	32,93%	28,19%	24,33%	29,79 %
	Total Belanja	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan

peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi
Belanja Pemenuhan
Aparatur Daerah Kota
Kotamobagu

Sumber: Dokumen
Realisasi Anggaran,
diolah 2018
) *unaudited*

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2015	400.721.479.370,00	403.221.479.370,00	99,38%
2	Tahun anggaran 2015	420.098.329.404,00	432.657.387.030,00	97,10%
3	Tahun anggaran 2016	548.770.844.389,00	548.770.844.389,00	100,00%
4	Tahun anggaran 2017	481.645.378.478,36	481.645.378.478,36	100,00%
5	Tahun anggaran 2018*)	475.848.694.978,00	475.848.694.978,00	100,00%

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat dari waktu ke waktu, tahun 2014 sebesar 99,38 persen, tahun 2015 sebesar 97,10 persen; tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar 100 persen.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Defisit Riil Anggaran
Kota Kotamobagu

Sumber: Dokumen
Realisasi Anggaran,
diolah 2018
) un-audited

NO	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018*) (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	479.525 .120.83 0,00	564.484 .184.25 2,00	627.615 .362.66 8,00	701.749 .680.96 3,11	717.769 .054.96 7,63
	Dikurangi realisasi:					
	2 Belanja Daerah	479.669 .347.31 8,00	527.750 .242.99 6,00	697.175 .959.36 2,00	701.625 .724.89 7,96	717.057 .879.18 8,80
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
A	Defisit riil	(144.22 6.488,0 0)	36.733. 941.256 ,00	(69.560. 596.694 ,00)	123.956 .065,15	711.175 .778,83
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	69.568. 061.244 ,00	66.249. 821.169 ,00	90.424. 704.799 ,00	20.864. 108.105 ,00	20.983. 738.158 ,32
B	Dikurangi :					
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.0 00.000, 00	7.500.0 00.000, 00	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	5.059.0 57.626, 00	-	-	-

NO	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018*) (Rp)
C	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	67.068. 061.244 ,00	53.690. 763.543 ,00	90.424. 704.799 ,00	20.864. 108.105 ,00	20.983. 738.158 ,32
A+ C	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	66.923. 834.756 ,00	90.424. 704.799 ,00	20.864. 108.105 ,00	20.988. 064.170 ,15	21.694. 913.937 ,15

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup
Defisit Riil Anggaran
Kota Kotamobagu

Sumber : Dokumen
Realisasi Anggaran,
diolah 2018
) *unaudited*

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018* (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	4,27	(4,77)	36,49	(105,00)	0,57
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2014 hingga 2018.

Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Kotamobagu

No.	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018*)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	66.923.834.756	-3,80%	90.424.704.799	35,12%	20.864.108.105	-76,93%	20.988.064.170	0,59%	21.694.913.937	3,37%
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	1.721.575.242	-	-3.460.894.622	-301,03%	4.678.680.661	-235,19%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-15.771.431.000	-	- 55.069.943.016	249,18%	-4.547.286.169	-91,74%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-3.681.162.577	-	-4.162.564.777	13,08%	951.517.337	-122,86%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	69.568.061.244	51,51%	66.923.834.756	-3,80%	108.829.736.721	-	83.557.510.520	-23,22%	19.905.152.341	-76,18%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dokumen Realisasi Anggaran, diolah 2018

*) unaudited

Perolehan SiLPA selama tahun 2014 hingga 2018 sebagian besar diperoleh dari Belanja Daerah yang tidak terserap, kemudian juga dari pelampauan Pendapatan Daerah baik dari PAD, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.9
Sisa Lebih (Riil)
Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan Kota
Kotamobagu

Sumber: Dokumen
Realisasi Anggaran,
diolah 2018
) *unaudited*

No.	Uraian	(2015) (Rp)	(2016) (Rp)	(2017) (Rp)	(2018)* (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	90.381. 924.680	21.195. 783.966	21.007. 353.454	24.221. 938.326
	Dikurangi:				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	90.381. 924.680	21.195. 783.966	21.007. 353.454	24.221. 938.326

Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

D. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.10

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Kotamobagu

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran, diolah 2018 *) *unaudited*

Uraian	(2019) (Rp)	(2020) (Rp)	(2021) (Rp)	(2022) (Rp)	(2023) (Rp)
Saldo kas neraca daerah	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
Dikurangi:					
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Bertujuan untuk menguraikan proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi data.

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Berdasarkan penghitungan, proyeksi pendapatan untuk tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 697.574.906.904, dan meningkat menjadi Rp. 1.108.440.005.455 pada tahun 2020. Peningkatan proyeksi pada tahun 2020 karena asumsi adanya penambahan luas wilayah Kota Kotamobagu sehingga akan ada penambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya proyeksi pendapatan pada akhir periode RPJMD 2018-2023 akan menjadi Rp. 1.162.748.956.105. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
PENDAPATAN	697.574.906.904	1.108.440.005.455	1.127.860.729.016	1.016.375.325.918	1.162.748.956.105
Pendapatan Asli Daerah	72.679.765.526	98.296.557.701	135.659.701.426	190.243.888.107	270.135.931.118
Pajak daerah	17.442.069.526	23.589.721.034	32.556.323.304	45.655.721.359	64.828.630.884
Retribusi daerah	49.028.000.000	66.308.464.207	91.512.731.165	128.333.894.291	182.227.121.056
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.300.000.000	1.758.199.467	2.426.502.213	3.402.832.312	4.831.836.040
Lain-lain PAD yang sah	4.909.696.000	6.640.172.993	9.164.144.744	12.851.440.146	18.248.343.137
Dana Perimbangan	541.612.809.000	924.587.920.398	900.453.949.459	727.511.023.688	786.397.427.950
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	17.123.096.000	16.552.566.420	15.467.902.812	15.467.902.812	14.952.523.112
Dana alokasi umum	394.359.709.000	447.770.780.843	609.244.152.264	436.301.226.493	445.742.910.430
Dana alokasi khusus	130.130.004.000	460.264.573.135	275.741.894.383	275.741.894.383	325.701.994.408
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	83.282.332.378	85.555.527.356	91.747.078.131	98.620.414.123	106.215.597.037
Hibah	-	-	-	-	-
Dana darurat	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	26.580.698.378	31.070.690.194	39.157.465.648	47.609.715.994	56.470.713.541

Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	46.701.634.000	43.484.837.162	40.489.612.483	37.700.698.129	35.103.883.496
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	10.000.000.000	11.000.000.000	12.100.000.000	13.310.000.000	14.641.000.000
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: APBD, Data diolah, BPKD dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja dan pengeluaran **wajib mengikat serta prioritas utama** tahun 2019-2023 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Kotamobagu

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja	719.791.690.904	1.140.458.732.138	1.158.586.584.070	1.046.392.240.800	1.172.419.486.641
Belanja Tidak Langsung	348.964.238.173	353.966.918.949	359.287.319.603	365.069.227.346	383.177.798.733
Belanja Pegawai	265.872.172.073	335.222.493.021	330.887.665.835	263.577.373.162	277.022.613.995
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	4.275.300.000	3.631.771.783	3.155.969.560	27.882.565.182	19.538.917.360
Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	967.089.632	1.458.514.788	6.367.994.094	12.977.245.127
Belanja Bagi Hasil	1.300.000.000	50.412.391	1.958.592.933	2.254.118.888	3.696.730.847
Belanja Bantuan Keuangan	65.016.766.100	14.095.152.121	21.826.576.487	64.987.176.019	69.942.291.404

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	-	-	-	-
Belanja Langsung	370.827.452.731	786.491.813.189	799.299.264.467	681.323.013.454	789.241.687.908
Belanja Pegawai	7.036.343.350	18.889.128.459	39.100.183.511	61.411.306.251	46.402.981.138
Belanja Barang dan Jasa	261.388.494.430	370.544.196.607	320.096.922.885	272.029.987.275	403.466.435.729
Belanja Modal	102.402.614.951	397.058.488.123	440.102.158.071	347.881.719.929	339.372.271.040
Pembiayaan	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
Penerimaan Pembiayaan	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

Sumber: APBD, Data diolah, BPKD dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu
Sumber: APBD, data diolah, BPKD dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Uraian	Proyeksi				
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan	697.574.906.904	1.108.440.005.456	1.127.860.729.016	1.016.375.325.918	1.162.748.956.105
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
Total penerimaan	719.791.690.904	1.140.458.732.138	1.158.586.584.070	1.046.392.240.799	1.172.419.486.641
Dikurangi:					
Pengeluaran Pembiayaan	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
Kapasitas riil kemampuan keuangan	697.574.906.904	1.108.440.005.456	1.127.860.729.016	1.016.375.325.918	1.162.748.956.105

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah, yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan, dengan proyeksi seperti digambarkan pada tabel berikut.

1. **Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.
2. **Prioritas II**, dialokasikan untuk pendanaan:
 - a. **Program** prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2023, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai

manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

- b. **Program** prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

3. **Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, hibah, bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Berkaitan dengan hal tersebut Alokasi dan Kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel 3.14 dan 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Jenis Dana	Alokasi									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Prioritas I	32,67	227.932.150.025	28,53	316.281.849.247	26,81	302.353.848.834	23,56	239.427.742.399	22,27	258.968.353.788
Belanja Tidak Langsung	30,21	210.706.672.073	26,70	296.001.461.338	24,69	278.475.059.566	20,79	211.309.980.064	19,42	225.856.537.190
Belanja Langsung	2,47	17.225.477.952	1,83	20.280.387.909	2,12	23.878.789.268	2,77	28.117.762.336	2,85	33.111.816.597
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prioritas II	32,51	226.775.128.902	66,23	734.141.481.129	66,03	744.707.735.699	61,32	623.227.452.142	64,20	746.501.977.524
Prioritas III	34,82	242.867.627.977	5,23	58.016.675.080	7,16	80.799.144.482	15,12	153.720.131.377	13,53	157.278.624.793
Belanja Tambahan Penghasilan	29,76	207.621.672.073	3,54	39.221.031.684	4,64	52.379.517.502	5,14	52.267.393.098	4,40	51.138.374.544
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	0,11	795.000.000	0,33	3.645.859.265	0,28	3.161.728.413	2,74	27.891.288.969	1,68	19.542.067.735
Belanja Bantuan Sosial	2,47	17.225.477.952	0,09	1.026.504.065	0,13	1.473.078.010	0,62	6.352.204.556	1,12	12.989.727.377
Belanja Bantuan Keuangan	0,08	590.000.000	1,27	14.087.883.374	2,08	23.497.390.702	6,54	66.479.106.300	6,18	71.807.519.483

Jenis Dana	Alokasi									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Belanja Tidak Terduga	2,38	16.635.477.952	0,00	35.396.692	0,03	287.429.856	0,07	730.138.455	0,15	1.800.935.654
Total	100	697.574.906.904	100	1.108.440.005.456	100	1.127.860.729.016	100	1.016.375.325.918	100	1.162.748.956.105

Sumber: APBD, Data diolah, BPKD dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Tabel 3.15
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Kapasitas Keuangan Daerah	719.791.690.904	1.140.458.732.138	1.158.586.584.070	1.046.392.240.799	1.172.419.486.641
	Pendapatan	697.574.906.904	1.108.440.005.456	1.127.860.729.016	1.016.375.325.918	1.162.748.956.105
	Sisa Lebih (Rill)	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
B	Belanja	697.574.906.904	1.108.440.005.456	1.127.860.729.016	1.016.375.325.918	1.162.748.956.105
	Belanja Tidak Langsung	453.574.300.050	354.018.136.418	359.274.204.049	365.030.111.441	383.135.161.983
	Prioritas I	210.706.672.073	296.001.461.338	278.475.059.566	211.309.980.064	225.856.537.190
	Belanja Gaji dan Tunjangan	207.621.672.073	293.286.159.144	275.960.313.306	208.753.279.544	222.476.861.300
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.290.000.000	2.212.468.454	1.985.325.995	2.055.903.511	2.520.905.787
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	795.000.000	502.833.740	529.420.265	500.797.009	858.770.103
	Prioritas III	242.867.627.977	58.016.675.080	80.799.144.482	153.720.131.377	157.278.624.793
	Tambahan Penghasilan PNS	207.621.672.073	39.221.031.684	52.379.517.502	52.267.393.098	51.138.374.544
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	795.000.000	3.645.859.265	3.161.728.413	27.891.288.969	19.542.067.735
	Belanja Bantuan Sosial	17.225.477.952	1.026.504.065	1.473.078.010	6.352.204.556	12.989.727.377

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Belanja bantuan keuangan	590.000.000	14.087.883.374	23.497.390.702	66.479.106.300	71.807.519.483
	Belanja Tidak terduga	16.635.477.952	35.396.692	287.429.856	730.138.455	1.800.935.654
	Belanja Langsung	17.225.477.952	20.280.387.909	23.878.789.268	28.117.762.336	33.111.816.597
	Prioritas I	17.225.477.952	20.280.387.909	23.878.789.268	28.117.762.336	33.111.816.597
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	590.000.000	725.833.427	892.939.261	1.098.517.228	1.351.424.618
	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	16.635.477.952	19.554.554.482	22.985.850.006	27.019.245.108	31.760.391.979
	Prioritas II	226.775.128.902	734.141.481.129	744.707.735.699	623.227.452.142	746.501.977.524
	Program Pencapaian Visi dan Misi					
	Program Penyelenggaraan Lainnya					
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
	Prioritas I	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
	Pembayaran Pokok Hutang					
	Penyertaan Modal					
	Dana Cadangan					

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Surplus/(Defisit) = A-(B+C)	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembayaran Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Putang Daerah	-	-	-	-	-
	SILPA	-	-	-	-	-

Sumber: APBD, Data diolah, BPKD dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Kota Kotamobagu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Kotamobagu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Kotamobagu meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

4.1.1. Permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah

Permasalahan pada bagian ini dirumuskan berdasarkan telaahan capaian sasaran pokok RPJPD Kota Kotamobagu periode RPJMD sebelumnya, yang disinergikan dengan *platform kebijakan* atau janji politik Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu kurun waktu 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis dirumuskan permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah, meliputi:

4.1.1.1. Sistem Transportasi

Pembangunan transportasi di Kota Kotamobagu masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas.

Sistem dan jaringan transportasi multimoda belum optimal sehingga menyebabkan tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan transportasi. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus belum optimal dikarenakan belum rampungnya infrastruktur penunjang.

Ketersediaan prasarana jalan lingkar (*RingRoad*) belum ada, hal ini menyebabkan terhambatnya proses aliran barang yang akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Akses jalan menuju dan dari pusat kota dan luar kota menggunakan jaringan jalan yang juga digunakan untuk menunjang kegiatan perkotaan lainnya. Padahal kendaraan barang yang melintas termasuk kendaraan dengan beban berat. Selain merusak daya tahan jalan yang ada juga meningkatkan beban jalan yang dilewatinya.

Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalulintas.

Selain itu, kondisi jalan di Kota Kotamobagu juga belum sepenuhnya baik. Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat di Kota Kotamobagu. Hal ini sudah harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah, karena jalan merupakan salah satu sarana prasarana fisik vital yang berpengaruh terhadap perekonomian kawasan.

4.1.1.2. Banjir dan Genangan

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Kota Kotamobagu. Berdasarkan faktor penyebabnya, banjir yang terjadi di Kota Kotamobagu disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman. Bencana banjir terjadi apabila faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi, ini biasa mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi bagi warga Kota Kotamobagu.

Banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu meningkatkan volume dan tinggi air pada sungai yang mengalir ke Kota Kotamobagu. Peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Air hujan yang masuk melebihi kapasitas dan daya tampung sungai yang makin dangkal dan menyempit. Meningkatnya volume air sungai pada waktu terjadinya hujan deras di wilayah hulu. Di samping berkurangnya daerah resapan, pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang daerah aliran sungai meningkatkan potensi banjir karena meluapnya air sungai. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di selokan dan sungai dapat menghambat aliran air serta terjadinya sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran.

Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di Kota Kotamobagu terjadi pada satu waktu ketika peningkatan volume air hujan tidak dapat ditampung sungai dan saluran drainase kota yang ada. Beberapa bagian wilayah Kota Kotamobagu menjadi lokasi langganan banjir dan genangan karena terletak pada daerah aliran sungai. Sebagaimana diketahui, terdapat 10 aliran sungai yang melewati Kotamobagu. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, bahwa Kota Kotamobagu sebagai daerah yang menjadi lintasan begitu banyak sungai, harus dapat melaksanakan pembangunannya dengan pendekatan

yang ramah sungai. Sehingga adanya aliran sungai, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan warga di saat tertentu.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait dengan ancaman banjir adalah produksi sampah di Kota Kotamobagu, dimana sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu penyebab utama terganggunya aliran air di sungai dan saluran, yang kemudian menimbulkan genangan dan luapan air berlebih ke jalan dan permukiman warga.

4.1.1.3. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Kotamobagu. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru.

4.1.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Ketersediaan RTH di Kota Kotamobagu masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di Kota Kotamobagu meliputi penyediaan dan penyebaran kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.

Peningkatan penyediaan RTH publik menghadapi masalah terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau, dan mendorong masyarakat/privat untuk meningkatkan luas RTH di lahan milik mereka. Peran serta masyarakat dalam peningkatan RTH diwujudkan dalam pengembangan tajuk hijau terutama melalui penghijauan lingkungan dan bangunan. Permasalahan lain adalah belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah Kota Kotamobagu.

Selanjutnya untuk waktu ke depan pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu harus dapat mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai serta jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, gedung perkantoran, hotel, dan fasilitas publik. Di samping itu, diperlukan upaya identifikasi ruang dan kawasan yang dapat difungsikan kembali dan berpotensi sebagai RTH serta upaya membebaskan lahan milik publik secara bertahap untuk dimanfaatkan sebagai RTH.

4.1.1.5. Kemiskinan Kota

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Kotamobagu. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban

umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

4.1.1.6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Kotamobagu sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antarlain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*e-Government*), penyederhanaan sistem perizinan dan non-perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "*merit system*".

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (*mind set*) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antara lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

4.1.1.7. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kota Kotamobagu di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku

kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Kotamobagu dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

4.1.1.8. Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan, antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Penyelenggaraan kesehatan di Kota Kotamobagu dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Kotamobagu khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawatdaruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

Salah satu indikator yang menjadi ukuran pelayanan kesehatan di Kota Kotamobagu adalah angka kematian bayi dalam 1000 kelahiran. Di Tahun 2013, angka kematian bayi tersebut mencapai 14 kematian, sedangkan di Tahun 2017 dapat diturunkan hingga menjadi 5 kematian. Di masa depan, diharapkan angka ini terus menurun hingga mencapai 0 kematian.

4.1.1.9. Penataan Ruang

RTRW 2014-2034 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi yang tegas.

4.1.1.10. Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Kotamobagu merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat Kota Kotamobagu menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Kotamobagu yang aman, tentram dan tertib.

4.1.1.11. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi secara global memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan kelompok masyarakat miskin perkotaan. Faktor lain yang menyebabkan tingginya tingkat kerentanan Kota Kotamobagu adalah jumlah dan kepadatan penduduk serta persentase masyarakat miskin kota.

Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Kota Kotamobagu antara lain banjir dan kekeringan. Dampak lainnya adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumber daya lahan, serta terganggunya ketahanan pangan dan pada gilirannya akan berimplikasi kepada peningkatan jumlah kemiskinan. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

4.1.1.12. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Kotamobagu, yaitu persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari penambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma “membuang sampah” belum pada “mengolah sampah dari sumbernya”.

Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pengelolaan kualitas air permukaan masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana. Pencemaran air tanah disebabkan terutama oleh penggunaan *septic tank* yang belum memenuhi standar lingkungan. Saat ini pada kawasan perumahan baru terencana penggunaan *septic tank* sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan, meski masih perlu disosialisasikan tentang penggunaan *septic tank* yang memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit. Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

4.1.1.13. Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan airbersih; ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah; iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan dampak terhadap

penurunan muka tanah (*land subsidence*). Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh adanya beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah dan gaya-gaya tektonik.

Meskipun penyediaan air bersih sudah mencakup rumah tangga di Kota Kotamobagu, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber airtanah (sumur) dan cakupan pelayanan dari sistem perpipaan masih rendah. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.

4.1.1.14. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas pangan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan mengingat Kota Kotamobagu bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu yang berkelanjutan.

4.1.1.15. Stabilitas Ekonomi

Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kota Kotamobagu) seperti: sektor keuangan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Sedangkan untuk nilai tukar dalam peranannya terhadap stabilitas ekonomi cenderung mengikuti dinamisasi dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk Kondisi laju inflasi Kota Kotamobagu berada pada angka 3.83 pada tahun 2018. Kondisi ini meningkat 1.39 poin pada angka 2.44 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas makanan dan non makanan yang cenderung naik karena stok komoditas yang terbatas, cuaca yang tidak mendukung, maupun even hari besar keagamaan. Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif.

4.1.1.16. Iklim Investasi

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kota Kotamobagu diantaranya adalah belum maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu meskipun sudah banyak pembenahan disegala sektor, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh OPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukkan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

4.1.1.17. Perdagangan dan Jasa

Kota Kotamobagu sebagai kota jasa memerlukan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan kota-kota lain. Untuk mewujudkan fungsi kota jasa tersebut permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah persiapan infrastruktur guna menghadapi aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar Kota terutama dalam menghadapi regionalisasi ekonomi. Dengan persiapan yang mantap maka kinerja Kota Kotamobagu dapat berkompetisi dalam konteks menghadapi AFTA (*Asean Free Trade Area*), ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*), dan kelompok perdagangan internasional lainnya. Untuk itu diperlukan persiapan secara terencana dan sistematis agar produk Kota Kotamobagu dapat berkompetisi dengan produk nasional maupun

internasional, sehingga membanjirnya produk yang berasal dari luar di Kota Kotamobagu dapat diantisipasi secara profesional.

Posisi strategis Kota Kotamobagu terhadap perekonomian nasional dan internasional membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan instrumen pembangunan untuk melangsungkan kegiatan perekonomian regional dan aktivitas jasa keuangan dan jasa lainnya berskala nasional dan internasional. Di masa yang akan datang, Kota Kotamobagu dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan SDA dan infrastruktur publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi secara berkelanjutan.

4.1.1.18. Keuangan Daerah

Pembangunan Kota Kotamobagu perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.

Selain itu, Kota Kotamobagu sebagai calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan daerah lain. Sejalan dengan hal ini, Kota Kotamobagu harus mampu menyediakan prasarana dan sarana khusus yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kaitannya dengan hal ini maka permasalahannya adalah meningkatkan dukungan pendanaan untuk pembiayaan pembangunan dalam kerangka Kota Kotamobagu sebagai calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkat pemerintah, mulai dari desa, kelurahan dan kecamatan. Selain itu, peningkatan profesionalitas seluruh pegawai Pemerintah Kota Kotamobagu juga masih perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan Kota Kotamobagu menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan.

4.1.1.19. Kerjasama Antar Daerah

Pembangunan Kota Kotamobagu sangat terkait pemanfaatan sumber daya dengan wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan kerjasama antar daerah untuk menangani masalah yang bersifat regional seperti pengelolaan sampah, transportasi, polusi dan banjir. Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Bolaang Mongondow Raya. Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air bersih masih perlu perhatian dari para pemangku kepentingan.

Dalam rangka kerjasama antar daerah di wilayah Bolaang Mongondow Raya maka perlu dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program kerjasama antar Kabupaten/kota di dalamnya.

4.1.2. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan pemerintah daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa- masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Analisis permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan mengidentifikasi kinerja masing- masing urusan, dan relevansinya dengan kebijakan periode rencana. Dari hasil analisis diperoleh gambaran permasalahan umum terkait penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

- a) Terbatasan akses kelembagaan dan sarana prasarana PAUD;
- b) Relatif rendahnya partisipasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang Pendidikan (dewan Pendidikan, Yayasan, komite, pemerintah, swasta, masyarakat);
- c) Pemenuhan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*difabel*);
- d) Belum tersedianya Universitas Negeri Kota Kotamobagu;
- e) Masih kurangnya fasilitas Pendidikan berbasis teknologi informasi dan Pendidikan kearifan lokal;

2. Urusan Kesehatan

- a) Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan
- b) Masih tingginya penyakit-penyakit menular dan tidak menular (HIV/AIDS, TB Paru, Gizi Buruk dan DBD)
- c) Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya masyarakat
- d) Ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan reagensia laboratorium yang tidak sebanding dengan kebutuhan dan jumlah kunjungan pasien
- e) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dan lembaga swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan relatif rendah.
- f) Pelayanan Puskesmas yang belum Optimal
- g) Kurang Ketersediaan Dokter Ahli
- h) RSUD Kota Kotamobagu Belum berstandar ISO 9001:2015

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Belum adanya Konektifitas Jalan Lingkar (*ringroad*) antar wilayah tetangga
- b) Integrasi Infrastruktur, Sarana Prasarana Publik, Penataan Bangunan dan Lingkungannya belum sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Kotamobagu
- c) Belum adanya konsep pengembangan antar wilayah secara terpadu untuk mewujudkan interkasi yang saling mendukung
- d) Belum memadainya sistem drainase perkotaan
- e) Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi
- f) Penegakan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang belum optimal dilaksanakan
- g) Masih kurangnya pemanfaatan ruang terbuka hijau
- h) Masih adanya kondisi jalan yang mengalami kerusakan ringan sedang dan berat tersebar di wilayah Kota Kotamobagu
- i) Belum Optimalnya Pemanfaatan Dokumen RDTR sebagai acuan dalam pembangunan wilayah
- j) Perda RTRW tidak relevan lagi dengan kondisi Kota Kotamobagu
- k) Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kotamobagu

4. Urusan Perumahan

- a) Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
- b) Masih adanya Kawasan kumuh perkotaan
- c) Rendahnya infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, jamban)
- d) Ketersediaan basis data perumahan yang akurat dan komprehensif
- e) Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan
- f) Kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

- g) Belum adanya pemerataan pemasangan Penerangan Jalan Umum

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

- a) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana pada OPD belum memadai
- b) Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal
- c) Inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- d) Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam.

6. Urusan Perhubungan

- a) Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan baik kuantitas maupun kualitasnya
- b) Masih rendahnya budaya tertib berlalu lintas para pemakai jalan dan pengguna jasa transportasi akan pentingnya keselamatan angkutan
- c) Belum terpenuhinya standar keselamatan alat transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat
- d) Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan dan pengemudi melakukan pengujian kendaraan secara berkala.
- e) Sistem transportasi antar wilayah belum tertata dengan baik

7. Urusan Lingkungan Hidup

- a) Belum semua sungai yang ditetapkan status baku mutu lingkungannya
- b) Menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih tingginya sedimentasi dan masih adanya pembangunan pemukiman di kawasan daerah aliran sungai

- c) Masih terbatasnya prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

8. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan
- b) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Tingginya pengaruh negative dari globalisasi bagi anak dan remaja
- b) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, politik dan pemerintahan
- c) Masih adanya tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas tenaga penyuluh KB dan KS (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)
- b) Rendahnya peserta KB aktif dan KB mandiri
- c) Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB, di tengah kecenderungan semakin meningkatnya jumlah PUS

11. Urusan Sosial

- a) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

- b) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor
- c) Belum optimalnya penanggulangan bencana sosial
- d) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

12. Urusan Ketenagakerjaan

- a) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah.
- b) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
- c) Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja.
- d) Belum optimalnya tingkat pengangguran terbuka
- e) Kurangnya SDM yang berkualitas , Keterampilan dan Kreatifitas

13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi
- b) Rendahnya sumberdaya kelembagaan koperasi dan akses pasar
- c) Masih adanya koperasi tidak aktif dan belum berbadan hukum
- d) Kurang optimalnya kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya
- e) Rendahnya minat kewirausahaan dan pengembangan mutu produk UMKM
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana UMKM.

14. Urusan Penanaman Modal

- a) Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata
- b) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya
- c) Jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha
- d) Belum optimalnya penerapan Community Development (CD)

- atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari pelaku usaha
- e) Belum adanya perda yang mengatur tentang investasi di Kota Kotamobagu
 - f) Daya dukung peluang-peluang investasi, terutama kesiapan lahan belum memadai.

15. Urusan Kebudayaan

- a) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal
- b) Belum optimalnya pendayagunaan potensi budaya yang ada sebagai aset wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat
- c) Data-data bidang kebudayaan belum terinventarisasi secara akurat dan lengkap
- d) Belum tersedianya informasi terkait kalender budaya tentang upacara- upacara adat yang diselenggarakan di perkampungan adat.
- e) Kurangnya keterlibatan dunia usaha dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya
- f) Kurangnya promosi, even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi pelesatarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- g) Belum Optimalnya keragaman seni dan budaya

16. Urusan Pariwisata

- a) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum melibatkan seluruh stakeholder di bidang pariwisata secara holistik
- b) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan yang menjadi ikon Kota Kotamobagu
- c) Minimnya promosi pariwisata.

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a) Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga
- b) Terbatasnya akses untuk menyalurkan minat, bakat dan kreatifitas generasi muda
- c) Pembinaan organisasi kepemudaan masih terbatas.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a) Pendidikan politik masyarakat masih rendah
- b) Masih terjadinya gangguan kemananan dan ketertiban masyarakat (sengketa tanah, perkelahian, penganiyaan, kenakalan remaja, prostitusi, kumpul kebo, miras, dan pencurian

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- a) Masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antar organisasi perangkat daerah (OPD)
- b) Belum semua desa/kelurahan menyelesaikan persehatian batas wilayah administrasi desa/kelurahan
- c) Masih terbatasnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur
- d) Belum semua aset daerah (bergerak dan tidak bergerak) didata dan memiliki legalitas
- e) Sistem pembinaan jenjang karir ASN belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan
- f) Masih ada Perda yang belum dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya.
- g) Kerjasama kemitraan dan jejaring kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan belum optimal
- h) Belum optimalnya pelayanan publik di semua lini
- i) Lemahnya Penagakan supremasi hukum

- j) Masih perlunya peningkatan kualitas APIP dalam melakukan pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan review dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin.
- k) Masih perlunya penguatan pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, review laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.
- l) Perlunya peningkatan pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dipercepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- m) Masih perlunya peningkatan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- n) Perlunya peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas

dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan.

- o) Masih belum optimalnya pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- p) Perlunya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- q) Perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah tentang penggunaan dana kelurahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih.

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa
- b) Kapasitas sumber daya aparatur lembaga kemasyarakatan desa yang masih terbatas
- c) Belum optimal kemitraan antar lembaga dan masyarakat di tingkat desa
- d) Menurunnya modal sosial, budaya gotong royong, di tingkat masyarakat Desa
- e) Belum Optimalnya Pemanfaatan DD dan ADD
- f) Perlu adanya kajian peralihan status dari desa menjadi kelurahan

21. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a) Belum semua OPD memiliki sistem pendataan yang baik dan akurat
- b) Belum ada sinkronisasi data antara OPD dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan bank data dalam perumusan kebijakan pembangunan
- c) Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan belum optimal;
- d) Pemanfaatan IPTEK dan TI di masyarakat masih kurang
- e) Pemerataan akses internet gratis bagi masyarakat belum optimal
- f) Pengendalian dan integrasi aplikasi pemerintah belum optimal
- g) Pengembangan pelayanan public administrasi yang berbasis TI dan Komunikasi belum optimal

22. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

- a) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan
- b) Rendahnya minat baca masyarakat di perpustakaan
- c) Terbatasnya ketersediaan perpustakaan dan bahan bacaan di Perpustakaan Desa/Kelurahan
- d) Pengelolaan kearsipan di masing-masing OPD belum optimal
- e) Kurangnya tenaga arsiparis di masing-masing OPD.
- f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Arsip secara Digital

23. Urusan Pertanian dan Perikanan

- a) Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian perkebunan dan peternakan;
- b) Belum optimalnya pembangunan pertanian berbasis kawasan.
- c) Belum optimalnya kelembagaan produksi dan pemasaran hasil perikanan
- d) Terbatasnya akses pembudidaya terhadap permodalan

- e) Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dibandingkan ketersediaan potensi lestarnya
- f) Pengembangan usaha budidaya masih bersifat spasial, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
- g) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian
- h) Belum optimalnya penggunaan RPH
- i) Masih terbatasnya tenaga penyuluh baik kuantitas dan kualitas (kompetensi penyuluh)
- j) Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Petani

24. Urusan Perdagangan

- a) Terbatasnya sarana dan Prasarana perdagangan/distribusi
- b) Belum optimalnya kegiatan promosi komoditi perdagangan
- c) Kurangnya akses sistem jaringan informasi perdagangan
- d) Masih banyaknya pelanggaran dalam aktivitas perdagangan.
- e) Perlindungan Konsumen belum optimal

25. Urusan perindustrian

- a) Masih rendahnya jumlah dan kompetensi aparatur dan kelompok usaha kecil menengah
- b) Rendahnya nilai tambah hasil produksi sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan
- c) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah
- d) Penguasaan teknologi masih rendah

26. Urusan Ketahanan Pangan

- a) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Harus lebih ditingkatkan
- b) Pola Konsumsi Masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman

- c) Stabilitas harga masih Fluktuatif

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Nasional dan Internasional

Dalam memetakan isu-isu strategis selain didasarkan kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah, juga harus dipetakan permasalahan dari analisis lingkungan eksternal yaitu permasalahan dari dunia internasional, kebijakan nasional serta kebijakan regional. Disamping itu analisis lingkungan eksternal ini harus mampu menciptakan peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

4.2.1.1. Kebijakan Nasional

4.2.1.1.1. Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Kota Kotamobagu merupakan bagian dari Wilayah Sulawesi. Berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah sasaran pengembangan di Wilayah Sulawesi yang meliputi:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah

pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 5 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya .

2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 14 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 8,65 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,81 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,69.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi serta 2 kota baru publik yang mandiri dan terpadu.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya pengangguran dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 9 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

7. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 30% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 6 provinsi dan 48 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya system monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Sulawesi.

8. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 24 kabupaten/kota sasaran (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Makassar, Kota Palu, Kota Kendari, Kabupaten Gorontalo, Mamuju, Polewali Mandar, Maros, Takalar, Gowa, Luwu Timur, Bantaeng, Sigi, Donggala, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Kolaka, Konawe, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKS, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Terkait dengan sasaran pengembangan wilayah Sulawesi diatas, disusunlah sasaran pembangunan per provinsi yang terdapat di wilayah Sulawesi. Untuk sasaran pembangunan wilayah Sulawesi Utara, sebagaimana Kota Kotamobagu menjadi bagian di dalamnya, adalah sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi	7,1	7,2	7,8	7,8	8,3
Tingkat Kemiskinan	7,1	6,6	6,1	5,6	5,1
Tingkat Pengangguran	7,2	7,0	6,7	6,5	6,3

(sumber: Badan Pusat Statistik)

4.2.1.1.2. Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 yang disarikan menjadi Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan Trisakti tersebut dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2018.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu indikator

kesenjangan adalah kontribusi PDRB KBI selama 30 tahun (1983-2013) sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional (2015-2018) difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, dan kesembilan. Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan yaitu : Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang andal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Terkait dengan potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi, maka Tema Pembangunan Wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- Pengembangan industri berbasis logistik;
- Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis

kakao, padi, jagung;

- Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dangas bumi;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

4.2.1.1.3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 6 (enam) bidang SPM yakni:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) Sosial.

Untuk melaksanakan SPM tersebut masing-masing urusan dilaksanakan melalui indikator kinerja program beserta target hingga tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendidikan

Indikator capaian SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten/Kota diatur di dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Indikator-indikator yang terdapat di dalam SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

- Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
- Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
- Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan Pendidikan;
- Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
- Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKN;

- Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;
- Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
- Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
- Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKN dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
- Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
- setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

- Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
- Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu;
- Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
- Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
- Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik;
- Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester;

- Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

2) Kesehatan

Indikator capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| I | Pelayanan Kesehatan Dasar | <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; • Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani; • Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; • Cakupan pelayanan Ibu Nifas; • Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; • Cakupan kunjungan bayi; • Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ; • Cakupan pelayanan anak balita; • Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; • Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan; • Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat; • Cakupan peserta KB Aktif; • Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit; |
|---|---------------------------|---|

- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun√
 - Penemuan Penderita Pneumonia Balita;
 - Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif;
 - Penderita DBD yang Ditangani;
 - Penemuan Penderita Diare;
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
- II Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
 - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
- III Penyelidikan
- Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.
- IV Promosi
- Cakupan Desa Siaga Aktif.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.
6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.
8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.
9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.
11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.
13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
15. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.
16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota.
17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun

19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
20. Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.
21. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
22. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 sebagai berikut:

1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1.Cakupan ketersediaan rumah
		2.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

5) Indikator capaian SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Indikator capaian SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

I	Pelayanan Dokumen Kependudukan	<p>A. Cakupan penerbitan kartu keluarga</p> <p>B. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk</p> <p>C. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran</p> <p>D. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian</p>
II	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	<p>A. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota</p> <p>B. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>C. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota</p>
III	Penanggulangan bencana kebakaran	<p>A. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota</p> <p>B. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)</p> <p>C. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi</p> <p>D. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK</p>

6) Sosial

Indikator capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:		
	a.	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
2	b.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2 Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:		
2	a.	Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota	3 Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
	b.	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
3	Penanggulangan korban Bencana:		
	a.	Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial

				selama masa tanggap darurat
	b.	Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:			
	-	Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

4.2.1.2. Isu Internasional

4.2.1.2.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*enviromtent development*). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goals (tujuan), 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Agenda pasca SDGs 2015 akan diputuskan pada sidang umum PBB yang akan dihadiri oleh seluruh kepala

negara pada Bulan September 2015. Oleh karenanya isu berkenaan dengan hal tersebut harus sudah dijadikan perhatian oleh Kota Kotamobagu.

Adapun tujuan-tujuan dari SDGs adalah sebagai berikut:

- 1) Tanpa kemiskinan : Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat;
- 2) Tanpa kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia;
- 4) Pendidikan berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) Kesetaraan gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan;
- 6) Air bersih dan sanitasi layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Energi bersih dan terjangkau: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Berkurangnya kesenjangan: Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara;

- 11) Kota dan komunitas berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan;
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- 13) Penanganan perubahan iklim: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Ekosistem laut: Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
- 15) Ekosistem daratan: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh: Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif;
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan;

4.2.2. Isu-isu Strategis Kota Kotamobagu

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah isu-isu strategis pembangunan Kota Kotamobagu dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial budaya, ekonomi-keuangan dan legal kelembagaan.

Isu Global	Isu Nasional	Isu Provinsi Sulawesi Utara
	Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
	Penguatan Landasan Hukum dan Penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB	
		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
		Peningkatan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan
		Infrastruktur
		Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kepulauan
		Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
		Tata Kelola Birokrasi Efektif dan Efisien
		Keamanan dan ketertiban Masyarakat
		Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

4.2.3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana seperti Pembangunan Universitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta pembiayaan Pendidikan yang terjangkau untuk semua. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Demikian pula dengan peningkatan kualitas olahraga di Kota Kotamobagu perlu ditingkatkan, salah satunya dengan peningkatan kualitas tenaga pelatih di beberapa cabang olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga diantaranya pembangunan Gelanggang Olah Raga yang bertaraf nasional. Sehingga selain untuk menjadi sarana latihan bisa juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga yang ada di Kota Kotamobagu.

Mengingat kemajemukan warga Kota Kotamobagu, terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu di bangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

4.2.4. Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan

Meskipun telah banyak kemajuan, angka kematian ibu, bayi dan balita, Penyebaran virus HIV/AIDS, TB Paru, Gizi Buruk dan DBD masih merupakan isu yang harus terus mendapat perhatian, selain isu jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Masih tingginya permasalahan kesehatan diatas, tidak dapat dilepaskan dari kurangnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan, kinerja petugas kesehatan di fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan dasar

maupun pelayanan rujukan masih kurang mengutamakan pelayanan prima, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat, serta kondisi lingkungan yang belum memadai yang tercermin antara lain dari kurangnya ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi dasar.

Ditinjau dari sisi penyediaan sarana pelayanan kesehatan, meskipun Kota Kotamobagu telah mempunyai cukup sarana pelayanan kesehatan yang tersebar baik di tingkat kecamatan, Kelurahan dan desa namun masih perlu didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan fasilitas penunjang. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (secara fisik, sosial, dan ekonomi) juga masih perlu ditingkatkan.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, berbagai peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diantaranya adanya penerapan desentralisasi kesehatan yang memberi kesempatan kepada daerah untuk mengelola bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Di tingkat masyarakat, upaya pembangunan kesehatan perlu dilakukan secara lebih komprehensif, *cost-effective* dengan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dalam bidang kesehatan. Identifikasi sumber daya dan kekuatan-kekuatan lokal perlu dilakukan dan digunakan sebagai landasan pengembangan program. Berbagai upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti STMB, Posyandu dan lain-lain merupakan aset yang perlu terus ditingkatkan jumlah dan mutunya. Upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat perlu dimulai sejak usia dini melalui institusi pendidikan yang diiringi dengan penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai.

Dengan mendapatkan penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Padapa Tingkat Nasional pada tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan kualitas Kesehatan baik sarana dan prasarana, regulasi yang menunjang peningkatan kualitas kesehatan di Kota

Kotamobagu.

4.2.5. Kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu pokok yang dihadapi Kota Kotamobagu. Keadaan sampai tahun 2017 masih terdapat 7,308 Jiwa penduduk miskin atau sebesar 5.9 % dan 4.55 % Orang angkatan kerja yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan kualitas hidup menjadi masyarakat miskin diantaranya sulitnya lapangan pekerjaan, naiknya harga-harga kebutuhan pokok sementara pendapatan tidak meningkat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup standar sebagaimana layaknya sehingga mereka menjadi masyarakat golongan miskin. Dengan tingginya angka penduduk miskin maka program-program yang bersifat jaring pengaman sosial hendaknya masih dipertahankan. Disamping itu untuk memberdayakan masyarakat miskin perlu ditindaklanjuti kegiatan atau program-program untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam berusaha melalui kegiatan bimbingan teknis, bantuan peralatan dan bantuan modal sehingga dapat memberi lapangan pekerjaan.

4.2.6. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan industri dan investasi daerah

Kota Kotamobagu memiliki potensi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata yang sangat menjanjikan, namun belum dioptimalkan pemanfaatan secara baik.

Sektor pertanian merupakan sektor produktivitas yang relatif rendah. Hal ini antara lain terjadi karena masih rendahnya tingkat pendidikan petani, penerapan teknologi belum sesuai anjuran serta sarana prasarana pendukung lainnya belum memadai. Produktifitas usaha tani lahan kering khususnya komoditi kopi relatif rendah akibat kurang memperhatikan kaidah konservasi dan tingginya alih fungsi lahan serta tingkat kesuburan tanah yang rendah terutama fosfor. sedangkan pada usaha tani lahan basah

belum memberikan hasil yang optimal karena belum diterapkannya Panca Usaha tani sesuai rekomendasi, serta jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya kontinuitas ketersediaan produk pertanian baik jumlah maupun mutu.

Sektor **Ketahanan Pangan** dihadapkan pada perubahan pada perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi, harga pangan dan energi meningkat. Sehingga yang semula menjadi pengeksor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan untuk itu diperlukan upaya guna mengamankan produksi dan stok pangan, kemudian laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konvensi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Isu **sektor peternakan** berkaitan dengan pola pemeliharaan (budidaya) ternak yang belum dilakukan secara intensif. Disamping upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak yang belum optimal. Demikian juga pengetahuan dan ketrampilan peternak yang masih terbatas. Kedepan diharapkan adanya pola keterpaduan melalui integrasi di bidang pertanian dan peternakan, antara lain melalui pengembangan biogas dan sebagainya.

Sektor **perikanan** menjadi salah satu andalan Kota Kotamobagu, dimana didukung dengan potensi sumberdaya perikanan. Sektor perikanan dapat diarahkan menjadi sektor unggulan. Pemerintah perlu merencanakan upaya pemberdayaan antara lain melalui fasilitasi dalam penyediaan peralatan dan permodalan, kemitraan dengan perusahaan besar, penanganan pasca panen dan pemasaran.

Pengembangan **sektor perkebunan** juga menjadi perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Kotamobagu, karena didukung oleh karakteristik wilayah dan kesesuaian lahan. Namun demikian, peranan sub sektor perkebunan (perkebunan rakyat) terhitung masih kecil terhadap pembentukan PDRB Kota Kotamobagu, walaupun secara absolut nilai

tambah yang diberikan oleh sub sektor ini meningkat terus menerus setiap tahunnya. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian antara lain: masih maraknya serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan (kakao, Kopi). Peranan sub sektor perkebunan perlu terus ditingkatkan dan diharapkan menjadi penghasil bahan mentah untuk menunjang agroindustri baik dalam skala kecil dan atau menengah. Selain itu sub sektor perkebunan juga diharapkan berperan dalam mendorong pemerataan, pertumbuhan dan dinamika ekonomi di Kelurahan/Desa.

Kebijakan nasional di bidang **pariwisata** yang tercantum dalam Master Plan Pariwisata Nasional kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah adalah Permasalahan mendasar yang ditemui beberapa obyek wisata yang belum dilakukan secara terintegrasi. Upaya pembangunan sektor pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak terkait dan dikemas dalam konsep pengembangan wisata terkini. Selain itu pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi wisata harus diperhatikan, karena sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan.

Pembangunan sektor **industri dan perdagangan** sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur perdagangan masih terbatas terutama aktifitas ketersediaan stok dan tingkat harga. Selain itu masih sering terjadi pelanggaran perdagangan seperti penjualan barang kadaluarsa, dan praktik negatif perdagangan terutama kalangan pedagang eceran dan kaki lima. Pada sektor industri, optimalisasi industri kecil dan menengah juga merupakan isu penting. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan rumah tangga harus terus dibina agar menjadi usaha mandiri dan mempunyai daya saing, dan pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan **investasi dan penanaman modal** juga dihadapkan pada permasalahan keterbatasan ketersediaan infrastruktur baik prasarana darat,

kepemilikan lahan yang masih didominasi oleh tanah persekutuan adat, pengurusan administrasi izin penanaman modal dan investasi, serta masih kurangnya promosi terhadap potensi daerah dan peluang investasi kepada pihak investor baik melalui media cetak maupun elektronik ataupun kegiatan *expose* kerjasama dengan lembaga terkait baik berskala regional maupun nasional. Untuk itu, dalam rencana pembangunan jangka menengah, perlu memerhatikan akses terhadap promosi dan pemasaran produk, ketersediaan data-data perkembangan sektor ekonomi yang akurat dan terpilah sesuai kebutuhan para pengguna data (*user*) baik dalam bentuk data elektronik yang *on line* dan *off line* (leaflet, buklet, buku profil unggulan daerah) sehingga mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya sesuai dengan komoditi unggulan daerah.

4.2.7. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis (jalan, jembatan, air, irigasi, listrik) serta kualitas lingkungan hidup

Kondisi infrastruktur masih merupakan isu yang harus mendapat perhatian pemerintah Kota Kotamobagu. Infrastruktur dasar dan strategis menjadi vital karena sangat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur dasar yang memadai menjamin kelayakan hidup masyarakat, serta dalam skala yang lebih luas menjamin kegiatan usaha produktif masyarakat. Infrastruktur dasar yang menjadi isu meliputi kondisi jalan (Pembangunan dan pemeliharaan jalan, ketersediaan trotoar, jalur difabilitas) , ketersediaan air bersih, irigasi dan pengolahan limbah rumah tangga (sanitasi).

Permasalahan lingkungan hidup, masih dihadapkan pada masih luasnya lahan kritis, penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih tingginya sedimentasi dan pelebaran badan sungai, penyediaan ruang-ruang publik yang memadai dan pemanfaatannya untuk kebutuhan rekreasi bagi masyarakat (taman kota/kecamatan). Selain itu dalam rangka pengelolaan persampahan dihadapkan pada persoalan keterbatasan

prasarana dan sarana penunjang pengelolaan persampahan seperti kualitas TPA, jumlah TPS dan jumlah sarana transportasi pengangkut sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

4.2.8. Tata kelola pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktuserta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah satunya dengan menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kota Kotamobagu. Selain menyusun roadmap Kota Kotamobagu termasuk Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui PMPRB on-line oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Sejak tahun 2016 dirintis juga tata kelola perencanaan dan penganggaran Kota Kotamobagu telah terintegrasi berbasis IT. Ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah, namun hal ini tetap menyisakan berbagai kendala. Terkait dengan transparansi anggaran, diketahui bahwa Kota Kotamobagu termasuk daerah yang masih belum transparan, baik dalam proses pembahasan maupun penetapan APBD. Pada proses pembahasan APBD Kota Kotamobagu belum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam prosesnya. Demikian juga setelah APBD ditetapkan, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui belanja dan pendapatan pemerintah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Kotamobagu masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas. Tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. Masalah ini diindikasikan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan umum, seperti dalam hal pengangkutan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan jalan kota.

Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat.

Untuk merealisasikan pelayanan publik yang ideal, dibutuhkan kerjasama yang terorganisasi dan efektif antar komponen di dalam jajaran pemerintah kota. Satu bagian adalah sama pentingnya dibandingkan bagian lain, bahkan perlu ditumbuhkan perasaan bahwa bagiannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu dilakukan interaksi dan komunikasi intensif antara pemimpin dan warganya. Begitu pula antara pemimpin dan jajaran di bawahnya sehingga dapat dibuatkan evaluasi kinerja pemerintahan, serta dibuatkan ranking kinerja dan ranking pelayanan

masyarakat. Hal-hal tersebut diharapkan pada gilirannya kelak dapat mendorong perbaikan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, adil dan efektif dengan tetap meningkatkan standar kualitas. Program yang intensif dan terarah sangat dibutuhkan agar berkualitas kinerja tinggi. Penghargaan secara adil perlu dilembagakan agar aparat terus termotivasi dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan yang integral dan mendidik, sebagai upaya menjadikan tata kelola pemerintahan kota yang bersih.

Sebagai pelayan, pemerintah kota harus lebih memudahkan akses informasi pelayanan kepada masyarakat, misalnya informasi transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTR, layanan KTP, KK, dan surat-surat keterangan lainnya.

Selain itu untuk mendukung pelayanan publik dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, diantaranya pembangunan Kantor WaliKota Kotamobagu yang dilengkapi dengan sarana pendukungnya. Hal ini dikarenakan Kantor Walikota yang ada sekarang masi merupakan bangunan lama dengan lahan yang tidak memenuhi standar pelayanan publik

Salah satu agenda pembangunan nasional dan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.2.9. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, Pemberdayaan masyarakat serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan ruang yang lebih besar dalam menyelenggarakan pemerintahan,

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Salah satu isu penting adalah alokasi dana yang cukup besar kepada desa untuk mengelola anggaran dengan rata-rata 2 Miliar per desa. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, pemerintah Kota Kotamobagu diharapkan melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik dan kemampuan pengelolaan keuangan desa. Demikian pula masyarakat desa perlu dipersiapkan untuk menjadi mandiri dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa, agar hasil-hasil pembangunan yang dilakukan dapat secara langsung mengatasi berbagai permasalahan dasar yang dialaminya selama ini.

Salah satu isu strategis penting yang dihadapi pemerintah Kota Kotamobagu adalah lebih meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Khusus Anak untuk menuju Indonesia Layak Anak 2030. Untuk menjadi Kota Layak Anak ada 6 (enam) tingkatan yaitu start, inisiasi, Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak

Kota Kotamobagu sendiri saat ini sudah mencapai/menduduki tingkat ketiga yaitu Pratama. Untuk menuju ke tingkat selanjutnya menuju Indonesia Kota Layak Anak 2030 Kota Kotamobagu perlu mengadakan komitmen bersama untuk dapat mencapai hal tersebut.

Salah satu isu strategis dalam pengendalian Penduduk dan keluarga berencana adalah dengan meningkatkan Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk menekan tingkat pertumbuhan Penduduk.

4.2.10. Pengembangan Sistem Transportasi

Pengembangan sistem transportasi merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Sebagai salah satu kota, Kota Kotamobagu menghadapi berbagai permasalahan transportasi akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta pertanian. Oleh karena itu, perlu dibangunnya prasarana jalan lingkar (*Ring Road*) untuk pengembangan sistem transportasi terpadu sehingga memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa pertanian serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Sistem Alat transportasi yang ada masih jauh dari standar keamanan, untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 perlu adanya alat transportasi masal yang aman, nyaman serta mudah diakses.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi dengan angkutan darat diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di Kota Kotamobagu. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di Kota Kotamobagu harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan kewilayah Sekitar yang juga semakin meningkat.

4.2.11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota harus dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah perlu, baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Sedangkan pada kawasan kumuh sedang perlu diupayakan peningkatan kualitas huniannya serta prasarana sarana lingkungannya.

Tumbuh dan berkembangnya Kawasan pemukiman kumuh serta munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan pembangunan yang belum sepenuhnya terkendali mengakibatkan wajah perkotaan menjadi buruk dan kotor.

Untuk menjawab kondisi tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, pengawasan, pengendalian sesuai dengan atauran yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip urban management sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

4.2.12. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan kota serta diprioritaskan pada peningkatan kualitas RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW 2014-2034.

Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH ini, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

4.2.13. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Kota Kotamobagu, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018, RTRW Kota Kotamobagu tahun 2014-2034, dan visi misi kepala daerah terpilih.

Visi RPJMN untuk periode 2015-2019 adalah: **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”**, dengan misi yang meliputi:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, visi misi dalam RPJMD harus mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD yaitu **“Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa yang Aman, Asri, dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** dengan misi :

1. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa yang ramah dan berdaya saing;
2. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjamin kenyamanan hidup masyarakat Kotamobagu;
3. Mewujudkan pembangunan Kota Kotamobagu yang asri dan hijau berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang sehat, cerdas dan sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang berbudaya luhur, berlandaskan iman dan taqwa.

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 sebagai berikut.

5.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 adalah:

“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Visi dan misi yang akan dicapai pada lima tahun kedepan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu periode 2018-2023 adalah penjabaran dari RPJP Nasional sampai dengan RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, yang dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan yang sesuai dengan rencana dan berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

KOTA JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik.

PERDAGANGAN, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.

KEBUDAYAAN LOKAL yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip *“Moposad dan Pogogutat Motolu Adi”*.

MASYARAKAT SEJAHTERA yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BERDAYA SAING yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kota Kotamobagu Periode 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas *Kesejahteraan* masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan *Daya Saing* daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan *Pelayanan Publik* yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan aparatur yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

Bahwa untuk misi pertama, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, harmonis dalam kemajemukan, sadar

lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya Kota Kotamobagu seperti penyelenggaraan *event* budaya bertaraf internasional dan kawasan budaya serta pengembangan area-area untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat. Dengan fungsinya yang beragam, Kota Kotamobagu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datang mencari pekerjaan dan tinggal di Kotamobagu, sehingga penambahan penduduk Kota Kotamobagu akibat migrasi terus meningkat. Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Kotamobagu menjadi kota dengan multi etnis dan budaya. Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat, serta menambah tingginya persaingan antar individu. Pemberdayaan kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernilai positif menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat daya saing wilayahnya, pembangunan Kota Kotamobagu akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing wilayah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Misi Kedua : Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.

Bahwa untuk misi kedua, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada inovasi dan kreatifitas berbasis potensi ekonomi daerah yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota dengan penjelasan:

1. Lingkup penataan ruang ekonomi meliputi penataan ruang dengan memperbesar lahan untuk kawasan ekonomi perdagangan dan jasa berkelanjutan dengan menerapkan inovasi dan kreatifitas;
2. Lingkup infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan jalan, jembatan, angkutan umum, pengembangan sistem pengendalian banjir dan drainase untuk meningkatkan daya saing daerah;

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula Kota Kotamobagu tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi daerah sekitarnya, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya Kota Kotamobagu harus berorientasi pada kota pintar (*smart city*) yang memperhatikan 3 (tiga) hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa perdagangan dan arus investasi; pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan.

Pengembangan Kota Kotamobagu sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya. Membangun Kota Kotamobagu dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan *positioning* kota, diferensiasi dan *branding* atas produk-produk yang dimiliki Kota Kotamobagu. Selain itu pembangunan Kota Kotamobagu harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan.

Misi Ketiga : Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Bahwa untuk misi Ketiga, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan Kota Kotamobagu sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen) secara *online*, peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Kota Kotamobagu masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa, dan pelayanan administrasi kependudukan telah dikembangkan dan dapat diakses secara *online* melalui sistem informasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Bahwa tujuan umum pembangunan Kota Kotamobagu untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat kota yang lebih baik, yaitu:

1. Kota yang mampu meningkatkan posisi daya saing yang diukur berdasarkan tolok ukur aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, kekayaan budaya dan kondisi politik;
2. Kota yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa;
3. Kota yang PDRB per kapita-nya tumbuh pesat dan merata.
4. Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali.
5. Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bertambah baik
6. Kota yang tingkat toleransi warganya semakin baik

Untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik sebagaimana penjelasan di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat

Tujuan:

1. Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;

Sasaran:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan;

Misi Kedua : Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.

Tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata;
2. Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global;
3. Meningkatkan Investasi Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan;
3. Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Kelestarian Budaya Daerah;
4. Meningkatnya Investasi Daerah;

Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Tujuan:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Lingkungan serta Penanggulangan terhadap bencana;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga;
4. Meningkatkan Kualitas SDM.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan Berbasis e-Government;
2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;
3. Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif;
4. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana;
5. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif.

Tabel. 5.1
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Kotamobagu

VISI: KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (ADHK) (Rupiah)	23,68	25,09	26,50	27,91	29,32	30,73	30,73
				Tingkat Pengangguran (%) (%)	5,71	5,68	5,60	5,55	5,50	5,00	5,00
				PDRB per kapita (ADHB) (Rupiah)	17,06	17,53	18,00	18,47	18,94	19,41	19,41
			Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	5,96	5,94	5,92	5,91	5,90	5,88	5,88

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)	69,26	73	75	77	80	82	82,00
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	86,80	86,91	87,06	87,13	87,20	87,27	87,27
				Persentase Kesesuaian Ruang (%)	- ,00	100	100	100	100	100	100,00
			Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)	22,08	24	26	28	30	32	32,00
				Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi (%)	85,00	88,38	91,32	94,26	97,19	100	100,00
				Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,58	97,33	98,06	98,78	99,49	100	100,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Daerah	Presentase Destinasi yang di Kembangkan (%)	5	-	40	60	80	100	100
				Presentase Budaya yang dilestarikan (%)	25	50	75	85	95	100	100
		Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	3.928	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	7.000
3	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif,akuntabel dan Berbasis e-Government	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (Nilai)	63,70	70	75	80	80	80	80
				Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
				Zona Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	74	81	90	90	95	95	95

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi (%)	18	36	64	100	100	100	100
			Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase Peningkatan PAD (%)	- ,00	10	10	10	10	10	50,00
		Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Lingkungan serta Penanggulangan terhadap bencana	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat Kota Layak Anak (Predikat)	PRATAM A	PRATA MA	MADY A	MADY A	NINDY A	NINDYA	100,00
				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	94,78	94,80	94,82	94,84	94,86	94,88	94,88
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	57,48	57,48	57,49	57,50	57,51	57,52	57,52
		Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif	Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional (%)	42,14	45	48	50	60	75	75,00
				Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	9,97	10,19	10,41	10,63	10,85	11,07	11,07
				Angka harapan hidup (Tahun)	69,72	69,74	69,75	69,77	69,78	69,80	69,80

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional (%)	- ,00	- ,00	12,50	25	38	50	50,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan. Strategi disusun secara umum untuk menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan, untuk itu strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Sebagai Kota jasa, Kota Kotamobagu menetapkan Strategi ini sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan dalam rangka menciptakan nilai tambah dalam pembangunan sehingga dapat menarik investor dan stakeholder dalam meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Ini sejalan dengan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi pihak swasta dan masyarakat serta sebagai regulator dalam menciptakan regulasi dan fungsi administrative. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel. 6.1
Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi
Kota Kotamobagu

Visi: "KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (Rupiah)	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro				
					Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro				
					Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna				
					Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk				
				Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha					
				Mempantau kinerja koperasi melalui pendampingan RAT					
				Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan					
Mengembangkan Inovasi untuk peningkatan produktivitas sektor					Revitalisasi Lahan, Infrastruktur, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber daya manusia				

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

				pertanian, Perikanan dan Peternakan	Meningkatkan pengelolaan cadangan pangan dalam rangka stabilitas harga pangan
					Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Memperluas kesempatan kerja formal	Fasilitasi kerjasama lembaga pemberi kerja
				Menumbuhkan wirausaha Baru	Pelaksanaan pelatihan wirausaha
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat	Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui usaha ekonomi produktif
					Validasi data kemiskinan daerah

MISI 2 : MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah dari sumbernya	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah				
	Persentase Kesesuaian Ruang	Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	Persentase Kesesuaian Ruang	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang				
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih		Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				

MISI 2 : MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi		Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah komunal maupun individu untuk limbah domestik dan nondomestik	
	Persentase Rumah Layak Huni		Persentase Rumah Layak Huni	Menyediakan rumah layak huni	Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Presentase Destinasi yang di Kembangkan	Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Pelestarian Budaya Daerah	Presentase Destinasi yang di Kembangkan	Meningkatkan daya tarik wisata	Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata Kotamobagu melalui promosi yang efektif
					Mengembangkan kualitas Obyek Wisata
					Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secara periodik
			Presentase Pelestarian Budaya yang di Kembangkan	Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata	Menggali potensi budaya lokal
Meningkatkan Investasi Daerah	Nilai Investasi (Rupiah)	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan	Menciptakan Iklim Usaha yang Berdaya Saing

MISI 2 : MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

				mengembangkan daya tarik investasi	
--	--	--	--	------------------------------------	--

MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
					2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan Berbasis e-Government	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government				
					Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah				
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)		Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan serta pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informatika				
			Zona Kepatuhan Pelayanan Publik		Peningkatan pengembangan SOP dan SPP berbasis teknologi informatika.				
			Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi		Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber city				
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan						

MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK

Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Lingkungan serta Penanggulangan terhadap bencana	Indeks ketertiban dan ketenteraman	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan daerah	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota	
			Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan	
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Cakupan Penanganan Bencana	Mengurangi Resiko Bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	
	Menurunkan titik terdampak Bencana					
	Meningkatnya kualitas Hidup Keluarga	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
Kota Layak Anak		Kota Layak Anak		Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)		

MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK

Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif	Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas sampai jenjang perguruan tinggi dan mampu bersaing secara global	Melaksanakan Kemitraan Global
				Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan Informal	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional
			Angka harapan hidup (Tahun)	Peningkatan standar pelayanan Kesehatan	Meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan
					Meningkatkan manajemen Pelayanan rumah sakit/Puskemas
					Peningkatan mutu SDM kesehatan
			Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional	Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga	Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin
					Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga
			Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif

Sebuah strategi pembangunan daerah merupakan rangkaian perencanaan tahunan yang saling terkait. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah terdiri dari tema-tema pembangunan yang secara simultan terbentuk dari arah kebijakan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan prioritas pembangunan dan program kegiatan pemerintah daerah berdasarkan tema pembangunan tahunan. Dengan merujuk pada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, pemerintah Kota Kotamobagu kemudian merumuskan tema pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun yaitu: **a).meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan data dan informasi; b).meningkatkan daya saing melalui pendekatan data dan informasi; c).meningkatkan pelayanan public melalui pendekatan data dan informasi; d).memantapkan kualitas hasil evaluasi pembangunan; e).memantapkan kinerja kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan local.**

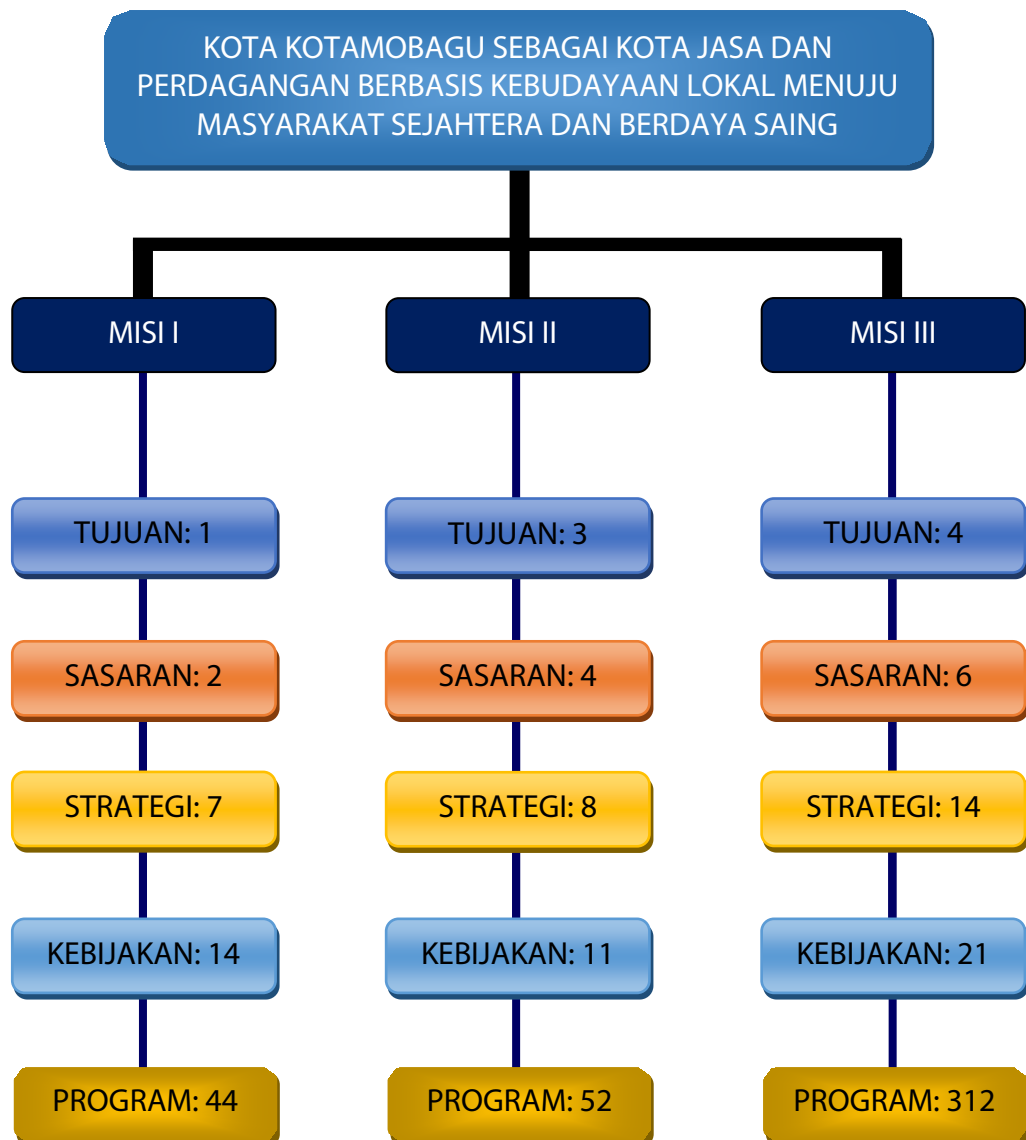
Berdasarkan tema pembangunan diatas kemudian dirumuskan Prioritas pembangunan daerah yang akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Prioritas pembangunan kotamobagu yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Investasi
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6. Reformasi Birokrasi
7. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana
8. Keadilan dan Kesetaraan Gender
9. Pemantapan Ketahanan Pangan

Untuk mendukung hal diatas, maka dijabarkan program prioritas dalam mendukung pencapaian janji-janji kepala daerah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Program Penurunan Angka Kemiskinan
3. Program Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan Lingkungan
4. Program Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman dan Perkotaan
5. Program Peningkatan Destinasi Pariwisata Daerah
6. Program Peningkatan Investasi Daerah
7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif, akuntabel dan berbasis *e-Government*
8. Program Peningkatan Kamandirian Keuangan Daerah
9. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kehidupan Bermasyarakat yang kondusif
10. Program Peningkatan Ketangguhan Terhadap Bencana
11. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pelindungan Anak
12. Program Peningkatan SDM yang sehat, Cerdas, Kompetitif dan Kreatif

SKEMA: VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR



Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Kotamobagu

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Misi-1 MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
Tujuan-1	Terwujudnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,79	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
Sasaran-1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (ADHB) (dalam juta rupiah)	23,68	25,09	26,50	27,91	29,32	30,73	32,14	33,55	34,96	36,37	37,78		
		Tingkat Pengangguran (%)	5,71	5,68	5,60	5,55	5,50	5,45	5,40	5,35	5,30	5,25	5,20		
		PDRB Perkapita (ADHK) (dalam juta rupiah)	17,06	17,53	18,00	18,47	18,94	19,41	19,88	20,35	20,82	21,29	21,76		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Cakupan Ketersediaan pangan utama (Ton)	210,00	215,00	1.397.604.500	220,00	1.367.604.500	225,00	1.362.604.500	250,00	1.414.184.500	255,00	1.373.394.500	Dinas Ketahanan Pangan	
		Cakupan Pola Pangan Harapan (Skor)	- ,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
		Cakupan Penanganan daerah rawan pangan (Skor)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Ternak (%)	32,71	20,00	402.750.000	20,00	588.550.045	20,00	528.040.000	20,00	565.000.000	20,00	550.750.040	Dinas Pertanian dan Perikanan	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (%)	100,00	100,00	500.000.000	100,00	1.227.500.000	100,00	1.380.000.000	100,00	1.732.500.000	100,00	2.235.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan (%)	100,00	100,00	1.061.400.000	100,00	2.500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Luas areal pertanian yang teraliri air irigasi (%)	100,00	100,00	1.266.847.200	100,00	1.263.712.000	100,00	1.263.712.000	100,00	1.263.712.000	100,00	1.263.712.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	41,00	80,00	375.000.000	80,00	390.000.000	66,00	390.000.000	66,00	390.000.000	66,00	390.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	38,00	38,00	40,00	42,00	44,80	47,00	49,20	51,40	53,60	55,80	58,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	433,00	455,00	250.000.000	482,00	825.000.000	507,00	325.000.000	532,00	325.000.000	557,00	325.000.000	557,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM (%)	- ,00	5,71		5,71		5,71		5,71		5,71		5,71	28,55
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pelaku usaha yang di promosikan (%)	- ,00	- ,00	150.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	82,00	83,00	400.000.000	84,00	560.000.000	85,00	410.000.000	86,00	585.000.000	87,00	410.000.000	87,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	persentase wirausaha muda (%)	59,52	64,29	250.000.000	71,43	250.000.000	80,95	250.000.000	88,10	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase penyelenggaraan kegiatan lomba (%)	90,00	95,00	30.700.000	95,00	105.700.000	95,00	105.700.000	95,00	105.700.000	95,00	105.700.000	95,00	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Lomba (%)	- ,00	100,00	62.827.600	100,00	187.827.600	100,00	187.827.600	100,00	187.827.600	100,00	187.827.600	100,00	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Kelurahan/Desa (%)	45,45	100,00	147.720.000	100,00	369.735.000	100,00	369.735.000	100,00	369.735.000	100,00	369.735.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang (%)	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang (%)	- ,00	13,33	-	20,00	123.071.400	20,00	71.341.400	20,00	30.000.000	26,67	30.000.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terlaksananya Kegiatan Lomba (%)	90,00	90,00	32.500.000	90,00	37.500.000	90,00	40.350.000	90,00	42.500.000	90,00	45.750.000	90,00	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Lomba (%)	- ,00	- ,00	-	- ,00	-	100,00	19.250.000	100,00	21.175.000	100,00	23.292.500	100,00	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Retribusi sampah (%)	51,00	70,00	31.000.000	75,00	31.000.000	80,00	31.000.000	95,00	31.000.000	100,00	31.000.000	100,00	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)	100,00	- ,00	-	100,00	373.744.000	100,00	339.342.600	100,00	335.342.600	100,00	331.342.600	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
	Persentase LPM berprestasi (%)	- ,00	- ,00		4,00		4,00		4,00		8,00		20,00	20,00

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (%)	75,00	75,00	98.692.650	100,00	97.191.250	100,00	126.892.650	100,00	97.191.250	100,00	97.191.250	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	66,67	73,33		80,00		86,67		93,33		100,00		100,00		
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (Rasio)	- ,00	0,88		0,89		0,90		0,94		1,00		1,00		
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparaturnya pemerintah desa yang kompeten (%)	90,00	100,00	693.600.000	100,00	693.600.000	100,00	693.600.000	100,00	693.600.000	100,00	693.600.000	100,00	Kotamobagu Utara	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang Kompeten (%)	- ,00	100,00	1.364.800.000	100,00	1.364.800.000	100,00	1.364.800.000	100,00	1.364.800.000	100,00	1.364.800.000	100,00	Kotamobagu Timur	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur pemerintahan desa kelurahan yang kompeten (%)	90,00	95,00	661.800.000	95,00	675.750.000	95,00	725.800.000	95,00	875.800.000	95,00	925.215.000	95,00	Kotamobagu Selatan	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Yang Kompeten (%)	- ,00	100,00	1.621.800.000	100,00	1.621.800.000	100,00	1.783.980.000	100,00	1.783.980.000	100,00	1.962.378.000	100,00	Kotamobagu Barat	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Agribisnis (%)	- ,00	- ,00	-	16,66	780.000.000	33,32	285.000.000	49,98	315.000.000	66,64	1.045.000.000	66,64	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Produk Pertanian / Perkebunan yang dipromosikan (%)	100,00	- ,00	-	100,00	335.000.000	100,00	345.000.000	100,00	355.000.000	100,00	355.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Cakupan bina kelompok petani (%)	- ,00	- ,00	-	14,35	2.525.000.000	14,35	2.120.000.000	14,35	1.860.000.000	14,35	1.825.000.000	57,40	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDB (%)	7,50	7,41	1.102.905.000	7,32	4.118.354.000	7,23	3.778.354.000	7,14	2.533.500.000	7,06	1.979.000.000	7,23	Dinas Pertanian dan Perikanan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir		
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	0,36	0,41		0,41		0,42		0,42		0,42		0,42		0,42	
	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDB (%)	28,17	28,32		28,46		28,60		28,74		28,88		28,88		28,88	
	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDB (%)	19,01	19,02		19,03		19,04		19,10		19,11		19,11		19,11	
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (%)	- ,00	- ,00	-	90,90	400.000.000	90,90	410.000.000	90,90	425.000.000	90,90	440.000.000	90,90	440.000.000	90,90	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani (%)	- ,00	- ,00		24,24		51,51		75,75		100,00		100,00		100,00	
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Ketersediaan LPG (%)	100,00	100,00	118.640.000	100,00	118.640.000	100,00	118.640.000	100,00	118.640.000	100,00	118.640.000	100,00	118.640.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	26,51	15,66	1.807.298.000	28,91	1.720.000.000	51,80	2.125.000.000	75,90	2.170.000.000	100,00	2.002.000.000	100,00	2.002.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan (%)	- ,00	- ,00	-	22,22	400.000.000	44,44	375.000.000	77,77	365.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase barang yang diawasi (%)	35,00	35,00	1.427.425.200	40,00	765.000.000	45,00	685.000.000	50,00	642.035.200	55,00	695.000.000	55,00	695.000.000	55,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perdagangan (%)	75,00	75,00	6.500.000.000	80,00	2.700.000.000	85,00	4.300.000.000	90,00	4.300.000.000	95,00	4.300.000.000	95,00	4.300.000.000	95,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Pedangan Kaki Lima dan Asongan yang dibina (%)	- ,00	- ,00	1.110.000.000	20,00	1.100.000.000	20,00	1.100.000.000	20,00	1.100.000.000	20,00	1.100.000.000	20,00	1.100.000.000	80,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	- ,00	10,17	599.700.000	10,86	1.100.000.000	10,66	1.050.000.000	9,74	1.000.000.000	9,56	1.000.000.000	50,99	1.000.000.000	50,99	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	Penguatan cadangan pangan (%)	15,00	60,00	1.589.300.000	60,00	1.749.300.000	60,00	1.394.300.000	60,00	1.699.300.000	60,00	1.394.300.000	60,00	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	Cakupan Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.150,00	2.150,00	1.935.000.000	2.150,00	1.835.000.000	2.150,00	1.885.000.000	2.150,00	1.935.000.000	2.150,00	1.835.000.000	2.150,00	Dinas Ketahanan Pangan	
	Cakupan Konsumsi Protein (Gram/kap/Hari)	57,00	57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		
	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
Sasaran-2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	5,96	5,94		5,92		5,91		5,90		5,88		5,88	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	persentase PMKS yang tertangani (%)	53,00	20,00	2.400.000.000	20,00	1.200.000.000	20,00	1.200.000.000	20,00	1.200.000.000	20,00	1.200.000.000	100,00	Dinas Sosial	
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	25,03	4,36		20,00		20,00		20,00		20,00		84,36		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	11,31	18,45	378.440.000	18,45	388.050.000	18,45	388.050.000	18,45	391.650.000	18,45	391.650.000	92,25	Dinas Sosial	
	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase perumusan kebijakan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Program pembinaan anak terlantar	Persentase Penyediaan Rumah singah bagi anak terlantar (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	468.000.000	100,00	468.000.000	100,00	468.000.000	100,00	468.000.000	100,00	Dinas Sosial	
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Persentase Panti asuhan yang mendapatkan bantuan (%)	100,00	100,00	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00	Dinas Sosial	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (%)	- ,00	- ,00	8.608.761.100	24,91	30.600.000.000	25,03	15.600.000.000	25,03	1.884.000.000	25,03	1.424.660.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan kualitas PSK S (%)	43,55	43,55	464.000.000	43,55	664.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.020.000.000	100,00	Dinas Sosial
Misi-2	MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN														
Tujuan-1	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)	69,26	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		82,00		82,00	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	86,80	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		87,27		87,27	
		Persentase Kesesuaian Ruang (%)	- ,00	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		100,00		100,00	
		Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)	22,08	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		32,00		32,00	
		Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi (%)	85,00	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		100,00		100,00	
		Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,58	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		100,00		100,00	
Sasaran-1	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)	69,26	73,00		75,00		77,00		80,00		82,00		82,00	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	86,80	86,91		87,06		87,13		87,20		87,27		87,27	
		Persentase Kesesuaian Ruang (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program Pengelolaan/penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (%)	58,33	66,67	-	64,29	85.870.000	71,43	27.500.000	75,00	92.310.000	81,25	35.000.000	81,25	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase Kapasitas Jalan yang di Tingkatkan (%)	70,00	73,00	102.281.000.000	75,00	58.000.000.000	77,00	32.500.000.000	80,00	10.000.000.000	82,00	10.000.000.000	82,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (Nilai)	0,00	0,00	24.285.000.000	0,00	12.000.000.000	0,00	104.500.000.000	0,00	16.000.000.000	0,00	17.500.000.000	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Konektivitas Jalan dan Jembatan (%)	1,61	2,43		3,03		6,07		6,07		9,10		26,70	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	87,75	87,94	2.558.310.000	92,76	40.535.752.750	95,79	25.464.870.476	98,42	22.267.620.000	100,00	13.941.018.122	94,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana (%)	- ,00	- ,00	-	16,67	1.750.000.000	22,22	1.750.000.000	16,67	1.750.000.000	22,22	1.750.000.000	77,78	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Panjang talud yang terbangun (%)	65,00	70,00	7.525.000.000	75,00	8.160.800.000	80,00	3.825.000.000	85,00	6.500.000.000	90,00	3.500.000.000	90,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (jumlah)	0,73	0,67	5.867.211.000	0,69	13.500.000.000	0,71	16.000.000.000	0,73	11.000.000.000	0,75	7.000.000.000	3,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase Sarana dan Prasarana daerah rawan bencana yang di rehabilitasi (%)	- ,00	- ,00	-	20,00	120.000.000	20,00	120.000.000	20,00	120.000.000	20,00	120.000.000	80,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase Panjang Talud dalam kondisi Baik (%)	78,00	80,00	530.780.000	82,00	530.780.000	84,00	650.500.000	86,00	650.500.000	88,00	650.500.000	88,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase data jalan dan jembatan yang update (%)	90,00	100,00	1.800.000.000	100,00	2.300.000.000	100,00	1.800.000.000	100,00	1.900.000.000	100,00	1.900.000.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase tersedianya database ruas jalan dan jembatan (%)	- ,00	19,95	750.000.000	39,89	1.000.000.000	59,20	500.000.000	80,05	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase jumlah alat ke-PUan yang tersedia (%)	50,00	60,00	3.191.010.000	70,00	1.250.000.000	80,00	750.000.000	90,00	3.116.440.000	100,00	850.000.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase Data Base Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya (%)	- ,00	100,00	775.000.000	- ,00	1.000.000.000	- ,00	2.000.000.000	- ,00	3.000.000.000	- ,00	4.000.000.000	- ,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Berkurangnya daerah terdampak Banjir (%)	15,00	20,00		25,00		30,00		40,00		50,00		50,00		
Program Perencanaan Tata Ruang	ketaatan terhadap RTRW (%)	50,00	60,00	1.500.000.000	68,00	575.000.000	72,00	1.000.000.000	79,00	2.421.687.500	83,00	1.874.503.000	83,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Pemanfaatan Ruang	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	- .00	85,00	1.250.000.000	88,00	1.552.500.000	91,00	1.785.375.000	92,00	2.053.181.250	94,00	2.361.158.750	94,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Rasio)	0,11	0,13		0,16		0,18		0,21		0,24		0,24	
	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	- .00	15,00		12,00		9,00		8,00		6,00		6,00	
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang (%)	- .00	100,00	150.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	- .00	100.000.000	- .00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang (%)	75,00	80,00	300.000.000	85,00	345.000.000	90,00	396.750.000	95,00	456.262.500	98,00	524.702.000	98,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Penataan Wilayah Administrasi Daerah (%)	- .00	- .00	-	25,00	300.000.000	25,00	351.000.000	25,00	651.000.000	25,00	872.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan kota-kota menengah dan besar (%)	70,00	100,00	600.000.000	100,00	800.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	presentase fasilitas LLAJ yang terpelihara (%)	55,56	77,78	440.000.000	100,00	540.000.000	100,00	2.380.000.000	100,00	420.000.000	100,00	570.000.000	100,00	Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)	72,31	80,00	9.121.635.000	75,00	11.223.830.400	74,00	11.105.000.000	73,00	12.295.000.000	72,00	12.842.500.000	72,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Operasionalisasi TPA di Kota Kotamobagu (Nilai)	75,56	76,00		76,00		77,00		77,00		78,00		78,00	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (%)	100,00	100,00	168.130.000	100,00	532.920.000	100,00	561.260.000	100,00	535.260.000	100,00	540.260.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	100,00	100,00	96.000.000	100,00	1.136.337.500	100,00	1.135.500.000	100,00	1.253.000.000	100,00	1.299.500.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan Hidup (Dok. 01)	95,00	80,95	219.054.000	81,82	389.780.000	82,61	265.000.000	83,33	305.000.000	84,00	275.000.000	84,00	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau (%)	20,00	20,00	1.353.875.000	20,00	4.948.405.000	40,00	4.225.895.000	40,00	2.704.595.000	60,00	-	60,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Institusi / Kelompok / Individu yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	32,00	40,00	84.135.000	42,86	208.120.000	50,00	197.500.000	50,00	268.650.000	56,67	257.450.000	56,67	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Penaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup (%)	100,00	100,00	37.250.000	100,00	125.350.000	100,00	47.000.000	100,00	242.700.000	100,00	64.500.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas (%)	- ,00	12,50	400.000.000	25,00	825.000.000	37,50	825.000.000	50,00	825.000.000	57,50	500.000.000	57,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Terampil (%)	- ,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		300,00		
Sasaran-2	Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	22,08	24,00		26,00		28,00		30,00		32,00		32,00		
	Persentase Rumah Tinggal Bersih Berkeseluruhan (%)	85,00	88,38		91,32		94,26		97,19		100,00		100,00		
	Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,58	97,33		98,06		98,78		99,49		100,00		100,00		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Sambungan Rumah (SR) Yg Berakses Sanitasi (%)	28,49	29,81	26.236.450.000	57,24	93.081.417.000	71,49	60.846.645.000	85,75	61.866.645.000	100,00	61.465.620.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase jumlah KK yang terlayani Air Minum (%)	60,00	65,00		70,00		80,00		90,00		100,00		81,00		

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase terbangunnya Jalan Paving (%)	60,00	65,00	1.950.000.000	70,00	2.350.000.000	80,00	3.470.000.000	95,00	4.580.000.000	100,00	5.700.000.000	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	96,58	97,33	9.205.640.000	98,06	9.428.206.750	98,78	8.794.870.750	99,49	8.879.197.150	100,00	8.980.388.830	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen pengembangan perumahan (%)	70,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	- ,00	15,30	649.480.000	20,70	2.470.814.180	19,80	2.228.103.516	27,50	1.823.403.700	16,70	2.233.603.516	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU (%)	- ,00	14,29	6.308.310.000	14,29	5.937.130.000	28,57	7.853.756.000	28,57	7.219.748.000	14,29	7.729.156.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	- ,00	0,10	696.070.000	0,10	469.670.000	0,10	391.895.000	0,10	379.870.000	0,10	379.870.000	0,50	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (%)	- ,00	19,81	3.085.950.000	19,97	2.236.900.000	19,97	1.736.900.000	20,13	1.236.900.000	20,13	1.236.900.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi ()	- ,00	20,00	1.354.385.000	20,00	1.502.300.000	20,00	1.526.300.000	20,00	702.300.000	20,00	602.300.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Tujuan-2	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Persentase Destinasi yang di Kembangkan (%)	5,00	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		100,00		100,00	
Sasaran-1	Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Kelestarian Budaya Daerah	Persentase Destinasi yang di Kembangkan (%)	5,00	- ,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	
		Persentase Budaya yang dilestarikan (%)	25,00	50,00		75,00		85,00		95,00		100,00		100,00	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai-nilai Budaya yang dikembangkan (%)	85,18	29,63	75.000.000	85,18	175.000.000	85,18	175.000.000	85,18	175.000.000	85,18	127.000.000	85,18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	- ,00	- ,00	-	- ,00	329.243.800	20,00	329.243.800	20,00	329.243.800	20,00	329.243.800	20,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (%)	100,00	100,00	135.000.000	100,00	750.000.000	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	Dinas Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (%)	25,00	25,00	390.000.000	50,00	1.315.000.000	62,50	1.315.000.000	62,50	1.315.000.000	62,50	1.315.000.000	62,50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata (%)	100,00	90,91	729.628.800	91,67	1.763.537.000	92,31	1.796.186.000	92,86	1.849.073.000	93,33	1.917.956.000	93,33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	lama kunjungan wisata (Hari)	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata (%)	- ,00	- ,00	-	40,00	16.010.015.000	60,00	16.010.015.000	80,00	16.010.015.000	100,00	16.010.015.000	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tujuan-3	Meningkatkan Investasi Daerah	Nilai Investasi (Rupiah)	3.928.588.264.774,00	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		10.928.588.264.774,00		10.928.588.264.774,00
Sasaran-1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Rupiah)	3.928.588.264.774,00	1.400.000.000.000,00		1.400.000.000.000,00		1.400.000.000.000,00		1.400.000.000.000,00		1.400.000.000.000,00		7.000.000.000.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Inseminator PKB, ATR (%)	50,00	- ,00	-	100,00	80.000.000	100,00	65.000.000	100,00	70.000.000	100,00	75.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	79,00	83,00	469.000.000	84,00	1.220.248.000	84,00	1.230.248.000	85,00	1.230.248.000	85,00	1.235.248.000	85,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase besar pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	54,05	45,00	382.195.200	55,56	382.195.000	56,10	207.195.000	56,63	207.195.000	57,14	207.195.000	57,14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Persentase besar tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	- ,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar (persen)	- ,00	- ,00	100.000.000	23,33	1.985.000.000	23,33	245.000.000	26,66	405.000.000	26,66	265.000.000	99,98	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (jumlah)	439,00	450,00	1.880.000.000	475,00	1.870.000.000	500,00	1.865.000.000	525,00	1.860.000.000	550,00	1.855.000.000	550,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio)	3.334,00	3.400,00		3.500,00		4.000,00		4.500,00		5.000,00		5.000,00	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	persentase pelayanan penerbitan perizinan (%)	100,00	100,00	160.000.000	100,00	70.000.000	100,00	80.000.000	100,00	90.000.000	100,00	100.000.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Daerah (%)	- .00	- .00	-	10,00	250.000.000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase Peningkatan Kualitas Produk (%)	- .00	1,60	125.000.000	1,60	200.000.000	1,50	200.000.000	1,50	200.000.000	1,50	200.000.000	7,70	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase Sentra yang Dikembangkan (%)	- .00	10,00	175.000.000	30,00	3.275.000.000	50,00	2.050.000.000	80,00	4.550.000.000	100,00	2.550.000.000	100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
MISI-3 MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK															
Tujuan-1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	54,60	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	80,00	80,00	80,00	80,00		
Sasaran-1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan Berbasis e-Government	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) (Nilai)	63,70	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	74,37	81,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
		Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi (%)	18,18	36,36	63,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi (persen)	100,00	100,00	75.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	125.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	90,00	100,00	2.933.587.800	100,00	2.948.587.800	100,00	2.949.187.800	100,00	2.949.187.800	100,00	2.949.187.800	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	952.800.000	100,00	1.086.100.000	100,00	1.087.700.000	100,00	1.089.300.000	100,00	1.090.900.000	100,00	Kotamobagu Barat	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	90,00	90,00	704.119.350	90,00	828.814.580	90,00	787.929.832	90,00	798.813.871	90,00	799.582.900	90,00	Kotamobagu Selatan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran (%)	60,00	70,00	197.750.000	80,00	617.122.350	85,00	671.975.210	90,00	705.230.897	95,00	741.808.607	95,00	Kotamobagu Timur	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	752.020.200	100,00	757.850.200	100,00	757.850.200	100,00	757.850.200	100,00	757.850.200	100,00	Kotamobagu Utara	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	96,12	100,00	1.052.077.475	100,00	1.223.760.100	100,00	1.223.760.100	100,00	1.223.760.100	100,00	1.198.760.350	100,00	Dinas Pendidikan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60,00	65,00	363.181.200	70,00	389.681.200	75,00	394.681.200	80,00	421.181.200	85,00	428.181.200	75,00	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	458.551.050	100,00	458.201.050	100,00	458.551.050	100,00	458.201.050	100,00	458.201.050	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	627.421.800	100,00	752.830.000	100,00	829.260.000	100,00	892.136.000	100,00	4.985.250.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	75,00	90,00	2.309.977.825	90,00	2.425.884.850	90,00	2.439.182.705	90,00	2.597.455.880	90,00	2.604.975.925	90,00	Dinas Perhubungan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	830.706.300	100,00	830.706.300	100,00	830.706.300	100,00	830.706.300	100,00	830.706.300	100,00	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	758.870.000	100,00	758.870.000	100,00	758.870.000	100,00	758.870.000	100,00	758.870.000	100,00	Dinas Kearsipan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	5.949.134.000	100,00	6.473.067.400	100,00	7.030.141.640	100,00	7.625.024.105	100,00	8.261.534.686	100,00	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	95,00	95,00	1.186.237.200	95,00	994.698.000	95,00	1.132.278.000	95,00	1.123.893.000	95,00	1.068.395.500	95,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	90,00	100,00	370.000.000	100,00	370.000.000	100,00	396.000.000	100,00	397.000.000	100,00	402.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (persen)	90,00	100,00	944.168.725	100,00	1.825.801.250	100,00	1.825.801.250	100,00	1.825.801.250	100,00	1.825.801.250	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	506.600.650	100,00	508.600.650	100,00	508.600.650	100,00	508.600.650	100,00	508.600.650	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	99,00	90,00	1.235.816.000	100,00	1.236.305.600	100,00	1.237.554.992	100,00	1.238.564.372	100,00	1.238.814.372	98,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	90,00	100,00	790.380.032	100,00	986.165.000	100,00	994.090.000	100,00	1.072.090.000	100,00	1.191.740.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	90,00	95,00	2.480.750.900	95,00	2.495.851.700	95,00	2.581.264.700	95,00	2.686.570.000	95,00	2.776.658.700	95,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	537.909.900	100,00	739.084.800	100,00	741.484.800	100,00	741.484.800	100,00	743.984.800	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi perkantoran (%)	- .00	90,00	1.221.957.550	80,00	1.172.355.050	90,00	1.103.895.800	90,00	1.095.395.800	90,00	1.185.395.800	88,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (Persen)	- .00	90,00	1.396.291.872	90,00	1.405.291.872	90,00	1.429.441.872	90,00	1.450.991.872	90,00	1.469.691.872	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	835.200.000	100,00	835.200.000	100,00	850.200.000	100,00	835.200.000	100,00	840.200.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	1.060.960.000	100,00	1.060.960.000	100,00	1.105.960.000	100,00	1.100.960.000	100,00	1.105.960.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	838.300.000	100,00	838.300.000	100,00	838.300.000	100,00	838.300.000	100,00	838.300.000	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	746.949.000	100,00	754.131.500	100,00	759.662.125	100,00	767.026.381	100,00	796.733.695	100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	85,00	90,00	2.142.000.000	90,00	2.142.000.000	90,00	2.242.000.000	90,00	2.382.000.000	90,00	2.482.500.000	90,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	944.186.600	100,00	1.400.000.000	100,00	1.484.000.000	100,00	1.509.000.000	100,00	1.582.000.000	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	419.355.250	100,00	463.625.250	100,00	471.155.250	100,00	489.375.250	100,00	498.805.250	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	585.200.000	100,00	677.150.000	100,00	707.850.000	100,00	736.000.000	100,00	775.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	767.862.000	100,00	1.243.602.400	100,00	1.255.602.400	100,00	1.685.812.400	100,00	1.696.812.400	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	- .00	95,00	485.077.300	95,00	620.452.150	95,00	620.452.150	95,00	620.452.150	95,00	620.452.150	95,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	2.221.272.000	100,00	2.417.500.000	100,00	2.521.750.000	100,00	2.627.500.000	100,00	2.765.000.000	100,00	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	1.637.500.000	100,00	1.606.500.000	100,00	1.607.500.000	100,00	1.606.500.000	100,00	1.606.500.000	100,00	Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	90,00	100,00	1.064.250.000	100,00	1.342.800.000	100,00	1.362.800.000	100,00	1.390.300.000	100,00	1.392.800.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	90,00	100,00	6.027.000.000	100,00	6.007.000.000	100,00	6.068.000.000	100,00	6.068.000.000	100,00	6.068.000.000	100,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	676.859.850	100,00	766.913.750	100,00	843.605.125	100,00	927.965.638	100,00	1.020.762.206	100,00	Inspektorat Daerah	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)	100,00	100,00	1.397.874.700	100,00	1.669.617.500	100,00	1.649.837.500	100,00	1.649.837.500	100,00	1.649.837.500	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	100,00	83.625.000	100,00	83.625.000	100,00	83.625.000	100,00	83.625.000	100,00	83.625.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Umum	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	80,00	85,00	6.139.376.800	88,00	6.139.376.800	90,00	6.139.376.800	92,00	6.139.376.800	94,00	6.139.376.800	89,80	Sekretariat Daerah	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran (%)	95,29	85,00	4.080.500.000	85,00	4.093.500.000	85,00	4.158.500.000	85,00	4.213.500.000	85,00	4.325.500.000	85,00	Sekretariat DPRD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (Persen)	90,00	100,00	889.567.375	100,00	1.654.701.000	100,00	1.990.901.000	100,00	1.772.851.000	100,00	1.772.851.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran (persen)	100,00	100,00	421.000.000	100,00	422.000.000	100,00	422.000.000	100,00	422.500.000	100,00	423.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	90,00	90,00	1.078.000.000	90,00	1.622.000.000	90,00	1.185.000.000	90,00	1.205.000.000	90,00	762.000.000	90,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	90,00	90,00	361.315.500	90,00	978.615.500	90,00	200.731.500	90,00	202.431.500	90,00	203.031.500	90,00	Kotamobagu Barat	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	90,00	100,00	181.880.650	100,00	165.513.000	100,00	151.741.205	100,00	163.830.450	100,00	166.501.765	100,00	Kotamobagu Selatan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	60,00	90,00	635.144.000	90,00	412.190.500	90,00	591.312.750	90,00	569.194.025	90,00	690.314.427	90,00	Kotamobagu Timur	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	175.689.800	100,00	333.689.800	100,00	175.689.800	100,00	83.689.800	100,00	325.689.800	100,00	Kotamobagu Utara	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	96,53	100,00	332.320.200	100,00	532.300.000	100,00	427.300.000	100,00	517.300.000	100,00	367.300.000	100,00	Dinas Pendidikan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	60,00	70,00	332.390.000	75,00	144.729.000	80,00	165.200.000	85,00	232.000.000	90,00	165.500.000	80,00	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	540.500.000	100,00	3.000.000	100,00	70.617.950	100,00	73.000.000	100,00	3.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	146.000.000	100,00	256.000.000	100,00	223.900.000	100,00	263.000.000	100,00	267.000.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	75,00	80,00	1.210.937.755	80,00	4.519.822.650	80,00	2.945.711.035	80,00	1.265.411.755	80,00	1.280.582.550	80,00	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	90,00	100,00	1.210.000.000	100,00	407.000.000	100,00	40.000.000	100,00	65.000.000	100,00	75.000.000	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	170.000.000	100,00	170.000.000	100,00	175.000.000	100,00	185.000.000	10,080,00	185.000.000	2.096,00	Dinas Kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	3.082.143.580	100,00	2.701.270.820	100,00	2.802.490.090	100,00	1.568.673.666	100,00	1.723.249.914	100,00	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	95,00	95,00	836.855.000	95,00	242.490.000	95,00	264.285.000	95,00	227.555.000	95,00	226.965.000	95,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	90,00	100,00	100.000.000	100,00	223.000.000	100,00	233.000.000	100,00	256.000.000	100,00	256.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (persen)	90,00	100,00	192.759.600	100,00	522.759.600	100,00	542.759.600	100,00	542.759.600	100,00	542.759.600	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	52.985.000	100,00	344.919.000	100,00	364.919.000	100,00	294.919.000	100,00	294.919.000	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100,00	100,00	718.295.000	100,00	128.400.000	100,00	258.700.000	100,00	166.400.000	100,00	147.400.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	90,00	100,00	147.032.000	100,00	611.100.000	100,00	269.200.000	100,00	252.550.000	100,00	578.250.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	80,00	90,00	962.920.000	90,00	1.662.570.000	90,00	777.570.000	90,00	1.161.070.000	90,00	823.570.000	90,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	101.014.850	100,00	207.542.800	100,00	242.842.800	100,00	152.842.800	100,00	87.842.800	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	90,00	90,00	278.789.750	90,00	264.810.500	90,00	462.372.250	90,00	202.120.000	90,00	302.120.000	90,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (persen)	- .00	90,00	1.460.000.000	90,00	1.260.000.000	90,00	837.000.000	90,00	1.690.000.000	90,00	1.790.000.000	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	470.000.000	100,00	470.000.000	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	210.000.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	315.000.000	100,00	55.000.000	100,00	25.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	875.000.000	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	602.345.000	100,00	926.687.939	100,00	887.937.939	100,00	154.602.000	100,00	222.930.000	100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	728.500.000	100,00	478.500.000	100,00	340.000.000	100,00	360.000.000	100,00	725.000.000	100,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100,00	100,00	1.435.140.000	100,00	1.396.200.000	100,00	1.015.000.000	100,00	1.025.000.000	100,00	1.035.000.000	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100,00	100,00	128.050.000	100,00	71.000.000	100,00	67.000.000	100,00	87.700.000	100,00	71.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	86.000.000	100,00	90.800.000	100,00	90.500.000	100,00	104.750.000	100,00	111.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	53.000.000	100,00	662.000.000	100,00	743.100.000	100,00	486.100.000	100,00	74.100.000	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	21.436.050,00	90,00	46.854.000	90,00	169.000.000	90,00	491.500.000	90,00	168.500.000	90,00	155.000.000	90,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang kesehatan (%)	100,00	100,00	450.000.000	100,00	1.100.000.000	100,00	685.000.000	100,00	775.000.000	100,00	865.000.000	100,00	Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	409.500.000	100,00	409.500.000	100,00	909.500.000	100,00	909.500.000	100,00	439.500.000	100,00	Dinas Sosial	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	291.900.000	100,00	240.000.000	100,00	235.000.000	100,00	160.000.000	100,00	220.000.000	100,00	Dinas Pertanian dan Perikanan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	90,00	100,00	1.872.500.000	100,00	4.552.500.000	100,00	862.500.000	100,00	812.500.000	100,00	887.500.000	100,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	139.506.550	100,00	458.457.205	100,00	888.802.926	100,00	976.683.218	100,00	334.751.540	100,00	Inspektorat Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (%)	100,00	100,00	631.807.225	100,00	485.600.000	100,00	515.600.000	100,00	535.600.000	100,00	585.600.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur (%)	100,00	100,00	6.023.798.174	100,00	6.413.548.174	100,00	6.023.798.174	100,00	6.413.548.174	100,00	6.413.548.174	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Umum	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80,00	85,00	-	90,00	-	92,00	-	94,00	-	98,00	-	91,80	Sekretariat Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase layanan sarana dan prasarana (%)	97,13	90,00	1.090.200.000	90,00	4.480.000.000	90,00	1.650.000.000	90,00	1.565.000.000	90,00	1.910.000.000	90,00	Sekretariat DPRD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	90,00	100,00	154.953.000	100,00	373.420.000	100,00	628.466.000	100,00	428.860.000	100,00	469.860.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (persen)	80,00	85,00	152.500.000	85,00	127.500.000	85,00	157.500.000	85,00	132.500.000	85,00	162.500.000	85,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	31.500.000	100,00	12.000.000	100,00	35.000.000	100,00	-	100,00	-	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (Persen)	90,00	90,00	-	90,00	61.900.000	90,00	62.300.000	90,00	62.700.000	90,00	63.100.000	90,00	Kotamobagu Barat	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)	90,00	100,00	40.500.000	100,00	33.600.000	100,00	35.700.000	100,00	37.800.000	100,00	39.900.000	100,00	Kotamobagu Selatan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	60,00	90,00	58.650.000	90,00	19.500.000	90,00	67.447.500	90,00	99.602.250	90,00	81.611.475	90,00	Kotamobagu Timur	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	-	100,00	95.650.000	100,00	35.150.000	100,00	35.150.000	100,00	95.650.000	100,00	Kotamobagu Utara	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	99,57	100,00	-	100,00	185.700.000	100,00	185.700.000	100,00	185.700.000	100,00	185.700.000	100,00	Dinas Pendidikan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	60,00	70,00	5.000.000	75,00	4.600.000	80,00	5.000.000	85,00	4.600.000	90,00	5.000.000	80,00	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	- 00	100,00	61.900.000	100,00	16.900.000	100,00	56.900.000	100,00	21.900.000	100,00	49.400.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	14.950.000	100,00	45.750.000	100,00	49.000.000	100,00	54.000.000	100,00	59.000.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)	80,00	80,00	74.055.000	80,00	64.055.000	80,00	64.055.000	80,00	74.055.000	80,00	64.055.000	80,00	Dinas Perhubungan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	95,00	100,00	79.325.000	100,00	18.000.000	100,00	79.325.000	100,00	18.000.000	100,00	79.325.000	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	45.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	Dinas Kearsipan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	265.500.000	100,00	246.200.000	100,00	280.040.000	100,00	302.460.000	100,00	313.880.000	100,00	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kepatuhan aparatur (%)	95,00	95,00	-	- ,00	48.500.000	- ,00	-	95,00	22.500.000	- ,00	11.000.000	38,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	- ,00	-	100,00	28.000.000	- ,00	-	- ,00	-	100,00	26.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (persen)	90,00	100,00	117.545.000	100,00	117.545.000	100,00	117.545.000	100,00	117.545.000	100,00	117.545.000	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	- ,00	-	100,00	67.000.000	100,00	67.000.000	100,00	67.000.000	100,00	67.000.000	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	35.650.000	100,00	68.375.000	100,00	35.650.000	100,00	68.375.000	100,00	35.650.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	-	100,00	56.800.000	100,00	72.000.000	100,00	87.000.000	100,00	105.000.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	85,00	95,00	60.600.000	95,00	18.000.000	95,00	24.600.000	95,00	18.000.000	95,00	24.600.000	95,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	35.000.000	100,00	12.500.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	80,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Aparatur (%)	- ,00	90,00	46.975.000	90,00	27.720.000	90,00	25.000.000	- ,00	-	90,00	25.000.000	72,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Layanan peningkatan disiplin aparatur (nasang)	- ,00	90,00	238.710.000	90,00	259.700.000	90,00	244.700.000	90,00	244.700.000	90,00	259.700.000	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Aparatur (%)	90,00	100,00	23.800.000	100,00	23.800.000	100,00	23.800.000	100,00	23.800.000	100,00	23.800.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)	90,00	100,00	101.800.000	- ,00	-	100,00	47.050.000	- ,00	-	100,00	30.800.000	100,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)	100,00	100,00	125.000.000	100,00	125.000.000	100,00	140.000.000	100,00	140.000.000	100,00	140.000.000	100,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)	100,00	100,00	103.000.000	100,00	103.000.000	100,00	103.000.000	100,00	103.000.000	100,00	103.000.000	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)	- ,00	100,00	36.450.000	- ,00	-	100,00	30.340.000	- ,00	-	100,00	18.225.000	60,00	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	51.000.000	100,00	10.000.000	100,00	36.000.000	100,00	10.000.000	100,00	16.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir		
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	80,00	100,00	72.000.000	100,00	72.000.000	100,00	72.000.000	100,00	72.000.000	100,00	72.000.000	100,00	100,00	Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	- ,00	90,00	-	90,00	18.000.000	90,00	24.000.000	90,00	7.200.000	90,00	7.200.000	90,00	90,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	215.000.000	100,00	10.000.000	100,00	211.750.000	100,00	230.000.000	100,00	300.000.000	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	710.000.000	100,00	260.000.000	100,00	610.000.000	100,00	260.000.000	100,00	610.000.000	100,00	100,00	Dinas Sosial
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	78.100.000	100,00	111.000.000	- ,00	-	100,00	87.500.000	- ,00	-	- ,00	- ,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	431.107.000	100,00	431.107.000	100,00	431.107.000	100,00	431.107.000	100,00	431.107.000	100,00	100,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100,00	100,00	66.895.000	100,00	73.584.500	100,00	80.942.950	100,00	89.037.245	100,00	97.940.970	100,00	100,00	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	TINGKAT KEPATUHAN APARATUR (%)	100,00	100,00	91.890.000	100,00	115.200.000	100,00	81.600.000	100,00	115.200.000	100,00	57.600.000	100,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	215.100.000	100,00	215.100.000	100,00	215.100.000	100,00	215.100.000	100,00	215.100.000	100,00	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (Persen)	90,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kepatuhan aparatur (%)	99,04	90,00	612.500.000	90,00	275.000.000	90,00	250.000.000	90,00	250.000.000	90,00	325.000.000	90,00	90,00	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90,00	100,00	-	100,00	87.280.000	100,00	61.100.000	100,00	87.280.000	100,00	61.100.000	100,00	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (persen)	90,00	90,00	44.080.000	90,00	47.500.000	90,00	48.000.000	90,00	50.000.000	90,00	50.000.000	90,00	90,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	60.000.000	100,00	84.000.000	100,00	84.000.000	100,00	84.000.000	100,00	84.000.000	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (Persen)	90,00	90,00	-	90,00	84.200.000	90,00	84.400.000	90,00	84.600.000	90,00	84.800.000	90,00	90,00	Kotamobagu Barat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	-	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	100,00	Kotamobagu Selatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (Orang)	90,00	-	147.207.000	100,00	37.400.000	100,00	48.745.350	100,00	62.009.885	100,00	68.210.873	100,00	Kotamobagu Timur	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	58.900.000	100,00	58.900.000	100,00	58.900.000	100,00	58.900.000	100,00	58.900.000	100,00	Kotamobagu Utara	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	97,42	100,00	-	100,00	65.000.000	100,00	65.000.000	100,00	65.000.000	100,00	65.000.000	100,00	Dinas Pendidikan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	60,00	70,00	53.400.000	75,00	143.400.000	80,00	53.400.000	85,00	143.400.000	90,00	143.400.000	80,00	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	-	100,00	90.000.000	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	-	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (Orang)	5,00	4,00	150.000.000	4,00	90.000.000	4,00	60.000.000	4,00	60.000.000	4,00	60.000.000	4,00	Dinas Perhubungan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	80,00	90,00	45.450.000	90,00	45.450.000	90,00	45.450.000	90,00	45.450.000	90,00	45.450.000	90,00	Dinas Ketahanan Pangan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	100,00	100,00	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00	Dinas Kearsipan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	90,00	100,00	2.040.000.000	100,00	2.304.000.000	100,00	2.256.000.000	100,00	2.292.000.000	100,00	2.292.000.000	100,00	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (persen)	95,00	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	95,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	-	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	175.000.000	100,00	175.000.000	100,00	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (persen)	90,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	100,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	- ,00	-	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	- ,00	100,00	73.460.000	100,00	73.460.000	100,00	73.460.000	100,00	73.460.000	100,00	73.460.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	27.450.000	100,00	57.000.000	100,00	65.000.000	100,00	75.000.000	100,00	85.000.000	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	85,00	90,00	39.400.000	90,00	53.100.000	90,00	53.100.000	90,00	53.100.000	90,00	66.800.000	90,00	90,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	54.360.000	- ,00	-	100,00	22.000.000	- ,00	-	40,00	40,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	60,00	90,00	130.880.000	- ,00	-	- ,00	-	90,00	130.880.000	90,00	-	90,00	90,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	- ,00	90,00	100.000.000	90,00	100.000.000	90,00	100.000.000	90,00	100.000.000	90,00	100.000.000	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	100,00	100,00	132.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi (%)	100,00	100,00	69.000.000	100,00	69.000.000	100,00	69.000.000	100,00	69.000.000	100,00	69.000.000	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	100,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	80.000.000	100,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	100,00	100,00	175.000.000	100,00	185.000.000	100,00	190.000.000	100,00	195.000.000	100,00	195.000.000	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	100,00	100,00	48.450.000	100,00	48.450.000	100,00	48.450.000	- ,00	-	- ,00	-	60,00	Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	100,00	100,00	220.000.000	100,00	220.000.000	100,00	220.000.000	100,00	220.000.000	100,00	220.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	- ,00	90,00	-	90,00	344.967.600	90,00	344.967.600	90,00	344.967.600	90,00	344.967.600	90,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	220.000.000	100,00	255.000.000	100,00	275.000.000	100,00	290.000.000	100,00	300.000.000	100,00	Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	100,00	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	Dinas Sosial	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	30.000.000	- ,00	-	100,00	30.000.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	90,00	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	175.000.000	100,00	175.000.000	100,00	200.000.000	100,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	100,00	100,00	1.001.500.000	100,00	1.101.650.000	100,00	1.211.815.000	100,00	1.332.996.500	100,00	1.466.296.150	100,00	Inspektorat Daerah	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)	100,00	100,00	46.400.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	90,00	100,00	60.650.000	100,00	60.650.000	100,00	60.650.000	100,00	60.650.000	100,00	60.650.000	100,00	Sekretariat Daerah	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase keikutsertaan aparatur dalam bimbingan teknis dan rapat koordinasi antar sekretariat DPRD (%)	- ,00	90,00	250.700.000	90,00	435.000.000	90,00	435.000.000	90,00	435.000.000	90,00	435.000.000	90,00	Sekretariat DPRD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)	90,00	100,00	-	100,00	145.830.000	100,00	145.830.000	100,00	145.830.000	100,00	145.830.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (persen)	- .00	2,00	35.000.000	2,00	35.000.000	2,00	35.000.000	2,00	35.000.000	2,00	35.000.000	10,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	- .00	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	90,00	90,00	45.000.000	90,00	45.000.000	90,00	45.000.000	90,00	45.000.000	90,00	45.000.000	90,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	100,00	-	100,00	18.000.000	100,00	30.000.000	100,00	42.000.000	100,00	54.000.000	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100,00	100,00	128.000.000	100,00	128.000.000	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Kualitas OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan (%)	90,00	100,00	538.617.250	100,00	538.617.250	100,00	538.617.250	100,00	544.917.250	100,00	544.917.250	100,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100,00	100,00	250.000.000	100,00	300.000.000	100,00	350.000.000	100,00	400.000.000	100,00	450.000.000	100,00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Buku)	1,00	1,00	50.000.000	1,00	80.000.000	1,00	80.000.000	1,00	80.000.000	1,00	80.000.000	1,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja SKPD bernilai baik (persen)	40,00	75,00	80.000.000	75,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	70,00	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	- ,00	21,51	557.520.000	19,35	700.320.000	17,21	832.820.000	19,35	945.320.000	22,58	1.067.820.000	22,58	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Manajerial (%)	- ,00	- ,00	669.007.000	50,00	3.392.387.000	75,00	2.640.207.000	100,00	2.627.207.000	100,00	2.579.707.000	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional (%)	- ,00	15,48		37,09		59,03		80,32		100,00		100,00		
	Persentase PNS Aliih status dari CPNS ke PNS (%)	- ,00	- ,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	33,00	36,00		42,00		48,00		53,00		59,00		59,00		
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Pendapatan Rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	550.000.000	100,00	39.714.145.473	100,00	43.685.560.020	100,00	48.054.116.022	100,00	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik Bernilai Baik (Persen)	40,00	75,00	130.000.000	100,00	175.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	80,00	Kotamobagu Selatan	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik (%) Cakupan Anggota	- ,00	- ,00	-	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	Kotamobagu Utara	
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB (Bersantasi)	79,71	80,00	392.500.000	80,00	180.000.000	80,00	380.000.000	80,00	180.000.000	80,00	170.000.000	80,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir		
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB (Persentase)	69,51	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB (Orang)	80,86	81,00		81,00		81,00		81,00		81,00		81,00		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah (%)	100,00	7,69	1.750.000.000	23,08	3.200.000.000	23,08	2.700.000.000	23,08	1.700.000.000	23,08	1.450.000.000	100,01		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	- ,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana penyuluhan KKB tingkat kecamatan (Kecamatan)	- ,00	100,00	1.272.098.000	100,00	-	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan (%)	85,00	86,00	165.406.600	87,00	600.000.000	88,00	750.000.000	89,00	900.000.000	90,00	1.050.000.000	90,00		Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Sekolah Sehat (%)	7,14	- ,00	-	2,68	50.000.000	2,68	50.000.000	2,68	50.000.000	2,68	50.000.000	10,72		Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan (%)	100,00	100,00	187.295.200	100,00	435.000.000	100,00	480.000.000	100,00	515.000.000	100,00	550.000.000	100,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah (%)	- ,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan (%)	90,00	90,00	4.592.313.720	95,00	19.850.000.000	95,00	21.900.000.000	100,00	23.925.000.000	100,00	24.950.000.000	100,00		Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (%)	22,22	11,11	44.205.330.700	14,81	30.530.031.798	18,52	16.736.675.898	14,81	21.541.864.645	3,70	19.858.483.289	62,95		UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	24.000.000.000	100,00	25.000.000.000	100,00	26.000.000.000	100,00	27.000.000.000	100,00	28.000.000.000	100,00	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan peserta BPJS KIS JKN (%)	75,00	90,00	13.610.131.000	95,00	4.700.000.000	100,00	4.800.000.000	100,00	5.350.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00	Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan kesehatan (%)	19,00	-	0	22,00	307.000.000	25,00	322.000.000	27,00	322.000.000	30,00	327.000.000	30,00	Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH (Orang)	11,00	24,00	108.051.400	20,00	575.000.000	18,00	605.000.000	15,00	625.000.000	10,00	665.000.000	10,00	Dinas Kesehatan	
	Angka Kematian Balita per 1000 KH (Orang)	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
	Angka Kematian Neonatal per 1000 KH (Bayi)	11,00	24,00		20,00		18,00		15,00		10,00		10,00		
	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1000 kelahiran hidup)	993,00	976,00		980,00		982,00		985,00		990,00		990,00		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	181,50	85,00		87,00		90,00		93,00		95,00		95,00		
	Cakupan pelayanan anak balita (%)	36,00	85,00		87,00		90,00		93,00		95,00		95,00		
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	98,00	80,00	670.767.600	90,00	2.918.448.000	92,00	2.928.448.000	93,00	2.938.448.000	95,00	2.943.448.000	95,00	Dinas Kesehatan	
	Angka kematian ibu per 100.000 KH (100.000 KH)	167,00	167,00		167,00		167,00		167,00		167,00		167,00		
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	80,70	90,00		91,00		92,00		93,00		95,00		95,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Cakupan kunjungan bayi (%)	93,00	90,00		91,00		92,00		93,00		95,00		95,00	
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	70,20	85,00		90,00		91,00		93,00		95,00		95,00	
	Cakupan pelayanan nifas (%)	74,00	85,00		90,00		91,00		93,00		95,00		95,00	
Program Pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan (%)	90,00	100,00	200.000.000	100,00	270.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	270.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan data/informasi	Cakupan pengembangan Data dan Informasi dalam peningkatan penyelenggaraan E-Government (%)	25,00	23,26	521.930.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	23,26	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana (%)	70,00	80,00	150.000.000	85,00	250.000.000	90,00	250.000.000	95,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD (%)	90,00	100,00	42.250.000	100,00	43.950.000	100,00	45.650.000	100,00	47.350.000	100,00	49.050.000	100,00	Kotamobagu Barat
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (%)	90,00	100,00	48.500.000	100,00	56.450.000	100,00	64.900.000	100,00	71.200.000	100,00	79.400.000	100,00	Kotamobagu Selatan
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD (%)	90,00	100,00	13.500.000	100,00	24.775.700	100,00	27.253.270	100,00	29.978.597	100,00	32.976.456	100,00	Kotamobagu Timur
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD (%)	90,00	100,00	46.463.000	100,00	46.463.000	100,00	46.463.000	100,00	46.463.000	100,00	46.463.000	100,00	Kotamobagu Utara

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	100,00	324.070.941	100,00	420.000.000	100,00	320.000.000	100,00	320.000.000	100,00	550.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
Program perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPDP (%)	100,00	100,00	1.892.146.000	100,00	1.690.000.000	100,00	1.965.000.000	100,00	1.720.000.000	100,00	1.965.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Penjabaran konsistensi program RKPDP ke dalam APBD (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program perencanaan pembangunan daerah	Predikat Nilai Sakip (Nilai)	63,54	70,00	215.000.000	75,00	175.000.000	75,00	175.000.000	80,00	175.000.000	80,00	175.000.000	80,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi (%)	15,00	15,00	450.000.000	60,00	1.250.000.000	75,00	250.000.000	85,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program perencanaan sosial budaya	Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang terselesaikan (%)	100,00	100,00	1.275.665.000	100,00	1.425.000.000	100,00	1.100.000.000	100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase perencanaan wilayah dan sumber daya air (%)	- ,00	20,00	350.000.000	40,00	350.000.000	60,00	350.000.000	80,00	350.000.000	100,00	100.000.000	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan (%)	100,00	100,00	150.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	Dinas Perhubungan	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan massal dan Angkutan Umum perkotaan (%)	- ,00	33,33	105.000.000	54,55	10.315.000.000	100,00	2.600.000.000	100,00	7.500.000.000	100,00	350.000.000	100,00	Dinas Perhubungan	
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Basin)	6,88	6,49	982.450.000	6,12	1.283.100.000	5,77	1.290.600.000	5,44	943.100.000	5,13	928.100.000	5,13	Dinas Perhubungan	
	pemasangan rambu-rambu (%)	26,67	17,89		17,77		17,77		17,77		17,65		88,85		
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum (jumlah)	1.623,00	1.623,00	48.720.000	1.957,00	50.910.000	2.291,00	6.000.000.000	2.625,00	55.710.000	2.959,00	57.270.000	2.959,00	Dinas Perhubungan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	persentase kepemilikan KIR angkutan Umum (%)	100,00	-	.00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase titik kemacetan yang teratasi (%)	67,00	67,00	630.644.900	75,00	3.640.000.000	85,00	1.720.000.000	80,00	1.720.000.000	92,00	1.720.000.000	92,00	Dinas Perhubungan	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (%)	90,00	100,00	-	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	Kotamobagu Selatan	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (%)	90,00	100,00	-	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	Kotamobagu Timur	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (%)	90,00	100,00	31.000.000	100,00	31.000.000	100,00	31.000.000	100,00	31.000.000	100,00	31.000.000	100,00	Kotamobagu Utara	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (Rasio)	0,93	0,94	952.270.000	0,95	1.359.952.500	0,96	1.370.758.500	0,97	1.371.564.500	0,98	1.387.370.500	0,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Rasio Anak berakte kelahiran (Rasio)	0,89	0,90		0,91		0,92		0,93		0,94		0,94		
	Rasio pasangan berakte nikah (Rasio)	0,46	0,60		0,70		0,80		0,85		0,90		0,90		
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	93,00	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00		98,00		
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (%)	88,21	88,21		88,39		88,57		88,92		89,20		89,20		
	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	5,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
	Cakupan penerbitan Akta Kematian (%)	82,67	93,04		93,23		93,41		93,60		93,78		93,78		
	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	88,21	89,00		90,00		91,00		93,00		94,00		94,00		
	Persentase keakuratan data disandingkan dengan data konsolidasi bersih (%)	-	.00	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri (%)	41,26	42,00	105.097.100	43,00	86.876.200	44,00	62.700.000	45,00	62.700.000	46,00	62.700.000	44,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan (%)	25,00	125,00		125,00		125,00		125,00		125,00		125,00	
Program pelayanan kontrasepsi	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu (%)	100,00	100,00	1.022.707.400	100,00	481.471.000	100,00	471.123.300	100,00	2.052.123.300	100,00	471.123.300	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	9,30	9,30		9,30		9,30		9,30		9,30		9,30	
	Ratio Aseptor KB (%)	78,73	78,80		78,80		79,00		79,00		79,00		78,92	
	Persentase penggunaan kotrasepsi jangka panjang (MK JP) (%)	34,65	34,65		35,50		36,50		37,10		37,70		37,70	
	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19 (%)	78,73	78,80		78,80		79,00		79,00		79,00		79,00	
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	27,00	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	71,03	73,00	86.400.000	75,00	86.400.000	77,00	92.100.000	79,00	42.100.000	80,00	42.100.000	80,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Agenda Kegiatan DPRD yang terfasilitasi (%)	98,99	90,00	15.750.000.000	90,00	15.650.000.000	90,00	15.670.000.000	90,00	16.170.000.000	90,00	16.190.000.000	90,00	Sekretariat DPRD
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan Peningkatan Kedinasan KDH/WKDH (%)	80,00	85,00	4.639.690.000	90,00	4.639.690.000	95,00	4.639.690.000	94,00	4.639.690.000	98,00	4.639.690.000	92,40	Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan daerah (persen)	- .00	100,00	496.340.000	100,00	1.112.340.000	100,00	1.228.320.000	100,00	1.312.340.000	100,00	1.312.340.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (%)	100,00	100,00	-	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	-	100,00	-	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemilihan sangaadi (%)	- .00	- .00	-	- .00	-	100,00	150.000.000	- .00	-	- .00	-	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase laporan capaian serapan anggaran APBD (%)	97,00	98,00	386.440.000	98,00	386.440.000	98,00	386.440.000	98,00	386.440.000	98,00	386.440.000	98,00	Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan administrasi dan pelaporan desa/kelurahan (%)	100,00	100,00	-	100,00	299.217.600	100,00	450.792.600	100,00	299.217.600	100,00	299.217.600	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan (%)	89,60	85,00	1.050.800.550	85,00	1.342.880.605	86,00	1.477.168.666	86,00	1.624.885.531	87,00	1.787.374.085	87,00	Inspektorat Daerah
	Persentase pelanggaran pegawai (%)	6,12	6,00		5,50		5,00		4,50		4,00		4,00	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase peningkatan kapabilitas aparat pengawas (persen)	20,00	40,00	137.500.000	100,00	151.250.000	100,00	166.375.000	100,00	183.012.500	100,00	201.313.750	100,00	Inspektorat Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Standarisasi LPSE (%)	50,00	55,56	420.000.000	66,67	490.000.000	77,78	545.000.000	94,44	535.000.000	100,00	600.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Laporan Pelaksanaan SPM (%)	- .00	- .00	-	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan sangaadi dan sangaadi banding lelang Barang/Jasa yang terlayani (%)	100,00	100,00	17.000.000	100,00	16.000.000	100,00	15.000.000	100,00	14.000.000	100,00	13.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			(Tahun 0)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani (%)	90,00	90,00	875.000.000	90,00	875.000.000	90,00	875.000.000	90,00	875.000.000	90,00	875.000.000	90,00	875.000.000	90,00	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah (%)	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	90,00	90,00	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Fasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD (%)	100,00	100,00	750.000.000	100,00	750.000.000	100,00	800.000.000	100,00	850.000.000	100,00	850.000.000	100,00	850.000.000	100,00	Sekretariat DPRD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan (%)	- ,00	- ,00	-	- ,00	-	27,27	500.000.000		42,42	900.000.000		30,31	750.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STUDUN) (%)	100,00	100,00	24.500.000	100,00	26.000.000	100,00	26.000.000	100,00	26.000.000	100,00	26.000.000	100,00	26.000.000	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu (%)	100,00	100,00	1.674.712.600	100,00	2.289.558.000	100,00	2.850.708.000	100,00	3.275.133.000	100,00	3.730.708.000	100,00	3.730.708.000	100,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1,85	0,84		1,11		1,11		1,11		1,11		1,11	1,11	1,11	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	rasio kebutuhan PNS (Persen)	51,65	60,00	150.000.000	65,00	150.000.000	70,00	150.000.000	75,00	150.000.000	80,00	150.000.000	80,00	150.000.000	80,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Daerah (%)	100,00	100,00	460.000.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Pengendalian Laju Inflasi daerah (Nilai)	3,83	3,30	-	3,30	56.000.000	3,30	56.000.000	3,30	56.000.000	3,30	56.000.000	3,30	56.000.000	3,30	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase tindak lanjut layanan keluhan masyarakat (%)	100,00	100,00	300.000.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Kelurahan/Desa yang mengelola arsip secara baku (%)	- ,00	3,03	75.000.000	9,06	10.000.000	9,06	125.000.000	9,06	150.000.000	9,06	150.000.000	39,27	Dinas Kearsipan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan pengembangan dan pemberdayaan an kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	24,44	40,52	14.230.571.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	40,52	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi (%)	26,92	23,08	150.000.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	23,08	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	cakupan pengembangan dan pemberdayaan an kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	42,42	21,21	10.610.400.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	21,21	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase Penyedia yang profesional (%)	100,00	100,00	1.900.000.000	100,00	2.150.000.000	100,00	2.275.000.000	100,00	2.400.000.000	100,00	2.520.000.000	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	persentase pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan (%)	- ,00	100,00	100.000.000	100,00	165.000.000	100,00	181.500.000	100,00	199.650.000	100,00	219.615.000	100,00	Inspektorat Daerah
Program Manajemen Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan * area Perubahan Reformasi Birokrasi (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	100,00	225.000.000	80,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (%)	77,05	70,49	1.990.000.000	70,49	6.465.000.100	70,49	6.440.000.100	70,49	6.440.000.100	70,49	6.440.000.100	70,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan dan pengembangan aplikasi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan e-Government (%)	23,26	30,23	314.750.000	46,51	1.496.350.000	65,12	850.850.000	81,40	1.079.950.000	100,00	578.750.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	cakupan layanan telekomunikasi (%)	72,00	76,00	1.048.097.500	85,00	13.880.775.000	90,00	12.093.000.000	95,00	10.393.000.000	100,00	10.293.000.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Cakupan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TKI) (%)	56,58	69,74		82,89		90,76		96,05		100,00		100,00	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral (%)	100,00	100,00	35.000.000	100,00	1.220.000.000	100,00	1.120.000.000	100,00	1.120.000.000	100,00	1.220.000.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (%)	56,58	69,74	50.000.000	82,89	960.000.000	90,76	492.040.000	96,05	492.040.000	100,00	492.040.000	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan (%)	- ,00	100,00	2.400.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	Kotamobagu Barat
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan (%)	- ,00	100,00	1.200.000.000	100,00	3.890.000.000	100,00	3.900.000.000	100,00	3.900.000.000	100,00	3.900.000.000	100,00	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan (1)	- ,00	- ,00	2.400.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	7.800.000.000	100,00	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan (%)	- ,00	100,00	1.200.000.000	100,00	3.900.000.000	100,00	3.900.000.000	100,00	3.900.000.000	100,00	3.900.000.000	100,00	Kotamobagu Utara
Sasaran-2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	- ,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	50,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	19,00	20,00	11.432.876.525	20,00	6.392.876.525	20,00	6.150.375.425	20,00	6.373.624.625	20,00	6.592.624.125	20,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
		56,58	59,50		59,98		59,98		60,01		58,08		59,51	
		3,02	1,57		1,58		1,59		1,66		1,73		1,73	
		0,21	0,69		0,70		0,71		0,72		0,73		0,73	
		43,42	40,50		40,02		40,02		39,99		41,92		41,92	
Tujuan-2	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Lingkungan serta Penanggulangan terhadap bencana	100,00	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		100,00		100,00	

	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sasaran-1	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara ()	- ,00	23,26	499.930.000	23,26	499.930.000	23,26	499.930.000	18,61	499.930.000	11,63	499.930.000	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan (%)	- ,00	- ,00	-	90,00	300.000.000	90,00	300.000.000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	Kotamobagu Timur
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	88,01	100,00	529.680.000	100,00	993.570.000	100,00	557.460.000	100,00	571.350.000	100,00	1.035.240.000	100,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Pencegahan Potensi Konflik (%)	100,00	100,00	175.000.000	100,00	361.403.200	100,00	328.403.200	100,00	300.403.200	100,00	360.283.200	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penegakan PERDA (%)	100,00	100,00	50.450.000	100,00	180.450.000	100,00	180.450.000	100,00	180.450.000	100,00	180.450.000	100,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara (%)	- ,00	11,11	200.000.000	16,66	574.620.875	16,66	554.620.875	16,66	544.622.625	16,66	544.622.625	77,75	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan ke agamaan (%)	100,00	100,00	9.144.394.500	100,00	9.683.262.000	100,00	9.544.394.500	100,00	9.683.262.000	100,00	9.544.394.500	100,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat (%)	100,00	100,00	180.000.000	100,00	738.501.000	100,00	673.864.000	100,00	632.864.000	100,00	632.864.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Limas yang Terlatih Dalam Pamswakarsa (%)	- ,00	20,00	40.000.000	20,00	865.000.000	20,00	265.000.000	20,00	265.000.000	20,00	265.000.000	20,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik (%)	100,00	100,00	598.862.000	100,00	863.265.000	100,00	590.000.000	100,00	540.000.000	100,00	540.000.000	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Sasaran-2	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	cakupan penanganan bencana (Indeks)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentasi Laporan Kejadian Bencana (%)	- ,00	- ,00	-	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Cakupan Perbaikan Perumahan Akibat bencana dan Relokasi Program Pemerintah (%)	- .00	- .00	-	20,00	750.000.000	20,00	750.000.000	20,00	750.000.000	20,00	750.000.000	16,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	91,98	95,00	40.610.400	95,00	2.390.610.400	95,00	290.610.400	95,00	290.610.400	95,00	290.610.400	95,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	- .00	62,79		62,79		62,79		62,79		62,79		62,79	
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	- .00	- .00	-	100,00	800.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	800.000.000	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan Bencana (%)	- .00	50,00	88.000.000	75,00	670.000.000	80,00	920.000.000	85,00	720.000.000	90,00	720.000.000	90,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Pengembangan Penyelenggaraan Tangguh Bencana	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan (%)	100,00	- .00	-	25,00	530.000.000	25,00	530.000.000	25,00	530.000.000	25,00	1.590.000.000	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Tujuan-3 Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,78	- .00		- .00		- .00		- .00		94,88		94,88	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja Akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	57,48	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		57,52	57,52	
	Kota Layak Anak (Kategori)	100,00	- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		100,00	100,00	
Sasaran-1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (Kategori)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,78	94,80		94,82		94,84		94,86		94,88		94,88	94,88	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	57,48	57,48		57,49		57,50		57,51		57,52		57,52	57,52	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (%)	90,00	95,00	-	95,00	25.000.000	95,00	25.000.000	95,00	25.000.000	95,00	25.000.000	95,00	Kotamobagu Selatan
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	0,03	0,02	63.030.200	0,01	63.030.200	0,01	63.030.200	0,01	63.030.200	- ,00	63.030.200	- ,00	Kotamobagu Utara
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	58,65	58,67	467.328.600	58,70	397.123.600	58,75	397.123.600	58,80	397.123.600	58,85	397.123.600	58,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA (%)	5,00	32,00	1.849.066.000	35,00	1.254.252.700	30,00	1.242.968.000	20,00	1.158.441.800	20,00	1.158.441.800	137,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	100,00	2.095.547.000	100,00	1.044.840.400	100,00	1.229.796.128	100,00	968.197.947	100,00	1.257.374.975	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio KDRT (%)	0,05	0,05		0,04		0,04		0,03		0,03		0,04	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir		
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	38,51	38,53	391.251.000	38,55	145.460.000	38,60	391.251.000	38,65	145.460.000	38,70	391.251.000	38,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase faskes dan jejaringnya (Diseluruh tingkatan wilayah) yang berkerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	38,30	45,00	389.000.000	57,00	372.000.000	66,00	372.000.000	71,00	392.400.000	72,00	372.000.000	72,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program Keluarga Berencana	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100,00	100,00	2.709.145.100	100,00	3.135.798.600	100,00	3.129.310.100	100,00	2.997.048.600	100,00	3.201.310.100	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Laju Pertumbuhan Penduduk IPP (orang)	2,80	1,36		1,31		1,27		1,25		1,23		1,23		
	Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) (%)	44,00	19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		19,00		
	rata-rata usia kawin pertama wanita (%)	22,98	22,98		22,98		22,98		22,98		22,98		22,98		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan (Sekolah)	14,00	18,00		22,00		26,00		30,00		34,00		34,00	
	Peresentasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)	52,30	58,10		58,10		58,10		58,10		58,10		58,10	
	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	- ,00	1,00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		1,00	
	Cakupan PKB / PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Sektor)	7,00	7,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir			
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	- .00	32,06		32,06		32,06		32,06		32,06		32,06		32,06	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	persentase PKK aktif (%)	- .00	100,00	300.000.000	100,00	711.321.400	100,00	707.500.000	100,00	755.000.000	100,00	805.000.000	100,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Rasio)	- .00	1,92		1,92		1,95		1,95		1,95		1,95		1,95	
Tujuan-4	Meningkatkan Kualitas SDM	72,00	- .00		- .00		- .00		- .00		72,25		72,25		72,25	
Sasaran-1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif	42,14	45,00		47,50		50,00		60,00		75,00		75,00		75,00	
	Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	9,97	10,19		10,41		10,63		10,85		11,07		11,07		11,07	
	Angka harapan hidup (Tahun)	69,72	69,74		69,75		69,77		69,78		69,80		69,80		69,80	
	Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional (%)	- .00	- .00		12,50		25,00		37,50		50,00		50,00		50,00	
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terakreditasi sesuai standar (%)	100,00	88,00	-	90,00	865.000.000	93,00	945.000.000	95,00	1.025.000.000	100,00	1.125.000.000	100,00		Dinas Kesehatan	
	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	23,00	30,00		31,00		32,00		33,00		37,00		37,00		37,00	
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	140,00	153,00		166,00		179,00		184,00		196,00		196,00		196,00	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (jumlah)	1.596,00	2.196,00	1.350.000.000	2.496,00	1.500.000.000	2.796,00	1.550.000.000	3.096,00	1.550.000.000	3.096,00	1.600.000.000	3.096,00		Dinas Kearsipan	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun (jumlah)	796,00	913,00		1.003,00		1.154,00		1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	rasio perpustakaan persatuan penduduk (Basis)	0,29	0,29		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	
	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (jumlah)	0,05	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,25	
	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (jumlah)	10.851,00	16.851,00		18.351,00		19.851,00		21.351,00		22.851,00		22.851,00	
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	70,18	87,72	1.873.550.000	91,23	1.873.550.000	94,74	1.873.550.000	98,25	1.873.550.000	100,00	1.873.550.000	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	75,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00	
	Persentase atlet berprestasi (%)	53,33	56,67		60,00		63,33		66,67		70,00		70,00	
	Cakupan pembinaan olahraga (%)	73,08	76,92		80,77		84,62		88,46		92,30		92,30	
Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi Pendukung di bidang pendidikan (%)	94,79	- .00	-	95,75	352.000.000	96,70	374.940.000	97,66	397.880.000	98,64	225.820.000	98,64	Dinas Pendidikan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	227.310.600	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	350.000.000	100,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan prevalensi gizi kurang (%)	1,26	2,12		2,06		1,95		1,88		1,78		1,78	
	Cakupan prevalensi gizi buruk (%)	0,04	0,50		0,50		0,40		0,20		0,10		0,10	
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	53,21	56,18	1.726.675.150	59,04	2.692.152.136	61,79	3.477.902.136	64,44	2.815.402.136	66,99	2.690.331.637	66,99	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik (%)	66,67	75,75	24.900.268.690	80,00	37.082.720.370	86,67	38.164.023.136	93,33	33.880.976.387	100,00	27.919.084.606	100,00	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik (%)	72,86	75,39		78,01		80,72		83,52		86,42		86,42	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,36	99,43		99,85		99,87		99,90		99,93		99,80	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,76	99,89		99,91		99,83		99,93		99,97		99,91	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,72	0,64		0,58		0,52		0,46		0,41		0,52	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,18	0,13		0,10		0,07		0,05		0,04		0,08	
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	86,16	86,77		87,38		87,99		88,59		89,20		89,20	
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	85,41	85,93		86,45		86,97		87,49		88,01		88,01	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	86,16	86,77		87,38		87,99		88,59		89,20		89,20	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	76,36	76,99		77,61		78,23		78,85		79,47		79,47	
	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs (%)	2,13	2,17		2,20		2,23		2,26		2,29		2,29	
	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI (%)	1,62	1,64		1,66		1,67		1,69		1,71		1,71	
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs (%)	105,07	105,17		105,27		105,37		105,47		105,57		105,57	
	Angka partisipasi kasar SD/MI (%)	95,45	95,64		95,81		95,99		96,16		96,32		96,32	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Imp/act/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (Rasio)	46,61	46,71		46,56		46,53		46,50		46,48		46,48	
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (Rasio)	43,15	47,90		53,18		59,04		65,55		72,78		72,78	
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (Rasio)	0,09	0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09	
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	86,19	87,74		89,31		90,92		92,55		94,22		94,22	
Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	99,87	99,88	941.160.600	99,89	2.819.675.500	99,91	1.748.375.700	99,92	1.754.085.700	99,93	1.519.795.700	99,93	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/Djv (%)	79,47	79,98	152.257.800	80,49	1.390.744.130	81,01	1.399.050.560	81,53	1.305.656.990	82,05	1.186.463.420	82,05	Dinas Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan obat dan perbekalan serta menjamin mutu obat dan perbekalan terhadap Masyarakat (%)	90,00	85,00	295.000.000	85,00	85.000.000	90,00	40.000.000	95,00	85.000.000	100,00	40.000.000	91,00	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	75,00	80,00	1.178.746.000	80,00	3.050.000.000	85,00	3.350.000.000	85,00	3.600.000.000	90,00	3.950.000.000	90,00	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit (%)	31,18	26,57	8.511.800.000	19,04	9.362.980.000	18,75	10.299.278.000	17,66	11.329.205.800	17,97	12.462.126.380	17,97	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	6,53	9,49	4.156.515.000	9,49	5.423.816.800	9,49	6.153.198.480	9,49	7.422.018.328	9,49	6.989.220.161	9,49	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	53,93	56,92		56,92		56,92		56,92		56,92		56,92	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Apotik dan IRTP yang diawasi (%)	70,00	-	-	85,00	350.000.000	90,00	400.000.000	95,00	450.000.000	100,00	550.000.000	100,00	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan jumlah organisasi UKBM (%)	100,00	100,00	281.800.000	100,00	727.100.000	100,00	751.500.000	100,00	770.900.000	100,00	795.300.000	100,00	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan pembantu puskesmas (%)	33,00	33,00		33,00		33,00		33,00		33,00		33,00	
	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita)	5,48	4,02		4,11		4,21		4,30		4,40		4,40	
	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	10,04	11,80		11,80		11,80		11,80		11,80		11,80	
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	2,42	3,16		3,16		3,16		3,16		3,16		3,16	
Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Gizi Pasien (%)	100,00	100,00	3.216.673.395	100,00	3.538.340.735	100,00	3.892.174.808	100,00	4.281.392.289	100,00	4.709.531.518	100,00	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	1,50	2,40	163.665.350	2,40	1.100.500.000	2,40	1.280.500.000	2,40	1.275.500.000	2,40	1.395.300.000	2,40	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (TA) (%)	80,00	85,00		88,00		89,00		90,00		90,00		90,00	
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	60,60	90,00		91,00		92,00		93,00		95,00		92,20	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir	
			(Tahun 0)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
	Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun (%)	27,00	40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		60,00	
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (5)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	71,60	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	34,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (per 100.000 penduduk)	330,00	350,00		361,00		357,00		352,00		348,00		348,00	
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (per 100.000 penduduk)	0,80	1,60		1,60		1,50		1,50		1,50		1,50	
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00	
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	83,00	90,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit penyakit NBD (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Penderita diare yang ditangani (%)	81,00	83,00		83,00		83,00		83,00		83,00		83,00	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Akhir				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Angka kejadian Malaria (per 100.000 penduduk)	4,00	0,80			0,80			0,80			0,80			0,80		
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0,01	0,02			0,02			0,02			0,03			0,03		
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun (%)	1,57	1,57	40.256.000		1,57	40.256.000		1,57	40.256.000		1,57	40.256.000		1,57	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Total Fertility Rate (TFR) (Orang)	2,38	2,17			2,13			2,10			2,07			2,04		
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (Kelompok)	13,00	29,00	546.200.000		42,00	492.200.000		54,00	537.500.000		66,00	493.500.000		78,00	378.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS) (Persentas)	81,00	75,00	40.000.000		70,00	40.000.000		60,00	40.000.000		50,00	40.000.000		40,00	40.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan kelompok keluarga yang melakukan Pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100,00	100,00	225.000.000		100,00	225.000.000		100,00	225.000.000		100,00	225.000.000		100,00	225.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	82,76	86,21	2.917.350.000		89,66	2.983.350.000		93,10	3.033.350.000		96,55	3.073.350.000		100,00	3.108.350.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	persentase Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga (%)	50,00	100,00	550.000.000		100,00	570.000.000		100,00	590.000.000		100,00	610.000.000		100,00	630.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	persentase prestasi olahraga (%)	61,54	65,38	2.300.000.000		69,23	2.300.000.000		73,08	2.300.000.000		76,92	2.300.000.000		80,77	2.300.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen Arsip Dinamis (%)	- 00	- 00	-		100,00	230.000.000		100,00	235.000.000		100,00	235.000.000		100,00	250.000.000	Dinas Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	2,33	2,33	100.000.000		11,63	100.000.000		11,63	100.000.000		11,63	100.000.000		11,63	100.000.000	Dinas Kearsipan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019–2023 Kota Kotamobagu

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja	719.791.690.904	1.140.458.732.138	1.158.586.584.070	1.046.392.240.800	1.172.419.486.641
Belanja Tidak Langsung	348.964.238.173	353.966.918.949	359.287.319.603	365.069.227.346	383.177.798.733
Belanja Pegawai	265.872.172.073	335.222.493.021	330.887.665.835	263.577.373.162	277.022.613.995
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	4.275.300.000	3.631.771.783	3.155.969.560	27.882.565.182	19.538.917.360
Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	967.089.632	1.458.514.788	6.367.994.094	12.977.245.127
Belanja Bagi Hasil	1.300.000.000	50.412.391	1.958.592.933	2.254.118.888	3.696.730.847
Belanja Bantuan Keuangan	65.016.766.100	14.095.152.121	21.826.576.487	64.987.176.019	69.942.291.404
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	-	-	-	-
Belanja Langsung	370.827.452.731	786.491.813.189	799.299.264.467	681.323.013.454	789.241.687.908
Belanja Pegawai	7.036.343.350	18.889.128.459	39.100.183.511	61.411.306.251	46.402.981.138
Belanja Barang dan Jasa	261.388.494.430	370.544.196.607	320.096.922.885	272.029.987.275	403.466.435.729
Belanja Modal	102.402.614.951	397.058.488.123	440.102.158.071	347.881.719.929	339.372.271.040

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pembiayaan	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
Penerimaan Pembiayaan	22.216.784.000	32.018.726.682	30.725.855.054	30.016.914.881	9.670.530.536
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

Tabel 7.2
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2019-2023

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Pendidikan																
Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi Pendukung di bidang pendidikan	%	94,79	0,000	0	95,750	352.000.000	96,700	374.940.000	97,660	397.880.000	98,640	225.820.000	98,640	1.350.640.000	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	53,21	56,180	1.726.675.150	59,040	2.692.152.136	61,790	3.477.902.136	64,440	2.815.402.136	66,990	2.690.331.637	66,990	13.402.463.195	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,47	79,980	152.257.800	80,490	1.390.744.130	81,010	1.399.050.560	81,530	1.305.656.990	82,050	1.186.463.420	82,050	5.434.172.900	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,18	0,130	24.900.268.690	0,100	37.082.720.370	0,070	38.164.023.136	0,050	33.880.976.387	0,040	27.919.084.606	0,078	161.947.073.189	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SD/MI	%	95,45	95,640		95,810		95,990		96,160		96,320		96,320		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86,16	86,770		87,380		87,990		88,590		89,200		89,200		
	Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	66,67	75,750		80,000		86,670		93,330		100,000		100,000		
	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	72,86	75,390		78,010		80,720		83,520		86,420		86,420		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	46,61	46,710		46,560		46,530		46,500		46,480		46,480		
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,76	99,890		99,910		99,830		99,930		99,970		99,906		
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	86,19	87,740		89,310		90,920		92,550		94,220		94,220		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	86,16	86,770		87,380		87,990		88,590		89,200		89,200		
	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	%	2,13	2,170		2,200		2,230		2,260		2,290		2,290		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	43,15	47,900		53,180		59,040		65,550		72,780		72,780		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,72	0,640		0,580		0,520		0,460		0,410		0,522		
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	%	105,07	105,170		105,270		105,370		105,470		105,570		105,570		
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	85,41	85,930		86,450		86,970		87,490		88,010		88,010		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	76,36	76,990		77,610		78,230		78,850		79,470		79,470		
	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	1,62	1,640		1,660		1,670		1,690		1,710		1,710		
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,36	99,430		99,850		99,870		99,900		99,930		99,796		
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,09	0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		
Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,87	99,880	941.160.600	99,890	2.819.675.500	99,910	1.748.375.700	99,920	1.754.085.700	99,930	1.519.795.700	99,930	8.783.093.200	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	1596	2.196.000	1.350.000.000	2.496.000	1.500.000.000	2.796.000	1.550.000.000	3.096.000	1.550.000.000	3.096.000	1.600.000.000	3.096.000	7.550.000.000	Dinas Kearsipan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	10851	16.851,000		18.351,000		19.851,000		21.351,000		22.851,000		22.851,000		
	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Jumlah	796	913,000		1.003,000		1.154,000		1.275,000		1.275,000		1.275,000		
	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	0,05	0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,250		
	rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,29	0,290		0,300		0,300		0,300		0,300		0,300		
Kesehatan																
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan obat dan perbekalan serta menjamin mutu obat dan perbekalan terhadap Masyarakat	%	90	85,000	295.000.000	85,000	85.000.000	90,000	40.000.000	95,000	85.000.000	100,000	40.000.000	91,000	545.000.000	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	%	31,18	26,570	8.511.800.000	19,040	9.362.980.000	18,750	10.299.278.000	17,660	11.329.205.800	17,970	12.462.126.380	17,970	51.965.390.180	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	75	80,000	1.178.746.000	80,000	3.050.000.000	85,000	3.350.000.000	85,000	3.600.000.000	90,000	3.950.000.000	90,000	15.128.746.000	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Apotik dan IRTP yang di awasi	%	70	0,000	0	85,000	350.000.000	90,000	400.000.000	95,000	450.000.000	100,000	550.000.000	100,000	1.750.000.000	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan prevalensi gizi buruk	%	0,04	0,500	227.310.600	0,500	350.000.000	0,400	350.000.000	0,200	350.000.000	0,100	350.000.000	0,100	1.627.310.600	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Cakupan prevalensi gizi kurang	%	1,26	2,120		2,060		1,950		1,880		1,780		1,780		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	83	90,000	163.665.350	90,000	1.100.500.000	91,000	1.280.500.000	92,000	1.275.500.000	93,000	1.395.300.000	93,000	5.215.465.350	Dinas Kesehatan
	Angka kejadian Malaria	per 100.000 penduduk	4	0,800		0,800		0,800		0,800		0,800		0,800		
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,005	0,020		0,020		0,020		0,030		0,030		0,030		
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	5	100	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji	%	100	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	0,8	1,600		1,600		1,500		1,500		1,500		1,500		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
	Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun	%	27	40,000		45,000		50,000		55,000		60,000		60,000		
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	71,6	95,000		95,000		95,000		95,000		95,000		95,000		
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	34	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	85	86,000		87,000		88,000		89,000		90,000		90,000		
	Penderita diare yang ditangani	%	81	83,000		83,000		83,000		83,000		83,000		83,000		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	80	85,000		88,000		89,000		90,000		90,000		90,000		
	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	1,5	2,400		2,400		2,400		2,400		2,400		2,400		
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	330	350,000		361,000		357,000		352,000		348,000		348,000		
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	60,6	90,000		91,000		92,000		93,000		95,000		92,200		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	53,93	56,920	4.156.515.000	56,920	5.423.816.800	56,920	6.153.198.480	56,920	7.422.018.328	56,920	6.989.220.161	56,920	30.144.768.769	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	6,53	9,490		9,490		9,490		9,490		9,490		9,490		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	10,04	11,800	281.800.000	11,800	727.100.000	11,800	751.500.000	11,800	770.900.000	11,800	795.300.000	11,800	3.326.600.000	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	2,42	3,160		3,160		3,160		3,160		3,160		3,160		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Cakupan pembantu puskesmas	%	33	33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		33,000		
	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 balita	5,48	4,020		4,110		4,210		4,300		4,400		4,400		
	Cakupan jumlah organisasi UKBM	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	140	153,000	0	166,000	865.000.000	179,000	945.000.000	184,000	1.025.000.000	196,000	1.125.000.000	196,000	3.960.000.000	Dinas Kesehatan
	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	%	100	88,000		90,000		93,000		95,000		100,000		100,000		
	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	23	30,000		31,000		32,000		33,000		37,000		37,000		
Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Gizi Pasien	%	100	100,000	3.216.673.395	100,000	3.538.340.735	100,000	3.892.174.808	100,000	4.281.392.289	100,000	4.709.531.518	100,000	19.638.112.745	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	%	22,22	11,110	44.205.330.700	14,810	30.530.031.798	18,520	16.736.675.898	14,810	21.541.864.645	3,700	19.858.483.289	62,950	132.872.386.330	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	%	0	21,510	557.520.000	19,350	700.320.000	17,210	832.820.000	19,350	945.320.000	22,580	1.067.820.000	22,580	4.103.800.000	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100,000	24.000.000.000	100,000	25.000.000.000	100,000	26.000.000.000	100,000	27.000.000.000	100,000	28.000.000.000	100,000	130.000.000.000	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	%	19	0,000	0	22,000	307.000.000	25,000	322.000.000	27,000	322.000.000	30,000	327.000.000	30,000	1.278.000.000	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan	%	100	100,000	187.295.200	100,000	435.000.000	100,000	480.000.000	100,000	515.000.000	100,000	550.000.000	100,000	2.167.295.200	Dinas Kesehatan
	Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah	%	0	20,000		40,000		60,000		80,000		100,000		100,000		
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	%	90	90,000	4.592.313.720	95,000	19.850.000.000	95,000	21.900.000.000	100,000	23.925.000.000	100,000	24.950.000.000	100,000	95.217.313.720	Dinas Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan peserta BPJS KIS JKN	%	75	90,000	13.610.131.000	95,000	4.700.000.000	100,000	4.800.000.000	100,000	5.350.000.000	100,000	6.000.000.000	100,000	34.460.131.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka kelangsungan hidup bayi	per 1000 kelahiran hidup	993	976,000	108.051.400	980,000	575.000.000	982,000	605.000.000	985,000	625.000.000	990,000	665.000.000	990,000	2.578.051.400	Dinas Kesehatan
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	181,5	85,000		87,000		90,000		93,000		95,000		95,000		
	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Angka Kematian Neonatal per 1000 KH	Bayi	11	24,000		20,000		18,000		15,000		10,000		10,000		
	Cakupan pelayanan anak balita	%	36	85,000		87,000		90,000		93,000		95,000		95,000		
	Angka Kematian Balita per 1000 KH	Orang	10	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	Orang	11	24,000		20,000		18,000		15,000		10,000		10,000		
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	98	80,000	670.767.600	90,000	2.918.448.000	92,000	2.928.448.000	93,000	2.938.448.000	95,000	2.943.448.000	95,000	12.399.559.600	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Cakupan pelayanan nifas	%	74	85,000		90,000		91,000		93,000		95,000		95,000		
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	80,7	90,000		91,000		92,000		93,000		95,000		95,000		
	Angka kematian Ibu per 100.000 KH	100.000 KH	167	167,000		167,000		167,000		167,000		167,000		167,000		
	Cakupan kunjungan bayi	%	93	90,000		91,000		92,000		93,000		95,000		95,000		
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	70,2	85,000		90,000		91,000		93,000		95,000		95,000		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	%	85	86,000	165.406.600	87,000	600.000.000	88,000	750.000.000	89,000	900.000.000	90,000	1.050.000.000	90,000	3.465.406.600	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Pendapatan Rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan	%	0	0,000	0	100,000	550.000.000	100,000	39.714.145.473	100,000	43.685.560.020	100,000	48.054.116.022	100,000	132.003.821.515	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Sekolah Sehat	%	7,14	0,000	0	2,680	50.000.000	2,680	50.000.000	2,680	50.000.000	2,680	50.000.000	10,720	200.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	%	100	100,000	1.266.847.200	100,000	1.263.712.000	100,000	1.263.712.000	100,000	1.263.712.000	100,000	1.263.712.000	100,000	6.321.695.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,8	0,000		0,000		0,000		0,000		87,270				

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	%	85	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	%	69,26	0,000		0,000		0,000		0,000		82,000				
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	22,08	0,000		0,000		0,000		0,000		32,000				
	Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase Sarana dan Prasarana daerah rawan bencana yang di rehabilitasi	%	0	0,000	0	20,000	120.000.000	20,000	120.000.000	20,000	120.000.000	20,000	120.000.000	80,000	480.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana	%	0	0,000	0	16,670	1.750.000.000	22,220	1.750.000.000	16,670	1.750.000.000	22,220	1.750.000.000	77,780	7.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	87,75	87,940	2.558.310.000	92,760	40.535.752.750	95,790	25.464.870.476	98,420	22.267.620.000	100,000	13.941.018.122	94,982	104.767.571.348	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Konektivitas Jalan dan Jembatan	%	1,61	2,430	24.285.000.000	3,030	12.000.000.000	6,070	104.500.000.000	6,070	16.000.000.000	9,100	17.500.000.000	26,700	174.285.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Nilai	0,002	0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Jumlah	0,73	0,670	5.867.211.000	0,690	13.500.000.000	0,710	16.000.000.000	0,730	11.000.000.000	0,750	7.000.000.000	3,550	53.367.211.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase data jalan dan jembatan yang update	%	90	100,000	1.800.000.000	100,000	2.300.000.000	100,000	1.800.000.000	100,000	1.900.000.000	100,000	1.900.000.000	100,000	9.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang	ketaatan terhadap RTRW	%	50	60,000	1.500.000.000	68,000	575.000.000	72,000	1.000.000.000	79,000	2.421.687.500	83,000	1.874.503.000	83,000	7.371.190.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Presentase tersedianya database ruas jalan dan jembatan	%	0	19,950	750.000.000	39,890	1.000.000.000	59,200	500.000.000	80,050	500.000.000	100,000	500.000.000	100,000	3.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Panjang talud yang terbangun	%	65	70,000	7.525.000.000	75,000	8.160.800.000	80,000	3.825.000.000	85,000	6.500.000.000	90,000	3.500.000.000	90,000	29.510.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	75	80,000	300.000.000	85,000	345.000.000	90,000	396.750.000	95,000	456.262.500	98,000	524.702.000	98,000	2.022.714.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase Panjang Talud dalam kondisi Baik	%	78	80,000	530.780.000	82,000	530.780.000	84,000	650.500.000	86,000	650.500.000	88,000	650.500.000	88,000	3.013.060.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase Data Base Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	%	0	100,000	775.000.000	0,000	1.000.000.000	0,000	2.000.000.000	0,000	3.000.000.000	0,000	4.000.000.000	0,000	10.775.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Berkurangnya daerah terdampak Banjir	%	15	20,000		25,000		30,000		40,000		50,000		50,000		
Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Rasio	0,105	0,129	1.250.000.000	0,155	1.552.500.000	0,181	1.785.375.000	0,207	2.053.181.250	0,236	2.361.158.750	0,236	9.002.215.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	0	85,000		88,000		91,000		92,000		94,000		94,000		
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	15,000		12,000		9,000		8,000		6,000		6,000		
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase jumlah alat ke-PUan yang tersedia	%	50	60,000	3.191.010.000	70,000	1.250.000.000	80,000	750.000.000	90,000	3.116.440.000	100,000	850.000.000	100,000	9.157.450.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase Kapasitas Jalan yang di Tingkatkan	%	70	73,000	102.281.000.000	75,000	58.000.000.000	77,000	32.500.000.000	80,000	10.000.000.000	82,000	10.000.000.000	82,000	212.781.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang	%	0	100,000	150.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	0,000	100.000.000	0,000	550.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Terampil	%	0	20,000	400.000.000	40,000	825.000.000	60,000	825.000.000	80,000	825.000.000	100,000	500.000.000	300,000	3.375.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas	%	0	12,500		25,000		37,500		50,000		57,500		57,500		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase jumlah KK yang terlayani Air Minum	%	60	65,000	26.236.450.000	70,000	93.081.417.000	80,000	60.846.645.000	90,000	61.866.645.000	100,000	61.465.620.000	81,000	303.496.777.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Sambungan Rumah (SR) Yg Berakses Sanitasi	%	28,49	29,810		57,240		71,490		85,750		100,000		100,000		
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase terbangunnya Jalan Paving	%	60	65,000	1.950.000.000	70,000	2.350.000.000	80,000	3.470.000.000	95,000	4.580.000.000	100,000	5.700.000.000	100,000	18.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	%	96,58	97,330	9.205.640.000	98,060	9.428.206.750	98,780	8.794.870.750	99,490	8.879.197.150	100,000	8.980.388.830	100,000	45.288.303.480	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0	15,300	649.480.000	20,700	2.470.814.180	19,800	2.228.103.516	27,500	1.823.403.700	16,700	2.233.603.516	100,000	9.405.404.912	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU	%	0	14,290	6.308.310.000	14,290	5.937.130.000	28,565	7.853.756.000	28,565	7.219.748.000	14,290	7.729.156.000	100,000	35.048.100.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen pengembangan perumahan	%	70	100,000	200.000.000	100,000	200.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	700.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Cakupan Perbaikan Perumahan Akibat bencana dan Akibat Relokasi Program Pemerintah	%	0	0,000	0	20,000	750.000.000	20,000	750.000.000	20,000	750.000.000	20,000	750.000.000	20,000	3.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0	62,790	40.610.400	62,790	2.390.610.400	62,790	290.610.400	62,790	290.610.400	62,790	290.610.400	62,790	3.303.052.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	91,98	95,000		95,000		95,000		95,000		95,000		95,000		
Sosial																
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	0	0,000	8.608.761.100	24,910	30.600.000.000	25,030	15.600.000.000	25,030	1.884.000.000	25,030	1.424.660.000	100,000	58.117.421.100	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program pembinaan anak terlantar	Persentase Penyediaan Rumah singah bagi anak terlantar	%	0	0,000	0	100,000	468.000.000	100,000	468.000.000	100,000	468.000.000	100,000	468.000.000	100,000	1.872.000.000	Dinas Sosial
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Panti asuhan yang mendapatkan bantuan	%	100	100,000	195.000.000	100,000	195.000.000	100,000	195.000.000	100,000	195.000.000	100,000	195.000.000	100,000	975.000.000	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan kualitas PSKS	%	43,55	43,550	464.000.000	43,550	664.000.000	100,000	1.000.000.000	100,000	1.000.000.000	100,000	1.020.000.000	100,000	4.148.000.000	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	11,31	18,450	378.440.000	18,450	388.050.000	18,450	388.050.000	18,450	391.650.000	18,450	391.650.000	92,250	1.937.840.000	Dinas Sosial
	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	persentase PMKS yang tertangani	%	53	20,000	2.400.000.000	20,000	1.200.000.000	20,000	1.200.000.000	20,000	1.200.000.000	20,000	1.200.000.000	100,000	7.200.000.000	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	25,03	4,360		20,000		20,000		20,000		20,000		84,360		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase perumusan kebijakan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	200.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik Bernilai Baik	Persen	40	75,000	130.000.000	100,000	175.000.000	100,000	200.000.000	100,000	200.000.000	100,000	200.000.000	100,000	905.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik	%	0	0,000	0	100,000	600.000.000	100,000	600.000.000	100,000	600.000.000	100,000	600.000.000	100,000	2.400.000.000	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik	%	0	0,000	0	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	40.000.000	100,000	160.000.000	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan	%	0	100,000	2.400.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	33.600.000.000	Kotamobagu Barat
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan	%	0	100,000	1.200.000.000	100,000	3.890.000.000	100,000	3.900.000.000	100,000	3.900.000.000	100,000	3.900.000.000	100,000	16.790.000.000	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	0	0,000	2.400.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	7.800.000.000	100,000	33.600.000.000	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan	%	0	100,000	1.200.000.000	100,000	3.900.000.000	100,000	3.900.000.000	100,000	3.900.000.000	100,000	3.900.000.000	100,000	16.800.000.000	Kotamobagu Utara
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan	%	0	0,000	0	90,000	300.000.000	90,000	300.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	600.000.000	Kotamobagu Timur

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Pencegahan Potensi Konflik	%	100	100,000	175.000.000	100,000	361.403.200	100,000	328.403.200	100,000	300.403.200	100,000	360.283.200	100,000	1.525.492.800	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	%	100	100,000	180.000.000	100,000	738.501.000	100,000	673.864.000	100,000	632.864.000	100,000	632.864.000	100,000	2.858.093.000	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	%	0	11,110	200.000.000	16,660	574.620.875	16,660	554.620.875	16,660	544.622.625	16,660	544.622.625	77,750	2.418.487.000	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan	%	100	100,000	9.144.394.500	100,000	9.683.262.000	100,000	9.544.394.500	100,000	9.683.262.000	100,000	9.544.394.500	100,000	47.599.707.500	Sekretariat Daerah Kesejahteraan Rakyat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	88,01	100,000	529.680.000	100,000	993.570.000	100,000	557.460.000	100,000	571.350.000	100,000	1.035.240.000	100,000	3.687.300.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100,000	50.450.000	100,000	180.450.000	100,000	180.450.000	100,000	180.450.000	100,000	180.450.000	100,000	772.250.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Limas yang Terlatih Dalam Pamswakarsa	%	0	20,000	40.000.000	20,000	865.000.000	20,000	265.000.000	20,000	265.000.000	20,000	265.000.000	20,000	1.700.000.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	%	100	100,000	598.862.000	100,000	863.265.000	100,000	590.000.000	100,000	540.000.000	100,000	540.000.000	100,000	3.132.127.000	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan Bencana	%	0	50,000	88.000.000	75,000	670.000.000	80,000	920.000.000	85,000	720.000.000	90,000	720.000.000	90,000	3.118.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentasi Laporan Kejadian Bencana	%	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pengembangan Penyelenggaraan Tangguh Bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	100	0,000	0	25,000	530.000.000	25,000	530.000.000	25,000	530.000.000	25,000	1.590.000.000	100,000	3.180.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Pertanian																
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	%	0	0,000	0	90,900	400.000.000	90,900	410.000.000	90,900	425.000.000	90,900	440.000.000	90,900	1.675.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani	%	0	0,000		24,240		51,510		75,750		100,000		100,000		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Produk Pertanian / Perkebunan yang dipromosikan	%	100	0,000	0	100,000	335.000.000	100,000	345.000.000	100,000	355.000.000	100,000	355.000.000	100,000	1.390.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan	%	100	100,000	1.061.400.000	100,000	2.500.000.000	100,000	500.000.000	100,000	500.000.000	100,000	500.000.000	100,000	5.061.400.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Ternak	%	32,71	20,000	402.750.000	20,000	588.550.045	20,000	528.040.000	20,000	565.000.000	20,000	550.750.040	100,000	2.635.090.085	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	0,36	0,410	1.102.905.000	0,410	4.118.354.000	0,420	3.778.354.000	0,420	2.533.500.000	0,420	1.979.000.000	0,420	13.512.113.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	19,01	19,020		19,030		19,040		19,100		19,110		19,110		
	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	28,17	28,320		28,460		28,600		28,740		28,880		28,880		
	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	7,5	7,410		7,320		7,230		7,140		7,060		7,232		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Agribisnis	%	0	0,000	0	16,660	780.000.000	33,320	285.000.000	49,980	315.000.000	66,640	1.045.000.000	66,640	2.425.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	100	100,000	500.000.000	100,000	1.227.500.000	100,000	1.380.000.000	100,000	1.732.500.000	100,000	2.235.000.000	100,000	7.075.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	%	0	0,000	0	14,350	2.525.000.000	14,350	2.120.000.000	14,350	1.860.000.000	14,350	1.825.000.000	57,400	8.330.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Inseminator PKB, ATR	%	50	0,000	0	100,000	80.000.000	100,000	65.000.000	100,000	70.000.000	100,000	75.000.000	100,000	290.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Energi dan Sumber Daya Mineral																
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase Ketersediaan LPG	%	100	100,000	118.640.000	100,000	118.640.000	100,000	118.640.000	100,000	118.640.000	100,000	118.640.000	100,000	593.200.000	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Pariwisata																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	%	0	0,000	0	40,000	16.010.015.000	60,000	16.010.015.000	80,000	16.010.015.000	100,000	16.010.015.000	100,000	64.040.060.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	lama kunjungan wisata	Hari	2	2,000	729.628.800	2,000	1.763.537.000	2,000	1.796.186.000	2,000	1.849.073.000	2,000	1.917.956.000	2,000	8.056.380.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Kunjungan Wisata	%	100	90,910		91,670		92,310		92,860		93,330		93,330		
Kelautan dan Perikanan																
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	%	0	0,000	0	22,220	400.000.000	44,440	375.000.000	77,770	365.000.000	100,000	350.000.000	100,000	1.490.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	26,51	15,660	1.807.298.000	28,910	1.720.000.000	51,800	2.125.000.000	75,900	2.170.000.000	100,000	2.002.000.000	100,000	9.824.298.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Perdagangan																

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase barang yang diawasi	%	35	35,000	1.427.425.200	40,000	765.000.000	45,000	685.000.000	50,000	642.035.200	55,000	695.000.000	55,000	4.214.460.400	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perdagangan	%	75	75,000	6.500.000.000	80,000	2.700.000.000	85,000	4.300.000.000	90,000	4.300.000.000	95,000	4.300.000.000	95,000	22.100.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	%	0	0,000	1.110.000.000	20,000	1.100.000.000	20,000	1.100.000.000	20,000	1.100.000.000	20,000	1.100.000.000	80,000	5.510.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian																
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0	10,170	599.700.000	10,860	1.100.000.000	10,660	1.050.000.000	9,740	1.000.000.000	9,560	1.000.000.000	50,990	4.749.700.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Prosentase Peningkatan Kualitas Produk	%	0	1,600	125.000.000	1,600	200.000.000	1,500	200.000.000	1,500	200.000.000	1,500	200.000.000	7,700	925.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Prosentase Sentra yang Dikembangkan	%	0	10,000	175.000.000	30,000	3.275.000.000	50,000	2.050.000.000	80,000	4.550.000.000	100,000	2.550.000.000	100,000	12.600.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Perencanaan																
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,8	0,000		0,000		0,000		0,000		87,270				
	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	%	85	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	%	69,26	0,000		0,000		0,000		0,000		82,000				
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	22,08	0,000		0,000		0,000		0,000		32,000				
	Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Penataan Wilayah Administrasi Daerah	%	0	0,000	0	25,000	300.000.000	25,000	351.000.000	25,000	651.000.000	25,000	872.000.000	100,000	2.174.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan kota kota menengah dan besar	%	70	100,000	600.000.000	100,000	800.000.000	100,000	350.000.000	100,000	350.000.000	100,000	350.000.000	100,000	2.450.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPd	%	90	100,000	42.250.000	100,000	43.950.000	100,000	45.650.000	100,000	47.350.000	100,000	49.050.000	100,000	228.250.000	Kotamobagu Barat
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPd	%	90	100,000	48.500.000	100,000	56.450.000	100,000	64.900.000	100,000	71.200.000	100,000	79.400.000	100,000	320.450.000	Kotamobagu Selatan
Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPd	%	90	100,000	13.500.000	100,000	24.775.700	100,000	27.253.270	100,000	29.978.597	100,000	32.976.456	100,000	128.484.023	Kotamobagu Timur
Program perencanaan pembangunan daerah	Presentase usulan hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd	%	90	100,000	46.463.000	100,000	46.463.000	100,000	46.463.000	100,000	46.463.000	100,000	46.463.000	100,000	232.315.000	Kotamobagu Utara

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100,000	324.070.941	100,000	420.000.000	100,000	320.000.000	100,000	320.000.000	100,000	550.000.000	100,000	1.934.070.941	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100,000	1.892.146.000	100,000	1.690.000.000	100,000	1.965.000.000	100,000	1.720.000.000	100,000	1.965.000.000	100,000	9.232.146.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
Program perencanaan sosial budaya	Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang terselesaikan	%	100	100,000	1.275.665.000	100,000	1.425.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	650.000.000	100,000	650.000.000	100,000	5.100.665.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan	%	90	100,000	200.000.000	100,000	270.000.000	100,000	130.000.000	100,000	130.000.000	100,000	270.000.000	100,000	1.000.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi	%	15	15,000	450.000.000	60,000	1.250.000.000	75,000	250.000.000	85,000	250.000.000	100,000	250.000.000	100,000	2.450.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase perencanaan wilayah dan sumber daya air	%	0	20,000	350.000.000	40,000	350.000.000	60,000	350.000.000	80,000	350.000.000	100,000	100.000.000	100,000	1.500.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan data/informasi	Cakupan pengembangan Data dan Informasi dalam peningkatan penyelenggaraan E-Government	%	25	23,260	521.930.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	23,260	521.930.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program perencanaan pembangunan daerah	Predikat Nilai Sakip	Nilai	63,54	70,000	215.000.000	75,000	175.000.000	75,000	175.000.000	80,000	175.000.000	80,000	175.000.000	80,000	915.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana	%	70	80,000	150.000.000	85,000	250.000.000	90,000	250.000.000	95,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	850.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	0	0,000	0	100,000	800.000.000	100,000	150.000.000	100,000	150.000.000	100,000	800.000.000	100,000	1.900.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Inspektorat																
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase peningkatan kapabilitas aparat pengawas	persen	20	40,000	137.500.000	100,000	151.250.000	100,000	166.375.000	100,000	183.012.500	100,000	201.313.750	100,000	839.451.250	Inspektorat Daerah
Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	persentase pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	%	0	100,000	100.000.000	100,000	165.000.000	100,000	181.500.000	100,000	199.650.000	100,000	219.615.000	100,000	865.765.000	Inspektorat Daerah
Keuangan																
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	0	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	90	90,000	45.000.000	90,000	45.000.000	90,000	45.000.000	90,000	45.000.000	90,000	45.000.000	90,000	225.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100,000	0	100,000	18.000.000	100,000	30.000.000	100,000	42.000.000	100,000	54.000.000	100,000	144.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100,000	128.000.000	100,000	128.000.000	100,000	135.000.000	100,000	135.000.000	100,000	135.000.000	100,000	661.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Kualitas OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	90	100,000	538.617.250	100,000	538.617.250	100,000	538.617.250	100,000	544.917.250	100,000	544.917.250	100,000	2.705.686.250	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemilihan sangadi	%	0	0,000	0	0,000	0	100,000	150.000.000	0,000	0	0,000	0	100,000	150.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100,000	250.000.000	100,000	300.000.000	100,000	350.000.000	100,000	400.000.000	100,000	450.000.000	100,000	1.750.000.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Buku	1	1,000	50.000.000	1,000	80.000.000	1,000	80.000.000	1,000	80.000.000	1,000	80.000.000	1,000	370.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja SKPD bernilai baik	persen	40	75,000	80.000.000	75,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	380.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	70	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	250.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase belanja pendidikan (20%)	%	19	20,000	11.432.876.525	20,000	6.392.876.525	20,000	6.150.375.425	20,000	6.373.624.625	20,000	6.592.624.125	20,000	36.942.377.225	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	perbandingan antara belanja tidak langsung	%	43,42	40,500		40,020		40,020		39,990		41,920		41,920		
	perbandingan antara belanja langsung	%	56,58	59,500		59,980		59,980		60,010		58,080		59,510		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		
	Persentase SILPA	%	3,02	1,570		1,580		1,590		1,660		1,730		1,730		
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,21	0,690		0,700		0,710		0,720		0,730		0,730		
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)	%	100	100,000	24.500.000	100,000	26.000.000	100,000	26.000.000	100,000	26.000.000	100,000	26.000.000	100,000	128.500.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	33	36,000	669.007.000	42,000	3.392.387.000	48,000	2.640.207.000	53,000	2.627.207.000	59,000	2.579.707.000	59,000	11.908.515.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase PNS Alih status dari CPNS ke PNS	%	0	0,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Manajerial	%	0	0,000		50,000		75,000		100,000		100,000		100,000		
	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	0	15,480		37,090		59,030		80,320		100,000		100,000		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,85	0,840	1.674.712.600	1,110	2.289.558.000	1,110	2.850.708.000	1,110	3.275.133.000	1,110	3.730.708.000	1,110	13.820.819.600	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	rasio kebutuhan PNS	Persen	51,65	60,000	150.000.000	65,000	150.000.000	70,000	150.000.000	75,000	150.000.000	80,000	150.000.000	80,000	750.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Penelitian dan Pengembangan																
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah	%	100	7,690	1.750.000.000	23,080	3.200.000.000	23,080	2.700.000.000	23,080	1.700.000.000	23,080	1.450.000.000	100,010	10.800.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
Sekretariat Dewan																
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Agenda Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	98,99	90,000	15.750.000.000	90,000	15.650.000.000	90,000	15.670.000.000	90,000	16.170.000.000	90,000	16.190.000.000	90,000	79.430.000.000	Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah																
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	%	90	90,000	875.000.000	90,000	875.000.000	90,000	875.000.000	90,000	875.000.000	90,000	875.000.000	90,000	4.375.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	%	90	90,000		90,000		90,000		90,000		90,000		90,000		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase laporan capaian serapan anggaran OPD	%	97	98,000	386.440.000	98,000	386.440.000	98,000	386.440.000	98,000	386.440.000	98,000	386.440.000	98,000	1.932.200.000	Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan snggah dan sanggah banding lelang Barang/Jasa yang terlayani	%	100	100,000	17.000.000	100,000	16.000.000	100,000	15.000.000	100,000	14.000.000	100,000	13.000.000	100,000	75.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan administrasi dan pelaporan desa/kelurahan	%	100	100,000	0	100,000	299.217.600	100,000	450.792.600	100,000	299.217.600	100,000	299.217.600	100,000	1.348.445.400	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan	%	0	0,000	0	0,000	0	27.270	500.000.000	42,420	900.000.000	30,310	750.000.000	100,000	2.150.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Presentase Penyedia yang profesional	%	100	100,000	1.900.000.000	100,000	2.150.000.000	100,000	2.275.000.000	100,000	2.400.000.000	100,000	2.520.000.000	100,000	11.245.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pelanggaran pegawai	%	6,12	6,000	1.050.800.550	5,500	1.342.880.605	5,000	1.477.168.666	4,500	1.624.885.531	4,000	1.787.374.085	4,000	7.283.109.437	Inspektorat Daerah
	Persentase tindak lanjut temuan	%	89,6	85,000		85,000		86,000		86,000		87,000		87,000		
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan Peningkatan Kedinasan KDH/WKDH	%	80	85,000	4.639.690.000	90,000	4.639.690.000	95,000	4.639.690.000	94,000	4.639.690.000	98,000	4.639.690.000	92,400	23.198.450.000	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Fasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD	%	100	100,000	750.000.000	100,000	750.000.000	100,000	800.000.000	100,000	850.000.000	100,000	850.000.000	100,000	4.000.000.000	Sekretariat DPRD
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Tingkat kelancaran pelayanan pimpinan daerah	persen	0	100,000	496.340.000	100,000	1.112.340.000	100,000	1.228.320.000	100,000	1.312.340.000	100,000	1.312.340.000	100,000	5.461.680.000	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi	persen	100	100,000	75.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	125.000.000	100,000	500.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Manajemen Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan * area Perubahan Reformasi Birokrasi	%	0	0,000	0	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	900.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	100,000	0	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	0	100,000	0	100,000	200.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Perhubungan																
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,8	0,000		0,000		0,000		0,000		87,270				

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	%	85	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	%	69,26	0,000		0,000		0,000		0,000		82,000				
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	22,08	0,000		0,000		0,000		0,000		32,000				
	Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	presentase fasilitas LLAJ yang terpelihara	%	55,56	77,780	440.000.000	100,000	540.000.000	100,000	2.380.000.000	100,000	420.000.000	100,000	570.000.000	100,000	4.350.000.000	Dinas Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	67	67,000	630.644.900	75,000	3.640.000.000	85,000	1.720.000.000	80,000	1.720.000.000	92,000	1.720.000.000	92,000	9.430.644.900	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan	%	100	100,000	150.000.000	100,000	250.000.000	100,000	250.000.000	100,000	250.000.000	100,000	250.000.000	100,000	1.150.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan massal dan Angkutan Umum perkotaan	%	0	33,330	105.000.000	54,550	10.315.000.000	100,000	2.600.000.000	100,000	7.500.000.000	100,000	350.000.000	100,000	20.870.000.000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	%	100	0,000	48.720.000	100,000	50.910.000	100,000	6.000.000.000	100,000	55.710.000	100,000	57.270.000	100,000	6.212.610.000	Dinas Perhubungan
	jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1623	1.623,000		1.957,000		2.291,000		2.625,000		2.959,000		2.959,000		
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	6,88	6,490	982.450.000	6,120	1.283.100.000	5,770	1.290.600.000	5,440	943.100.000	5,130	928.100.000	5,130	5.427.350.000	Dinas Perhubungan
	pemasangan rambu-rambu	%	26,67	17,890		17,770		17,770		17,770		17,650		88,850		
Lingkungan Hidup																
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,8	0,000		0,000		0,000		0,000		87,270				
	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	%	85	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	%	69,26	0,000		0,000		0,000		0,000		82,000				
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	22,08	0,000		0,000		0,000		0,000		32,000				
	Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Operasionalisasi TPA di Kota Kotamabagu	Nilai	75,56	76,000	9.121.635.000	76,000	11.223.830.400	77,000	11.105.000.000	77,000	12.295.000.000	78,000	12.842.500.000	78,000	56.587.965.400	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	72,31	80,000		75,000		74,000		73,000		72,000		72,000		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100,000	168.130.000	100,000	532.920.000	100,000	561.260.000	100,000	535.260.000	100,000	540.260.000	100,000	2.337.830.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	100	100,000	96.000.000	100,000	1.136.337.500	100,000	1.135.500.000	100,000	1.253.000.000	100,000	1.299.500.000	100,000	4.920.337.500	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah	%	95	80,950	219.054.000	81,820	389.780.000	82,610	265.000.000	83,330	305.000.000	84,000	275.000.000	84,000	1.453.834.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan/Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Dokumen Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	%	58,33	66,670	0	64,290	85.870.000	71,430	27.500.000	75,000	92.310.000	81,250	35.000.000	81,250	240.680.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Institusi / Kelompok / Individu yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	32	40,000	84.135.000	42,860	208.120.000	50,000	197.500.000	50,000	268.650.000	56,670	257.450.000	56,670	1.015.855.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	100,000	37.250.000	100,000	125.350.000	100,000	47.000.000	100,000	242.700.000	100,000	64.500.000	100,000	516.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	%	20	20,000	1.353.875.000	20,000	4.948.405.000	40,000	4.225.895.000	40,000	2.704.595.000	60,000	0	60,000	13.232.770.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pertanahan																

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Presentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	0	19,810	3.085.950.000	19,965	2.236.900.000	19,965	1.736.900.000	20,130	1.236.900.000	20,130	1.236.900.000	100,000	9.533.550.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0	0,100	696.070.000	0,100	469.670.000	0,100	391.895.000	0,100	379.870.000	0,100	379.870.000	0,500	2.317.375.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi		0	20,000	1.354.385.000	20,000	1.502.300.000	20,000	1.526.300.000	20,000	702.300.000	20,000	602.300.000	100,000	5.687.585.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara		0	23,256	499.930.000	23,256	499.930.000	23,256	499.930.000	18,605	499.930.000	11,627	499.930.000	100,000	2.499.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	90	100,000	0	100,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	300.000.000	Kotamobagu Selatan
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	90	100,000	0	100,000	20.000.000	100,000	20.000.000	100,000	20.000.000	100,000	20.000.000	100,000	80.000.000	Kotamobagu Timur
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	90	100,000	31.000.000	100,000	31.000.000	100,000	31.000.000	100,000	31.000.000	100,000	31.000.000	100,000	155.000.000	Kotamobagu Utara
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Anak berakte kelahiran	Rasio	0,89	0,900	952.270.000	0,910	1.359.952.500	0,920	1.370.758.500	0,930	1.371.564.500	0,940	1.387.370.500	0,940	6.441.916.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	%	88,21	88,210		88,390		88,570		88,920		89,200		89,200		
	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	5	20,000		40,000		60,000		80,000		100,000		100,000		
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0,93	0,940		0,950		0,960		0,970		0,980		0,980		
	Cakupan penerbitan Akta kematian	%	82,67	93,040		93,230		93,410		93,600		93,780		93,780		
	Presentase keakuratan data disandingkan dengan data konsolidasi bersih	%	0	95,000		95,000		95,000		95,000		95,000		95,000		
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,46	0,600		0,700		0,800		0,850		0,900		0,900		
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	88,21	89,000		90,000		91,000		93,000		94,000		94,000		
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93	94,000		95,000		96,000		97,000		98,000		98,000		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	Kelompok	13	29,000	546.200.000	42,000	492.200.000	54,000	537.500.000	66,000	493.500.000	78,000	378.000.000	78,000	2.447.400.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan kelompok keluarga yang melakukan Pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	1.125.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun	%	1,57	1,570	40.256.000	1,570	40.256.000	1,570	40.256.000	1,570	40.256.000	1,570	40.256.000	1,570	201.280.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	2,38	2,170		2,130		2,100		2,070		2,040		2,040		
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	Persentase	81	75,000	40.000.000	70,000	40.000.000	60,000	40.000.000	50,000	40.000.000	40,000	40.000.000	40,000	200.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,78	0,000		0,000		0,000		0,000		94,880				
	Kota Layak Anak	kategori	100	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	%	90	95,000	0	95,000	25.000.000	95,000	25.000.000	95,000	25.000.000	95,000	25.000.000	95,000	100.000.000	Kotamobagu Selatan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,03	0,020	63.030.200	0,010	63.030.200	0,010	63.030.200	0,010	63.030.200	0,000	63.030.200	0,000	315.151.000	Kotamobagu Utara
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	%	5	32,000	1.849.066.000	35,000	1.254.252.700	30,000	1.242.968.000	20,000	1.158.441.800	20,000	1.158.441.800	137,000	6.663.170.300	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	38,51	38,530	391.251.000	38,550	145.460.000	38,600	391.251.000	38,650	145.460.000	38,700	391.251.000	38,606	1.464.673.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	58,65	58,670	467.328.600	58,700	397.123.600	58,750	397.123.600	58,800	397.123.600	58,850	397.123.600	58,850	2.055.823.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100,000	2.095.547.000	100,000	1.044.840.400	100,000	1.229.796.128	100,000	968.197.947	100,000	1.257.374.975	100,000	6.595.756.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio KDRT	%	0,05	0,045		0,040		0,035		0,030		0,025		0,035		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000			
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000			
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	71,03	73,000	86.400.000	75,000	86.400.000	77,000	92.100.000	79,000	42.100.000	80,000	42.100.000	80,000	349.100.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	Orang	80,86	81,000	392.500.000	81,000	180.000.000	81,000	380.000.000	81,000	180.000.000	81,000	170.000.000	81,000	1.302.500.000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB	Persentasi	69,51	70,000		70,000		70,000		70,000		70,000		70,000			
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB	Persentasi	79,71	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		80,000			
Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana																	

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,78	0,000		0,000		0,000		0,000		94,880				
	Kota Layak Anak	kategori	100	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase faskes dan jejaringnya (Diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	38,3	45,000	389.000.000	57,000	372.000.000	66,000	372.000.000	71,000	392.400.000	72,000	372.000.000	72,000	1.897.400.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana	Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	14	18,000	2.709.145.100	22,000	3.135.798.600	26,000	3.129.310.100	30,000	2.997.048.600	34,000	3.201.310.100	34,000	15.172.612.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	0	1,000		0,000		0,000		0,000		0,000		1,000		
	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	0	32,060		32,060		32,060		32,060		32,060		32,060		
	Laju Pertumbuhan Penduduk LPP	orang	2,8	1,360		1,310		1,270		1,250		1,230		1,230		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggungjawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	%	44	19,000		19,000		19,000		19,000		19,000		19,000		
	rata-rata usia kawin pertama wanita	%	22,98	22,980		22,980		22,980		22,980		22,980		22,980		
	Cakupan PKB / PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Peresentasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	52,3	58,100		58,100		58,100		58,100		58,100		58,100		
	jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan melaksanakan program pembangunan	Sektor	7	7,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	%	41,26	42,000	105.097.100	43,000	86.876.200	44,000	62.700.000	45,000	62.700.000	46,000	62.700.000	44,000	380.073.300	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	25	125.000		125,000		125,000		125,000		125,000		125,000		
Program pelayanan kontrasepsi	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	%	78,73	78,800	1.022.707.400	78,800	481.471.000	79,000	471.123.300	79,000	2.052.123.300	79,000	471.123.300	79,000	4.498.548.300	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	27	25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	9,3	9,300		9,300		9,300		9,300		9,300		9,300		
	Persentase penggunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	34,65	34,650		35,500		36,500		37,100		37,700		37,700		
	Ratio Aseptor KB	%	78,73	78,800		78,800		79,000		79,000		79,000		78,920		
Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan	Presentase Sarana dan Prasarana penyuluhan KKB tingkat kecamatan	Kecamatan	0	100,000	1.272.098.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	500,000	1.272.098.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Tenaga Kerja																
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	38	38,000	375.000.000	40,000	390.000.000	42,000	390.000.000	44,800	390.000.000	47,000	390.000.000	47,000	1.935.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	41	80,000		80,000		66,000		66,000		66,000		66,000		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	79	83,000	469.000.000	84,000	1.220.248.000	84,000	1.230.248.000	85,000	1.230.248.000	85,000	1.235.248.000	85,000	5.384.992.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	54,05	45,000	382.195.200	55,560	382.195.000	56,100	207.195.000	56,630	207.195.000	57,140	207.195.000	57,140	1.385.975.200	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	%	0	5,710	250.000.000	5,710	825.000.000	5,710	325.000.000	5,710	325.000.000	5,710	325.000.000	28,550	2.050.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	433	455,000		482,000		507,000		532,000		557,000		557,000		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pelaku usaha yang di promosikan	%	0	0,000	150.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	225.000.000	100,000	1.050.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	82	83,000	400.000.000	84,000	560.000.000	85,000	410.000.000	86,000	585.000.000	87,000	410.000.000	87,000	2.365.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar	persen	0	0,000	100.000.000	23,330	1.985.000.000	23,330	245.000.000	26,660	405.000.000	26,660	265.000.000	99,980	3.000.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal																
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Daerah	%	0	0,000	0	10,000	250.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	persentase pelayanan penerbitan perizinan	%	100	100,000	160.000.000	100,000	70.000.000	100,000	80.000.000	100,000	90.000.000	100,000	100.000.000	100,000	500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	3334	3.400,000	1.880.000.000	3.500,000	1.870.000.000	4.000,000	1.865.000.000	4.500,000	1.860.000.000	5.000,000	1.855.000.000	5.000,000	9.330.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	439	450,000		475,000		500,000		525,000		550,000		550,000		
Kebudayaan																
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	%	25	25,000	390.000.000	50,000	1.315.000.000	62,500	1.315.000.000	62,500	1.315.000.000	62,500	1.315.000.000	62,500	5.650.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai-nilai Budaya yang dikembangkan	%	85,18	29,630	75.000.000	85,180	175.000.000	85,180	175.000.000	85,180	175.000.000	85,180	127.000.000	85,180	727.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0	0,000	0	0,000	329.243.800	20,000	329.243.800	20,000	329.243.800	20,000	329.243.800	20,000	1.316.975.200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100.000	135.000.000	100.000	750.000.000	100.000	135.000.000	100.000	135.000.000	100.000	135.000.000	100.000	1.290.000.000	Dinas Sosial
Kepemudaan dan Olahraga																
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	persentase wirausaha muda	%	59,52	64,290	250.000.000	71,430	250.000.000	80,950	250.000.000	88,100	250.000.000	100,000	250.000.000	100,000	1.250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	presentase prestasi olahraga	%	61,54	65,380	2.300.000.000	69,230	2.300.000.000	73,080	2.300.000.000	76,920	2.300.000.000	80,770	2.300.000.000	80,770	11.500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	persentase Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	%	50	100.000	550.000.000	100.000	570.000.000	100.000	590.000.000	100.000	610.000.000	100.000	630.000.000	100.000	2.950.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	82,76	86,210	2.917.350.000	89,660	2.983.350.000	93,100	3.033.350.000	96,550	3.073.350.000	100,000	3.108.350.000	100,000	15.115.750.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	70,18	87,720	1.873.550.000	91,230	1.873.550.000	94,740	1.873.550.000	98,250	1.873.550.000	100,000	1.873.550.000	100,000	9.367.750.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Cakupan pembinaan atlet muda	%	75	75.000		80.000		85.000		90.000		95.000		95.000		
	Cakupan pembinaan olahraga	%	73,08	76,920		80,770		84,620		88,460		92,300		92,300		
	Persentase atlet berprestasi	%	53,33	56,670		60.000		63,330		66,670		70.000		70.000		
Pangan																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Cakupan Ketersediaan pangan utama	Ton	210	215.000	1.397.604.500	220.000	1.367.604.500	225.000	1.362.604.500	250.000	1.414.184.500	255.000	1.373.394.500	255.000	6.915.392.500	Dinas Ketahanan Pangan
	Cakupan Pola Pangan Harapan	Skor	0	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
	Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90	90,000	1.935.000.000	90,000	1.835.000.000	90,000	1.885.000.000	90,000	1.935.000.000	90,000	1.835.000.000	90,000	9.425.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Cakupan Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari	2150	2.150,000		2.150,000		2.150,000		2.150,000		2.150,000		2.150,000		
	Cakupan Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	57	57,000		57,000		57,000		57,000		57,000		57,000		
Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	Penguatan cadangan pangan	%	15	60,000	1.589.300.000	60,000	1.749.300.000	60,000	1.394.300.000	60,000	1.699.300.000	60,000	1.394.300.000	60,000	7.826.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase penyelenggaraan kegiatan lomba	%	90	95,000	30.700.000	95,000	105.700.000	95,000	105.700.000	95,000	105.700.000	95,000	105.700.000	95,000	453.500.000	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terlaksananya Kegiatan Lomba	%	90	90,000	32.500.000	90,000	37.500.000	90,000	40.350.000	90,000	42.500.000	90,000	45.750.000	90,000	198.600.000	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Lomba	%	0	0,000	0	0,000	0	100,000	19.250.000	100,000	21.175.000	100,000	23.292.500	100,000	63.717.500	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Lomba	%	0	100,000	62.827.600	100,000	187.827.600	100,000	187.827.600	100,000	187.827.600	100,000	187.827.600	100,000	814.138.000	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Retribusi sampah	%	51	70,000	31.000.000	75,000	31.000.000	80,000	31.000.000	95,000	31.000.000	100,000	31.000.000	100,000	155.000.000	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	66,67	73,330	98.692.650	80,000	97.191.250	86,670	126.892.650	93,330	97.191.250	100,000	97.191.250	100,000	517.159.050	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	75	75,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rasio	0	0,880		0,890		0,900		0,940		1,000		1,000		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Kelurahan/Desa	%	45,45	100,000	147.720.000	100,000	369.735.000	100,000	369.735.000	100,000	369.735.000	100,000	369.735.000	100,000	1.626.660.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	100	0,000	0	100,000	373.744.000	100,000	339.342.600	100,000	335.342.600	100,000	331.342.600	100,000	1.379.771.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
	Persentase LPM berprestasi	%	0	0,000		4,000		4,000		4,000		8,000		20,000		
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang	%	0	13,330	0	20,000	123.071.400	20,000	71.341.400	20,000	30.000.000	26,670	30.000.000	100,000	254.412.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparaturnya pemerintah desa yang kompeten	%	90	100,000	693.600.000	100,000	693.600.000	100,000	693.600.000	100,000	693.600.000	100,000	693.600.000	100,000	3.468.000.000	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang Kompeten	%	0	100,000	1.364.800.000	100,000	1.364.800.000	100,000	1.364.800.000	100,000	1.364.800.000	100,000	1.364.800.000	100,000	6.824.000.000	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur pemerintahan desa kelurahan yang kompeten	%	90	95,000	661.800.000	95,000	675.750.000	95,000	725.800.000	95,000	875.800.000	95,000	925.215.000	95,000	3.864.365.000	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Yang Kompeten	%	0	100,000	1.621.800.000	100,000	1.621.800.000	100,000	1.783.980.000	100,000	1.783.980.000	100,000	1.962.378.000	100,000	8.773.938.000	Kotamobagu Barat
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,78	0,000		0,000		0,000		0,000		94,880				
	Kota Layak Anak	kategori	100	0,000		0,000		0,000		0,000		100,000				

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rasio	0	1,920	300.000.000	1,920	711.321.400	1,950	707.500.000	1,950	755.000.000	1,950	805.000.000	1,950	3.278.821.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	persentase PKK aktif	%	0	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		
Statistik																
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Daerah	%	100	100.000	460.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,000	460.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Pengendalian Laju Inflasi daerah	Nilai	3,83	3,300	0	3,300	56.000.000	3,300	56.000.000	3,300	56.000.000	3,300	56.000.000	3,300	224.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Komunikasi dan Informatika																
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	42,42	21,210	10.610.400.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	21,210	10.610.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	24,44	40,520	14.230.571.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	40,520	14.230.571.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	%	26,92	23,080	150.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	23,080	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Standarisasi LPSE	%	50	55,560	420.000.000	66,670	490.000.000	77,780	545.000.000	94,440	535.000.000	100,000	600.000.000	100,000	2.590.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentasi tindakan lanjut layanan keluhan masyarakat	%	100	100,000	300.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan dan pengembangan aplikasi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan e-Government	%	23,26	30,230	314.750.000	46,510	1.496.350.000	65,120	850.850.000	81,400	1.079.950.000	100,000	578.750.000	100,000	4.320.650.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral	%	100	100,000	35.000.000	100,000	1.220.000.000	100,000	1.120.000.000	100,000	1.120.000.000	100,000	1.220.000.000	100,000	4.715.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Cakupan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	%	56,58	69,740	1.048.097.500	82,890	13.880.775.000	90,760	12.093.000.000	96,050	10.393.000.000	100,000	10.293.000.000	100,000	47.707.872.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
	cakupan layanan telekomunikasi	%	72	76,000		85,000		90,000		95,000		100,000		100,000		
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	%	77,05	70,490	1.990.000.000	70,490	6.465.000.100	70,490	6.440.000.100	70,490	6.440.000.100	70,490	6.440.000.100	70,490	27.775.000.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	persentase Kelurahan/Desa yang mengelola arsip secara baku	%	0	3,030	75.000.000	9,060	10.000.000	9,060	125.000.000	9,060	150.000.000	9,060	150.000.000	39,270	510.000.000	Dinas Kearsipan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Laporan Pelaksanaan SPM	%	0	0,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	200.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Persandian																
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	56,58	69,740	50.000.000	82,890	960.000.000	90,760	492.040.000	96,050	492.040.000	100,000	492.040.000	100,000	2.486.120.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kearsipan																

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen Arsip Dinamis	%	0	0,000	0	100,000	230.000.000	100,000	235.000.000	100,000	235.000.000	100,000	250.000.000	100,000	950.000.000	Dinas Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2,33	2,330	100.000.000	11,630	100.000.000	11,630	100.000.000	11,630	100.000.000	11,630	100.000.000	48,850	500.000.000	Dinas Kearsipan
Urusan operasional rutin perkantoran																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100,000	60.000.000	100,000	84.000.000	100,000	84.000.000	100,000	84.000.000	100,000	84.000.000	100,000	396.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	90	90,000	1.078.000.000	90,000	1.622.000.000	90,000	1.185.000.000	90,000	1.205.000.000	90,000	762.000.000	90,000	5.852.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	100,000	2.933.587.800	100,000	2.948.587.800	100,000	2.949.187.800	100,000	2.949.187.800	100,000	2.949.187.800	100,000	14.729.739.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100,000	31.500.000	100,000	12.000.000	100,000	35.000.000	100,000	0	100,000	0	100,000	78.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,000	952.800.000	100,000	1.086.100.000	100,000	1.087.700.000	100,000	1.089.300.000	100,000	1.090.900.000	100,000	5.306.800.000	Kotamobagu Barat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Persen	90	90,000	0	90,000	61.900.000	90,000	62.300.000	90,000	62.700.000	90,000	63.100.000	90,000	250.000.000	Kotamobagu Barat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	90	90,000	0	90,000	84.200.000	90,000	84.400.000	90,000	84.600.000	90,000	84.800.000	90,000	338.000.000	Kotamobagu Barat

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	90,000	361.315.500	90,000	978.615.500	90,000	200.731.500	90,000	202.431.500	90,000	203.031.500	90,000	1.946.125.500	Kotamobagu Barat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	90	100,000	40.500.000	100,000	33.600.000	100,000	35.700.000	100,000	37.800.000	100,000	39.900.000	100,000	187.500.000	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100,000	0	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	200.000.000	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	90	100,000	181.880.650	100,000	165.513.000	100,000	151.741.205	100,000	163.830.450	100,000	166.501.765	100,000	829.467.070	Kotamobagu Selatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	90	90,000	704.119.350	90,000	828.814.580	90,000	787.929.832	90,000	798.813.871	90,000	799.582.900	90,000	3.919.260.533	Kotamobagu Selatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Orang	90	0,000	147.207.000	100,000	37.400.000	100,000	48.745.350	100,000	62.009.885	100,000	68.210.873	100,000	363.573.108	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	%	60	90,000	635.144.000	90,000	412.190.500	90,000	591.312.750	90,000	569.194.025	90,000	690.314.427	90,000	2.898.155.702	Kotamobagu Timur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	%	60	70,000	197.750.000	80,000	617.122.350	85,000	671.975.210	90,000	705.230.897	95,000	741.808.607	95,000	2.933.887.064	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	60	90,000	58.650.000	90,000	19.500.000	90,000	67.447.500	90,000	99.602.250	90,000	81.611.475	90,000	326.811.225	Kotamobagu Timur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100,000	58.900.000	100,000	58.900.000	100,000	58.900.000	100,000	58.900.000	100,000	58.900.000	100,000	294.500.000	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	175.689.800	100,000	333.689.800	100,000	175.689.800	100,000	83.689.800	100,000	325.689.800	100,000	1.094.449.000	Kotamobagu Utara
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	752.020.200	100,000	757.850.200	100,000	757.850.200	100,000	757.850.200	100,000	757.850.200	100,000	3.783.421.000	Kotamobagu Utara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100,000	0	100,000	95.650.000	100,000	35.150.000	100,000	35.150.000	100,000	95.650.000	100,000	261.600.000	Kotamobagu Utara

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	96,53	100,000	332.320.200	100,000	532.300.000	100,000	427.300.000	100,000	517.300.000	100,000	367.300.000	100,000	2.176.520.200	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	96,12	100,000	1.052.077.475	100,000	1.223.760.100	100,000	1.223.760.100	100,000	1.223.760.100	100,000	1.198.760.350	100,000	5.922.118.125	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	99,57	100,000	0	100,000	185.700.000	100,000	185.700.000	100,000	185.700.000	100,000	185.700.000	100,000	742.800.000	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	97,42	100,000	0	100,000	65.000.000	100,000	65.000.000	100,000	65.000.000	100,000	65.000.000	100,000	260.000.000	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	60	65,000	363.181.200	70,000	389.681.200	75,000	394.681.200	80,000	421.181.200	85,000	428.181.200	75,000	1.996.906.000	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	60	70,000	5.000.000	75,000	4.600.000	80,000	5.000.000	85,000	4.600.000	90,000	5.000.000	80,000	24.200.000	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	60	70,000	53.400.000	75,000	143.400.000	80,000	53.400.000	85,000	143.400.000	90,000	143.400.000	80,000	537.000.000	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	60	70,000	332.390.000	75,000	144.729.000	80,000	165.200.000	85,000	232.000.000	90,000	165.500.000	80,000	1.039.819.000	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	0	100,000	61.900.000	100,000	16.900.000	100,000	56.900.000	100,000	21.900.000	100,000	49.400.000	100,000	207.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	0	100,000	90.000.000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	90.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	540.500.000	100,000	3.000.000	100,000	70.617.950	100,000	73.000.000	100,000	3.000.000	100,000	690.117.950	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan Layanan Administrasi perkantoran	%	100	100,000	458.551.050	100,000	458.201.050	100,000	458.551.050	100,000	458.201.050	100,000	458.201.050	100,000	2.291.705.250	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100,000	14.950.000	100,000	45.750.000	100,000	49.000.000	100,000	54.000.000	100,000	59.000.000	100,000	222.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100,000	0	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	30.000.000	100,000	120.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	146.000.000	100,000	256.000.000	100,000	223.900.000	100,000	263.000.000	100,000	267.000.000	100,000	1.155.900.000	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	627.421.800	100,000	752.830.000	100,000	829.260.000	100,000	892.136.000	100,000	4.985.250.000	100,000	8.086.897.800	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	75	80,000	1.210.937.755	80,000	4.519.822.650	80,000	2.945.711.035	80,000	1.265.411.755	80,000	1.280.582.550	80,000	11.222.465.745	Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	75	90,000	2.309.977.825	90,000	2.425.884.850	90,000	2.439.182.705	90,000	2.597.455.880	90,000	2.604.975.925	90,000	12.377.477.185	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	80	80,000	74.055.000	80,000	64.055.000	80,000	64.055.000	80,000	74.055.000	80,000	64.055.000	80,000	340.275.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	Orang	5	4,000	150.000.000	4,000	90.000.000	4,000	60.000.000	4,000	60.000.000	4,000	60.000.000	4,000	420.000.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		90	100,000	1.210.000.000	100,000	407.000.000	100,000	40.000.000	100,000	65.000.000	100,000	75.000.000	100,000	1.797.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	830.706.300	100,000	830.706.300	100,000	830.706.300	100,000	830.706.300	100,000	830.706.300	100,000	4.153.531.500	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	95	100,000	79.325.000	100,000	18.000.000	100,000	79.325.000	100,000	18.000.000	100,000	79.325.000	100,000	273.975.000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	80	90,000	45.450.000	90,000	45.450.000	90,000	45.450.000	90,000	45.450.000	90,000	45.450.000	90,000	227.250.000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	170.000.000	100,000	170.000.000	100,000	175.000.000	100,000	185.000.000	10.080.000	185.000.000	2.096.000	885.000.000	Dinas Kearsipan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,000	758.870.000	100,000	758.870.000	100,000	758.870.000	100,000	758.870.000	100,000	758.870.000	100,000	3.794.350.000	Dinas Kearsipan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	100.000	45.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	245.000.000	Dinas Kearsipan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	100	100.000	55.000.000	100.000	55.000.000	100.000	55.000.000	100.000	55.000.000	100.000	55.000.000	100.000	275.000.000	Dinas Kearsipan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100.000	3.082.143.580	100.000	2.701.270.820	100.000	2.802.490.090	100.000	1.568.673.666	100.000	1.723.249.914	100.000	11.877.828.070	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100.000	5.949.134.000	100.000	6.473.067.400	100.000	7.030.141.640	100.000	7.625.024.105	100.000	8.261.534.686	100.000	35.338.901.831	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100.000	265.500.000	100.000	246.200.000	100.000	280.040.000	100.000	302.460.000	100.000	313.880.000	100.000	1.408.080.000	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	90	100.000	2.040.000.000	100.000	2.304.000.000	100.000	2.256.000.000	100.000	2.292.000.000	100.000	2.292.000.000	100.000	11.184.000.000	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	95	95.000	836.855.000	95.000	242.490.000	95.000	264.285.000	95.000	227.555.000	95.000	226.965.000	95.000	1.798.150.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	95	95.000	1.186.237.200	95.000	994.698.000	95.000	1.132.278.000	95.000	1.123.893.000	95.000	1.068.395.500	95.000	5.505.501.700	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kepatuhan aparatur	%	95	95.000	0	0,000	48.500.000	0,000	0	95,000	22.500.000	0,000	11.000.000	31,667	82.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	Persen	95	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	0,000	0	100.000	28.000.000	0,000	0	0,000	0	100.000	26.000.000	100.000	54.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100.000	0	100.000	75.000.000	100.000	75.000.000	100.000	175.000.000	100.000	175.000.000	100.000	500.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	90	100.000	100.000.000	100.000	223.000.000	100.000	233.000.000	100.000	256.000.000	100.000	256.000.000	100.000	1.068.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	100.000	370.000.000	100.000	370.000.000	100.000	396.000.000	100.000	397.000.000	100.000	402.000.000	100.000	1.935.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	persen	90	100.000	117.545.000	100.000	117.545.000	100.000	117.545.000	100.000	117.545.000	100.000	117.545.000	100.000	587.725.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	persen	90	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	250.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	persen	90	100.000	192.759.600	100.000	522.759.600	100.000	542.759.600	100.000	542.759.600	100.000	542.759.600	100.000	2.343.798.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	persen	90	100.000	944.168.725	100.000	1.825.801.250	100.000	1.825.801.250	100.000	1.825.801.250	100.000	1.825.801.250	100.000	8.247.373.725	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	0,000	0	100.000	67.000.000	100.000	67.000.000	100.000	67.000.000	100.000	67.000.000	100.000	268.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	0,000	0	100.000	400.000.000	100.000	400.000.000	100.000	400.000.000	100.000	400.000.000	100.000	1.600.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100.000	52.985.000	100.000	344.919.000	100.000	364.919.000	100.000	294.919.000	100.000	294.919.000	100.000	1.352.661.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100.000	506.600.650	100.000	508.600.650	100.000	508.600.650	100.000	508.600.650	100.000	508.600.650	100.000	2.541.003.250	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	100.000	35.650.000	100.000	68.375.000	100.000	35.650.000	100.000	68.375.000	100.000	35.650.000	100.000	243.700.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	0	100.000	73.460.000	100.000	73.460.000	100.000	73.460.000	100.000	73.460.000	100.000	73.460.000	100.000	367.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	100,000	718.295.000	100,000	128.400.000	100,000	258.700.000	100,000	166.400.000	100,000	147.400.000	100,000	1.419.195.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	99	90,000	1.235.816.000	100,000	1.236.305.600	100,000	1.237.554.992	100,000	1.238.564.372	100,000	1.238.814.372	98,000	6.187.055.336	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100,000	0	100,000	56.800.000	100,000	72.000.000	100,000	87.000.000	100,000	105.000.000	100,000	320.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100,000	27.450.000	100,000	57.000.000	100,000	65.000.000	100,000	75.000.000	100,000	85.000.000	100,000	309.450.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	90	100,000	147.032.000	100,000	611.100.000	100,000	269.200.000	100,000	252.550.000	100,000	578.250.000	100,000	1.858.132.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	100,000	790.380.032	100,000	986.165.000	100,000	994.090.000	100,000	1.072.090.000	100,000	1.191.740.000	100,000	5.034.465.032	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	85	95,000	60.600.000	95,000	18.000.000	95,000	24.600.000	95,000	18.000.000	95,000	24.600.000	95,000	145.800.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	85	90,000	39.400.000	90,000	53.100.000	90,000	53.100.000	90,000	53.100.000	90,000	66.800.000	90,000	265.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	80	90,000	962.920.000	90,000	1.662.570.000	90,000	777.570.000	90,000	1.161.070.000	90,000	823.570.000	90,000	5.387.700.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	95,000	2.480.750.900	95,000	2.495.851.700	95,000	2.581.264.700	95,000	2.686.570.000	95,000	2.776.658.700	95,000	13.021.096.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	537.909.900	100,000	739.084.800	100,000	741.484.800	100,000	741.484.800	100,000	743.984.800	100,000	3.503.949.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	0	0,000	0	100,000	35.000.000	100,000	12.500.000	100,000	20.000.000	100,000	20.000.000	100,000	87.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	0	0,000	0	100,000	54.360.000	0,000	0	100,000	22.000.000	0,000	0	100,000	76.360.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	101.014.850	100,000	207.542.800	100,000	242.842.800	100,000	152.842.800	100,000	87.842.800	100,000	792.086.050	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Aparatur	%	0	90,000	46.975.000	90,000	27.720.000	90,000	25.000.000	0,000	0	90,000	25.000.000	90,000	124.695.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	60	90,000	130.880.000	0,000	0	0,000	0	90,000	130.880.000	90,000	0	90,000	261.760.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90	90,000	278.789.750	90,000	264.810.500	90,000	462.372.250	90,000	202.120.000	90,000	302.120.000	90,000	1.510.212.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi perkantoran	%	0	90,000	1.221.957.550	80,000	1.172.355.050	90,000	1.103.895.800	90,000	1.095.395.800	90,000	1.185.395.800	88,000	5.779.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	persen	0	90,000	1.460.000.000	90,000	1.260.000.000	90,000	837.000.000	90,000	1.690.000.000	90,000	1.790.000.000	90,000	7.037.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	0	90,000	1.396.291.872	90,000	1.405.291.872	90,000	1.429.441.872	90,000	1.450.991.872	90,000	1.469.691.872	90,000	7.151.709.360	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Layanan peningkatan disiplin aparatur	pasang	0	90,000	238.710.000	90,000	259.700.000	90,000	244.700.000	90,000	244.700.000	90,000	259.700.000	90,000	1.247.510.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	0	90,000	100.000.000	90,000	100.000.000	90,000	100.000.000	90,000	100.000.000	90,000	100.000.000	90,000	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	470.000.000	100,000	470.000.000	100,000	270.000.000	100,000	270.000.000	100,000	210.000.000	100,000	1.690.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100.000	835.200.000	100.000	835.200.000	100.000	850.200.000	100.000	835.200.000	100.000	840.200.000	100.000	4.196.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	50.000.000	100.000	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	100	100.000	132.000.000	100.000	75.000.000	100.000	75.000.000	100.000	75.000.000	100.000	75.000.000	100.000	432.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100.000	1.060.960.000	100.000	1.060.960.000	100.000	1.105.960.000	100.000	1.100.960.000	100.000	1.105.960.000	100.000	5.434.800.000	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Aparatur	%	90	100.000	23.800.000	100.000	23.800.000	100.000	23.800.000	100.000	23.800.000	100.000	23.800.000	100.000	119.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100.000	115.000.000	100.000	115.000.000	100.000	75.000.000	100.000	75.000.000	100.000	75.000.000	100.000	455.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100.000	135.000.000	100.000	135.000.000	100.000	315.000.000	100.000	55.000.000	100.000	25.000.000	100.000	665.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100.000	838.300.000	100.000	838.300.000	100.000	838.300.000	100.000	838.300.000	100.000	838.300.000	100.000	4.191.500.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan aparatur	%	100	100.000	35.000.000	100.000	35.000.000	100.000	35.000.000	100.000	35.000.000	100.000	35.000.000	100.000	175.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	%	100	100.000	69.000.000	100.000	69.000.000	100.000	69.000.000	100.000	69.000.000	100.000	69.000.000	100.000	345.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100.000	875.000.000	100.000	875.000.000	100.000	875.000.000	100.000	875.000.000	100.000	875.000.000	100.000	4.375.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100.000	746.949.000	100.000	754.131.500	100.000	759.662.125	100.000	767.026.381	100.000	796.733.695	100.000	3.824.502.701	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	90	100,000	101.800.000	0,000	0	100,000	47.050.000	0,000	0	100,000	30.800.000	100,000	179.650.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	602.345.000	100,000	926.687.939	100,000	887.937.939	100,000	154.602.000	100,000	222.930.000	100,000	2.794.502.878	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	85	90,000	2.142.000.000	90,000	2.142.000.000	90,000	2.242.000.000	90,000	2.382.000.000	90,000	2.482.500.000	90,000	11.390.500.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	100	100,000	125.000.000	100,000	125.000.000	100,000	140.000.000	100,000	140.000.000	100,000	140.000.000	100,000	670.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100,000	50.000.000	100,000	50.000.000	100,000	75.000.000	100,000	75.000.000	100,000	80.000.000	100,000	330.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	728.500.000	100,000	478.500.000	100,000	340.000.000	100,000	360.000.000	100,000	725.000.000	100,000	2.632.000.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,000	944.186.600	100,000	1.400.000.000	100,000	1.484.000.000	100,000	1.509.000.000	100,000	1.582.000.000	100,000	6.919.186.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	100	100,000	103.000.000	100,000	103.000.000	100,000	103.000.000	100,000	103.000.000	100,000	103.000.000	100,000	515.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	Orang	100	100,000	175.000.000	100,000	185.000.000	100,000	190.000.000	100,000	195.000.000	100,000	195.000.000	100,000	940.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100,000	1.435.140.000	100,000	1.396.200.000	100,000	1.015.000.000	100,000	1.025.000.000	100,000	1.035.000.000	100,000	5.906.340.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	0	100,000	36.450.000	0,000	0	100,000	30.340.000	0,000	0	100,000	18.225.000	100,000	85.015.000	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	100	100,000	48.450.000	100,000	48.450.000	100,000	48.450.000	0,000	0	0,000	0	100,000	145.350.000	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100,000	128.050.000	100,000	71.000.000	100,000	67.000.000	100,000	87.700.000	100,000	71.000.000	100,000	424.750.000	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	419.355.250	100,000	463.625.250	100,000	471.155.250	100,000	489.375.250	100,000	498.805.250	100,000	2.342.316.250	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	585.200.000	100,000	677.150.000	100,000	707.850.000	100,000	736.000.000	100,000	775.000.000	100,000	3.481.200.000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	100,000	51.000.000	100,000	10.000.000	100,000	36.000.000	100,000	10.000.000	100,000	16.000.000	100,000	123.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100,000	220.000.000	100,000	220.000.000	100,000	220.000.000	100,000	220.000.000	100,000	220.000.000	100,000	1.100.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	86.000.000	100,000	90.800.000	100,000	90.500.000	100,000	104.750.000	100,000	111.000.000	100,000	483.050.000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	53.000.000	100,000	662.000.000	100,000	743.100.000	100,000	486.100.000	100,000	74.100.000	100,000	2.018.300.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	767.862.000	100,000	1.243.602.400	100,000	1.255.602.400	100,000	1.685.812.400	100,000	1.696.812.400	100,000	6.649.691.600	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	80	100,000	72.000.000	100,000	72.000.000	100,000	72.000.000	100,000	72.000.000	100,000	72.000.000	100,000	360.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	0	95,000	485.077.300	95,000	620.452.150	95,000	620.452.150	95,000	620.452.150	95,000	620.452.150	95,000	2.966.885.900	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	0	90,000	0	90,000	18.000.000	90,000	24.000.000	90,000	7.200.000	90,000	7.200.000	90,000	56.400.000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	0	90,000	0	90,000	344.967.600	90,000	344.967.600	90,000	344.967.600	90,000	344.967.600	90,000	1.379.870.400	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	21436050	90,000	46.854.000	90,000	169.000.000	90,000	491.500.000	90,000	168.500.000	90,000	155.000.000	90,000	1.030.854.000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100,000	215.000.000	100,000	10.000.000	100,000	211.750.000	100,000	230.000.000	100,000	300.000.000	100,000	966.750.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100,000	220.000.000	100,000	255.000.000	100,000	275.000.000	100,000	290.000.000	100,000	300.000.000	100,000	1.340.000.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang kesehatan	%	100	100,000	450.000.000	100,000	1.100.000.000	100,000	685.000.000	100,000	775.000.000	100,000	865.000.000	100,000	3.875.000.000	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	2.221.272.000	100,000	2.417.500.000	100,000	2.521.750.000	100,000	2.627.500.000	100,000	2.765.000.000	100,000	12.553.022.000	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100,000	1.637.500.000	100,000	1.606.500.000	100,000	1.607.500.000	100,000	1.606.500.000	100,000	1.606.500.000	100,000	8.064.500.000	Dinas Sosial
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	100,000	710.000.000	100,000	260.000.000	100,000	610.000.000	100,000	260.000.000	100,000	610.000.000	100,000	2.450.000.000	Dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	100	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	100.000.000	100,000	500.000.000	Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	409.500.000	100,000	409.500.000	100,000	909.500.000	100,000	909.500.000	100,000	439.500.000	100,000	3.077.500.000	Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	100,000	1.064.250.000	100,000	1.342.800.000	100,000	1.362.800.000	100,000	1.390.300.000	100,000	1.392.800.000	100,000	6.552.950.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	100,000	78.100.000	100,000	111.000.000	0,000	0	100,000	87.500.000	0,000	0	0,000	276.600.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100,000	30.000.000	0,000	0	100,000	30.000.000	0,000	0	0,000	0	0,000	60.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100,000	291.900.000	100,000	240.000.000	100,000	235.000.000	100,000	160.000.000	100,000	220.000.000	100,000	1.146.900.000	Dinas Pertanian dan Perikanan

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	100.000	150.000.000	100.000	150.000.000	100.000	175.000.000	100.000	175.000.000	100.000	200.000.000	100.000	850.000.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	90	100.000	1.872.500.000	100.000	4.552.500.000	100.000	862.500.000	100.000	812.500.000	100.000	887.500.000	100.000	8.987.500.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	100.000	6.027.000.000	100.000	6.007.000.000	100.000	6.068.000.000	100.000	6.068.000.000	100.000	6.068.000.000	100.000	30.238.000.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100.000	431.107.000	100.000	431.107.000	100.000	431.107.000	100.000	431.107.000	100.000	431.107.000	100.000	2.155.535.000	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	100	100.000	1.001.500.000	100.000	1.101.650.000	100.000	1.211.815.000	100.000	1.332.996.500	100.000	1.466.296.150	100.000	6.114.257.650	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100.000	139.506.550	100.000	458.457.205	100.000	888.802.926	100.000	976.683.218	100.000	334.751.540	100.000	2.798.201.439	Inspektorat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100.000	676.859.850	100.000	766.913.750	100.000	843.605.125	100.000	927.965.638	100.000	1.020.762.206	100.000	4.236.106.569	Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	100.000	66.895.000	100.000	73.584.500	100.000	80.942.950	100.000	89.037.245	100.000	97.940.970	100.000	408.400.665	Inspektorat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100	100.000	1.397.874.700	100.000	1.669.617.500	100.000	1.649.837.500	100.000	1.649.837.500	100.000	1.649.837.500	100.000	8.017.004.700	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	TINGKAT KEPATUHAN APARATUR	%	100	100.000	91.890.000	100.000	115.200.000	100.000	81.600.000	100.000	115.200.000	100.000	57.600.000	100.000	461.490.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	100.000	46.400.000	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	100.000	25.000.000	100.000	146.400.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	100.000	631.807.225	100.000	485.600.000	100.000	515.600.000	100.000	535.600.000	100.000	585.600.000	100.000	2.754.207.225	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur	%	100	100,000	6.023.798.174	100,000	6.413.548.174	100,000	6.023.798.174	100,000	6.413.548.174	100,000	6.413.548.174	100,000	31.288.240.870	Sekretariat Daerah Bagian Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,000	83.625.000	100,000	83.625.000	100,000	83.625.000	100,000	83.625.000	100,000	83.625.000	100,000	418.125.000	Sekretariat Daerah Bagian Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100,000	215.100.000	100,000	215.100.000	100,000	215.100.000	100,000	215.100.000	100,000	215.100.000	100,000	1.075.500.000	Sekretariat Daerah Bagian Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	80	85,000	6.139.376.800	88,000	6.139.376.800	90,000	6.139.376.800	92,000	6.139.376.800	94,000	6.139.376.800	89,800	30.696.884.000	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	Persen	90	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	Persen	90	100,000	60.650.000	100,000	60.650.000	100,000	60.650.000	100,000	60.650.000	100,000	60.650.000	100,000	303.250.000	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	%	80	85,000	0	90,000	0	92,000	0	94,000	0	98,000	0	0,000	0	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	95,29	85,000	4.080.500.000	85,000	4.093.500.000	85,000	4.158.500.000	85,000	4.213.500.000	85,000	4.325.500.000	85,000	20.871.500.000	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kepatuhan aparatur	%	99,04	90,000	612.500.000	90,000	275.000.000	90,000	250.000.000	90,000	250.000.000	90,000	325.000.000	90,000	1.712.500.000	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kelkutsertaan aparatur dalam bimbingan teknis dan rapat koordinasi antar sekretariat DPRD	%	0	90,000	250.700.000	90,000	435.000.000	90,000	435.000.000	90,000	435.000.000	90,000	435.000.000	90,000	1.990.700.000	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase layanan sarana dan prasarana	%	97,13	90,000	1.090.200.000	90,000	4.480.000.000	90,000	1.650.000.000	90,000	1.565.000.000	90,000	1.910.000.000	90,000	10.695.200.000	Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	90	100,000	889.567.375	100,000	1.654.701.000	100,000	1.990.901.000	100,000	1.772.851.000	100,000	1.772.851.000	100,000	8.080.871.375	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	100,000	0	100,000	87.280.000	100,000	61.100.000	100,000	87.280.000	100,000	61.100.000	100,000	296.760.000	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	90	100,000	154.953.000	100,000	373.420.000	100,000	628.466.000	100,000	428.860.000	100,000	469.860.000	100,000	2.055.559.000	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	%	90	100,000	0	100,000	145.830.000	100,000	145.830.000	100,000	145.830.000	100,000	145.830.000	100,000	583.320.000	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	persen	100	100,000	421.000.000	100,000	422.000.000	100,000	422.000.000	100,000	422.500.000	100,000	423.000.000	100,000	2.110.500.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	persen	90	90,000	44.080.000	90,000	47.500.000	90,000	48.000.000	90,000	50.000.000	90,000	50.000.000	90,000	239.580.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	persen	0	2,000	35.000.000	2,000	35.000.000	2,000	35.000.000	2,000	35.000.000	2,000	35.000.000	10,000	175.000.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	persen	80	85,000	152.500.000	85,000	127.500.000	85,000	157.500.000	85,000	132.500.000	85,000	162.500.000	85,000	732.500.000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 sebagai berikut

Tabel 8.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kotamobagu
 Tahun 2019-2023

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PDRB per kapita (ADHB) (dalam juta rupiah)	23,68	25,09	26,50	27,91	29,32	30,73	30,73
Tingkat Pengangguran (%)	5,71	5,68	5,60	5,55	5,50	5,00	5,00
PDRB Perkapita (ADHK) (dalam juta rupiah)	17,06	17,53	18,00	18,47	18,94	19,41	19,41
Persentase penduduk miskin (%)	5,96	5,94	5,92	5,91	5,90	5,88	5,88

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)	69,26	73,00	75,00	77,00	80,00	82,00	82,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	86,80	86,91	87,06	87,13	87,20	87,27	87,27
Persentase Kesesuaian Ruang (%)	- ,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)	22,08	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	32,00
Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi (%)	85,00	88,38	91,32	94,26	97,19	100,00	100,00

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,58	97,33	98,06	98,78	99,49	100,00	100,00
Persentase Destinasi yang di Kembangkan (%)	5,00	- ,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Nilai Investasi (Rupiah)	3.928.588.264.774,00	1.400.000.000.000,00	1.400.000.000.000,00	1.400.000.000.000,00	1.400.000.000.000,00	1.400.000.000.000,00	7.000.000.000.000,00
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP) (Nilai)	63,70	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)	74,37	81,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi (%)	18,18	36,36	63,64	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase Peningkatan PAD (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Persentase penegakan peraturan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
cakupan penanganan bencana (Indeks)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (Kategori)	PRATAMA	PRATAMA	MADYA	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	94,78	94,80	94,82	94,84	94,86	94,88	94,88
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	57,48	57,48	57,49	57,50	57,51	57,52	57,52
Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional (%)	42,14	45,00	47,50	50,00	60,00	75,00	75,00
Angka Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	9,97	10,19	10,41	10,63	10,85	11,07	11,07
Angka harapan hidup (Tahun)	69,72	69,74	69,75	69,77	69,78	69,80	69,80

Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional (%)	- ,00	- ,00	12,50	25,00	37,50	50,00	50,00
Persentase Budaya yang dilestarikan (%)	25	50	75	85	95	100	100

Label 8.2
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kota Kotamobagu

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	6,79	6,84	6,89	6,94	6,95	6,96	6,96	
2	PDRB per kapita (ADHB)	Milyar Rupiah	23,68	25,09	26,5	27,91	29,32	30,73	30,73	
3	PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	17,06	17,53	18	18,47	18,94	19,41	19,41	
4	Nilai Investasi (Dalam Juta)	Nilai	3.928.588	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	7.000.000	
5	Persentase Penduduk Kemiskinan	%	5,96	5,94	5,92	5,91	5,9	5,88	5,88	
6	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio	94,04	94,06	94,08	94,09	94,10	94,12	94,12	
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72	72,05	72,1	72,15	72,2	72,25	72,25	
8	Angka melek Huruf	%	99,87	99,88	99,89	99,91	99,92	99,93	99,93	
9	Angka rata-rata lama Sekolah	%	9,97	10,19	10,41	10,63	10,85	11,07	11,07	
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,72	69,74	69,75	69,77	69,78	69,8	69,8	
11	persentase balita gizi buruk	%	0,04	0,5	0,5	0,4	0,2	1	1	
12	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,26	2,12	2,06	1,95	1,88	1,78	1,78	
13	Presentase Destinasi yang di Kembangkan	%	5	0	40	60	80	100	100	
14	Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	100	100	100	100	100	100	
15	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,71	5,68	5,6	5,55	5,5	5	5	
16	Keluarga pra sejahtera	Jumlah	1.343	1.208	1.087	975	877	789	789	
17	cakupan penanganan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,78	94,8	94,82	94,84	94,86	94,88	94,88	
19	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,48	57,48	57,49	57,5	57,51	57,52	57,52	
20	persentase Peningkatan PAD	%	0	10	10	10	10	10	50	
21	opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
22	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91	91	91	91	91	91	91	
23	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	60	60	60	60	60	60	60	
24	Penanganan daerah Rawan Pangan	Skor	5	5	5	5	5	5	5	
25	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	7,5	7,41	7,32	7,23	7,14	7,06	7,06	
26	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	28,17	28,320	28,460	28,600	28,740	28,880	28,880	
27	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	19,01	19,020	19,030	19,040	19,100	19,110	19,110	
28	Ketersediaan energi	Kkal/Kap/Hari	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	
29	Ketersediaan Protein	Gram/kap/Hari	57	57	57	57	57	57	57	
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Nilai Tukar Petani	Nilai	95,16	95,21	95,26	95,31	95,36	95,41	95,41	
2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	63,7	70	75	80	80	80	80	
3	Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	Kategori	pratama	pratama	madya	madya	madya	nindya	nindya	
4	Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi	%	18,18	36,36	63,64	100	100	100	100	
5	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penegakan peraturan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	74,37	81	90	90	95	95	95	
8	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,58	97,33	98,06	98,78	99,49	100	100	
9	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	%	22,08	24	26	28	30	32	32	
10	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	%	85	88,38	91,32	94,26	97,19	100	100	
11	Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional	%	42,14	45	47,5	50	60	75	75	
12	Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional	%	0	0	12,5	25	37,5	50	50	
13	Persentase Kesesuaian Ruang	%	0	100	100	100	100	100	100	
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86,8	86,91	87,06	87,13	87,2	87,27	87,27	
15	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	%	69,26	73	75	77	80	82	82	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
1 Pendidikan										
1.1	Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi Pendukung di bidang pendidikan	%	94,79	0,00	95,75	96,70	97,66	98,64	98,64	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	53,21	56,18	59,04	61,79	64,44	66,99	66,99	Dinas Pendidikan
1.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,47	79,98	80,49	81,01	81,53	82,05	82,05	Dinas Pendidikan
1.4	Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	66,67	75,75	80,00	86,67	93,33	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86,16	86,77	87,38	87,99	88,59	89,20	89,20	Dinas Pendidikan
1.6	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	72,86	75,39	78,01	80,72	83,52	86,42	86,42	Dinas Pendidikan
1.7	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	1,62	1,64	1,66	1,67	1,69	1,71	1,71	Dinas Pendidikan
1.8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,36	99,43	99,85	99,87	99,90	99,93	99,80	Dinas Pendidikan
1.9	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	Dinas Pendidikan
1.10	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	85,41	85,93	86,45	86,97	87,49	88,01	88,01	Dinas Pendidikan
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	76,36	76,99	77,61	78,23	78,85	79,47	79,47	Dinas Pendidikan
1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.13	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	%	105,07	105,17	105,27	105,37	105,47	105,57	105,57	Dinas Pendidikan
1.14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,76	99,89	99,91	99,83	99,93	99,97	99,91	Dinas Pendidikan
1.15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	46,61	46,71	46,56	46,53	46,50	46,48	46,48	Dinas Pendidikan
1.16	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,18	0,13	0,10	0,07	0,05	0,04	0,08	Dinas Pendidikan
1.17	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	86,19	87,74	89,31	90,92	92,55	94,22	94,22	Dinas Pendidikan

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
1.18	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	%	2,13	2,17	2,20	2,23	2,26	2,29	2,29	Dinas Pendidikan
1.19	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
1.20	Angka partisipasi kasar SD/MI	%	95,45	95,64	95,81	95,99	96,16	96,32	96,32	Dinas Pendidikan
1.21	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,72	0,64	0,58	0,52	0,46	0,41	0,52	Dinas Pendidikan
1.22	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	43,15	47,90	53,18	59,04	65,55	72,78	72,78	Dinas Pendidikan
1.23	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	86,16	86,77	87,38	87,99	88,59	89,20	89,20	Dinas Pendidikan
1.24	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,87	99,88	99,89	99,91	99,92	99,93	99,93	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan									
2.1	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	75	80	80	85	85	90	90	Dinas Kesehatan
2.2	Persentase Apotik dan IRTP yang diawasi	%	70	0	85	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
2.3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.4	Cakupan prevalensi gizi kurang	%	1,26	2,12	2,06	1,95	1,88	1,78	1,78	Dinas Kesehatan
2.5	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.6	Cakupan prevalensi gizi buruk	%	0,04	0,50	0,50	0,40	0,20	0,10	0,10	Dinas Kesehatan
2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	80	85	88	89	90	90	90	Dinas Kesehatan
2.8	Penderita diare yang ditangani	%	81	83	83	83	83	83	83	Dinas Kesehatan
2.9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	71,6	95	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
2.10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,005	0,020	0,020	0,020	0,030	0,030	0,030	Dinas Kesehatan
2.11	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	0,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Kesehatan
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.13	Angka kejadian Malaria	per 100.000 penduduk	4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Dinas Kesehatan
2.14	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	1,5	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	Dinas Kesehatan
2.15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	60,6	90	91	92	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	34	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.17	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	85	86	87	88	89	90	90	Dinas Kesehatan
2.18	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	5	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.19	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	330	350	361	357	352	348	348	Dinas Kesehatan
2.21	Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun	%	27	40	45	50	55	60	60	Dinas Kesehatan
2.22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	83	90	90	91	92	93	93	Dinas Kesehatan
2.23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	6,53	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	Dinas Kesehatan
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	53,93	56,92	56,92	56,92	56,92	56,92	56,92	Dinas Kesehatan
2.25	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 balita	5,48	4,02	4,11	4,21	4,30	4,40	4,40	Dinas Kesehatan
2.26	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.27	Cakupan jumlah organisasi UKBM	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.28	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	10,04	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	Dinas Kesehatan
2.29	Cakupan pembantu puskesmas	%	33	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	Dinas Kesehatan
2.30	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	2,42	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	Dinas Kesehatan
2.31	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	140	153	166	179	184	196	196	Dinas Kesehatan
2.32	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	%	100	88	90	93	95	100	100	Dinas Kesehatan
2.33	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	23	30	31	32	33	37	37	Dinas Kesehatan
2.34	Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	%	19	0,00	22,00	25,00	27,00	30,00	30,00	Dinas Kesehatan
2.35	Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.36	Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah	%	0	20	40	60	80	100	100	Dinas Kesehatan
2.37	Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	%	90	90	95	95	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.38	Cakupan peserta BPJS KIS JKN	%	75	90	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.39	Angka kelangsungan hidup bayi	per 1000 kelahiran hidup	993	976	980	982	985	990	990	Dinas Kesehatan
2.40	Angka Kematian Neonatal per 1000 KH	Bayi	11	24	20	18	15	10	10	Dinas Kesehatan
2.41	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	Orang	11	24	20	18	15	10	10	Dinas Kesehatan
2.42	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	181,5	85	87	90	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.43	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.44	Cakupan pelayanan anak balita	%	36	85	87	90	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.45	Angka Kematian Balita per 1000 KH	Orang	10	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Dinas Kesehatan
2.46	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	80,7	90	91	92	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.47	Cakupan pelayanan nifas	%	74	85	90	91	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.48	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	98	80	90	92	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.49	Cakupan kunjungan bayi	%	93	90	91	92	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.50	Angka kematian Ibu per 100.000 KH	100.000 KH	167	167	167	167	167	167	167	Dinas Kesehatan

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
2.51	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	70,2	85	90	91	93	95	95	Dinas Kesehatan
2.52	Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	%	85	86	87	88	89	90	90	Dinas Kesehatan
2.53	Persentase Pendapatan Rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan	%	0	0	100	100	100	100	100	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
2.54	Persentase Pemenuhan Gizi Pasien	%	100	100	100	100	100	100	100	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
2.55	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	%	22,22	11,11	14,81	18,52	14,81	3,70	62,95	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
2.56	persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	%	0	21,51	19,35	17,21	19,35	22,58	22,58	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
2.57	Persentase Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
2.58	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	%	31,18	26,57	19,04	18,75	17,66	17,97	17,97	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
2.59	Tingkat pelayanan obat dan perbekalan serta menjamin mutu obat dan perbekalan terhadap Masyarakat	%	90	85	85	90	95	100	100	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
2.60	Persentase Sekolah Sehat	%	7,14	0,00	2,68	2,68	2,68	2,68	10,72	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Pekerjaan Umum									
3.1.1	Persentase Luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.2	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	87,75	87,94	92,76	95,79	98,42	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Nilai	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.4	Persentase Konektifitas Jalan dan Jembatan	%	1,61	2,43	3,03	6,07	6,07	9,10	9,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.5	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Jumlah	0,73	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.6	Persentase data jalan dan jembatan yang update	%	90	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.7	Persentase tersedianya database ruas jalan dan jembatan	%	0	19,95	39,89	59,20	80,05	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.8	Persentase Panjang talud yang terbangun	%	65	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.9	Persentase Panjang Talud dalam kondisi Baik	%	78	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.10	Persentase Data Base Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	%	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.11	Persentase Berkurangnya daerah terdampak Banjir	%	15	20	25	30	40	50	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.12	Persentase jumlah alat ke-PUan yang tersedia	%	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.13	Persentase Kapasitas Jalan yang di Tingkatkan	%	70	73	75	77	80	82	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.14	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Terampil	%	0	20	40	60	80	100	300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.15	Persentase jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas	%	0	12,50	25,00	37,50	50,00	57,50	57,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.16	Persentase Sambungan Rumah (SR) Yg Berakses Sanitasi	%	28,49	29,81	57,24	71,49	85,75	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.17	Persentase jumlah KK yang terlayani Air Minum	%	60	65	70	80	90	100	81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.18	Persentase terbangunnya Jalan Paving	%	60	65	70	80	95	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.19	Persentase Sarana dan Prasarana daerah rawan bencana yang di rehabilitasi	%	0,0	0,0	20	20	20	20	80	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
3.1.20	Persentase Keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana	%	0,0	0,0	16,67	22,22	16,67	22,22	77,78	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
3.2	penataan ruang									
3.2.1	rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	0	85	88	91	92	94	94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0,105	0,129	0,155	0,181	0,207	0,236	0,236	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	15	12	9	8	6	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.5	ketaatan terhadap RTRW	%	50	60	68	72	79	83	83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.6	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	75	80	85	90	95	98	98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.7	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	%	20	20	20	40	40	60	60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.8	Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang	%	0	100	100	100	100	0	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4 Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman										
4.1	Persentase rumah layak huni	%	96,58	97,33	98,06	98,78	99,49	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0	15,30	20,70	19,80	27,50	16,70	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.3	Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU	%	0	14,29	14,29	28,57	28,57	14,29	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.4	Cakupan Perbaikan Perumahan Akibat bencana dan Akibat Relokasi Program Pemerintah	%	0	0	20	20	20	20	20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.5	Persentase Dokumen pengembangan perumahan	%	70	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	91,98	95	95	95	95	95	95	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
4.7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
5.1	Persentase SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik Bernilai Baik	%	40	75	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
5.2	Persentase pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
5.3	Cakupan Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan	%	0	0	90	90	0	0	90	Kotamobagu Timur
5.4	Persentase Pencegahan Potensi Konflik	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
5.5	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
5.6	Persentase Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	%	0	11,11	16,66	16,66	16,66	16,66	77,75	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
5.7	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan ke agamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	88,01	100	100	100	100	100	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
5.9	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
5.10	Persentase Limas yang Terlatih Dalam Pamswakarsa	%	0	20	20	20	20	20	20	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
5.11	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
5.12	Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan Bencana	%	0	50	75	80	85	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
5.13	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
5.14	Persentasi Laporan Kejadian Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
5.15	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan Kebencanaan	%	100	0	25	25	25	25	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
6	Sosial									
6.1	Persentase Penyediaan Rumah singah bagi anak terlantar	%	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.2	Persentase Panti asuhan yang mendapatkan bantuan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.3	Persentase Peningkatan kualitas PSKS	%	43,55	43,55	43,55	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.4	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.5	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	11,31	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	92,25	Dinas Sosial
6.6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	25,03	4,36	20	20	20	20	84,36	Dinas Sosial
6.7	persentase PMKS yang tertangani	%	53	20	20	20	20	20	100	Dinas Sosial
6.8	Persentase perumusan kebijakan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	0	0,00	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
6.9	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	0	0	25	25	25	25	100	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Layanan Urusan Wajib Non dasar										
1	Tenaga kerja									
1.1	Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	38	38,00	40,00	42,00	44,80	47,00	47,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.2	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	41	80,00	80,00	66,00	66,00	66,00	66,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.3	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	79	83,00	84,00	84,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.4	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	54,05	45,00	55,56	56,10	56,63	57,14	57,14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.5	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	50	50	50	50	50	50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
2.1	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	%	5	32	35	30	20	20	137	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	38,51	38,53	38,55	38,60	38,65	38,70	38,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	58,65	58,67	58,70	58,75	58,80	58,85	58,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.5	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.6	Rasio KDRT	%	0,05	0,045	0,040	0,035	0,030	0,025	0,035	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.7	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	%	12	16	0	0	0	0	16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,91	50	51	51,5	52	52,5	52,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.9	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	Kelompok	13	29	42	54	66	78	78	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.10	Cakupan kelompok keluarga yang melakukan Pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
2.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun	%	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.12	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	2,38	2,17	2,13	2,10	2,07	2,04	2,04	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.13	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	%	0,35	0,32	0,3	0,26	0,20	0,18	0,19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	Cakupan Keluarga yang Mempuyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	71,03	73	75	77	79	80	80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	Orang	80,86	81	81	81	81	81	81	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB	Persentasi	69,51	70	70	70	70	70	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB	Persentasi	79,71	80	80	80	80	80	80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.19	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	%	90	95	95	95	95	95	95	Kotamobagu Selatan
2.20	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	Kotamobagu Utara
3 Pangan										
3.1	Cakupan Ketersediaan pangan utama	Ton	210	215	220	225	250	255	255	Dinas Ketahanan Pangan
3.2	Cakupan Bola Pangan Harapan	Skor	0	90	90	90	90	90	90	Dinas Ketahanan Pangan
3.3	Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan
3.4	Cakupan Konsumsi Protein	Gram/kap/Hari	57	57	57	57	57	57	57	Dinas Ketahanan Pangan
3.5	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Ketahanan Pangan
3.6	Cakupan Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari	2150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	Dinas Ketahanan Pangan
3.7	Penguatan cadangan pangan	%	15	60	60	60	60	60	60	Dinas Ketahanan Pangan
4 Pertanian										
4.1	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	0	19,81	19,97	19,97	20,13	20,13	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.2	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.3	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	0	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.4	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	0	23,26	23,26	23,26	18,61	11,63	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5 Lingkungan Hidup										
5.1	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	72,31	80	75	74	73	72	72	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Operasionalisasi TPA di Kota Kotamobagu	Nilai	75,56	76	76	77	77	78	78	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.5	Persentase Ketersediaan Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah	%	95	80,95	81,82	82,61	83,33	84	84	Dinas Lingkungan Hidup
5.6	Persentase Dokumen Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	%	58,33	66,67	64,29	71,43	75	81,25	81,25	Dinas Lingkungan Hidup
5.7	Persentase Institusi / Kelompok / Individu yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	32	40	42,86	50	50	56,67	56,67	Dinas Lingkungan Hidup
5.8	Persentase Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
5.9	hasil pengukuran indeks kualitas air	Angka	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Dinas Lingkungan Hidup
5.10	hasil pengukuran indeks kualitas udara	Angka	92	92,1	92,2	92,3	92,4	94,5	94,5	Dinas Lingkungan Hidup
5.11	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	73	73,2	73,5	73,6	73,7	73,8	73,8	Dinas Lingkungan Hidup
5.12	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH D yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu	%	44,44	50	60	66,67	75	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
5.13	PersentaseJumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	%	27,69	20	25	26	27	28	28	Dinas Lingkungan Hidup
5.14	Persentase Pelayanan Sampah Perkotaan	%	72,31	80	80	85	85	90	90	Dinas Lingkungan Hidup
6 Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil										
6.1	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
6.2	Presentase keakuratan data disandingkan dengan data konsolidasi bersih	%	0	95	95	95	95	95	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	5	20	40	60	80	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.5	Cakupan penerbitan Akta kematian	%	82,67	93,04	93,23	93,41	93,60	93,78	93,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.6	Rasio Anak berakte kelahiran	Rasio	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	88,21	89	90	91	93	94	94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.8	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,46	0,60	0,70	0,80	0,85	0,90	0,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.9	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	%	88,21	88,21	88,39	88,57	88,92	89,20	89,20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.10	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93	94	95	96	97	98	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rasio	0	0,88	0,89	0,90	0,94	1,00	1,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	75	75	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.3	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	66,67	73,33	80,00	86,67	93,33	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.4	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Keluraha/Desa	%	45,45	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.5	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	100	0	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.7	Persentase LPM berprestasi	%	0	0	4	4	4	8	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.8	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang	%	0	13,33	20	20	20	26,67	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.9	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rasio	0	1,92	1,92	1,95	1,95	1,95	1,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
7.10	persentase PKK aktif	%	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.11	Persentase aparat pemerintah desa yang kompeten	%	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
7.12	Persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang Kompeten	%	0	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
7.13	Persentase Aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang kompeten	%	90	95	95	95	95	95	95	Kecamatan
7.14	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Lomba	%	0	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
7.15	Persentase Retribusi sampah	%	51	70	75	80	95	100	100	Kotamabagu Utara
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1	Persentase faskes dan jejaringnya (Diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	38,3	45	57	66	71	72	72	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	0	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.3	Laju Pertumbuhan Penduduk LPP	orang	2,8	1,36	1,31	1,27	1,25	1,23	1,23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.4	Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	14	18	22	26	30	34	34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	0	1	0	0	0	0	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.6	Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	%	44	19	19	19	19	19	19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.7	Cakupan PKB / PLKB yang di dayakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.9	jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	7	7	8	8	8	8	8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.10	rata-rata usia kawin pertama wanita	%	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	22,98	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.11	Peresentasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	52,3	58,10	58,10	58,10	58,10	58,10	58,10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.12	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	%	41,26	42	43	44	45	46	44	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.13	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	%	25	125	125	125	125	125	125	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.14	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamabagu	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.15	Ratio Aseptor KB	%	78,73	78,80	78,80	79	79	79	78,92	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.16	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	9,3	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.17	Persentase penggunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	34,65	34,65	35,50	36,50	37,10	37,70	37,70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
8.18	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	%	78,73	79	79	79	79	79	79	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.19	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	27	25	25	25	25	25	25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.20	Persentase Sarana dan Prasarana penyuluhan KKB tingkat kecamatan	Kecamatan	0	100	100	100	100	100	500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Perhubungan									
9.1	presentase fasilitas LLAJ yang terpelihara	%	55,56	77,78	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
9.2	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	67	67	75	85	80	92	92	Dinas Perhubungan
9.3	Persentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
9.4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan massal dan Angkutan Umum perkotaan	%	0	33,33	54,55	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
9.5	jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1623	1.623	1.957	2.291	2.625	2.959	2.959	Dinas Perhubungan
9.6	persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	%	100	0	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
9.7	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	6,88	6,49	6,12	5,77	5,44	5,13	5,13	Dinas Perhubungan
9.8	pemasangan rambu-rambu	%	26,67	17,89	17,77	17,77	17,77	17,65	88,85	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan informatika									
10.1	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	42,42	21	0	0	0	0	21	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.2	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	24,44	41	0	0	0	0	41	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.3	Persentase peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	%	26,92	23	0	0	0	0	23	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.4	Persentasi tindaklanjut layanan keluhan masyarakat	%	100	100	0	0	0	0	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.5	Cakupan pengelolaan dan pengembangan aplikasi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan e-Government	%	23,26	30,23	46,51	65,12	81,40	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.6	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.7	cakupan layanan telekomunikasi	%	72	76	85	90	95	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.8	Cakupan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	%	56,58	69,74	82,89	90,76	96,05	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.9	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	%	77,05	70,49	70,49	70,49	70,49	70,49	70,49	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.10	persentase Kelurahan/Desa yang mengelola arsip secara baku	%	0	3,03	9,06	9,06	9,06	9,06	39,27	Dinas Kearsipan
10.11	Persentase Laporan Pelaksanaan SPM	%	0	0,00	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
10.12	Persentase Standarisasi LPSE	%	50	56	67	78	94	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
11.1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	%	0	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	28,55	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	433	455	482	507	532	557	557	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.4	Persentase pelaku usaha yang di promosikan	%	0	0,00	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.5	Persentase Koperasi Aktif	%	82	83	84	85	86	87	87	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.6	Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar	%	0	0,00	23,33	23,33	26,66	26,66	99,98	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	Penanaman modal									
21.1	Persentase Peningkatan Potensi Investasi Daerah	%	0	0	10	0	0	0	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
21.2	persentase pelayanan penerbitan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	3334	3.400	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21.4	jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	439	450	475	500	525	550	550	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Kepemudaan dan Olah raga									
13.1	persentase wirausaha muda	%	59,52	64,29	71,43	80,95	88,10	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.2	presentase prestasi olahraga	%	61,54	65,38	69,23	73,08	76,92	80,77	80,77	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.4	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	82,76	86,21	89,66	93,10	96,55	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	75	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.6	Persentase atlet berprestasi	%	53,33	56,67	60,00	63,33	66,67	70	70	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.7	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	70,18	87,72	91,23	94,74	98,25	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.8	Cakupan pembinaan olahraga	%	73,08	76,92	80,77	84,62	88,46	92,30	92,30	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Statistik									
14.1	Persentase Data Statistik Daerah	%	100	100	0	0	0	0	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
14.2	Persentase Pengendalian Laju Inflasi daerah	Nilai	3,83	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
15	Persandian									
15.1	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	56,58	69,74	82,89	90,76	96,05	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan									
16.1	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	%	25	25,00	50,00	62,50	62,50	62,50	62,50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.2	Persentase nilai-nilai Budaya yang dikembangkan	%	85,18	29,63	85,18	85,18	85,18	85,18	85,18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0	0	0	20	20	20	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.4	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
17	Perpustakaan									
17.1	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,25	Dinas Kearsipan
17.2	rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Dinas Kearsipan
17.3	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	1596	2.196	2.496	2.796	3.096	3.096	3.096	Dinas Kearsipan
17.4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	10851	16.851	18.351	19.851	21.351	22.851	22.851	Dinas Kearsipan
17.5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Jumlah	796	913	1.003	1.154	1.275	1.275	1.275	Dinas Kearsipan
18	Kearsipan									
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen Arsip Dinamis	%	0	0,00	100	100	100	100	100	Dinas Kearsipan
17.2	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2,33	2,33	11,63	11,63	11,63	11,63	48,85	Dinas Kearsipan
Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata									
1.1	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	%	0	0	40	60	80	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2	lama kunjungan wisata	Hari	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.3	Persentase Kunjungan Wisata	%	100	90,91	91,67	92,31	92,86	93,33	93,33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Pertanian									
2.1	Persentase Peningkatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani	%	0	0,00	24,24	51,51	75,75	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.2	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	%	0	0,00	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.3	Persentase Produk Pertanian / Perkebunan yang dipromosikan	%	100	0,00	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.4	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
2.5	Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Ternak	%	32,71	20	20	20	20	20	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.6	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	7,5	7,41	7,32	7,23	7,14	7,06	7,06	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.7	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	0,36	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.8	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	19,01	19,02	19,03	19,04	19,10	19,11	19,11	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.9	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	28,17	28,32	28,46	28,60	28,74	28,88	28,88	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.10	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Agribisnis	%	0	0,00	16,66	33,32	49,98	66,64	66,64	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.11	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.12	Cakupan bina kelompok petani	%	0	0,00	14,35	14,35	14,35	14,35	57,40	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.13	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Inseminator PKB, ATR	%	50	0	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	Energi dan Sumber Daya Alam									
3.1	Persentase Ketersediaan LPG	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
4	Perdagangan									
4.1	Persentase barang yang diawasi	%	35	35	40	45	50	55	55	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.2	Persentase Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perdagangan	%	75	75	80	85	90	95	95	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.3	Persentase Pedangan Kaki Lima dan Asongan yang dibina	%	0	0	20	20	20	20	80	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Perindustrian									
5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0	10,17	10,86	10,66	9,74	9,56	50,99	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5.2	Prosentase Peningkatan Kualitas Produk	%	0	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	7,7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5.3	Prosentase Sentra yang Dikembangkan	%	0	10	30	50	80	100	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6	Kelautan dan Perikanan									
6.1	Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	%	0	0,00	22,22	44,44	77,77	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
6.2	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	26,51	15,66	28,91	51,80	75,90	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
6.3	produksi perikanan	%	99,48	99,48	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan									
1.1	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.3	Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.4	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan	%	90	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.5	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi	%	15	15	60	75	85	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.6	Persentase perencanaan wilayah dan sumber daya air	%	0	20	40	60	80	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
1.7	persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencanaan	%	70	80	85	90	95	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.8	Cakupan pengembangan Data dan Informasi dalam peningkatan penyelenggaraan E-Government	%	25	23	0	0	0	0	23	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.9	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah
1.10	Persentase Penataan Wilayah Administrasi Daerah	%	0	0	25	25	25	25	100	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
1.11	Persentase peningkatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
1.12	Predikat Nilai Sakip	Nilai	63,54	70	75	75	80	80	80	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
1.13	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	%	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
2	Keuangan									
2.1	Persentase Peningkatan Kualitas OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	90	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.2	perbandingan antara belanja tidak langsung	%	43,42	40,50	40,02	40,02	39,99	41,92	41,92	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.3	persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10	10	10	10	10	10	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.4	Persentase SILPA	%	3,02	1,57	1,58	1,59	1,66	1,73	1,73	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,21	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,73	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.6	persentase belanja pendidikan (20%)	%	19	20	20	20	20	20	20	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.7	perbandingan antara belanja langsung	%	56,58	59,50	59,98	59,98	60,01	58,08	59,51	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2.8	Persentase pemilihan sangadi	%	0	0	0	100	0	0	100	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
2.9	Persentase Capaian Kinerja SKPD bernilai baik	persen	40	75	75	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1	Persentase PNS yang memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	33	36	42	48	53	59	59	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.3	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	%	0	15,48	37,09	59,03	80,32	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.4	Persentase PNS Alih status dari CPNS ke PNS	%	0	0,00	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.5	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Manajerial	%	0	0	50	75	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.6	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,85	0,84	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.8	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.9	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	3	3	3	3	3	3	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.10	jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	35	35	35	35	35	35	35	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.11	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan
3.12	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	Badan Kepegawaian, Pendidik an dan Pelatihan

Nomor	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahunan					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
3.13	rasio kebutuhan PNS	Persen	51,65	60	65	70	75	80	80	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
4 Penelitian dan Pengembangan										
4.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.2	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah	%	100	7,69	23,08	23,08	23,08	23,08	100	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 Pengawasan										
5.1	Persentase pelanggaran pegawai	%	6,12	6,000	5,500	5,000	4,500	4,000	4,000	Inspektorat Daerah
5.2	Persentase tindak lanjut temuan	%	89,6	85,000	85,000	86,000	86,000	87,000	87,000	Inspektorat Daerah
5.3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	17	16	15	14	14	13	13	Inspektorat Daerah
5.4	Persentase peningkatan kapabilitas aparat pengawas	%	20	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Inspektorat Daerah
5.5	persentase pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	%	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Inspektorat Daerah
6 Sekretariat Dewan										
6.1	Persentase Agenda Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	98,99	90	90	90	90	90	90	Sekretariat DPRD
6.2	Presentase Fasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Sekretariat DPRD
7 Sekretariat Daerah										
7.1	Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	%	90	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
7.2	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	%	90	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
7.3	Persentase laporan capaian serapan anggaran OPD	%	97	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
7.4	Persentase peningkatan adminstrasi dan pelaporan desa/kelurahan	%	100	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
7.5	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan	%	0	0,000	0,000	27,270	42,420	30,310	100,000	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
7.6	Presentase Penyedia yang profesional	%	100	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
7.7	Persentase pengaduan snggah dan sanggah banding lelang Barang/Jasa yang terlayani	%	100	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
7.8	Persentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi	persen	100	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
7.9	Presentase pelaksanaan area Perubahan Reformasi Birokrasi	%	0	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

BAB IX

PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Implementasi RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 diperlukan komitmen bersama untuk dilaksanakan secara konsisten sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, yang selanjutnya sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;
3. Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Walikota/Wakil Walikota, OPD dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Walikota wajib untuk mempublikasikan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Dengan demikian, masing-masing anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi/reses ke daerah pemilihannya, sejalan dengan kerangka kebijakan dan program dalam RPJMD;

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Kotamobagu berkewajiban melakukan pembinaan, konsultasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
6. Bappelitbangda Kota Kotamobagu berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta evaluasi hasil terhadap dokumen RPJMD 2018-2023.

RPJMD ini disusun sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Kota Kotamobagu.